# KASYAF

Jurnal Populer Pemikiran Ekonomi Islam
Volume 5 Tahun 4 / 2022

## Pengelolaan Haji : Transparansi dan Keadilan

• Prof. Didin S Damanhuri • Syamsuddin Arif • Syahruddin El-Fikri
• Ade Marfuddin • Muhammad Subarkah • Darmawan Sepriyossa
• Tim BPKH • Mega Nuriyah • Syaiful Rahman Soenaria • Vincentius Roni Pramudya
• Naqiya Syahidati • Rustam Sumarna

Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

ISSN: 2715-2588

ISSN 2715-2588
9 772715 258007

# Daftar Isi

1. **Muqaddimah** ..... 3
Syaiful Rahman Soenaria

2. **Haji dan Politik** ..... 5
Syamsuddin Arif

3. **Haji: dari Urusan Dua-Tiga Kali Sampai Memaksimalkan Pembimbing** ..... 8
Syahruddin El-Fikri

4. **Haji dan Persaudaraan Universal** ..... 12
Ade Marfuddin

5. **Yang Muda, Yang Berhaji : Dari Wali Hingga Para Lansia** ..... 16
Muhammad Subarkah

6. **'Subsidi Haji', Skema Ponzi dan Masa Depan BPKH** ..... 19
Darmawan Sepriyossa

7. **Pengelolaan Dana Haji dan Dampak Sosial Berkelanjutan** ..... 22
Tim BPKH

8. **Simulasi Minimalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Melalui Model *Activity Based Management* (ABM)** ..... 36
Mega Nuriyah dan Syaiful Rahman Soenaria

9. **Analisis Optimalisasi Kinerja Portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dengan Metode *Mean Absolute Deviation* (MAD) Dan *Single Index Model* (SIM)** ..... 46
**Vincentius Roni Pramudya** dan Syaiful Rahman Soenaria

10. **Pandangan Thomas Piketty dan Ekonomi Islam Tentang Redistribusi Kekayaan** ..... 60
Syaiful Rahman Soenaria dan Naqiya Syahidati

11. **Belajar dari Sejarah: Penyelenggaraan Haji Sebaiknya Diserahkan Kepada Lembaga Independen** ..... 71
Rustam Sumarna

12. **Mekkah Mengubah Keyakinan dan Perjuangan Hidup Saya** ..... 76
Malcolm X

13. **Tantangan Sistem Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam** ..... 88
Prof. Didin S Damanhuri

14. **Sekelumit "Fase Pendidikan Pribadi", Puisi Sir Muhammad Iqbal dari Kumpulan Puisi "Asrar-I-Khudi"** ..... 92
Tim Kasyaf

15. **Epilog : Adil, Sejak dari Dugaan** ..... 95
Darmawan Sepriyossa

Jurnal Kasyaf diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB UNPAD), adalah media informasi dan komunikasi masalah sosial, ekonomi, dan bisnis dalam perspektif Islam, dengan konten utama tulisan pemikiran populer, ringkasan hasil penelitian, serta gagasan orisinal. Redaksi mengundang semua komponen masyarakat untuk berkontribusi tulisan. Tulisan dalam Jurnal Kasyaf tidak selalu mencerminkan pendapat FEB UNPAD. Redaksi dapat mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya.

©Hak cipta dilindungi Undang Undang.

Penanggung Jawab: **Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam FEB UNPAD**
**Amelia Hayati**

Dewan Redaksi:
Ketua: **Syaiful Rahman Soenaria**
Anggota: **Darmawan Sepriyossa, Kurniawan Saefullah, Uken Junaedi, Hary Mulia Rachman, Dadan Gunawan Muhammad Syawal, Satya Rinaldi, Firman Jatnika**

Pelaksana Redaksi: **Adil Teguh Wijaya**

Alamat: Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40133, Indonesia. Telp.: +62-813-2112-3018 (Uken Junaedi)

Volume 5 tahun 4 Jurnal Kasyaf ini diterbitkan bersama oleh
Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam FEB UNPAD
dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia

# Muqaddimah

*"Dan (ingatlah) ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan) "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud.*

*Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh,"*

***(Q.S. Al Hajj ayat 26-27)***

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Yang Memampukan siapa saja yang dikehendakiNYA untuk mengerjakan haji bahkan dari jalan yang diluar jangkauan pemikiran manusia. Shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman dalam tata kelola diri, organisasi, dan masyarakat.

Peristiwa haji adalah fenomena dahsyat. Jauh sebelum orang di dunia bicara tentang globalisasi, sejak 1.400 tahun lalu haji sudah menunjukkan **watak kosmopolitan** dari Islam. Jutaan orang datang setiap tahun ke tanah suci berasal dari seluruh penjuru dunia. Multi bangsa, multi ras, multi bahasa, multi budaya, dan multi status sosial dan ekonomi. Mereka berkumpul melaksanakan rukun haji dengan menggunakan pakaian yang sama (untuk laki-laki hanya dua lembar kain putih) tak peduli jabatan, pangkat, gelar akademik, kepemilikan harta yang mereka sandang masing-masing. Semua sama di tanah suci sebagai hamba Allah. Haji dengan demikian menjadi satu bukti **watak egaliter** dari Islam. Yang membedakan seorang manusia dibandingkan manusia lain hanyalah taqwanya kepada Allah.

Dalam ibadah haji, orang bertawaf mengelilingi Kabah dengan **arah gerak yang harmoni dengan alam**. Arah tawaf sama dengan arah putaran pola sidik jari manusia, sama dengan arah pusar rambut di kepala kita, sama dengan arah gerak elektron mengelilingi intinya, sama dengan arah bumi/planet di tata surya mengelilingi matahari, sama dengan arah bintang-bintang mengelilingi pusat galaksi. Dalam shalat yang dilakukan berjamaah di Masjidil Haram, semua jamaah haji menghadap rapih ke arah Kabah, membentuk lingkaran rapih yang terus membesar lingkaran tersebut ke luar kota Makkah, ke luar jazirah Arabia, dan menjangkau seluruh wilayah di bumi kita.

Semua Muslim shalat berjamaah menghadap arah yang sama dan membentuk lingkaran rapih dalam skala global. Terus menerus setiap hari lima waktu tak putus-putus di 24 zona waktu dunia. Ini menunjukkan **Islam mengajarkan kerapihan jamaah dan organisasi yang dimulai dari ibadah shalat**. Bahkan kerapihan jamaah dalam arah ke Kabah juga terjadi untuk semua muslim yang sudah wafat. Mereka semua dimakamkan dengan posisi jenazah menghadap Kabah, sehingga nanti bila hari kebangkitan tiba, semua Muslim akan dihidupkan kembali oleh Allah dalam barisan yang rapih menghadap Kabah.

Prosesi sya'i mengajarkan kita keteladanan Siti Hajar yang berikhtiar terus mencari air untuk anak bayinya hingga tujuh kali antara bukit Safa dan bukit Marwah, walau tak membuahkan hasil karena justru air Zamzam muncul di dekat bayi Ismail yang sedang menanti ikhtiar Ibunya**. Islam mengajarkan kita untuk fokus pada ikhtiar dan bukan pada hasil**. Demikian juga prosesi melempar jumroh sebagai **simbol perlawanan kita terhadap syaitan, musuh yang nyata bagi umat manusia.**

Demikian juga berkumpul di Arafah sebagai puncak ibadah haji, bermalam di Mina dan prosesi haji lainnya termasuk menyembelih hewan qurban sebagai wujud **mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim yang menempatkan perintah Allah diatas segala yang lain.**

Demikian banyaknya pelajaran hidup dari ibadah haji, sehingga jamaah haji yang kembali ke tanah airnya usai tuntas mengerjakan haji, telah siap menjadi manusia dengan kualifikasi mendekati insan kamil. Tak heran bahwa Allah Mewajibkan setiap muslim untuk mengerjakan haji, sekali dalam seumur hidup. Memandang betapa penting arti dari ibadah haji, maka pengelolaan haji haruslah dilakukan sebaik mungkin agar memberi peluang yang besar kepada setiap jamaah untuk nyaman dan aman melaksanakan semua prosesi ibadah haji sehingga secara syariat sah ibadah hajinya dan secara hakikat dapat kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

**Ada beberapa otoritas yang terlibat dalam pengelolaan haji**, yaitu **(1) Pemerintah Saudi Arabia** sebagai "Pelayan kedua tanah suci", sebutan yang dimulai sejak tanah suci dikuasakan pengelolaannya kepada Sultan Selim I dari Daulah Utsmaniyah. Kemudian **(2) Kementrian Agama Republik Indonesia** yang memfasilitasi jamaah haji Indonesia sejak awal keberangkatan hingga kepulangan kembali ke tanah air, dan juga **(3) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)** yang memperoleh mandat dari undang-undang untuk mengelola dana haji yang saat ini jumlahnya tidak kurang dari Rp 150 triliun, jumlah nominal uang yang luar biasa besar sebagai amanah dari umat Islam Indonesia.

Selain itu ada entitas **(4) biro perjalanan Haji dan Umroh** yang juga mengelola dan memfasilitasi jamaah haji Indonesia yang mendaftar melalui biro perjalanan tersebut. Karena ibadah haji adalah wajib dan setiap muslim yang mengerjakan haji tentu mengeluarkan pengorbanan yang besar agar dapat berangkat haji baik sumber daya uang, waktu, tenaga dll, maka pengelolaan haji seyogianya dilakukan secara **transparan** dan memenuhi azas **keadilan**.

Beberapa isu strategis yang relevan untuk dibahas diantaranya:

1. Kapasitas masjidil haram, padang arafah dan fasilitas fisik lainnya di tanah suci;
2. Jumlah bandara udara yang dibuka dan difungsikan untuk *landing* dan *take off* pesawat terbang yang mengangkut jamaah haji dari seluruh dunia;
3. Kuota setiap negara setiap tahunnya;
4. Durasi seorang jamaah haji tinggal di tanah suci (dipengaruhi isu strategis 1 dan 2 diatas);
5. Lamanya waktu tunggu seorang calon jamaah haji untuk bisa berangkat ke tanah suci (dipengaruhi isu strategis 1, 2 dan 3 diatas);
6. Besarnya biaya yang harus dibayarkan seorang calon jamaah haji;
7. Besarnya biaya riil penyelenggaraan ibadah haji untuk setiap orang jamaah;
8. Pengelolaan dana haji melalui kegiatan investasi, baik investasi pada surat berharga maupun investasi langsung;
9. Kendali atas biaya akomodasi dan konsumsi di tanah suci untuk jamaah haji;
10. Jumlah penduduk muslim di setiap negara;
11. Digitalisasi pengelolaan haji;
12. Pengembangan ekonomi umat Islam melalui penguatan ekosistem haji.

Kasyaf volume 5 ini mengambil tema tentang pengelolaan haji dengan fokus di dua kata kunci: **transparansi** dan **keadilan**. Spesial untuk penerbitan volume 5 ini, FEB UNPAD bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

Selain beberapa artikel yang membahas tentang aspek ekonomi dari haji, juga terdapat artikel tentang aspek politik dari haji karena kita ketahui bersama bahwa pergerakan nasional di Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah banyak memperoleh inspirasi dan energi dari tokoh-tokoh ulama yang kembali dari tanah suci untuk haji dan menuntut ilmu, sebagai contoh H.O.S. Tjokroaminoto, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dll. Haji seharusnya juga menjadi Kongres Akbar Umat Islam sedunia. Pada musim haji seharusnya semua pemimpin Muslim berkumpul di Tanah Suci, membicarakan dan menyepakati agenda-agenda strategis umat Islam seperti penjajahan zionis Israel atas Palestina, kemajuan pendidikan dan ekonomi umat dll.

Selain itu di volume 5 ini juga ditampilkan artikel hasil riset tentang pandangan Thomas Piketty dan konsep Ekonomi Islam tentang strategi mengatasi ketimpangan sosial, artikel tentang tantangan sistem keuangan syariah, dan juga kumpulan puisi dari Muhammad Iqbal tentang Fase Pendidikan Pribadi yang isinya relevan dengan kualifikasi manusia yang telah mengerjakan haji.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Syaiful Rahman Soenaria**

# Haji dan Politik

Syamsuddin Arif *

Tidak ada ritual dalam Islam yang lebih menyedot begitu banyak perhatian, waktu, tenaga, dan biaya daripada haji. Sebuah ibadah masal dan spektakuler yang dimulai oleh panggilan Nabi Ibrahim alaihis-salām ribuan tahun silam.

Firman Allāh SWT kepadanya: "*Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang ringkih, berdatangan dari segenap penjuru yang jauh*" (QS al-Ḥajj ayat 27).

Perintah berhaji "bagi yang mampu" –secara jasmani, rohani dan finansial– ditegaskan lagi di dalam surah Al 'Imran ayat 97: "*Di antara kewajiban manusia terhadap Allāh yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana (man istaṭā'a ilayhi sabīlā). Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji itu), maka ketahuilah bahwa Allāh Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari seluruh alam.*"

Inilah ibadah yang berdampak luas dan multi-dimensi. Para pengamat mengakuinya sebagai perhimpunan umat manusia terbanyak di muka bumi pada suatu waktu. Tak kurang dari sejuta hingga tiga juta orang datang berkumpul untuk mengerjakan ibadah tahunan ini. Menurut Mohsin Tutla dari *World Hajj and Umrah Convention* (WHUC) London, perhelatan haji telah menghasilkan sekitar 16 miliar dolar AS kepada negara penyelenggara. Adapun di Indonesia, total dana haji yang terhimpun per akhir Mei 2021 sebesar Rp 150 triliun, menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan nilai "manfaat" total sejumlah Rp 7,43 triliun. Ini belum termasuk dana abadi umat (DAU) yang telah dikumpulkan pemerintah Indonesia dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya naik haji (ONH) sebanyak Rp 3,4 triliun setiap tahun dengan nilai "manfaat" sekitar Rp 200 miliar. Bilangan yang amat besar dan wajar, mengingat jumlah calon jamaah haji yang sudah mengantre sebanyak 5,1 juta orang.

Namun, ibadah ini juga tak pernah lepas dari 'lirikan' para penguasa, yang melihatnya sebagai peluang sekaligus ancaman, jika tidak dikendalikan dan ditertibkan. Sejak berabad-abad lamanya, trafik haji memang bukan hanya pergerakan orang dan barang, tapi juga perputaran jasa dan uang. Momen haji juga merupakan ajang penyebaran ilmu dan gagasan. Di Tanah Suci, kontak antara orang-orang Islam dari Nusantara dengan kaum Muslim yang berasal dari negara-negara lain tak jarang memunculkan kesadaran politik untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap mereka. Tak heran jika peneliti Barat bernama Eric Tagliocozzo menyimpulkan bahwa haji dan politik memang tak dapat dipisahkan sejak zaman dulu: *"Religion and politics were inextricably linked in the conduct of the Hajj in historical times"*.

Mekkah merupakan titik temu kaum Muslimin dari seluruh dunia saat musim haji dan salah satu pusat keilmuan di mana terdapat banyak ulama besar. Oleh karenanya tidak sedikit jamaah haji yang kemudian memperpanjang masa tinggal mereka untuk memperdalam ilmu agama. Sebutlah sebagai contoh Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mahfuz at-Tarmasi, dan masih banyak lagi, yang berhasil menjadi ulama terkemuka sampai wafat di sana. Menurut ahli sejarah kolonial, pada sekitar tahun 1860, dari semua orang asing yang tinggal di Mekkah, orang 'Jawah' (Nusantara) paling banyak jumlahnya sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa kedua di Mekkah setelah bahasa Arab.

Salah satu perkara yang dikhawatirkan oleh pemerintah Belanda waktu itu adalah spirit persatuan umat Islam atau "Pan-Islam" yang mengobarkan sentimen anti-penjajah. Di mata mereka, penyelenggaraan ibadah haji sangat rentan dipolitisir.

*) *Syamsuddin Arif, adalah pengajar Program Pascasarjana Universitas Darussalam, Gontor, Jawa Timur.*

Pemerintah kolonial Perancis di Aljazair, misalnya, membatasi dan mengawasi dengan ketat orang-orang yang berangkat dan pulang haji. Salomo Keijzer mencatat: *"De politiek van de Franschen in Algérie is en kan zijn van een geheel anderen aard, dan die van de Engelschen en Hollanders in de Indiën. Om de schadelijke gevolgen van de bedevaart naar Mekka te weren, schijnt de militaire magt in Algérie zelf en de streng gehandhaafde bepalingen omtrent de reispassen ook ten opzigte van de bedevaartgangers voldoende."*

Maka tak mengherankan jika masing-masing pemerintah kolonial berusaha mengawasi dan mengintervensi lalu lintas haji, tak terkecuali Belanda yang menjajah Indonesia, menempatkan konsulnya di Jeddah untuk memantau para jamaah haji dari Nusantara. Sebagaimana dinyatakan oleh Christiaan Snouck Hurgronje yang sempat tinggal selama hampir setahun (1884-1885) di Jeddah dan Mekkah, jamaah haji dari Nusantara selain melakukan ibadah dan ziarah di Tanah Suci, dipercaya terpapar dan terpengaruh oleh suasana keagamaan dan "angin politik" yang berhembus di sana.

Meski tidak seluruhnya, kata Hurgronje, sebagian mereka menjadi semakin 'fanatik' dan semakin taat beragama sesudah kembali ke Tanah Air. Terutama sekali mereka yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, surau, atau madrasah, mereka ini dikatakan sangat mudah terpengaruh oleh gagasan persatuan umat Islam sedunia (orang Eropa menyebutnya "Pan-Islamisme"). Tak terkecuali jamaah haji dari kalangan awam yang katanya menjadi lahan subur bagi benih-benih fanatisme agama: *"Wir kennen jetzt die religiösen und **politis**chen Einflüsse, denen sie beim Haddj ausgesetzt sind. Selbstverständlich wirken dieselben nicht auf alle Djäwah-pilger in gleichem Maasse; diese sind mehr, jene weniger fanatisch oder pietistisch angelegt. Bei solchen, die in der Heimath vorher in den Pesantrens, Soeraus, Madrasahs oder in den Moscheen Unterricht genossen haben, ist die Empfänglichkeit für eine **pan-islam**itische Gesinnung am grössten; in der grossen, ungelehrten Masse der Haddji's sind immer Einzelne, die von der Wallfahrt die Keime des rohen Fanatismus mitnehmen."*

Seperti kita ketahui gagasan Satu Umat Islam atau 'Pan-Islam' itu mulai menyebar di akhir abad ke-19 pada era Sultan 'Abdul Hamid II. Sejumlah cendekiawan berperan mempopulerkan gagasan ini lewat tulisan di berbagai majalah dan surat kabar. Süleyman Hasbi (w. 1909), misalnya, menulis artikel berjudul *Risale-yi ittihadiye li-saadet-i millet-i el-islamiye* ('Pesan Persatuan untuk Kebahagiaan Umat Islam') yang mengajak seluruh kaum Muslimin untuk mengutamakan solidaritas, kesepakatan (*ittifaq*) dan menjauhi perpecahan (*tafarruq*), seraya menunjuk haji sebagai salah satu sarana pemersatu.

Seruan ini disambut oleh ulama Mesir, Iran dan India. Syekh Muhammad 'Abduh pun menulis *Tawḥīd al-Muslimīn wa Waḥdat al-Sulṭatayn ad-Dīniyyah wa-'s-Siyāsiyyah* ('Penyatuan kaum Muslimin wa Kesatuan Otoritas Agama dan Politik'). Bersama gurunya, Sayyid Jamaluddin al-Afghani, 'Abduh giat mengusung gagasan persatuan Islam sebagai gerakan politik melawan imperialisme Barat. Adapun di Iran dan India seruan tersebut diwakili oleh Abu'l-Ḥasan Mirza Qajar dan ʿAbd al-Majid Daryabadi.

Kekhawatiran pemerintah Belanda akan dampak politik dari ibadah haji memang cukup beralasan. Mereka tidak ingin orang Islam terinspirasi untuk angkat senjata melawan pemerintah kafir seperti dilakukan oleh Syekh Yusuf bersama tentaranya di Banten. Memang salah satu alasan Belanda membuang Syekh Yusuf pada tahun 1684 dari Srilanka (Ceylon) ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan adalah untuk memutus rantai politik yang terjalin antara beliau dengan para mujahidin melalui jamaah haji yang singgah bertemu beliau. Menurut peneliti Perancis Henri Chambert-Loir, sejak wilayah Nusantara dikuasai oleh Serikat Dagang Hindia Belanda (VOC), perjalanan haji ke Mekkah memang dipersulit. Mereka khawatir kalau para haji itu terpengaruh ajaran "perang sabil" selama di Tanah Suci. Pada bulan Maret 1689, VOC dikabarkan menangkap tiga orang Bugis yang baru pulang dari haji dan membuang mereka ke Srilanka lalu diteruskan ke Afrika Selatan.

Persepsi senada pernah dikemukakan oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang sempat memerintah Jawa dan Sumatera tatkala Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda yang sedang diduduki oleh Prancis. Menurutnya, perjalanan haji berpotensi menimbulkan bahaya politik. Seperti halnya orang Arab, para haji yang pulang dari Mekkah sering dianggap sebagai orang suci dan sakti. Banyak di antaranya kemudian menjadi semacam pemuka agama. Karena begitu dihormati, tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar memberontak kepada pemerintah.

Para 'pendeta Islam' itu ternyata hampir selalu menjadi golongan yang paling aktif dalam setiap pemberontakan: *"Every Arab from Mecca, as well as every Javan who had returned from a pilgrimage thither, assumed on Java the character of a saint [with] supernatural powers. Thus respected, it was not difficult for them to rouse the country to rebellion, and they became the most dangerous instruments opposed to the Dutch interests."* Pada tahun 1811, penguasa Inggris di Nusantara

mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada warga agar berhati-hati terhadap para 'Sayid' (orang Arab) dan 'pendeta pribumi' (haji) yang dijulukinya sebagai para "penghasut".

Snouck Hurgronje juga menceritakan betapa seorang Syekh asal Lampung yang sudah bertahun-tahun bermukim di Mekkah pun masih cinta kepada Tanah Airnya dan peduli terhadap nasib bangsanya yang sedang dijajah Belanda: *Der **pan-Islam**itische Gedanke ließ unseren Schech nicht unberührt, und ganz Lampong in Mekka kam unter den Einfluss derselben Hoffnungen. ... Manchmal überlegte sich der Schech, wie Alles geworden wäre, wenn man nicht die Holländer freudig hereingeholt hätte : hätte man die kleinlichen Zwistigkeiten, welche die Djāwah daheim zertheilen, durch den edlen Kriegsruf des Islam's übertönt, sich unter der Fahne des Sultanats von Banten, Palembang oder am Ende Atjeh geschaart und die Belanda (= Welanda, Olanda) hinausgeworfen, so bildeten jetzt einige Millionen Djäwah zusammen ein grosses muhammedanisches Reich, dem sich immer mehr Rassengenossen anschliessen würden!*

Sepulangnya dari Tanah Suci banyak yang berganti nama seperti Wirjowikoro yang mengubah namanya menjadi Haji Samanhudi dan Muhammad Darwisj menjadi Haji Ahmad Dahlan. Sebagian bahkan terpanggil untuk membuat gerakan sosial keagamaan maupun politik. Contoh yang paling nyata adalah Haji Samanhudi yang mendirikan Sarekat Islam, dan Haji Ahmad Dahlan yang berangkat ke Mekkah pada 1883 untuk mengerjakan haji dan menimba ilmu di sana, sebelum kembali ke Tanah Air dan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1912.

Begitu juga tokoh-tokoh pembaharu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara seperti Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul (1879-1945) dan Syaikh Djamil Djambek (1860-1947). Mereka pulang dari Tanah Suci tidak hanya dengan kondisi yang lebih bersemangat untuk memperbaiki keislamannya, tetapi juga berusaha untuk mengobarkan semangat perjuangan Islam agar bersatu menentang kolonial Belanda. Sebagian mereka bahkan aktif memimpin organisasi dan pergerakan politik seperti halnya Haji Umar Said Cokroaminoto.

Pasca Perang Dunia ke-II, di mana muncul negara-negara baru berbasis kebangsaan (*nation state*) ketimbang agama, ibadah haji menjadi salah satu alat politik juga. Bagi negara tuan rumah, ibadah haji memberikan Arab Saudi posisi tawar penting dalam hubungan dengan dunia Islam. Sejak 1960-an, Raja Faisal menjadikan ibadah haji sebagai kunci untuk melobi negara-negara muslim lain mewujudkan dan menguasai Organisasi Konferensi Islam (kini bernama 'Organisasi Kerja Sama Islam' atau OKI). Melalui OKI tersebut dan Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī ('Liga Dunia Islam'), Arab Saudi mendapat dukungan negara-negara Muslim lain dalam pengelolaan haji tanpa harus mengompromikan kedaulatan penuhnya atas dua Tanah Suci. Negara-negara muslim Sunni (Ahlus Sunnah) umumnya tidak mempersoalkan kedaulatan Arab Saudi atas Haramayn itu. Hanya Iran dan Libya pada masa pemerintahan Muammar Gaddafi yang beberapa kali mengusulkan 'internasionalisasi' tata kelola ibadah haji agar penyelenggaraan dilaksanakan oleh semacam konsorsium yang dibentuk bersama oleh negara-negara Islam.

Di lain pihak, pemerintah negara-negara berkembang tak jarang menjadikan ibadah haji sebagai alat meraih dukungan politik. Demikian menurut Peter Mandaville, yang menyebut Presiden Indonesia Suharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad naik haji sebagai contohnya. Pemimpin rezim sekular itu dianggapnya menggunakan haji sebagai kedok untuk mengelabui rakyat *(politically expedient to cloak themselves in the symbolism of pilgrimage)*. Ironisnya, kekhawatiran terhadap dampak politik dari haji sekarang ini justru muncul di kalangan pemerintah Muslim sendiri. Apalagi ketika meletus revolusi di Iran pada tahun 1979. Banyak yang takut kalau hawa panas revolusi itu akan mempengaruhi para jemaah haji bila mereka kembali ke negara masing-masing. Maka wajarlah jika pengelolaan haji akan terus dikendalikan oleh institusi negara daripada oleh swasta dan masing-masing orang.

**Epilog**

Haji adalah pertemuan terbesar umat manusia di muka bumi. Para haji memperbaharui ikatan mereka dengan Allah dan para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Haji yang sempurna akan membersihkan segala dosa sehingga pelakunya sesuci bayi yang baru dilahirkan dan dijanjikan surga. Bagi umat Islam, haji adalah ekspresi persatuan dan kesetaraan semua orang beriman dan persaudaraan mereka di dunia ini dan di akhirat. Haji memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk melakukan perenungan mendalam dan kritis terhadap diri masing-masing, orientasi hidup, dan kondisi sosial politik di Tanah Air mereka, serta kondisi global umat Islam secara keseluruhan. Haji selalu memiliki potensi dan konsekuensi politik yang luas. Maka haji akan selalu menjadi objek regulasi dan rawan dieksploitasi oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi maupun politik lokal dan internasional. Walhasil, politisasi haji memang tak dapat dihindari, dulu maupun kini. [ ]

# Haji: dari Urusan Dua-Tiga Kali Sampai Memaksimalkan Pembimbing

Syahruddin El-Fikri*

Ibadah haji merupakan perintah Allah SWT yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam, khususnya bagi yang mampu (*istitho'ah*) untuk pergi ke Baitullah (Kabah) di Tanah Suci (Makkah).

Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran [3]: 97). *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah Swt adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu (istitho'ah) mengadakan perjalanan ke sana,..."* (QS. Ali Imran [3]: 97).

Sedikitnya ada empat makna *istitho'ah*. Yakni, kemampuan dalam hal biaya, mampu dari segi fisik (sehat), mampu dari segi keamanan, dan mampu memahami manasik haji. Kemampuan dalam hal materi (biaya) artinya jamaah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, memiliki biaya untuk pergi ke Tanah Suci dan biaya bagi keluarga yang ditinggalkan di Tanah Air. Harta tersebut milik pribadi dan bukan berhutang. Atau seseorang berangkat haji karena tugas atau diberangkatkan oleh seorang maupun lembaga. Sehingga, mereka yang berangkat haji dan keluarganya yang ditinggalkan tidak terlantar karena kepergiannya.

Selain mampu dalam hal biaya, umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, hendaknya juga mampu dalam hal fisik. Artinya, secara fisik yang bersangkutan mampu melaksanakan ibadah haji. Ia tidak dalam keadaan sakit (sehingga menghalanginya untuk ke Tanah Suci), dan tidak pula sedang hamil (yang dikhawatirkan akan membahayakan diri dan janin yang dikandungnya). Banyak calon jamaah haji (CJH) yang sudah mampu secara materi (bahkan sudah lunas biaya perjalanan ibadah haji/BPIH), dan belum hamil, namun menjelang keberangkatan atau saat tes kesehatan (di antaranya suntik meningitis), yang bersangkutan gagal berangkat karena kendala kesehatan.

Di samping kedua hal tersebut (biaya dan kesehatan), makna *istitho'ah* adalah kemampuan dari segi keamanan. Aman bagi negara yang akan dikunjungi, juga aman bagi negara yang ditinggalkan. Pandemi covid-19 yang melanda dunia, telah menyebabkan ratusan negara di dunia *lockdown* (menutup diri dari tamu asing). Bahkan di Indonesia sendiri, beberapa kali dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, dan PPKM dari level 1 hingga level 5. Semuanya dalam rangka membatasi aktivitas dan kegiatan masyarakat, agar tidak tertular maupun menularkan virus covid-19.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri akhirnya memberlakuan pelaksanaan ibadah haji dalam jumlah terbatas. Pada tahun 2020, jumlah jamaah haji hanya sebanyak 1000 orang yang terdiri atas warga lokal. Kemudian pada tahun 2021 kemarin, pelaksanaan ibadah haji masih diberlakukan dalam jumlah jamaah yang terbatas. Dampak dari pemberlakuan pembatasan ini menyebabkan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, tidak diperkenankan mengirimkan jamaah haji. Tak hanya itu, jamaah umrah juga ditangguhkan. *"La dharara wa la dhirar (jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain)."*

Rasulullah Saw dalam sebuah hadis mengatakan, *"Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Berkenaan dengan hal tersebut, maka makna *istitho'ah* dalam hal keamanan ini sangat penting, khususnya bagi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar penularan covid-19 tidak menyebar secara luas. Di sinilah terbukti pentingnya mengedepankan salah satu *maqashid asy-syari'ah* (tujuan hukum Islam), yakni *hifzhun nafs* (memelihara jiwa) harus lebih diutamakan dibandingkan *hifzhud diin* (memelihara agama).

Pelaksanaan ibadah haji adalah dalam rangka memelihara agama, namun bila dalam pelaksanaannya berdampak negatif bagi umat

*Jurnalis Republika, Anggota PPIH 2019.*

manusia, maka memelihara jiwa (keselamatan umat manusia) harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah [5] ayat 32. *"…Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…" (QS. Al Ma'idah [5]: 32).*

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i juga disebutkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak."* (HR. An-Nasa'i).

Selain makna *istitho'ah* di atas, kalangan ulama juga sepakat bahwa makna *istitho'ah* (mampu) dalam ayat 97 surah Ali Imran tersebut diatas, adalah kemampuan dalam memahami tata cara beribadah (manasik) haji dengan baik dan benar. Mulai dari memakai pakaian ihram, niat haji dan umrah, tawaf (mengelilingi Kabah), sa'i (lari-lari kecil dari bukit Shofa ke bukit Marwah), wukuf (berhenti) di Arafah untuk mendengarkan Khutbah Arafah, melontar jumrah, mabit (bermalam di Mina dan Muzdalifah), tahallul (memotong sebagian rambut), dan lainnya.

Dengan mengetahui dan memahami prosesi dan tata cara beribadah haji dengan baik dan benar, maka jamaah tidak akan memiliki ketergantungan atau bergantung pada pembimbing ibadah haji. Sehingga diharapkan, jamaah akan mendapatkan predikat haji mabrur (diterima oleh Allah SWT). *"Tidak ada balasan bagi haji mabrur, kecuali surga."* (HR. Bukhari-Muslim).

Tentu saja, kerugian besarlah bagi mereka yang mengerjakan haji, namun tidak mendapatkan predikat haji mabrur. Al-Ghazali dalam *magnum opus*-nya, yakni *Kitab Ihya 'Ulumuddin*, menyebutkan, mereka yang mengerjakan haji, namun tidak memahami maksud dan makna yang terkandung dalam setiap prosesi ibadah haji adalah orang yang teperdaya, tertipu (*ghurur*).

**Sekali berhaji**

Dengan jaminan balasan yang besar itu, maka jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, datang berbondong-bondong ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. *"Serulah mereka (untuk berhaji), niscaya mereka akan datang kepada-mu dengan berkendaraan dan berjalan kaki menuju Makkah."*(QS. Al-Hajj [22]: 27).

Bahkan karena besarnya pahala mengerjakan ibadah haji itu pula, maka sebagian umat Islam ada yang mengerjakannya lebih dari sekali (berulang kali). Sebab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *"Diantara umrah yang satu dengan yang lain adalah penghapus dosa, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga."*

Selain itu, dengan kemampuan yang dimiliki, maka mengerjakan haji lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. *"(Haji) yang pertama itu hukumnya wajib, sedangkan yang selanjutnya (lebih dari sekali, pen) adalah sunnah."* (HR. Ahmad). Karena alasan ini pula (bahwa berhaji lebih dari sekali itu hukumnya sunnah), ketika jabatan menteri agama dipegang oleh (Alm) HM Maftuh Basyuni, beliau memberlakukan 'larangan' atau aturan bagi yang sudah berhaji untuk mengerjakan haji lagi. Di samping alasan tersebut, Maftuh juga melihat besarnya animo (keinginan) umat Islam untuk memenuhi rukun Islam yang kelima ini dan menjadi Tamu-tamu Allah *(dhuyufurrahman)*.

Seperti diketahui, kuota jamaah haji Indonesia pada tahun 2021 mencapai 231 ribu orang. Sementara, setiap tahun jumlah umat Islam di Indonesia yang ingin menunaikan haji mencapai terus bertambah. Mereka yang belum mendapatkan porsi, harus antre dan menunggu giliran untuk berangkat (*waiting list*). Jumlahnya calon jamaah haji (CJH) yang mengantre ini mencapai puluhan hingga jutaan orang.

Di beberapa daerah, bahkan ada CJH yang harus antre hingga 25 tahun ke depan. Sebagian di antaranya adalah umat Islam yang sudah pernah berhaji dan sebagian besar lainnya adalah mereka yang belum berhaji sama sekali. Karena keterbatasan kuota inilah, maka mereka harus menunggu untuk tahun-tahun berikutnya.

Karena hal tersebut, maka Menag bermaksud memberlakukan aturan Berhaji Cukup Sekali Seumur Hidup itu. Tujuannya, agar terjadi pemerataan, dan mereka yang berkeinginan untuk berhaji lagi dapat mengurungkan niatnya dan mempergunakan dananya itu untuk kepentingan umat yang lebih besar, seperti membantu lembaga pendidikan, membangun sekolah serta membiayai pendidikan anak yatim dan tidak mampu.

Tak heran, keinginan Menag ini pun mendapatkan beragam respons dari masyarakat. Ada yang setuju (pro), namun lebih banyak yang tidak (kontra). Bahkan, beberapa di antara yang kontra menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan ibadah khusus, yakni hanya untuk orang yang mampu, sehingga tidak perlu lagi ada pengkhususan.

**Kaidah fiqh**

Tanpa bermaksud memihak siapapun, pemberlakuan aturan atau bahkan—mungkin—larangan untuk berhaji lebih dari sekali, patut untuk direnungkan. Dengan kondisi saat ini, dimana jumlah umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji

cukup besar, pandangan memberlakukan aturan atau batasan untuk berhaji cukup sekali, menurut penulis sangat tepat.

Pasalnya, banyak umat Islam yang ingin berhaji, namun gagal berangkat karena terkendala oleh kuota yang terbatas. Selain karena minim kuota, kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya mereka yang sudah berhaji dan bermaksud untuk mengulanginya lagi. Dan ini juga sudah ditegaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019, pasal 14 ayat 1, bahwa haji lebih diprioritaskan untuk jamaah haji berusia 65 tahun ke atas.

*"Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jamaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu."*

Banyak alasan yang dikemukakan para jamaah haji yang ingin mengulangi atau berhaji kembali. Pertama, karena haji yang pertama dirasa kurang mantap, sehingga ia bermaksud untuk mengulanginya dan menyempurnakannya. Kedua, mengulang haji karena akan menghajikan orang lain. Ketiga, berhaji lagi karena menjadi muhrim atau pembimbing jamaah haji. Keempat, karena berhaji lebih dari sekali adalah sunnah.

Menurut seorang pakar fiqh asal Irak, Ibrahim Yazid An-Nakhai, walaupun hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa haji yang kedua dan seterusnya adalah sunnah, namun hukum itu bisa berubah, manakala ada atau tidak ada illat (alasan) yang mengikutinya. Kaidah ushul fiqh menyebutkan, *Al-hukmu yadurru ma'a illatihi, wujudan wa 'adaman*. (Hukum itu beredar (berlaku) sesuai dengan ada atau tidaknya illat (alasan)).

Khalifah Umar Ibn Khattab RA pun pernah menangguh dan membatalkan hukum yang dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai hukum yang sudah pasti (*qath'i*). Yaitu, ketika salah seorang warga miskin yang terpaksa mencuri barang karena anak-anaknya kelaparan. Sesuai dengan hukum Islam, orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Namun, karena dia terpaksa melakukan pencurian akibat kelaparan, maka Khalifah Umar RA justru tidak melakukan hukum potong tangan dan memerintahkan orang yang barangnya dicuri itu agar memberikan sejumlah barangnya kepada si pencuri tersebut.

Dengan bersandar pada kaidah tersebut, menurut Ibrahim An-Nakhai, berhaji lebih dari sekali yang hukum asalnya sunnah bisa menjadi makruh. Diantara alasannya, apabila ada orang yang belum pergi haji dan ingin berangkat namun gagal karena terbatasnya kuota, sementara didalamnya ada orang yang sudah berhaji, maka hukumnya makruh.

Ulama yang juga budayawan, KH A Mustofa Bisri (akrab disapa Gus Mus) dalam bukunya *"Fiqh Keseharian Gus Mus"*, menyatakan, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim dan membiayai pendidikan anak yang tidak mampu lebih utama daripada berhaji yang kedua kali.

Merujuk pada kaidah usul fiqh, Gus Mus menyatakan: *Al-Muta'addi Afdhalu min al-Qaashir (Yang luas itu lebih baik/utama (afdhal) daripada yang ringkas)*. Maksudnya, membantu fakir miskin, anak yatim, membangun lembaga pendidikan dan lain sebagainya yang manfaatnya lebih luas, lebih afdhal (mulia) daripada berhaji untuk kedua kali atau lebih yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri.

Tentu saja, memberi sedekah dan membangun lembaga pendidikan, akan lebih besar manfaatnya (*mashlahah*). Bahkan, andaikata dari setiap musim haji terdapat 10.000 orang yang sudah pergi haji, dan uang BPIH minimal Rp 25 juta itu disumbangkan untuk kepentingan membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lainnya, maka akan terkumpul dana dari haji setiap tahun sebesar Rp 250 miliar.

Imam Malik, pencetus metode pengambilan hukum fiqh, *Maslahah Mursalah*, mengungkapkan, tiap maslahah merupakan pengkhususan (*takhshih*) dari keumuman hukum atau dalil yang *qath'i* (pasti) dan *dzanny* (yang meragukan). (Lihat Abu Zahrah, *Usul Fiqh*).

Merujuk pada pandangan ini, penulis berpendapat, ajaran Islam dan perintah Allah untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, merupakah ke-maslahat-an yang lebih *qath'i* (pasti) dan jelas, daripada berhaji berulang-ulang yang maslahat-nya hanya untuk diri pribadi. Rasulullah SAW pun sering memerintahkan umatnya untuk membantu fakir miskin dan menyantuni anak yatim. *"Barangsiapa tidak mau memperhatikan urusan orang Muslim, maka Ia tidak termasuk golongan mereka."* Lebih tegas lagi, Rasulullah mengatakan, *"Tidak termasuk orang yang beriman, orang yang tidur kekenyangan, sementara dirinya (mengetahui) ada tetangganya yang sedang kelaparan dan kekurangan."*

Karenanya, bagi umat Islam yang sudah haji dan ingin berhaji lagi, alangkah baik dan bijaknya, andaikata bisa menggunakan dana untuk haji yang kedua atau lebih itu untuk kepentingan umat yang membutuhkan.

Bukankah Rasulullah SAW telah menegaskan, *"Apabila anak cucu Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalnya. Kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya."* Berdasarkan hadits ini—tentu—membantu fakir miskin, menyantuni anak

yatim, memberikan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, merupakan suatu amal jariyah yang akan langgeng bagi pribadi muslim yang ikhlas beramal, kendati dirinya telah terbujur kaku di liang kubur.

**Peranan pembimbing**

Jika kita mau jujur dan mengevaluasi diri, sebagian besar umat Islam yang menunaikan ibadah haji—bahkan yang berhaji beberapa kali—belum maksimal memahami makna dan kandungan dari setiap prosesi ibadah haji. Jangankan makna dan tujuannya, memahami syarat, rukun, wajib dan sunnah haji saja banyak yang tidak mengetahui dan memahaminya secara tepat. Tak heran, ada jamaah yang gencar mengejar sunnah, namun meninggalkan yang wajib. Adapula yang mengutamakan syarat, tapi melupakan yang rukun.

Tentu saja, kita sangat mengharapkan para jamaah haji bisa meraih predikat haji mabrur. Yakni yang melaksanakan syarat, rukun, wajib dan sunnah haji secara sempurna dan paska haji, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya.

Para jamaah haji, sebagian besar—tentu—pernah mendengar kisah Abdullah Ibnu Mubarak. Ia menceritakan bahwa ada seseorang yang tidak berangkat haji, namun ia justru mendapatkan predikat haji mabrur. Ini disebabkan, oleh sikap dan perilakunya yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain dan lebih membutuhkan, ketimbang mengejar gelar haji untuk dirinya sendiri. Ia gagal berangkat haji, karena dana untuk pergi haji diberikan kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Atas sikap ikhlas dan dermawannya, Ia mendapatkan predikat haji mabrur. *Subhanallah*.

Di sinilah menurut hemat penulis, dibutuhkan peranan yang lebih optimal bimbingan manasik dari para pembimbing haji terhadap calon jamaah haji. Pembimbing tidak saja bertanggung jawab atas kelancaran proses pelaksanaan ibadah jamaah, lebih dari itu, pembimbing juga bertanggung jawab mengantarkan jamaah haji menjadi pribadi-pribadi muslim yang santun, dermawan, peduli dan memiliki akhlak terpuji, rajin mengerjakan shalat fardlu secara berjamaah, mengeluarkan zakat dan memperbanyak amalan sunnah lainnya sehingga bisa menggapai predikat haji mabrur.

Menurut penulis, bimbingan manasik haji tidak cukup hanya dilakukan selama 5-10 kali pertemuan. Bimbingan manasik harus dilakukan minimal setahun sebelum jamaah berangkat. Lebih lama tentu makin baik. Tujuannya, agar jamaah benar-benar memahami setiap tahapan prosesi ibadah haji dengan baik tanpa harus selalu bertanya kepada pembimbing. Dengan demikian, akan muncul keberanian dan kemandirian jamaah tanpa harus selalu bergantung pada pembimbing.

Di sinilah yang kita harapkan peranan pembimbing dan bimbingan manasik yang lebih optimal. Kelancaran pelaksanaan prosesi ibadah haji, selain kuatnya pemahaman masing-masing pribadi jamaah, tetapi juga berkat peranan pembimbing dan bimbingan manasik yang optimal. Sekadar saran dan usul, ada baiknya setiap umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, memiliki sertifikasi kelulusan dalam memahami hasil bimbingan manasik. Mereka yang belum mendapatkan sertifikasi, hendaknya dapat menunda dulu keberangkatannya. Tujuannya, agar kewajiban melaksanakan ibadah haji yang sekali itu, benar-benar menghasilkan pribadi muslim yang saleh.

Tentunya, sertifikasi itu harus merefleksikan kemampuan dan pemahaman jamaah. Sertifikasi kelulusan diberikan bukan karena adanya kepentingan tertentu, melainkan karena kemampuan dan pemahaman dari jamaah. Pemberi sertifikasi—pemerintah, Kemenag, KBIH atau pembimbing—memiliki tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dengan demikian, mereka yang berhaji adalah orang-orang yang mampu dalam arti sesungguhnya.

Di sinilah (lagi) peranan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) menjadi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman jamaah haji. Dengan bimbingan yang optimal, maka jamaah haji nantinya tidak lagi membutuhkan tugas pembimbing ketika di Tanah Suci, kecuali petugas khusus yang sudah diatur menurut UU, seperti TKHI, TKHD, TPIHI dan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

KBIH dan pembimbing cukup hanya sampai di embarkasi keberangkatan. Hal ini sejalan dengan harapan Menag yang ingin merumuskan kembali fungsi KBIH yang kini banyak berubah menjadi lahan bisnis.

**Aturan pembatasan**

Jika nantinya aturan pembatasan itu dilakukan hendaknya diatur secara bijak. Sebab, animo masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah haji sangat besar. Aturan tersebut hendaknya tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit. Penulis menyarankan, mereka yang berkeinginan untuk berhaji lagi, hendaknya setelah memasuki masa 10 tahun kemudian. Dengan demikian, pemerataan bagi mereka yang belum berhaji sama sekali, dapat sedikit mengurangi daftar antrean yang cukup panjang.

Alternatif lainnya, adalah dengan mengatur mereka yang akan berhaji lebih dari sekali, harus atau wajib melalui biro haji khusus (PIHK) dengan jumlah sekitar 5-10 persen dari jumlah kuota haji Indonesia. Sebab, mereka yang akan berhaji lagi adalah tergolong mereka yang sangat mampu (sebagian diatas rata-rata). *Wa Allahu A'lamu Bi Al-Shawab*. *[ ]*

# Haji dan Persaudaraan Universal

Ade Marfuddin*

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang diwajibkan beribadah kepada-Nya. Ibadah dalam perpektif kemasyarakatan seyogyanya bukan hanya bertalian dengan hal-hal yang sifatnya transendental, melainkan juga mencakup ranah sosial. Jika puasa, berdzikir, shalat malam adalah beberapa bentuk ibadah yang bersifat individual, maka terdapat bentuk ibadah lain yang sarat dengan nuansa sosial, yakni shalat berjamaah, haji dan umroh.

Haji dan umroh merupakan ibadah yang bernilai sosial tinggi. Mulai dari kegiatan pendaftaran, berangkat ke Tanah Suci, menunaikan setiap rukun dan sunnahnya, hingga kembali ke Tanah Air. Dua bentuk ibadah tersebut bertalian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dua ibadah ini merupakan ziarah dan tamasya yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam agama maupun pergaulan sosial. Tak pelak, ibadah ini kerap disertakan dengan tambahan "bagi mereka yang mampu", yang menandakan dua ibadah ini, terutama haji, dilaksanakan oleh umat Muslim yang siap secara lahir dan batin.

Ada kesenangan tersendiri ketika menyimak kisah-kisah orang berhaji. Terkadang, saat menghadiri acara *walimatus safar*, yakni suatu tradisi Islam Nusantara di mana seseorang yang akan berangkat haji menghelat acara doa bersama dan beramah tamah, terbetik suatu kegembiraan pribadi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tak jarang, muncul kekaguman kepada calon haji, betapa beruntungnya ia dapat berhaji, karena biasanya ibadah itu akan diikuti dengan serangkaian ibadah lain yang sifatnya eksklusif, seperti *thawaf* di Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah SAW dan lain-lain. Sungguh membuat iri hati bagi yang melihat atau mendengarnya.

Menunaikan ibadah haji adalah idaman bagi setiap muslim. Dan faktanya tidak semua orang dapat menunaikan haji. Banyak sekali rintangan yang menghalangi orang berangkat ke Tanah Suci. Dalam dua tahun ini rintangan yang nyata yaitu adanya wabah global covid-19 yang melanda dunia, ibadah haji salah stau yang terkena imbasnya, faktor lain yang paling umum dijumpai adalah masalah biaya. Harus diakui, haji adalah ibadah yang mahal. Aspek komersial dalam ritual tahunan Islam ini amat menonjol. Secara teoritis, Muslim yang ingin barhaji namun tidak mempunyai dana yang cukup tentu akan mengurungkan niatnya dan mereka yang tidak berpunya, namun mempunyai keinginan keras untuk menunaikannya, mereka akan menabung di bank atau lembaga penyedia jasa dan layanan haji sampai batas waktu yang ditentukan. Kesabaran dan kerja keras tentu dibutuhkan. Lantas bagaimana bagi orang yang kaya dan mampu, tapi kenyataannya banyak orang mampu dari segi biaya, tapi mereka urung menuaikan ibadah haji. Hal ini semakin menandaskan ibadah ini memang tidak mudah dilaksanakan oleh orang sembarangan,. hanya yang di panggilah dan dipilihlah yang dapat berkunjung ke Baitullah.

Namun, uang bukanlah segala-galanya dalam ibadah ke Tanah Haram. Masih ada tangan-tangan Tuhan yang membuka jalan bagi para tamu-Nya ikut serta dalam ritus musiman umat Islam sedunia ini. Bahkan, beberapa ada yang melakukan perjalanan dengan moda kendaraan darat yang menempuh perjalanan bermilmil jauhnya. Ada pula yang berangkat ke Saudi Arabia dengan berjalan kaki. Orang-orang semacam ini adalah manusia yang tercerahkan. Mungkin saja sebagian di antara mereka memiliki kedekatan dengan Tuhan (*waliyullah*), sehingga melampaui masalah-masalah yang dikhawatirkan umat Muslim pada umumnya. Ritual haji menjadi lahan tempat ditunjukkannya kebesaran Tuhan yang melampaui batas-batas rasionalitas manusia.

*Ali Shariati*, dalam suatu tulisannya *Makna Haji* (terbit 1983), menerangkan bahwa ritual haji berarti kekosongan. Seorang yang datang ke masjid al-Haram diharapkan menguras pikiran, jiwa dan raganya dari segala aliran bendawi dan duniawi. Para *hujjaj*

*Pengajar di STES Bhakti Nugraha, ketua umum Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia (IPHUIN) dan MPP-RHI*

dianjurkan untuk mengisi ketiga perangkat kemanusiaan itu dengan urusan-urusan ilahiyah. Jika para haji berhasil menerapkan hal itu, maka yang timbul adalah persamaan dan kebersamaan. Mereka luruh dalam geliat massa yang menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Jika perlu, seluruh aktivitas kesehariannya diniatkan untuk mengingat zat Tuhannya.

*H.M.Dien Madjid* dalam buku sejarah haji Indonesia (Ade Marfuddin 2020) menyampaikan Haji adalah migrasi periodik manusia terbesar sepanjang sejarah. Besar kemungkinan, tidak ada yang menandingi kontinuitas perpindahan manusia ini hingga sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan di masa depan. Pada konteks ini, haji dianggap sebagai salah satu pemantik pergerakan sejarah umat manusia. Haji bukan hanya menawarkan kedekatan (*taqarrub*) pada Tuhan, namun sebagai penanda dari perubahan sosial dalam sejarah.

Dalam setiap kurun waktu, manusia mengalami keadaan serta menghadapi masalah yang berbeda, termasuk berhaji. Dinamika perhajian Nusantara telah mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Salah satu yang paling terlihat adalah pada moda transportasi yang digunakan. Di masa klasik, beberapa manuskrip kuno Nusantara menerangkan tentang kejadian-kejadian manakjubkan bagaimana seseorang dapat berpindah dengan cepat dari satu daerah di Nusantara ke Tanah Hijaz. Henry Chambert Lloir mengabadikan kisah-kisah ajaib orang berhaji yang menempuh perjalanan super cepat dalam *Magnum Opus*-nya yang berjudul *Naik Haji di Masa Silam jilid 1; 1482-1890* (terbit 2013), bagaikan kisah Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sekejap mata.

Haji pada hakekatnya adalah perjalanan suci, dimana pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam hanya sekali dalam seumur hidup, jika sudah mencapai istitho,ah. Disebut perjalanan suci, karena seluruh rangkaian kegiatannya merupakan ibadah. Haji juga disebut sebagai ibadh puncak yang melambangkan ketaatan, kemahabahan, serta penyerahan diri secara total seorang hamba kepada Allah SWT, baik jiwa, raga, maupun harta (maaliyah).

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam islam, haji memiliki korelasi yang signifikan serta kontribusi dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 197 . Berbekallah, dan sebaik-baik bekal yang paling utama adalah taqwa" merupakan dalil yang qathi bahwa haji adalah serangkian ibadah yang bertujuan mengangkat dan meningkatkan derajat kemausiaan. *Ali Syariati* menyebut haji sebagai evolisi manusia menuju Allah. Ibadah haji melambangkan kepulangan seseorang hamba kepada Tuhannya yang maha abadi. Ibadah haji yang menurat Van Gennep ( 1960), merupakan ritus-ritus keagamaan (ritess de pasade) mampu secara efektif mendorang lahirnya perubahan bagi setiap individu "dari posisi tertentu sebelumnya ke posisi yang lainnya" *Al-Maududi* (1984), menggambarkan perubahan pada diri seseoran akan tampak telihat sejak dia memancangkan niatnya untuk beribadah haji, secara pasti hatinya akan diliputi rasa cinta, ketaqwaan kepada Allah SWT, keshalihan serta taubat yang amat mendalam. Proses haji yang merupakan gambaran perjalanan primordial kemanusiaan menjadi tuntunan serta pelajaran bagi mereka yang mau menghayatinya. Demikian besar peran dan pengruh ibadah haji terhadap seseorang, bahwa untuk mengubah cara hidup demikian hanya dapat ditempuh dengan cara memperolah pengalaman menunaikan ibadah haji (*Syariati;1983* )

Perjalanan haji yang baik, akan mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, kepedulian, kejujuran, dan kasih sayang antara ummat manusia serta mengikis berbagi sikap negatif dalam diri manusia seperti kekejaman, penindasan, kelicikan, tipu daya serta penghambaan kepada selain Allah. dengan melakukan ibadah haji, perilaku seseorang akan mengalami perubahan pada kehidupan selanjutnya dan akan menjadi sosok yang saleh secara individual maupun sosial.

Mengutip Q.S. Al-Hajj; 27. *Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."* Ibadah haji merupakan seruan Nabi Ibrahim atas perintah Allah, agar seluruh umat muslim datang berziarah ke tempat-tempat suci di Mekkah, seperti Ka'bah. Secara umum, "seruan" berarti memiliki konotasi "kebebasan" bagi siapa saja yang mampu untuk menjalankan ibadah haji. "Ayat al-Qur'an tersebut telah menggugah setiap kalbu umat manusia dimanapun berada-tentunya yang beragama Islam- ayat tersebut turun 1450 tahun yang silam, tapi panggilannya terus dirasakan hingga sekarang, bahkan mungkin sampai Kabah masih berdiri tegak. Bukti bahwa seruan itu dirasakan, ternyata para jamaah haji datang dari berbagai pelosok dunia, mereka datang untuk memenuhi panggilanNya, untuk mendatangi dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Dan di berbagai negara calon jema,ah haki sampai rela untuk antri menunggu giliran, karena terbatasnya kuota haji ( 1/1000: OKI 1985 di Jordania). Sebut saja Malaysia hinga saat ini jema,ah yang waiting list sudah mencapai 3,5 juta orang (masa tunggu 110 tahun), dan Indonesia sudah

mencapai 5.1 juta orang ( Sumber: BPKH/2021) masa tunggu rata-rata 23 Tahun. Dapat dikatakan Ibadah haji merupakan ibadah yang di dambakan oleh setiap umat islam dimanapun berada.

Secara kuantitatif jumlah jamaah haji yang berkunjung ke Tanah Suci Makkah setiap tahun terus mengalami kenaikan cukup signifikan seiring dengan pertambhan jumlah penduduk muslim di dunia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) jumlahnya mencapai 2,4 juta jema.ah, yang datang dari pelosok dunia. Dan jumlah jamaah haji Indonesia dalam lima tahun terakhir rata-rata 231.000 orang setiap tahunnya. Dengan angka tersebut, telah menempatkan Indonesia menjadi pengirim jema,ah terbesar di dunia dibandingkan negara-negara Islam lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahawa ummat islam Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap pelaksanaan ibadah haji. Hal ini terjadi karena, menurut Martin Van Bruinessen (1949-43), haji memiliki peranan penting bagi ummat islam Indonesia. Terdapat satu anggapan yang telah sejak lama melekat pada kaum muslimin Indonesia bahwa oang yang telah menunikan ibadah haji dinyakini memiliki kelebihan dibanding merekan yang belum melaksanakannya. bahkan, menurut pengamatan Karel A Stenbrink (1984), pada abad ke -19, para haji yang pulang dari Makkah dianggap sebagi orang istimewa dan suci yang memiliki kekuatan supranatural.

Dapat dipahami bahwa sesungguhnya haji telah menjadi episentrum bagi umat Islam, Haji tidak hanya berfungsi sebagai ritual seremoni *an sich*, akan tetapi di dalam haji terkandung nilai-nilai yang agung yang harus dijaga, dipraktikkan dan disebarkan oleh mereka yang telah mampu melaksanakannya. Dampak dari pemahaman atas nilai-nilai haji akan tercermin dalam sikap yang memperlakukan orang lain dengan semangat persaudaraan, kasih sayang, toleransi, persamaan serta kepedulian. Para haji terdahulu telah mampu membuktikan betapa semangat haji mereka telah mampu mendorang terciptanya perubahan sosial menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya dan bukan sebaliknya.

Haji akan selalu menjadi sentra konsolidator umat Islam. Ibadah ini menandaskan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan. Mekkah menjadi penanda dari besarnya harapan umat Muslim untuk menunjukkan ketaatan dan kemahabahan kepada Tuhan di satu tempat, yang dikitari oleh aneka peninggalan bersejarah yang bernafaskan ibadah dan lipatan pahala bagi mereka yang melakukan ritual tertentu di sisinya. Semua yang menziarahi Ka'bah di musim haji, dipastikan akan menjadi bagian dalam arus besar ketundukkan akan kebesaran Allah SWT. Untuk itu bagi setiap yang mendapat seruan untuk berkunjung ke Baitullah hendaknya mengambil hikmah dan pelajaran, *Q.S Al-Hajj 28*: " *Agar mereka dapat mengambil Pelajaran*".

Tatakelola haji dalam lima tahun terkahir ini, telah diusik dan diwacanakan untuk di Internasionalisasikan, dan telah menjadi wacana public sejalan dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat internasional. Wacana tersebut tidak lepas dari sentuhan politik dan ekonomi global dari sektor haji dan umrah yang sangat menggiurkan. Memang secara kasat mata bahwa ibadah haji nampaknya tak pernah steril dari nuansa politik jika melihat pada cara-cara pengelolaan haji oleh Arab Saudi, baik dari segi perizinan, kuota jamaah, bahkan hingga persoalan jalur masuk para jamaah, diatur sedemikian rupa atas wewenang Kerajaan. Tata kelola haji, walaupun bersipat ritual tahunan telah membuat negara Islam lainnya (pengirim jema,ah) tergiur untuk menjadi bagian dalam tata kelola tersebut. Tentunya gagasan ini akan menimbukan tanggapan pro-kontra. Pada hal secara nyata dan jelas bahwa tata kelola haji secara defacto dan yurisdiksi eksklusif menjadi otoritas Kerajaan Arab Saudi di dalam teritorialnya, dan menempatkan dirinya sebagai "(*khadim al-haramain*) dan dapat dipastikan dengan segala upayanya pihak Kerajaan Saudia Arabia (KSA) dengan tegas menolak untuk menginternasionalisasikan tata kelola haji yang syarat dengan muatan politis.

KSA sebagai "(*khadim al-haramain*) dengan segala otoritasnya tentunya harus menjawab dan merespon kebutuhan masyarakat internasional (sebagai pengirim jema,ah) dengan mempersiapkan fasilitas guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan jema,ah. Dan yang perlu dibangun oleh KSA saat ini, untuk menolak wacana internasionalisasi tata kelola haji adalah menggagas untuk membangun persaudaraan umat Islam di dunia melaui HAJI. Haji menjadi media yang sangat strategis untuk mewujudkannya. Haji hendaknya menjadi pusat laboratorium keumatan, kebangsaan secara global, haji menjadi media membangun komitmen antara bangsa dan lewat haji persaudaraan kemanusiaan dapat dibangun.

Wacana dan pandangan tersebut dapat terwujud, bila semua delegasai dalam ritual ibadah haji tersebut, memiliki kesadaran, kesamaan pandangan, komitmen bersama dan semangat kebangsaan secara global. Lihat sejarah haji masa silam, dimana para hujaj telah menyuarakan dan mengobarkan api perlawanan terhadap tirani barat sebagai "penjajah". Maka tidak sedikit para hujajj selepas menuaiakan ibadah haji ke negaranya menjadi motor penggerak untuk melakukan

perlawanan dan memiliki andil dalam kebebasan kemanusiaan. Saat ini mungkin bukan bentuk kolonialisme yang di lawan, tapi dalam bentuk lain yang memerlukan penyikapan bersama, paling tidak membuka jaringan kerjasama dan jalinan komunikasi yang lebih kondusif antara bangsa dan negara.

Realitas menunjukkan bahwa pemahaman keberagamanan mayoritas Umat Islam Indonesia masih pada tataran ritual, seremonial dan procedural. Belum pada wujud aplikatif di masyarakat. Pada hal Haji adalah ibadah yang paling penting dan memiliki kedudukan paling tinggi. Didalam haji, seorang muslim dituntut untuk berkorban secara fisik (jasmaniah), mental-spritual (ruhaniah) dan materil (maaliyah) yang berdimensi social (Ijmitma'iyah).

Disamping kedudukannya sebagai Ibadah "mahdhah", haji juga merupakan muktamar umat Islam sedunia yang diikuti oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Jadi, haji merupakan sarana pendidikan tentang persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah), semangat persatuan (Wahdah islamiyah), kecintaan dan kerjasama (Ta'awun). Pengalaman haji dapat menumbuhkan kesadaran holistic dan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan serta kesemestaan. Kesadaran ini seharusnya dipupuk dan dibangun bersama, agar ritual ibadah haji tahunan tersebut melahirkan bentuk kesalehan yang berdimensi vertical dan horizontal *(hablumminallah, hablumminannas dan hablumminal 'alam)*.

*Memadukan Ibadah Ritual dengan Ibadah Sosial* (*Salahuddin Wahid,- Kompas:2018*) Islam adalah agama yang amat menganjurkan keadilah, sehingga disejajarkan dengan ketaqwaan, suatu derajat tertinggi dalam Islam. Rasulullah bersabda " berbuat adil satu jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun, tetapi sebagai Negara dengan penduduk Islam paling banyak di dunia, Indonesia adalah salah satu Negara dengan angka korupsi tertinggi, Narkoba dan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Dari persepektif inilah, permasalahan yang lebih besar terlihat. Ada perbandingan terbalik antara bertambahnya jumlah hujjaj di Indonesia dengan peran-peran mereka di masyarakat secara social. Kondisi sebaliknya bisa kita temukan dalam sejarah, betapa para haji dimasa lalu memiliki peran dan andil yang sangat besar dalam pembinaan, pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Meski jumalah mereka jauh lebih sedikit dibanding jumlah haji saat ini.

Disini kita bisa menyebut salah satu penyebabnya, yakni pergeseran nilai yang disebabkan oleh adanya distorsi-distorsi. Kita merasakan semakin minimnya ruang-ruang dimana orang bisa dengan leluasa menemukan kebenaran-keberanan melewati refleksinya selama perjalanan menunaikan Ibadah Haji. Haji hari ini adalah haji yang dimanjakan oleh berbagai kemudahan-kemudahan yang melelapkan yang mengakibatkan sulitnya seseorang melakukan komunikasi spiritual dengan setiap yang melekat pada setiap simbol haji. Karena setiap kita menjumpai simbol-simbol tersebut, kesadaran kita tidak pada posisi dimana simbol tersebut menyejarah, melainkan dengan segala atribut yang sudah kita lekatkan secara sangat erat pada diri kita sebelum kita injakkan kaki di tanah yang suci tersebut. Sehingga tidak aneh jika banyak diantara mereka yang tidak menjalalni perubahan setelah mereka melakukan Ibadah Haji.

Pesan Moral Ibadah *Haji "KH. M. Rusli Amin, MA. L*ebih jauh menjelaskan bahwa manusia yang berkumpul di Padang Arafah, mereka mengenakan pakaian ikhram yang berwarna putih, yang menggambarkan persamaan dihadapan Allah. Disana berhimpun manusia dengan latar belakang yang berbeda; berbeda suku, bangsa, bahasa, warna kulit, status social, namun semua diikat dengan akidah yang sama "*laa Ilaaha Illalah*", telah diikiat dan dipertautkan dari hati mereka semua dengan kalimat tauhid. Manusia berkumpul di Padang Arafah, bukan untuk mencari perbedaan, bukan untuk menonjolkan kehebatan diri, suku, bangsa,dan lain-lain, akan tetapi untuk mempertemukan persamaan, memupuk persatuan, mengkokohkan persaudaraan. Firman Allah SWT : *Artinya "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal…" (QS. Al-Hujarat : 13)*

Perpecahan merupakan ancaman yang sering kali ditemukan di dalam kehidupan manusia. Perbedaan ras, suku, golongan, warna kulit dan juga perbedaan agama, masih menjadi factor pemicu munculnya pertentangan-pertentangan, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Essensi Haji adalah wukuf di Arofah (*Al-Hajju Arro*fah). Mereka hadir tanpa sekat dan perbedaan, semua hadir dengan menanggalkan ke-akuan dan kesmobongan, mereka hadir tanpa sekat dan pembeda tapi sebaliknya mereka hadir sebagai mahluk Tuhan dan pribadi yang lemah (dhoif) di hadapanNya. Hendaknya demonstrasi persaudaraan universal yang terlihat pada saat wukuf di Arafah tersebut, bukanlah semata-mata menjadi tontonan, akan tetapi menjadi pendorong dan pembangkit semangat kebersamaan, memupuk perdamaian dan persaudaraan universal. *Wallahu a'lam bishawab*. [ ]

# Yang Muda, Yang Berhaji : Dari Wali Hingga Para Lansia

Muhammad Subarkah

*Pergi haji ke Baitullah*
*Tunaikan perintah Allah*
*Rukun Islam yang kelima*
*Bagi umat yang berharta…*

Syair di atas adalah potongan bait lagu gambus yang tenar di era 1980-an. Penyanyi bintang gambus saat itu, Rofiqoh Darto Wahab. Lagu ini terdengar di mana-mana di kediaman keseharian warga Muslim. Pesannya jelas, bagi setiap Muslim yang telah *'istitaah* (berharta, sehat, berakal, baligh/dewasa) pergi haji adalah kewajiban setiap Muslim. Tak peduli lelaki dan perempuan.

Uniknya menjelang setengah abad kemudian, yakni selepas dua dekade di tahun 2000 Masehi, pergi haji ternyata tak semudah saat itu. Keinginan pergi haji 'seketika', yakni di tahun itu sudah bisa memenuhi *istita'ah* (mampu) untuk berhaji bisa pada musim haji tahun itu juga ke Makkah. Dan, seperti disebutkan Dirjen Haji Umrah, Prof Dr Hilman Latief, bila pergi haji masa kini makin banyak unsur tangan tuhan. Katanya," Ibadah haji sekarang ini benar-benar panggilan Illahi. Makin rumit."

Sebenarnya apa sih yang membuat rumit? Jawabnya pun sederhana, yakni antrean urutan pergi haji semakin panjang. Bila di awal tahun 2000 lalu, antrean hanya beberapa tahun saja, kini sudah melonjak sampai hingga 25 tahunan. Bahkan di Sulawesi banyak wilayah yang panjang antreannya sudah mendekati 50 tahun. Di Malaysia misalnya, lanjut Dirjen Haji, antrean pergi haji warga di sana sudah mendekati 100 tahun. Maka semakin tak masuk akal bukan?

Panjangnya antrean pergi haji tentu saja membuat rata-rata umur jamaah haji semakin renta. Apalagi rata-rata Muslim Indonesia mengumpulkan hartanya sangat lama untuk bisa berhaji. Kebanyakan mereka mulai mengumpulkan dana haji sedikit demi sedikit ketika usianya menginjak 30-40 tahun. Jadi ketika naik hajinya sejak pertama mendaftar di usia 40 tahun, dia baru bisa berangkat haji mulai usia 60 tahun. Ini catatan sebelum ada pandemi COVID- 19 yang membuat antrean haji makin mengular panjang.

Ada pengalaman menarik dari Dirjen Haji ketika banyak orang tua atau lansia datang kepadanya untuk meminta keringanan bisa pergi haji dengan segera. Mereka merujuk aturan dalam perundangan haji bila ada jatah satu persen untuk haji bagi para lansia seperti dirinya.

Dan ini jelas merepotkan karena bila dihitung secara proporsional dengan mengacu pada perundangan haji bahwa besaran itu dibagi menurut proporsi berdasarkan pada urutan umur, porsi 'jatah' satu persen kepada kaum lansia, itu sudah habis dibagi ketika sampai umur 85 tahun. Ternyata jatah sebesar satu persen dari jumlah seluruh daftar tunggu orang yang membayar biaya awal haji yang pada tahun 2021 sudah mencapai 5,5 juta orang, itu habis dibagi sampai ke usai 85 tahun. "Bayangkan itu. Masih banyak calon jamaah haji yang mendekati usia 100 tahun dan 90 tahun ternyata. Ini jelas mengagetkan, sekaligus bersyukur bila usia Muslim Indonesia banyak yang panjang ternyata," ujar Dirjen Haji.

*****

Menyadari keadaan panjangnya antrean pergi haji, maka mau tidak mau impian dari slogan mentereng 'Yang Muda Yang Berhaji' makin sulit terjadi. Ke depan jamaah haji Indonesia akan semakin renta. Dan bila ada jamaah haji yang berusia muda, bisa dipastikan mereka pergi dengan tidak menggunakan 'visa haji biasa', tapi melalui fasilitas visa '*furodah*' (*visa calling* dari Arab Saudi) yang sangat mahal.

**Subarkah, jurnalis Republika dan pengamat haji*

Bila haji dengan visa biasa melalui Departemen Agama di tahun 2018 (sebelum pandemi) hanya sekitar Rp 36 juta, apabila memakai visa *furodah* harganya minimal mencapai hitungan 20.000 ribu dolar AS. Ini pun masih dalam kategori pergi haji memakai visa *'furodah* dengan layanan paling minimal. Kalau layanan *furodah* 'premium' menjadi berlipat-lipat lagi harganya.

Mencari jalan ke luar dari panjangnya masa tunggu atau antrean pergi haji, kini mulai digencarkan himbauan agar para orang tua bila ingin melihat putranya berhaji di usia muda, mereka sudah mendaftarkan sang anak untuk pergi haji dengan membayar setoran awal yang sampai Rp 25 juta itu ke pihak Departemen Agama via bank yang ditunjuk. Keantusiasan untuk mendaftarkan anak berhaji ini ternyata sangat besar dan semakin membuat besar jumlah setoran dana haji yang kini mencapai lebih dari Rp 150 triliun.

Besaranya dana setoran calon jamaah haji jelas membuat '*ngiler*' siapa saja, misalnya pemerintah sempat mengusulkan agar dana dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur. Soal ini kemudian membuat heboh, namun entah kenapa kemudian hilang begitu saja. Tampaknya dana haji urung dipakai untuk itu. Dana setoran haji sebesar itu sampai kini hanya dibelikan sukuk belaka. Marah.

Dalam soal ini jelas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berpikir berkali-kali bila berani menggunakan dana itu, sebab bila sampai investasi di infrasturktur merugi dan kemudian merujuk perundangan haji mereka bisa dikenai pidana sekaligus menanggung renteng biaya kerugian itu. Maka, mereka jelas tak mau melakukan atau berani melakukan tindakan pertaruhan yang berisiko tinggi itu.

Alhasil di masa depan, jamaah haji Indonesia komposisi umurnya akan semakin menua. Ini jelas berbeda dengan masa lalu, misalnya saat Sunan Gunung Jati pada tahun 1520 M pergi dari Cirebon ke Makkah pada usia muda *(lihat Henri Chambert Loir:2013)*. Saat itu Sunan Gunung Jati ini pergi ke Tanah Suci selain untuk berhaji, kepergiannya juga untuk menuntut ilmu. Bahkan, momentum kepergiannya itu terindikasi sebagai cara dia untuk membuka jalur diplomasi antara Kesultanan Demak dengan Imperium Ottoman Turki.

Sunan Gunung Jati dan para penguasa Kesultanan Demak yang baru menggantikan Kerajaan Majapahit itu mahfum bila Ottoman itulah yang saat itu menguasai wilayah apa yang kini disebut sebagai Saudi Arabia. Salah satu wakil dari kekuasaanya itu adalah sosok yang lazim disebut 'Syarif Makkah'.

*****

Lalu apa untung dan ruginya berhaji di masa muda dan untung ruginya berhaji di masa tua?

Jawabnya, yang pasti kalau mampu berhaji di masa muda, maka pergi haji akan terasa indah dan menyenangkan. Beribadah bisa lebih tenang. Selain itu dapat menikmati kesempatan itu persis sama dengan apa yang disebut tokoh orientalis Belanda Snouck Hurgronje sebagai 'Festival Makkah'. Suasana ibadah yang begitu riuh rendah akan dapat dinikmati tanpa terlalu mengkhawatirkan kondisi fisik karena masih belia. Apalagi pada dasarnya ibadah haji adalah ibadah fisik. Tanpa kebugaran tubuh ibadah ini menjadi sulit bisa dinikmati secara maksimal.

Kendala fisik dari jamaah haji Indonesia yang semasa belum muncul pademi COVID-19 sebagaian besar –yakni mencapai 60 persen—adalah jamaah lansia yang berpredikat sebagai jamaah 'risti' (risiko tinggi) karena mengidap berbagai penyakit. Efek dari banyaknya jamaah lansia-risti ini tampak jelas pada data kondisi jamaah di awal kedatangan hingga sesudah melakukan serangkaian ibadah haji di Kawasan Arafah Mina (Armina) yakni wukuf dan melontar jumlah. Bila pada masa awal kedatangan di Makkah, jumlah jamaah yang sakit dan wafat lazimnya landa-landai saja.

Namun semenjak memasuki masa Armina mereka yang sakit dan wafat jumlahnya melondak drastic. Bahkan bila dilihat dari kecenderungan kurvanya, grafik kurva sontak berubah menjadi mendekati tegak lurus. Rumah sakit haji untuk jamaah haji Indonesia di Makkah kala itu selalu penuh dengan jamaah. Ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan suasana sebelum itu, yakni saat jamaah masih bugar karena baru datang di Tanah Suci.

Tuntutan fisik tersebut terlihat sangat jelas, karena sebelum para jamaah haji datang dari berbagai dunia ke Makkah, kala itu suasana kota itu sepi-sepi. Kalau dibandingkan suasana Makkah di luar musim haji layaknya kota Yogyakarta di hari-hari biasa. Malah Yogyakarta terasa lebih bising dan padat.

Namun, menjelang dua pekan sebelum pelaksanaan puncak haji, yakni melakukan rangkain ibadah di kawasan Armina, kota itu berubah menjadi padat sekali. Lalu lintas macet di mana-mana. Barikade mulai dipasang di jalan-jalan untuk mengatur arus kendaraan. Bila hari biasa jamaah haji nyaman pergi dan beribadah di Masjidil Haram, kala itu menjadi berhimpit-himpitan.

Kawasan masjid itu menjadi penuh sesak. Rangkaian ibadah Sa'i, tawaf, shalat berjamaah, melakukan miqat dan lainnnya pun kemudian menjadi penuh tantangan. Lazimnya, para petugas haji waktu itu sudah mulai menghimbau kepada jamaah (terutama yang lansia) tak usah pergi memaksakan

diri shalat ke Masjidil Haram. Mereka dihimbau agar lebih melakukan shalat di tempatnya tinggal atau berjamaah di masjid yang ada didekat mereka tinggal. Pada waktu itu jamaah haji lansia banyak sekali yang tersesat karena terpisah dari rombongan.

Situasi banyaknya jamaah haji yang tak muda lagi makin diperparah dengan banyaknya cerita 'mistik' tentang Tanah Suci ketika dahulu mereka menjalani bimbingan manasik haji. Para pembimbing manasik masih lazim membumbui cerita haji dengan kisah yang membuat khawatir. Ini misalnya kerap mendengungkan bahwa keburukan yang dilakukan di tanah suci akan dibayar tunai saat itu juga.

Almarhum Ketua PB NU, KH Hasyim Muzadi, ketika menjadi Amirul Haj pada tahun 2011 mengeluhkan hal itu. Saking kesalnya dia membuat ujaran bahwa: Makkah adalah tanah suci, tapi penduduknua tak suci!

Apa yang dikatakan KH Hasyim Muzadi ada benarnya sebab di kala itu banyak laporan kepada petugas haji bahwa jamaah haji lansia 'dikerjai' warga yang tinggal Makkah. Mereka banyak sekali yang mengalami penipuan hingga adanya calo mencium hajar aswad dengan meminta besaran biaya tertentu. Saat itu KH Hasyim Mujadi pun mengingatkan Makkah itu penduduknya bukan hanya orang pribumi Arab saja, tapi banyak ditinggali warga negara dari negara lain. “Sebagian besar yang nakal itu bukan warga asli Makkah, tapi para 'mukimin' (warga asing yang tinggal di Makkah).

Akibatnya, rata-rata jamaah haji yang tua banyak mengalami tekanan jiwa. Ini karena selain diorientasi karena sudah berumur dan berpendidikan sederhana, karena merasa sudah tua selalu merasa ketakutan ketika berhaji. Para lansia yang terkena dimensia ini malah sampai menjelang masa puncak haji mereka merasa tidak tengah berada di Makkah tapi berada di kampung halamannya. Hal ini jelas membuat beban tanggungjawab petugas haji semakin bertambah. Mereka harus mengawal jamaah haji selama 24 jam serta memastikan mereka tetap sehat secara jasmani dan rohani.

Segala kendala dari jamaah lansia itulah yang setidaknya tidak terlalu dialami oleh jamaah haji yang muda. Bahkan saking senangnya para jamaah haji muda melakukan ibadah layaknya berdar-mawisata bahkan melakukan bulan madu berikutnya. Ini misalnya terlihat dengan ramainya penyewaan 'kamar barokah' (kamar berduaan untuk suami isteri, red) di tempat kawasan para jamaah tinggal selama musim haji. Haji bagi mereka jelas sangat terasa indah dan berkesan. Apalagi waktunya sampai lebih dari 40 hari, atau hampir tiga sampai empat kali lipat dari waktu bila mereka melakukan ibadah umrah.

Tapi keceriaan melakukan ibadah haji karena berusia masih muda, saat ini kian menjadi, sebuah impian yang jauh bagi anak-anak muda di era milenial. Bila di zaman masa lalu, yakni sebelum Indonesia merdeka saat waktu menunaikan perjalanan ibadah haji sampai lebu dari tujuh bulans, justru saat itu usia jamaah malah kebanyakan anak muda. Dapat dipastikan jamaah haji yang berumur renta tak akan bisa pergi ke sana.

Pergi ke Tanah Suci saat itu, selain untuk berhaji para jamaah haji dipakai untuk menuntut ilmu kepada para ulama kondang di Makkah. Jadi saat itu, karena sekalian belajar, berangkat haji ke Makkah menjadi dilakukan selama bertahun-tahun. Minimal kalau mereka memilih berhaji dengan waktu tujuh bulan lamanya, semenjak menjelang Ramadhan mereka sudah berada di Makkah. Dan baru Kembali setelah usai bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan terakhir di kalender Qamariyah (lazim disebut kalender Islam,red).

Maka saat ini, apalagi setelah adanya pandemi Covid -19 yang telah membuat dua kali jamaah haji Indonesia tak bisa berangkat ke tanah suci, maka sekarang dapat dipastikan pergi haji semakin sulit. Berhaji pada usia muda --layaknya syair lagu gambus Haji dari Rofiqoh Abdul Wahab—cenderung hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berharta saja. Baik berharta karena bisa bila beli visa 'furodah' yang hingga ribuan dollar itu atau karena orang tuanya kaya-raya sehingga semenjak kecil dia sudah didaftar untuk berhaji secara regular yang berbiaya jauh lebih murah.

Nah, apakah Makkah dan Madinah ke depan situsainya di musim haji haji akan dipenuhi jamaah lansia? Entahlah. Sebab, haji memang benar-benar pangggilan Allah Swt. Situasi ini bisa jadi ke depan membuat ibadah haji menjadi lebih bernilai spiritual dan sekaligus syahdu. Ini sesuai juga dengan penggalan syair lagu 'Pergi Haji, yang di zaman lalu lazim terdengar dalam lantunan syair pantun permainan rebana di berbagai pesantren.

*…Ada orang mau berangkat haji*
*Di jalanan temui para haji:*
*Pergi haji jangan ditangisi*
*Tujuh bulan Kembali lagi*
*Ya dana..ya dana dana..ya dana .. ya dana dana*
*Pergi haji jangan ditangisi*
*Tujuh bulan Kembali lagi.*

[ ]

# 'Subsidi Haji', Skema Ponzi dan Masa Depan BPKH

Darmawan Sepriyossa*

Di sekitar abad ke-8 Masehi, dua malaikat yang tengah menyaksikan prosesi ibadah haji tahun itu berbincang satu sama lain.

"Berapa banyak jamaah yang datang tahun ini?"tanya malaikat yang satu.

"Enam ratus ribu orang," jawab malaikat lainnya. "Tapi, tak satu pun haji mereka diterima, kecuali seorang tukang sepatu bernama Muwaffaq yang batal menunaikan haji, tertinggal di rumahnya di Damaskus. Bahkan berkat dia, semua ibadah jamaah yang berhaji akhirnya diterima Allah Sang Maha Kuasa."

Kisah yang melibatkan tokoh sufi Ibnu Mubarok itu termasuk cerita sufi yang sangat popular kita dengar. Kita tak pernah mendapatkan informasi jelas, mengapa ibadah ratusan ribu jamaah haji itu tertolak sebelum perbuatan mulia Muwaffaq si tukang sepatu itu.

Anggaplah, dalam lima tahun atau bahkan sekitar satu dekade ini, pada setiap tahun di bulan haji, kedua malaikat itu selalu terlibat obrolan yang sama.

"Berapa banyak jamaah tahun ini?" kata malaikat satu, yang senantiasa mengawali perbincangan dengan pertanyaan klise tersebut.

"Dua juta orang lebih. Tetapi 200-an ribu jamaah dari negeri bernama Indunisi tak satu pun diterima," jawab malaikat yang lain, yang juga selalu sabar menjadi penjawab pertanyaan itu. "Mereka hanya membayar setengah biaya, kadang kurang. Sisanya dibayar satu badan pengelola dengan cara yang tak sepenuhnya adil buat jamaah lain, mereka yang menanti dalam antrean panjang pemberangkatan, bahkan sampai penantian itu diputuskan kematian…"

***

Sudah menjadi rahasia umum bahwa telah sekian lama Ongkos Naik Haji (ONH) setiap jamaah Indonesia mendapatkan bantuan. Istilah gampangnya 'disubsidi', meski terma tersebut jelas kurang tepat. Mengapa dibantu, tentu karena kurang, sementara bila ONH itu dinaikkan begitu saja, kemungkinan besar riaknya bisa jadi ke segala bidang dan tak terkontrol.

Persoalannya, mahalnya biaya ini juga sering disebut berhubungan dengan keengganan pemerintah Arab Saudi membuka bandara selain Jeddah dan Riyadh untuk kedatangan jamaah haji—yang membuat penumpukan menjadi niscaya-, selain permainan klasik para syeikh, yang nota bene kalangan swasta Saudi, memainkan biaya akomodasi di sana.

Misalnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2019 sejatinya menghabiskan sekitar Rp 72 juta per jamaah. Sementara jamaah haji tahun itu hanya perlu membayar Rp 35,2 juta. Ada selisih sekitar Rp 37 juta antara yang dibayar dan rata-rata biaya riil setiap jamaah haji. Itu bukan hanya untuk musim haji 2019, tahun sebelum dan sesudahnya pun bantuan seperti itu diberikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pengakuan Dewan Pengawas BPKH bahkan menyebut jumlah bantuan per jamaah yang lebih besar lagi. Anggota Dewas BPKH, KH Marsudi Syuhud, mengatakan, selama sekitar empat tahun terakhir BPKH menutupi kekurangan dana haji sekitar Rp 42,9 juta per jamaah. Kata Marsudi, kekurangan dana tiap

*Jurnalis, pernah berkiprah di Majalah Panji, Majalah TEMPO, harian Republika. Saat ini bekerja di INILAH.COM.*

jamaah yang ditutupi BPKH itu berasal "dari keuntungan yang didapat dari dana setoran jemaah haji" yang dikelola badan tersebut.

Fakta itulah, justru, yang membuat beberapa pihak berkeras bahwa jamaah haji Indonesia tidak pernah mendapatkan subsidi. Fakta bahwa kekurangan biaya haji tidak ditutup pemerintah secara langsung, melainkan oleh BPKH—yang sebenarnya juga lembaga publik-membuat talangan itu menurut mereka tidak bisa disebut subsidi. Sekalipun menurut sifatnya diakui bantuan itu sejalan dengan tujuan subsidi, yakni meringankan beban masyarakat dan untuk sesuatu yang masih bisa dianggap sebagai kepentingan umum.

Perdebatan itu belum lagi melibatkan kalangan yang berkeras memegang common sense mereka bahwa subsidi idealnya diberikan pada sesuatu yang berkenaan dengan urusan produktif, bukan konsumsi. Lupa, bahwa subsidi minyak goreng, misalnya, jelas-jelas urusan konsumsi meski kemudian membawa dampak langsung pada pabrik minyak goreng.

Bagi mereka, subsidi selazimnya datang dari atau tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara bantuan untuk haji tidak berasal dari APBN, melainkan dari hasil usaha BPKH. Barangkali karena dalam perdebatan yang sehat orang tak menghendaki '*zero sum game*', kalangan 'pemerintah' dan BPKH pun kemudian menggunakan nama dana manfaat untuk bantuan tersebut. Tanpa harus berdebat, kita akan gampang bersepakat bahwa terma tersebut jelas menyiratkan kentalnya eufimisme.

Tetapi tentu saja, saya tak hendak berhenti pada perdebatan seputar sebutan subsidi atau bukan. Saya bukan juga kalangan yang mengharamkan bantuan buat para jamaah haji. Dalam pemikiran sederhana saya, kalau ada pihak yang bisa membantu meringankan beban jamaah haji, mengapa tidak? Apalagi bila bantuan itu diberikan negara yang memang harus punya arti bagi kehidupan warganya. Bagi negara, bantuan tersebut tak sekadar 'cum', melainkan kewajiban negara pada umat Islam yang menjadi warganya, sebagaimana kemudian diatur dalam Undang-undang no 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Sebaliknya, dari sisi jamaah haji pun pemberian bantuan tersebut tidak bisa dengan gampang dianggap tanpa persoalan. Laiknya manusia normal, jamaah haji tentu menginginkan kemudahan dan harga ONH yang terjangkau, untuk tidak mengatakan murah. Namun karena hal ini menyangkut urusan ibadah yang kental dengan keyakinan pribadi dan subjektivitas, ketenangan serta harapan bahwa ibadah mereka sah tanpa beban kesangsian-lebih jauh lagi mabrur (diterima Allah)-, tampaknya lebih prioritas dibanding sekadar besaran biaya.

Kalau pun selama ini—barangkali--tidak ada warga yang gigih mempertanyakan dari mana asal dana manfaat yang dipakai untuk menutupi kekurangan BPIH setiap jamaah per tahun, bukan berarti tidak ada masalah di masyarakat tentang hal itu. Setidaknya, seiring makin lazimnya penggunaan media sosial (*socmed*) di masyarakat, pertanyaan-pertanyaan yang di masa lalu tidak mengemuka, perlahan mulai menyeruak. Misalnya, sudah ada *kok* yang ingin mengetahui lebih detil diputar 'ke' dan 'di' mana saja dana haji yang konon jumlahnya perputarannya lebih dari sekitar Rp 156 triliun itu.

Apalagi kemudian sempat muncul kabar yang membuat publik mereka-reka kemungkinan adanya penggunaan skema Ponzi dalam urusan BPIH ini. Mulai muncul kekhawatiran selisih yang disebut diambil dari 'dana manfaat' itu sebenarnya dibayarkan dari dana setoran jemaah yang belum berangkat, mereka yang waktu tunggunya mencapai puluhan tahun kemudian. "Apabila ini yang terjadi, apa bedanya dengan tragedi First Travel? Inikah *money game* dalam penyelenggaraan ibadah haji?" tulis motivator Jamil Azzaini dalam sebuah kolom di satu situs berita.

Sekadar mengingatkan, skema Ponzi adalah kemampuan untuk mengatur arus kas (*cash flow*) tanpa didukung *underlying asset* dan manajemen risiko yang baik. Selama masih ada dana baru (*fresh money*) yang masuk, maka piramida Ponzi ini akan tegak berdiri dan pemilik dana menikmati keuntungan. Dana segar dari nasabah baru inilah yang dipakai untuk membayar nasabah lama. Kondisi ini akan terus terjadi. Pendek kata, semakin banyak nasabah baru yang masuk, semakin kuatlah piramida itu. Sebaliknya, ketika nasabah baru tersendat, fondasi piramida pun goyah menuju tumbang.

Dalam sejarah,modus investasi palsu ini 'ditemukan' Charles Ponzi dari Italia, yang menjadi terkenal pada tahun 1920 karena menipu klien-kliennya sebesar 20 miliar dolar AS.

Tetapi penjahat skema Ponzi terbesar justru berada di zaman kita. Dialah Bernie Madoff, yang pertengahan tahun ini meninggal setelah menyelewengkan harta klien-kliennya sebesar 65 miliar dolar AS. Madoff, yang terbongkar pada 2008 lalu, meninggal di penjara saat menjalani hukuman 150 tahun. Oh ya, kalau Jamil Azzaini khawatir, itu wajar. Di Indonesia, kita pernah dikejutkan pasangan pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, yang penipuan berkedok bisnis umroh mereka merugikan konsumen tak kurang dari Rp 500 miliar alias setengah triliun rupiah!

Menguatnya kerisauan publik soal BPIH ini pun bukan tanpa sebab. Dalam acara "Diseminasi

Pengawasan Keuangan Haji" di Bandung, Oktober 2020 lalu, Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yuslam Fauzi mengingatkan soal kian besarnya jarak antara biaya riil haji dengan setoran calon jamaah yang lebih kecil tersebut.

"Kalau ini berlaku terus, hati-hati, pada 2026 itu keuntungan yang ada tidak cukup untuk menutup 'subsidi' tersebut karena jarak semakin lebar," kata Yuslam. Alarm yang dibunyikan Dewas BPKH itulah yang belakangan membuat Wakil Presiden Makruf Amin ikut bersuara, meminta agar dana bantuan BPIH tersebut kian diperkecil, untuk pada saatnya dihilangkan sama sekali.

Di kalangan pegiat perjalanan haji pun tampaknya sinyalemen soal skema Ponzi tersebut meruap kuat. Paling tidak berdasarkan pernyataan Ketua Forum Satu, Baluki Ahmad, saat ditanya harian *Republika* soal wacana pengurangan bantuan dana haji. Baluki mengatakan, hal itu akan merugikan jamaah yang berangkat belakangan, padahal uang mereka telah terpakai oleh jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Secara eksplisit—paling tidak berdasarkan tulisan *Republika*—Baluki mengatakan selama ini 'subsidi' yang diberikan itu merupakan uang jamaah lain yang belum diberangkatkan. Secara tegas ia juga mengatakan bahwa sistem haji reguler saat ini merupakan aturan yang sesungguhnya tidak menjadikan keadilan, tetapi terus saja berjalan.

Kalau pun sistem keuangan haji yang kini dikelola BPKH itu bebas dari skema Ponzi, dengan keharusan untuk menalangi dana sekian banyak, beban BPKH sebenarnya tergolong 'gila'. Beban segila itu akan menekan dan memaksa BPKH untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, seiring tuntutan untuk menghasilkan keuntungan investasi yang luar biasa besar.

Dengan beban dan tekanan sehebat itu, meski Dewas BPKH menegaskan optimisme seiring perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut, plus sekian banyak sertifikasi yang menguatkan kredibilitas mereka, BPKH sangat rawan terpeleset. Paling tidak, tekanan untuk menghasilkan keuntungan besar itu akan meminggirkan kehati-hatian pada syar'i atau tidaknya sebuah investasi yang akan mereka gulirkan.

Dari sisi itu saja, Malaikat Pencatat akan mempertanyakan kualitas haji jamaah haji Indonesia yang berujung pada peluang mabrur tidaknya ibadah mereka. Itu hal yang jauh lebih utama banding setengah atau bahkan seluruh besaran dana ONH. [dsy]

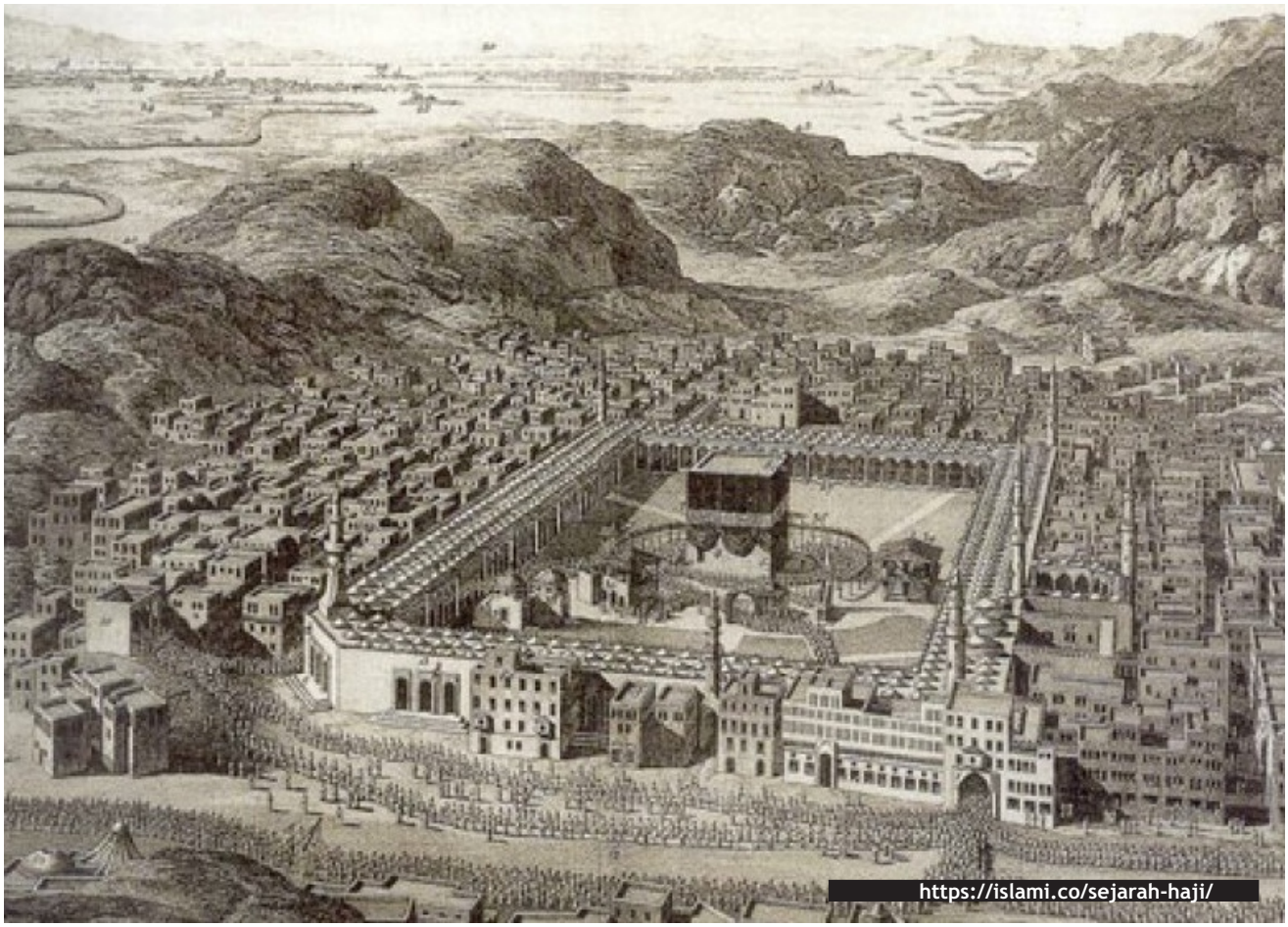
https://islami.co/sejarah-haji/

# Pengelolaan Dana Haji dan Dampak Sosial Berkelanjutan

Tim BPKH *

**Regulasi pengelolaan dana haji**

Tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal kerja sama resmi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Sebagai tindak lanjut, pada 1951 dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1951 yang memberhentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. Pada 1952, pemerintah Indonesia membentuk PT Pelayaran Muslim untuk menjadi satu-satunya panitia penyelenggara haji dan mulai memberlakukan sistem kuota.

Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji menghasilkan pembentukan Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad) yang kemudian berubah nama menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH) pada 1962. Panitia ini terdiri dari berbagai departemen dan wakil dari lembaga nondepartemen yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kompartemen Kesejahteraan (Nuri, 2014). Tahun 1964, tugas PPPH diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA) dan PPPH dibubarkan (Yanis, 2017).

Setelah 39 tahun, dengan munculnya Peraturan Presiden tentang Penyelenggara-an Urusan Haji, komitmen pemerintah semakin meningkat dengan ditetapkannya dasar hukum melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.

Setelah beberapa tahun penyelenggaraan haji berlangsung, terasa payung hukum yang mengatur hal itu masih perlu disempurnakan. Akhirnya, pada 2008 dilakukan amandemen Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada akhirnya, Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan pada 17 Oktober 2014 menjadi momentum yang monumental bagi industri keuangan, khususnya di bidang keuangan haji.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama secara penuh. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008, proses pelayanan haji dilakukan oleh Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh berfungsi sebagai pelaksana, Komisi Pengawas Haji Indonesia berfungsi sebagai pengawas, serta Dana Abadi Umat (DAU) yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dana haji lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat.

Seiring waktu, kelembagaan dalam pengelolaan keuangan dana haji ini tidak menunjukkan lingkungan yang mapan dan kondusif. Kementerian Agama memegang peranan yang dominan di ketiga fungsi tersebut dan tidak terdapat pemisahan nyata antara pengelola dan pelaksana. Untuk itu Pemerintah mengambil langkah nyata dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah badan hukum publik yang bersifat mandiri yang akan bertanggung jawab langsung mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama.

BPKH resmi mengambil alih pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan tersebut tertuang juga tata cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas keuangan haji.

*) *Ascarya, Aisha Putrina Sari, Atika Rukminastiti Masrifah, Beny Witjaksono, Indra Gunawan*

Sumber: Ilustrasi Penulis
Gambar 2.1. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Haji

Sejatinya ibadah haji bukan hanya sebuah peristiwa bersejarah yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual, tetapi juga mengandung potensi ekonomi yang luar biasa. Sehingga potensi besarnya dana haji tersebut harus dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan juga agar ekonomi haji mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional dan berdampak pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yang meliputi seluruh hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji). Hal ini bermakna bahwa BPKH juga mengelola dana haji milik jemaah. Setoran dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang produktif.

Terbentuknya BPKH disebabkan--salah satunya--oleh adanya tantangan dominasi, di mana pengelolaan keuangan haji menggabungkan antara fungsi pengelola dan pelaksana. Untuk itu BPKH dibentuk dengan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban, dan pelaporan keuangan haji dipegang oleh Badan Pelaksana. Sementara Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Kedua posisi ini saling bekerja sama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan.

Dewan pengawas memiliki wewenang dalam penyetujuan operasional investasi BPKH. Badan pelaksana wajib menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan dua kali biaya penye-lenggaraan ibadah haji (Pasal 47 UU nomor 34 tahun 2014). Dalam ketentuan, BPKH di-perbolehkan mengelola dana jemaah, namun perlu adanya dana cadangan yang siap diambil dengan besaran sebanyak dua kali dari total peserta ibadah haji. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana dengan baik apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan mengalami kerugian.

BPKH memiliki visi menjadi lembaga pengelola keuangan tepercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKH mempunyai lima misi yaitu membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern; meningkatkan efisiensi dan rasionalitas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui kerja sama strategis; melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas; menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional; dan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Menurut UU nomor 34 tahun 2014, BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Berdasarkan pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

Implementasi BPKH harus dapat dijalankan dengan baik dan berdampak sosial. Strategi investasi yang komprehensif dan tepat diperlukan untuk memaksimalkan pendapatan haji. Strategi investasi harus diperbarui secara teratur mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Strategi tersebut harus disetujui dan diperiksa oleh komite pengelola risiko, mengingat bahwa pengelolaan keuangan dana haji dilakukan secara transparan, aman, dan profesional.

Dengan adanya BPKH, diharapkan pengelolaan dana haji dan DAU tidak terbatas pada pengelolaan jasa perbankan dan penempatan sukuk namun dengan strategi investasi yang lebih komprehensif. Kemudian dana yang diinvestasikan tersebut secara terbuka dilindungi oleh undang-undang. Hal ini bermakna bahwa BPKH memiliki keleluasaan dalam mengelola

dana haji secara transparan dan profesional namun tetap mengedepankan kepentingan jamaah haji.

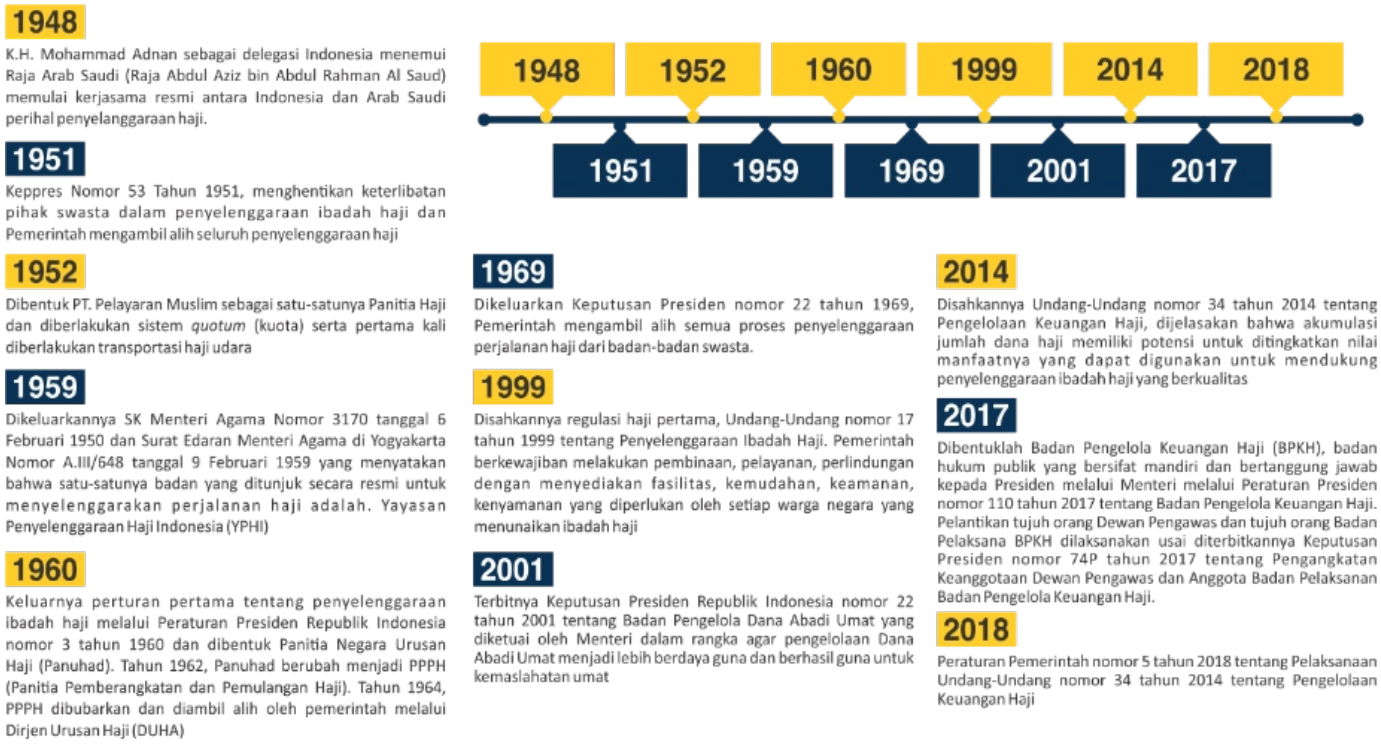


Sumber: Ilustrasi penulis
Gambar 2.2. *Milestone* Perkembangan Regulasi Penyelenggaraan Haji

1948 – K.H. Mohammad Adnan sebagai delegasi Indonesia menemui Raja Arab Saudi (Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud) memulai kerja sama resmi antara Indonesia dan Arab Saudi perihal penyelenggaraan haji.

1951 – Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan Pemerintah mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji.

1952 – Dibentuk PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem *quotum* (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara.

1959 – Dikeluarkan SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI).

1960 – Keluar peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1960 dan dibentuk Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad). Tahun 1962, Panuhad berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). Tahun 1964, PPPH dibubarkan dan diambil alih pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA).

1969 – Keluar Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1969, Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji dari badan-badan swasta.

1999 – Disahkannya regulasi haji pertama, Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

2001 – Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri dalam rangka agar pengelolaan Dana Abadi Umat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat.

2014- Pengesahan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

2017 – Dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Pelantikan tujuh orang Dewan Pengawas dan tujuh orang Badan Pelaksana BPKH dilaksanakan usai diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 74P tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Haji.

2018 – Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

**Portofolio dan nilai manfaat BPKH**

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji dibentuklah BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Struktur organisasi BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji, termasuk penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat dan likuiditas, serta bekerja sama dengan lembaga lain.

BPKH, meskipun dijamin oleh UU No. 34 tahun 2014 dan PP No. 5 tahun 2018 untuk mengelola dana haji melalui investasi pada instrumen emas maupun investasi langsung, namun BPKH lebih memilih instrumen investasi yang memiliki *profile sovereign risk*. Dasar pertimbangan yang diambil adalah karakteristik DAU yang merupakan hasil efisiensi atau penghematan atas penyelenggaran ibadah haji, kepemilikan dan peruntukan bagi kemaslahatan umat. Hal itu sesuai amanah UU No. 34 tahun 2014, yang menyatakan bahwa BPKH berwenang menginvestasikan dana haji dengan prinsip syariah, hati-hati, aman serta memberi nilai manfaat. Salah satu instrumen investasi yang aman, memiliki *profile sovereign risk* dan sesuai *syariah* adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negaa adalah surat berharga nregara yang diterbitkan berdasarkan prinsip *syariah*, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No. 19 2008). Sukuk negara, bebas terhadap risiko gagal bayar (*default*) karena pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh UU. Beberapa alasan memilih investasi pada sukuk negara menurut DJPPR Kemenkeu & ADB (2015): 1) Sesuai *syariah*; 2) Tidak dikenakan pajak atas transaksi *underlying asset* pada investasi sukuk; 3) Aman. Terdapat tujuh jenis SBSN yaitu Sukuk Ritel (SR), *Islamic Fixed Rate* (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Valas dan Sukuk Tabungan.

Dana haji pada awalnya diinvestasikan pada instrumen SBSN SDHI di tahun 2009 sebesar Rp 2,69 triliun, dan meningkat terus dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya di tahun 2015-2017 sebesar Rp 36,70 triliun (lihat gambar 2.3). Sejak tahun 2016 dana haji mulai diinvestasikan juga pada instrumen SBSN PBS, walau masih sedikit hanya Rp 0,40 triliun.

Namun sejak 2018 (setelah berdirinya BPKH di pertengahan 2017) investasi pada instrumen SBSN PBS meningkat pesat menjadi Rp 10,35 triliun, sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji, dan terus menjadi instrumen utama investasi dana haji, sedangkan SBSN SDHI mulai menurun menjadi Rp 34,20 dan mulai menurun terus karena tidak ada lagi investasi SBSN SDHI baru.

Di akhir 2021, *outstanding* SBSN SDHI tinggal Rp 14,70 triliun, yang akan jatuh waktu terakhir pada tahun 2029. Pada tahun 2018 itu juga dimulai investasi dana haji pada SBSN USDPBS dalam denominasi Dolar Amerika sebesar USD200 juta atau setara Rp 2,74 triliun. Sementara itu, investasi ke SBSN PBS meningkat terus menjadi Rp 12,49 triliun di tahun 2019, Rp 34,80 triliun di tahun 2020, hingga Rp 82,44 di tahun 2021 (lihat gambar 2.3).

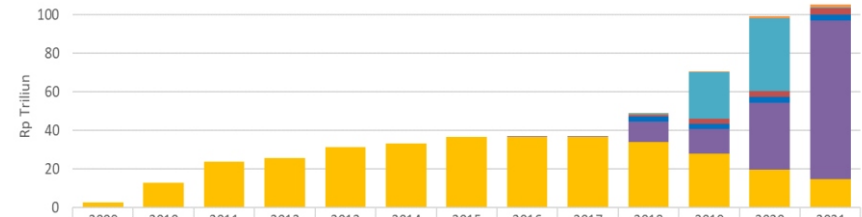


| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainnya | | | | | | | | | | 0.02 | 0.02 | 1.13 | 2.03 |
| ReksDa | | | | | | | | | | 0.50 | 24.23 | 37.88 | 0.54 |
| Sukuk K | | | | | | | | | | 0.80 | 2.34 | 2.94 | 3.29 |
| USDPBS | | | | | | | | | | 2.74 | 2.89 | 2.89 | 2.86 |
| PBS | | | | | | | | 0.40 | 0.35 | 10.35 | 12.49 | 34.80 | 82.44 |
| SDHI | 2.69 | 12.78 | 23.78 | 25.78 | 31.53 | 33.20 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 34.20 | 28.20 | 19.70 | 14.70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SBSN** | **2.69** | **12.78** | **23.78** | **25.78** | **31.53** | **33.20** | **36.70** | **37.10** | **37.05** | **47.29** | **43.57** | **57.39** | **100.00** |
| **TOTAL** | **2.69** | **12.78** | **23.78** | **25.78** | **31.53** | **33.20** | **36.70** | **37.10** | **37.05** | **47.32** | **70.17** | **99.34** | **105.85** |
| **D-HAJI** | | | | | | | | | **102.5** | **112.4** | **124.3** | **143.1** | **151.0** |

Sumber: Data Kemenkeu, diolah penulis
Gambar 2.3. Investasi Dana Haji

Di tahun 2018 (lihat gambar 2.3), selain mulai investasi dana haji ke USDPBS, BPKH juga mulai investasi dana haji ke Sukuk Korporasi Rp 0,80 triliun, Reksa dana *Syariah* Rp 0,50 triliun dan investasi langsung sebesar Rp 0,024 triliun dalam bentuk penyertaan saham Bank Muamalat Indonesia (BMI). Investasi ke Reksadana *Syariah* meningkat pesat di tahun 2019 menjadi Rp 24,23 triliun dan meningkat lagi menjadi Rp 37,88 triliun di tahun 2020, namun menurun kembali ke Rp 0,54 triliun di tahun 2021.

Sementara itu, investasi di Sukuk Korporasi meningkat terus menjadi Rp 2,34 triliun di tahun 2019, Rp 2,94 triliun di tahun 2020 dan Rp 3,29 triliun di tahun 2021. Investasi langsung dan lainnya juga memiliki tren naik menjadi Rp 1,13 triliun di tahun 2020 dan Rp 2,03 triliun di 2021.

Secara keseluruhan, total investasi dana haji di tahun 2018 mencapai Rp 47,32 triliun (42,1 persen) dari total kelolaan dana haji sebesar Rp 112,4 triliun. Investasi dana haji melonjak di tahun 2019, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 70,17 (56,5 persen) dari total kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 124,3 triliun. Di tahun 2020 investasi dana haji meningkat lagi, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 99,34 triliun (69,4 persen) sejalan dengan semakin meningkatnya kelolaan dana haji Rp 143,1 triliun yang juga dipicu oleh pembatalan penyelenggaraan haji karena pandemi COVID-19.

Di tahun 2021 penyelenggaraan haji kembali batal karena masih pandemi COVID-19, sehingga investasi dana haji juga meningkat, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 105,85 (70,1 persen) sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 157,0 triliun.

**Penempatan dana haji pada SBSN**

a. Milestone Dana Haji pada SBSN

SBSN pertama terbit di tahun 2008 akhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Setahun kemudian Kemenkeu dan Kemenag bekerjasama dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang pertama untuk penempatan langsung (*private placement*) dana haji di bulan Mei tahun 2009 sebesar Rp 1,5 triliun pada SBSN SDHI-2010A, dilanjutkan dengan penempatan dana haji di bulan Juni 2009 sebesar Rp 850,0 miliar pada SBSN SDHI-2010B dan penempatan DAU sebesar Rp 336,0 miliar pada SBSN SDHI-2010C (lihat gambar 2.4).

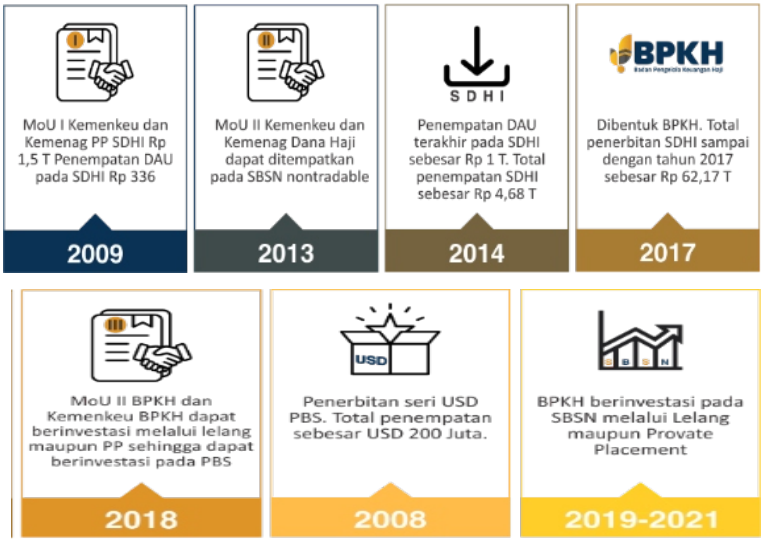


Sumber: Hadiningdyah (2021), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 2.4. *Milestone* Penempatan Investasi Dana Haji pada SBSN

MoU kedua ditandatangani pada 2013, di mana dana haji dapat ditempatkan pada SBSN *nontradable*, yang selanjutnya di 2014 adalah penempatan DAU terakhir pada SDHI-2029A sebesar Rp 1,0 triliun. Sebelum BPKH lahir di pertengahan tahun 2017, dana haji terakhir ditempatkan pada SBSN-SDHI2020E di bulan Maret sebesar Rp 1,0 triliun, sehingga total penempatan dana haji pada SDHI berjumlah sebesar Rp 62,2 triliun, dengan outstanding SDHI sebesar Rp 36,7 triliun. Setahun sebelumnya pada tahun 2016, dana haji mulai diinvestasikan pada instrumen SBSN-PBS sebesar Rp 400,0 miliar.

MoU ketiga ditandatangani oleh BPKH dan Kemenkeu pada tahun 2018, di mana BPKH dapat berinvestasi melalui lelang maupun *private placement*, sehingga dapat berinvestasi pada SBSN-PBS. Pada tahun itu juga diterbitkan USDPBS001 dan USDPBS002 masing-masing sebesar USD100,0 juta dengan total USD200,0 juta yang semuanya merupakan penempatan dana haji setara Rp 2,4 triliun. Setelah itu di tahun 2019 hingga 2021 saat ini, BPKH berinvestasi pada SBSN melalui lelang maupun *private placement*.

b. Investasi dana haji pada SBSN

Total investasi SBSN (SDHI, PBS dan USDPBS) meningkat tajam dari Rp 43,57 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 57,39 triliun di tahun 2020 dan akhirnya menjadi Rp 100,00 triliun di tahun 2021, atau meliputi 66,67 persen dana haji yang dikelola oleh BPKH (Rp150 triliun per Mei 2021). Selain SBSN, investasi di Sukuk Korporasi hanya 2,19 persen, Reksadana syariah hanya 0,36 persen dan investasi langsung dan lainnya hanya 1,35 persen. Dengan demikian, dana haji yang disimpan di bank Syariah masih cukup besar 29,9

persen atau Rp 44,15 triliun, sudah mencapai target di bawah 30 persen (maksimum sebesar 30 persen).

Kelebihan dari investasi dana haji di SBSN adalah risiko rendah, volume besar, variasi instrumen cukup beragam dan banyak, dan imbal hasil cukup baik. Selain itu, saat ini BPKH tidak dikenakan pajak penghasilan, sehingga hal ini memberikan berbagai tambahan manfaat, antara lain (Hadiningdyah, 2021):

a) Dana yang tersedia lebih besar sehingga mengurangi ketergantungan pada APBN;
b) Menambah likuiditas di Bank Syariah (BPS-BPIH) dan bisns syariah;
d) Bank Syariah dis investasi syariah;
c) Meningkatkan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kas-haji yang dapat diinvestasikan atau ditempatkan pada instrumen berbasiapat lebih optimal berorientasi pada investasi berbasis syariah.

Kepemilikan BPKH pada instrumen SBSN ini (termasuk SDHI, PBS dan USDPBS) cukup dominan, di mana semua seri SDHI dan USDPBS dipegang 100 persen oleh BPKH. Sementara itu, untuk seri PBS kepemilikan BPKH tidak dominan hanya ada tiga yang dimiliki 100 persen oleh BPKH, yaitu PBS018, PBS020 dan PBS024 (lihat gambar 2.5). Bahkan untuk PBS yang jangka waktunya tidak terlalu panjang juga tidak menjadi pilihan investasi bagi dana haji, karena *return* cenderung lebih rendah.

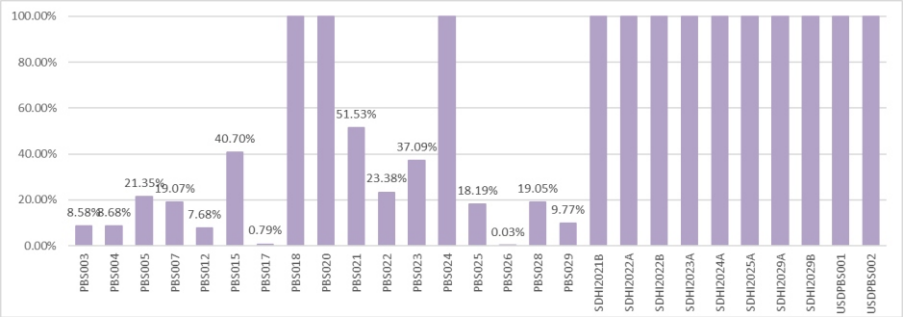


Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis
Gambar 2.5. Kepemilikan BPKH pada SBSN

Sementara itu, profil jatuh tempo SBSN yang dimiliki BPKH dapat dilihat pada gambar 2.6, di mana di setiap tahun hingga tahun 2034 (13 tahun kedepan) sudah ada SBSN yang jatuh tempo. Sementara itu, di tahun setelahnya masih ada beberapa yang belum ada SBSN yang jatuh tempo, seperti di tahun 2035, 2036, 2038 dan 2039. Selain itu, di tahun-tahun yang sudah ada SBSN yang jatuh tempo, jumlah nominalnya belum merata untuk memenuhi kebutuhan biaya haji yang saat ini sekitar Rp 15 triliun. Investasi dana haji yang jatuh tempo dan dana haji yang belum diinvestasikan dapat diprioritaskan untuk menambah investasi yang belum merata untuk sepuluh tahun kedepan.

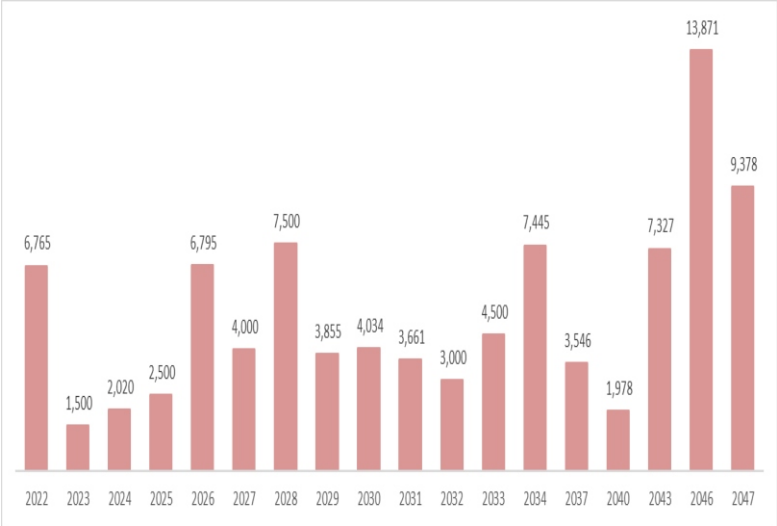


Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis
Gambar 2.6. Profil Jatuh Tempo SBSN yang Dimiliki BPKH

**Portofolio SBSN SDHI**

Instrumen awal investasi dana haji adalah pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI) sejak 2009, yang diterbitkan melalui *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanggal 22 April 2009, yaitu penempatan langsung (*private placement*) dana haji dan dana abadi umat (DAU) pada sukuk negara. SBSN SDHI ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah *ijarah al-khadamat*. *Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri, yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

SDHI pertama terbit tanggal 7 Mei 2009 dengan no seri SDHI-2010A melalui penempatan langsung (*private placement*) dengan jangka waktu satu tahun, imbal hasil 8,52 persen dan jumlah nominal Rp 1,5 triliun. *Private placement* memberikan keuntungan bagi Kemenag dalam menentukan tenor SDHI yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan dana haji. Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah. SDHI tidak dapat diperdagangkan

(*nontradeable*) sehingga tidak bisa di-*redeem* setiap saat. Sejak tahun 2011, pemerintah menerbitkan SDHI setiap tahunnya dengan nilai terendah Rp 336 miliar untuk SDHI-2010C dan SDHI-2014B, yang terbit Juni 2009 dan Agustus 2010 dengan tenor 1 tahun dan 4 tahun serta imbal hasil 7,89 persen dan 7,30 persen. Sementara nilai SDHI tertinggi Rp 6,0 triliun untuk SDHI-2014D, yang terbit Februari 2011 dengan tenor tiga tahun dan imbal hasil 7,85 persen.

Tenor SDHI semakin lama semakin panjang di mana SDHI terpanjang tenornya adalah 10 tahun, seperti SDHI-2021A, SDHI-2021B, SDHI-2022A, SDHI-2024A dan SDHI-2025A, serta 15 tahun, seperti SDHI-2029A dan SDHI-2029B. SDHI terakhir adalah SDHI-2020E yang terbit Maret 2017 dengan tenor tiga tahun dan imbal hasil 7,14 persen. Jumlah keseluruhan SBSN SDHI yang diterbitkan sejak 2009 hingga 2017 sebanyak 30 seri dengan jumlah nominal Rp 62,166 triliun.

Semenjak berdirinya BPKH di pertengahan tahun 2017, SDHI baru tidak lagi diterbitkan, hanya tinggal SDHI *outstanding* saja yang dikelola yang meliputi 17 SDHI dari seri SDHI-2019A hingga SDHI-2029B dengan jumlah nominal Rp34,2 triliun. Di tahun-tahun berikutnya, SDHI terus berkurang karena jatuh tempo hingga tersisa Rp 14,7 triliun di akhir tahun 2021.

**Portofolio SBSN PBS**

Salah satu investasi dana haji yang terus meningkat dan semakin besar peran dan pangsanya adalah penempatan di instrumen SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS), yang menggunakan akad *Ijarah* atas aset yang akan disewakan (*asset to be leased*). Itu memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (*sukuk holders*) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad *ijarah* (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (*fixed return*).

Perbedaan antara SBSN nonPBS dan SBSN PBS yaitu pada pemanfaat dananya atau penggunaan dana hasil penerbitan SBSN. Jika hasil penerbitan SBSN nonPBS digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*), khususnya untuk menutup defisit anggaran, maka hasil penerbitan SBSN PBS digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga. Oleh karenanya, dana yang diperoleh dari penerbitan langsung di-*earmark* atau dikhususkan untuk membiayai proyek yang telah ditentukan dalam APBN dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain (Nopijantoro, 2017).

SBSN PBS ini dapat dimiliki oleh investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan PBS berupa kupon bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan (*tradable*), sehingga jika dana haji diinvestasikan dalam PBS, maka pengelola keuangan haji dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa di-*redeem* setiap saat melalui pasar sekunder (Hariyanto, 2017). PBS diterbitkan pertama kali tanggal 11 Oktober 2011 dengan no seri PBS-0001 dan seri PBS-0002.

Penempatan dana haji, termasuk DAU, pada instrumen SBSN PBS terus meningkat setelah berdirinya BPKH di pertengahan tahun 2017 dengan enam seri PBS senilai Rp 10,35 triliun dan meningkat menjadi 9 seri PBS di tahun 2019 senilai Rp 12,49 triliun (lihat tabel 2.2). Sejalan dengan menurunnya penempatan di SBSN SDHI, pada tahun 2020 penempatan dana haji pada SBSN PBS melonjak hampir tiga kali lipat menjadi Rp 34,80 triliun dengan 15 seri PBS. Lonjakan investasi di SBSN PBS ini berlanjut di tahun 2021 menjadi Rp 82,44 triliun (atau 54,96 persen)

**Portofolio sukuk korporasi**

Dana haji juga diinvestasikan pada Sukuk Korporasi BUMN dan Swasta yang memiliki peringkat *investment grade* idA+ hingga idAAA. Sukuk BUMN meliputi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Elnusa Tbk. Sedangkan Sukuk Swasta meliputi PT CIMB Niaga Tbk. Pangsa terbesar portofolio ada pada Sukuk BUMN PLN sebesar 38,27 persen atau Rp 1,16 triliun (lihat tabel 2.3).

Pada pertengahan tahun 2021 BPKH juga mulai berinvestasi pada Sukuk PNM (Permodalan Nasional Madani), yang digunakan untuk pengembangan keuangan mikro Syariah ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). ULAAM melayani usaha mikro kecil (UMK), sedangkan MEKAAR melayani usaha ultra mikro berbasis kelompok, khususnya diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

a. Sukuk PLN

Investasi dana haji pada Sukuk PLN naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, investasi pada Sukuk PLN baru Rp300 miliar dengan rata-rata *return* 8,38 persen, yang kemudian naik pada tahun 2019 menjadi Rp 988 miliar dengan rata-rata *return* 8,62 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 investasi ke Sukuk PLN naik lagi menjadi Rp 1.158 miliar dengan rata-rata *return* 8,51 persen. Standar deviasi Sukuk PLN

masih dibawah 1,0 persen dengan SR diatas empat (lihat tabel 2.3). Kinerja Sukuk PLN ini dari sisi SR lebih tinggi dari SBSN dengan *return* lebih tinggi dan standar deviasi yang hampir sama.

b. Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah

Investasi dana haji pada Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah juga naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, investasi pada Sukuk CIMB Niaga baru Rp 200 miliar dengan *return* 9,25 persen, yang kemudian naik drastis di tahun 2019 menjadi Rp 675 miliar dengan *return* 8,59 persen. Pada tahun 2020, investasi pada Sukuk CIMB Niaga mencapai puncaknya menjadi Rp 975 miliar dengan *return* 8,16 persen, sedangkan pada tahun 2021 menurun karena ada Sukuk yang jatuh tempo sehingga tinggal Rp 775 miliar dengan *return* 8,00 persen

c. Sukuk Sarana Multi Infrastruktur

Investasi dana haji pada Sukuk Sarana Multi Infrastruktur (SMI) naik dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan kemudian sama terus hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, investasi pada Sukuk SMI baru Rp 100 miliar dengan *return* 7,75 persen, yang kemudian naik drastis di tahun 2019 menjadi Rp 580 miliar dengan *return* 8,13 persen. Hal ini bertahan pada tahun 2020 dan 2021

d. Sukuk Permodalan Nasional Madani

Investasi dana haji pada Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM) mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2021 dengan pembelian dua seri Sukuk PNM dengan total investasi sebesar Rp 349 miliar, dengan jangka waktu tiga tahun (seri SMPNMP01BCN1) dan *return* 7,00 persen dan lima tahun (seri SMPNMP01CCN1) dengan *return* 8,00 persen. Dengan demikian, total *return* tahun 2021 menjadi 7,25 persen.

**Portofolio *cash waqf linked sukuk* (CWLS)**

Salah satu bentuk investasi berdampak sosial (*social impact investment*) atau SII yang khas dikembangkan di Indonesia adalah *cash waqf linked sukuk* (CWLS) dengan akad *Wakalah* atas kerja sama Bank Indonesia, Kemenkeu, Kemenag dan BWI, untuk pengembangan Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di kota Serang, Banten. Secara umum, skema CWLS dapat dilihat pada gambar 2.20.

Sementara itu, peran BI, Kemenkeu, Kemenag dan BWI, antara lain: 1) menjaga transparansi dan *governance* dana wakaf melalui *Waqf Core Principles* (WCP); 2) menyediakan sistem informasi wakaf; 3) mitra lembaga sosial (organisasi pengelola wakaf - OPW dan organisasi pengelola zakat - OPZ) dalam mengelola proyek sosial (misalnya pengembangan Madrasah); dan 4) edukasi publik terkait wakaf sukuk.

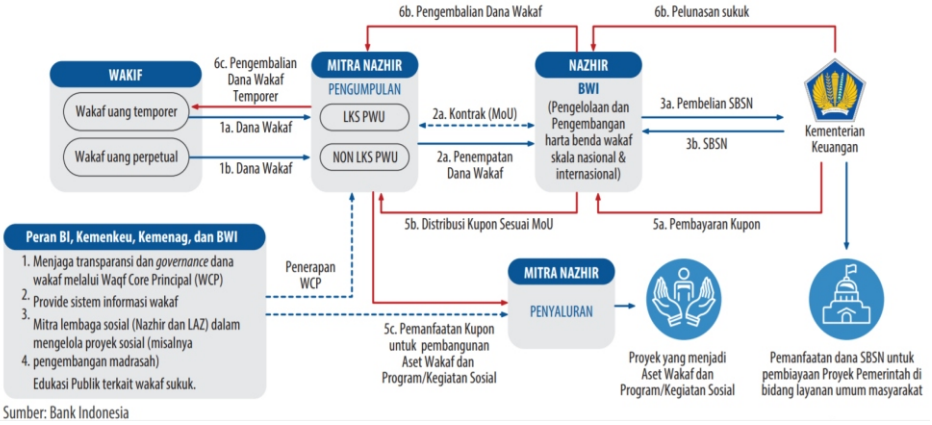


Sumber: Kemenkeu
Gambar 2.20. Skema Umum Cash Waqf Linked Sukuk

CWLS yang terbit pertama kali ini diberi nama CWLS-SW001 dengan skema seperti pada gambar 2.21. Pertama BWI menghimpun wakaf uang temporer melalui bank Syariah sebagai LKS-PWU (lembaga keuangan Syariah - penerima wakaf uang) dan wakaf abadi non LKS-PWU dari para wakif individu atau institusi. Sementara itu DJPPR-Kemenkeu menerbitkan Sukuk Wakaf atau CWLS dengan cara *private placement* dari BWI pada 10 Maret 2020 senilai Rp 50,849 triliun, jangka waktu 5 tahun, *nontradeable*, diskonto di depan Rp 2,4 miliar dan kupon bulanan Rp 211,0 juta. Wakif SW001 ini meliputi BPKH, Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, BNI Syariah, Baitul Maal Muamalat, Bank CIMB Niaga Syariah, Dompet Dhuafa, Bank Sinarmas Syariah, Bank Mega Syariah dan Maybank Syariah. BPKH berwakaf sementara dari dana DAU sebesar Rp 25,0 miliar.

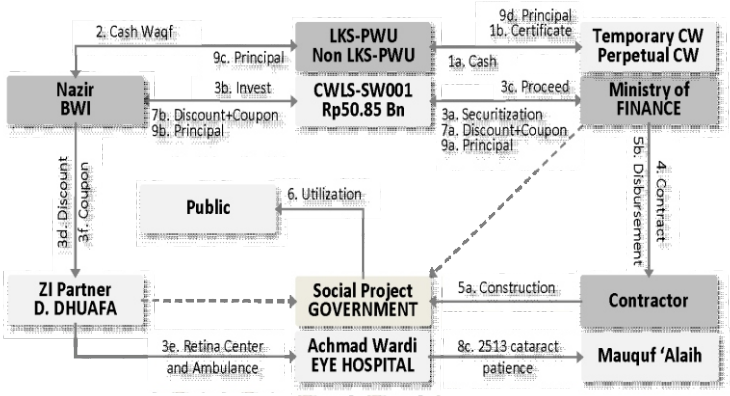


Sumber: Ilustrasi Penulis
Gambar 2.21. Skema CWLS-SW001

*Return* CWLS dalam bentuk diskonto dan kupon bulanan oleh BWI, setelah dikurangi bagian Nazir sebesar 10 persen setelah dikurangi biaya-biaya, selanjutnya disalurkan melalui mitra organisasi pengelola wakaf (OPW) Dompet Dhuafa untuk membiayai renovasi ruang operasi mata Rp 1,7 miliar, pembelian alat operasi mata Rp 8,8 miliar, pembelian ambulans Rp 600 juta dan bakti sosial operasi mata untuk 2513 pasien selama lima tahun Rp 1 miliar. Ketika CWLS jatuh waktu, pokok wakaf uang sementara akan dikembalikan 100 persen kepada para wakif, termasuk wakaf uang sementara BPKH dari dana DAU sebesar Rp 25 miliar, sedangkan wakaf uang abadi akan kembali ke BWI untuk digunakan untuk wakaf produktif berikutnya.

a. Profil Jatuh Tempo

Selain itu, portofolio investasi dana haji ke SBSN juga harus memperhatikan profil jatuh tempo sesuai kebutuhan biaya haji setiap tahun. Dari gambar 2.23, masih banyak tahun-tahun jatuh tempo yang perlu ditambah investasinya, paling tidak untuk sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, seperti tahun 2023, 2024, 2025, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035 dan 2036.

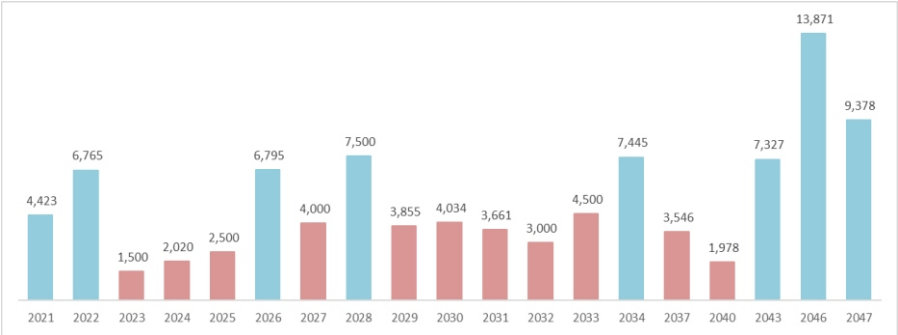


Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.23. Variasi Profil Jatuh Tempo SBSN Dana Haji

b. Investasi yang Bertanggung Jawab dan Berdampak Sosial

Hal lain yang sekarang menjadi penting dan perlu diperhatikan kedepan adalah investasi yang bertanggung jawab (*responsible investment*, RI), seperti investasi yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible investment*, SRI), investasi yang memperhatikan lingkungan, sosial dan tata kelola (*environment, social and governance*, ESG) dan investasi yang berdampak sosial (*social impact investment*, SII), dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs), seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Investasi dana haji ke berbagai instrumen investasi syariah harus menambahkan kriteria *responsible investment* (*green*, SRI, ESG maupun SII), baik yang ke bank syariah, SBSN, Sukuk Korporasi, Reksadana, investasi langsung atau pun yang ke investasi lainnya. Sebagai contoh, dana haji dapat diinvestasikan ke *Green Sukuk* dan *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS) yang diterbitkan oleh Kemenkeu. SBSN PBS yang juga diterbitkan oleh Kemenkeu diharapkan kedepan juga memperhatikan ESG, SRI atau SII, sehingga dana haji tetap dapat diinvestasikan ke SBSN PBS ini.

*Green Sukuk* adalah gabungan antara instrumen investasi yang mengedepankan proyek berbasis hijau, yang berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta SDGs, yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta ditinjau oleh pengulas independen internasional CICERO (*Center for International Climate Research*). Sebagian dana haji dapat diinvestasikan ke *sovereign green* sukuk ini karena termasuk SBSN yang aman dan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali (*re-finance*) secara langsung proyek berbasis hijau yang memenuhi syarat.

Sementara itu, CWLS adalah inovasi wakaf uang yang dikembangkan bersama oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Keuangan, dalam rangka menggalang wakaf uang produktif yang akan diinvestasikan dengan membeli Surat Berharga Syariah negara (SBSN) khusus berjangka maksimum sampai dengan lima tahun, yang akan digunakan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk membiayai infrastruktur di bidang sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

Para wakif (donatur) dapat memilih untuk berwakaf uangnya secara permanen atau sementara, selama jangka waktu SBSN tersebut. Secara singkat, karakteristik CWLS antara lain: 1) investasi wakaf uang dalam Sukuk Negara; 2) penyaluran imbalan Sukuk Negara untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf; dan 3) pelunasan Sukuk Negara 100 persen kepada para wakif (untuk wakaf temporer) atau Nazhir (untuk wakaf permanen). Sebagian dana haji atau *return* dana haji dapat diinvestasikan pada CWLS ini untuk meningkatkan SII.

Selain itu, dana haji dapat lebih diinvestasikan ke arah instrumen yang masuk dalam Indeks Saham *Sustainable and Responsible Investment* SRI-KEHATI yang diluncurkan melalui kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Semakin banyak investasi dana haji ke instrumen investasi dalam SRI-

KEHATI maka akan lebih tinggi dampak sosialnya (*social impact investment*).

c. Optimalisasi imbal hasil

Meski perhatian utama investasi dana haji pada instrumen investasi syariah yang aman, berisiko rendah, beragam, berprofil jatuh tempo sesuai kebutuhan dan berdampak sosial, perhatian selanjutnya dapat diarahkan ke optimalisasi imbal hasil. Jika dilihat dari perkiraan imbal hasil berbagai instrumen investasi syariah dana haji, Sukuk Korporasi, Investasi Langsung, Investasi Lainnya dan Emas memiliki imbal hasil yang lebih besar dari pada Tabungan Bank Syariah, SBSN maupun Reksadana. Jika dilihat dari ketentuan, persentase investasi pada Investasi Langsung, Investasi Lainnya dan Emas masih dapat dinaikkan.

Demikian juga jika dilihat dari rencana dan realisasi di tabel 8. Sementara itu, penempatan pada bank syariah dan investasi pada SBSN dapat dikurangi. SDHI yang berangsur-angsur jatuh tempo dapat diinvestasikan ke Investasi Langsung, Emas, Sukuk Korporasi dan Investasi Lainnya.

**Regulasi dan ketentuan umum *social impact investment***

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, BPKH harus memilih instrumen investasi yang telah disaring dari usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip *Socially Responsible Investment* (SRI) bisa diartikan sebagai berinvestasi dengan menghindari industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Hal yang dihindari oleh SRI adalah berinvestasi pada *platform* atau perusahaan yang memproduksi alkohol, tembakau, senjata dan lainnya yang berpotensi memberikan dampak buruk.

Selain SRI, BPKH juga cenderung menginisiasi jenis-jenis investasi yang menghasilkan dampak positif, sosial dan lingkungan (ESG) untuk masyarakat. Investasi berdampak sosial bukanlah investasi yang memiliki keuntungan lebih sedikit daripada investasi berdampak komersial. Investasi berdampak sosial membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk mulai menghasilkan keuntungan daripada investasi berdampak komersial. Selanjutnya, setelah keuntungan diperoleh, investasi berdampak sosial mensyaratkan reinvestasi sebagian besar keuntungan, agar semakin banyak penerima manfaatnya.

BPKH sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia turut berkontribusi dalam investasi berdampak sosial yang memiliki nilai manfaat berkelanjutan bagi umat. Investasi berdampak sosial BPKH bertujuan menghasilkan keuntungan sekaligus mengatasi masalah sosial dan lingkungan pada masyarakat. Jika ditelusuri pangkalnya, konsep investasi ini tidak lepas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, sistem keuangan yang hanya memperhatikan aspek ekonomi dirasakan memang memberikan keuntungan yang besar, tetapi rentan terhadap guncangan. Krisis demi krisis yang datang bergantian akan berdampak pada ekonomi dan pembangunan secara luas. Hal inilah yang kemudian mendasari dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 7/21/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum oleh Bank Indonesia. Meski tidak secara eksplisit terdapat istilah keuangan berkelanjutan tetapi pada peraturan tersebut aspek lingkungan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan oleh bank pada saat melihat prospek usaha yang diajukan oleh debitur (lihat gambar 17).

Konsep dari keuangan berkelanjutan di Indonesia semakin dikuatkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan-tujuan yang ada dalam RPJMN memiliki arah yang sama dengan sasaran capaian dari SDGs. Oleh karena itu, berbicara tentang arah pembangunan yang ada di RPJMN tidak akan terpisahkan dengan SDGs, di mana pembangunan negara Indonesia juga akan berkaitan dengan pembangunan dunia (lihat gambar 2.26).

Sumber: Berbagai sumber, diolah oleh Penulis

Gambar 2.26. Perkembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Komitmen dari pencapaian SDGs dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi coordinator pelaksana untuk mencapai tujuan dari SDGs sesuai dengan Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bappenas juga dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga *United Nation* (UN) dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memantau pencapaian SDGs terdapat *dashboard* yang bisa menampilkan secara visual sejauh mana SDGs sudah tercapai di Indonesia.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tentu juga diperlukan perekonomian yang digerakkan oleh sumber dana atau keuangan berkelanjutan. Dorongan untuk membuat sistem keuangan berkelanjutan telah diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, telah terdapat *roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap pertama dikeluarkan pada Desember 2014 untuk penerapan di tahun 2015-2019. Sementara itu, *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap kedua dikeluarkan untuk mencapai tujuan-tujuan di tahun 2021-2025.

Agar implementasi dari keuangan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik maka pada tahun 2017 dikeluarkanlah peraturan turunan yang bersifat mengikat kepada seluruh entitas lembaga keuangan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (lihat gambar 2.22).

Berdasarkan POJK tersebut, seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, mulai dari sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang terdiri dari pegadaian, lembaga penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didorong untuk mendukung implementasi dari keuangan berkelanjutan untuk mencapai ekonomi berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 dalam POJK No 51/POJK.03/2017, terdapat delapan prinsip yang perlu dipenuhi untuk mencapai keuangan berkelanjutan, yaitu:

a. prinsip investasi bertanggung jawab;
b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;
d. prinsip tata kelola;
e. prinsip komunikasi yang informatif;
f. prinsip inklusif;
g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
h. prinsip koordinasi dan kolaborasi

Sumber: POJK No 51/POJK.03/2017, diolah oleh Penulis
Gambar 2.27. Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan menurut POJK No. 51/POJK.03/2017

**Keterkaitan *social responsible investment* (SRI), *social impact investment*, dan *social development goals* (SDGs) terhadap investasi BPKH**

Sesuai dengan Peraturan BPKH No. 5 tahun 2018 pasal 25 ayat 1, untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, BPKH harus memilih instrumen investasi yang telah disaring dari usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jika produk investasi yang dipilih mengalami perubahan status menjadi tidak syariah maka pasal selanjutnya mengatur BPKH untuk segera melakukan divestasi. Investasi di instrumen syariah secara tidak langsung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Socially Responsible Investment* (SRI), sosial dan lingkungan (ESG), dan Sustainable *Development Goals* (SDGs) yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prinsip SRI bisa diartikan sebagai berinvestasi dengan menghindari industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Hal yang dihindari oleh SRI adalah berinvestasi pada *platform* atau perusahaan yang memproduksi alkohol, tembakau, senjata dan lainnya yang berpotensi memberikan dampak buruk. Hal ini sejalan dengan prinsip investasi syariah di mana investasi di bidang tersebut dilarang.

Selain SRI, BPKH juga cenderung menginisiasi jenis-jenis investasi yang menghasilkan dampak positif, sosial dan lingkungan (ESG) untuk masyarakat. Investasi berdampak sosial bukanlah investasi yang memiliki keuntungan lebih sedikit daripada investasi berdampak komersial. Investasi berdampak sosial membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk mulai menghasilkan keuntungan daripada investasi berdampak komersial. Selanjutnya, setelah keuntungan diperoleh, investasi berdampak sosial mensyaratkan reinvestasi sebagian besar keuntungan, agar semakin banyak penerima manfaatnya.

BPKH sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah terbesar di Indonesia turut berkontribusi dalam investasi berdampak sosial yang memiliki nilai manfaat berkelanjutan bagi umat. Investasi berdampak sosial BPKH bertujuan menghasilkan keuntungan sekaligus mengatasi masalah sosial dan lingkungan pada masyarakat. Jika ditelusuri pangkalnya, konsep investasi ini tidak lepas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Secara garis besar, terdapat dua kelompok dampak sosial yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh BPKH. Pertama, adalah ketika BPKH melakukan investasi yang berbasiskan proyek secara langsung dan berdampak tidak hanya kepada ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Ada beberapa kriteria dari proyek yang dapat menjadi sasaran investasi dari BPKH yaitu merupakan pembangunan infrastruktur, dapat meningkatkan pelayanan publik, bermanfaat bagi pemberdayaan industri dalam negeri dan program-program lainnya yang memiliki nilai strategis. Contoh-contoh dari proyek tersebut adalah sebagai tercantum dalam tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11. Proyek Penyaluran Investasi BPKH

| Tahun | Nominal | Penyaluran Dana SBSN |
|---|---|---|
| 2018 | Rp2,2 triliun | - Pembangunan 8 Asrama Haji<br>- Pembangunan 245 Balai Nikah & Manasik Haji<br>- Pembangunan 23 PTKIN (kampus Islam) dan 32 Madrasah |
| 2019 | Rp2,4 triliun | - 14 Unit Pembangunan Asrama Haji<br>- 28 Unit Balai Nikah dan Manasik Haji<br>- 35 Unit Gedung Kuliah Baru PTKIN<br>- 125 Unit Gedung Madrasah<br>- 6 Unit Pembangunan Gedung Kuliah Pengganti PTKIN<br>- 1 Unit Pembangunan Pusat Layanan Halal<br>- 16 Unit Pembagunan Pusat Layanan Haji |
| 2020 | Rp2,9 triliun | - 10 Proyek Embarkasi Haji dan 40 Proyek Pusat Pelayanan Haji Terpadu<br>- 6 Pembangunan Sarana dan Fasilitas Gedung PTKIN dan 136 Madrasah<br>- 228 Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji |

Sumber: BPKH (2020)

Jika dampak pertama didapatkan dari investasi yang dilakukan, maka dampak kedua berasal dari nilai manfaat yang dihasilkan oleh investasi Dana Abadi Ummat BPKH yang disalurkan menjadi dana kemaslahatan. Program dana kemaslahatan disalurkan kepada berbagai macam proyek sosial dan juga berkolaborasi dengan lembaga lain. Contoh-contoh dari penggunaan dana kemaslahatan adalah sebagai tercantum dalam tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12. Proyek Dana Kemaslahatan BPKH

| Tahun | Program Kemaslahatan |
|---|---|
| 2019 | - Pelayanan Ibadah Haji berupa Penambahan Fasilitas Akomodasi Jamaah Lanjut Usia<br>- Pendidikan dan Dakwah<br>- Sarana Prasarana Ibadah<br>- Kesehatan<br>- Sosial Keagamaan |
| 2020 | - Penanggulangan Covid-19<br>- Bantuan Alat Pelindung Diri (APD)<br>- Alat Kesehatan<br>- Pembuatan Ruang Isolasi<br>- Bantuan Sembako<br>- Ventilator<br>- Disinfektan<br>- Bantuan Operasional Masjid<br>- Bantuan untuk Da'I, Imam, Marbot, dan sebagainya<br>- Kampung BPKH untuk Penyintas Bencana di Palu, Sigi, dan Donggala |

Sumber: BPKH (2020)

## Kesimpulan dan saran

Program-program yang dijalankan oleh BPKH tersebut, baik yang berupa investasi maupun nilai manfaat yang disalurkan menjadi dana kemaslahatan telah mengokohkan peran BPKH dalam memberikan dampak yang positif tidak hanya kepada ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Ditambah lagi hal tersebut menjadikan manfaat dari dana kelolaan BPKH tidak hanya dirasakan oleh para jamaah haji Indonesia tetapi juga masyarakat secara umum.

Tantangan global tentu tidak bisa diabaikan, mengingat sangat dinamis dan tingginya unsur ketidakpastian. Ancaman penyebaran konflik geopolitik dan pandemi Covid-19 membutuhkan serangkaian paket preventif dan antisipatif yang memitigasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) laksana pedal kopling, diiringi strategi manajemen risiko serupa pedal rem, selain beragam inovasi dan sinergi terobosan laksana pedal gas. Itu semua harus dilakukan secara harmoni. Oleh karena itulah BPKH belum berinvestasi pada instrumen/aset yang berpotensi spekulasi unsur VUCA yang tinggi, diantaranya saham yang diperdagangkan di bursa dan emas karena keduanya tidak memiliki arus kas positif (imbal hasil tetap). Hal ini telah memerlukan konsultasi mendalam dengan auditor BPK RI mengingat ada potensi rugi harian yang perlu dimitigasi.

BPKH juga harus memenuhi investasi berkesinambungan ala Social Development Goals (SDGs) PBB yang selaras dengan Maqashid Syariah dalam menjaga keberlangsungan jiwa, harta, keturunan, akal dan agama. SDGs diinspirasikan dari komponen

triple bottom line, dengan orientasi People-Planet-Profit (3Ps). Secara umum, investasi SDGs harus mengikuti kerangka teoritis yang mengacu pada siklus investasi berkelanjutan bukan semata-mata *return* jangka pendek. Investasi ala green and blue ini sudah terhampar di kepulauan nusantara, tinggal bagaimana ini dapat sinergi bersama-sama. Instrumen Green/Blue Sukuk ini perlu diinisiasi oleh BPKH sebagai salah satu s*ophisticated* investor nasional.

Sebagai negara berpopulasi Muslim terbesar, status Presidensi Indonesia di G-20, yang berslogan *recover stronger-recover together* memberikan beberapa peluang, di antaranya: (a) penguatan diplomasi ekonomi untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (b) keistimewaan agenda-setting bagi kepentingan nasional RI, (c) keseimbangan mediasi antara negara maju dan berkembang (d) penguatan sektor-sektor ekonomi utama di Indonesia melalui perundingan di Forum G-20 di bidang perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan sumber daya manusia dan target SDGs. Indonesia memiliki banyak peluang untuk menarik investasi asing ke dalam negeri, BPKH sebagai salah satu investor jangkar nasional perlu menggandeng Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain.

BPKH dapat mendorong adanya skema investasi yang luas seperti sektor pendidikan (asrama/sekolah dan kampus, sarana laboratorium dan riset perguruan tinggi), kesehatan (klinik, laboratorium/radiologi dan rumah sakit) bahkan sektor yang menaungi ketahanan pangan seperti: pertanian-perikanan-peternakan hingga agro-industri serta sektor yang defensif dan tumbuh pesat di masa pandemi seperti teknologi informasi.

Inisiasi sinergi BPKH dengan Kementerian/ Lembaga melalui perumusan bersama atas Rencana Investasi Tahunan BPKH cukup banyak. Khusus dengan Kemenag, BPKH dapat mendukung penuh setidaknya 5 dari 7 program prioritas Kemenag tahun 2022, yaitu Transformasi Digital, Cyber Islamic University, Kemandirian Pesantren, Revitalisasi PLHUT dan peningkatan Religiosity Index.

Berikut beberapa gagasan ide sinergi BPKH dengan pemangku kepentingan terkait di antaranya:

A. Optimalisasi Cyber Islamic University dan kemandirian pesantren melalui pola investasi dan kemaslahatan BPKH. Investasi yang sinergi pada sarana di Universitas Islam Negeri (UIN) dan pesantren pilihan perlu ditingkatkan sesuai standard internasional Ini meliputi asrama, laboratorium, perpustakaan bahkan *sport centre* yang *fully digital* dengan fasilitas IT lengkap. Dengan demikian kemanfaatannya bukan hanya bagi guru madrasah yang memiliki keterbatasan dalam melanjutkan studinya dengan murah dan mudah setara sarjana, cyber Islamic university dan kemandirian pesantren dilengkapi dengan akses informasi untuk semua user/pemangku kepentingan untuk memantau aktivitas perkembangan siswa/santrinya. Investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga aman, membangun generasi bangsa dan memiliki dampak sosial sekaligus dapat berorientasikan *green energy* (*solar cell/mini hydro*).

B. Revitalisasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), optimalisasi Barang Milik Haji (BMH) dan asset kelolaan BLU di dalam dan di luar negeri (termasuk di Arab Saudi) yang direkomendasikan oleh Kemenag RI akan mewujudkan etalase terbaik bagi umat Indonesia. Apabila lokasinya strategis dapat dibangun halal business resort/district meliputi sentra ibadah, wisata, *office*/hotel/mall/ *amusements*. PLHUT di Jeddah misalnya, dapat dibangun *mixed use property*, yang selain menjadi kantor operasional haji juga dapat dijadikan hotel transit dan pelayanan jemaah dan WNI. Revitalisasi asset lain seperti KUA di tiap kecamatan dan sarana kanwil agar dibangun dengan fasilitas yang lebih memadai melalui skema investasi atau dana kemaslahatan BPKH.

C. Didukung oleh BWI, DJPPR-Kemenku, Baznas, Bimas Kemenag, dan DEKS-BI, BPKH telah berperan serta dalam kegiatan kemaslahatan asnaf Kesehatan dalam rangka membantu salah satu rumah sakit mata yaitu dengan mendukung pengadaan alat kesehatan retina center, renovasi ruangan retina center dan subsidi biaya operasi retina melalui Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) sebesar total Rp25miliar. Program CWLS ini merupakan bukti komitmen kemaslahatan BPKH mengembangkan sinergi investasi sosial di tanah air.

D. Akumulasi sinergi poin di atas mengantarkan pada *religiousity index* yang meningkat. Katalisator indeks kesadaran beragama selanjutnya adalah upaya sinergi BPKH dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta BUMN/BUMD dengan *credit rating* di atas *investment grade* untuk melakukan pembiayaan pembangunan sarana keumatan melalui dana haji. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, PT. Pertamina (Persero), PLN (Persero), PNM (Persero), hingga PDAM Daerah adalah beberapa mitra potensial. Sinergi dengan pemerintah daerah melalui Sukuk Daerah saat ini semakin terbuka dengan disyahkannya UU No 1/2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah.

E. BPKH masih menunggu berbagai peluang investasi di luar negeri yang mampu mengefisienkan

biaya haji dan kemaslahatan umat. Kerajaan Arab Saudi sejatinya mulai terbuka masuknya investasi dari negara Muslim khususnya Indonesia, dimana hal ini tetap harus koordinasi dahulu dengan Kemenag RI. Selama menunggu itu terjadi, instrumen inovatif domestik di pasar modal Indonesia seperti Green Sukuk atau Green/Blue KIK EBA Syariah dan DINFRA Syariah yang sedang menjadi trend global bagi kemaslahatan yang berkesinambungan patut dijajaki serius.

**Referensi**


Cochran, P. L. (2007). The evolution of corpor ate social responsibility. *Business Horizons, 50*(6), 449-454.

Hadiningdyah, D.I. (2021). Investasi SBSN untuk Pembangunan Keumatan dan Bangsa. Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Hariyanto, E. (2017). Memahami Project Based Sukuk (PBS). Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Hens, L., & Nath, B. (2005). *The world summit on sustainable development*. Dordrecht: Springer.

Nopijantoro, W. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi, 1*(2), 390-406.

Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *1*(1).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Presiden No 59 tahun 2107 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Penjelasan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Social Investment Forum. (2006). *2005 report on socially responsible investing trends in the United States*. Washington, DC: Social Investment Forum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Yanis, M. (2017). Kebijakan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan: Transformasi Pelayanan Berpihak dan Berkelanjutan. https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/paparan/Transformasi%20Pelayanan%20Berpihak%20dan%20Berkelanjutan.pdf
http://awsassets.wwf.or.id/downloads/sustainable_banking_pilot_project_ojk_wwf_id_english_231115_1.pdf

http.kehati.or.id.

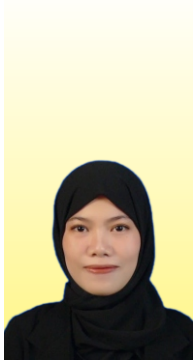

# Simulasi Minimalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Melalui Model *Activity Based Management* (ABM)

Mega Nuriyah[1]
Syaiful Rahman Soenaria[2]

## A. Latar Belakang

Setelah pandemi Covid-19 mereda, penyelenggaraan ibadah haji telah dilangsungkan kembali setelah dua tahun tutup. Di sisi lain, adanya isu mengenai Ongkos Naik Haji (ONH) atau yang saat ini dikenal sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang tidak bisa menutupi semua Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus mencari cara untuk menginvestasikan dana haji dalam mencapai nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Adanya jarak yang terlampau jauh antara Bipih dan BPIH, kemudian fenomena bahwa BPIH meledak dikarenakan Covid-19 menjadi isu utama penelitian ini. Terdapat dua komponen biaya yang meliputi BPIH yaitu direct cost dan indirect cost. Biaya langsung atau direct cost dikenal sebagai Bipih ditetapkan langsung dalam Keputusan Presiden berdasarkan instruksi Presiden dan usulan Menteri Agama yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Biaya ini harus dibayarkan oleh calon Jemaah haji melalui BPS-BPIH yang telah ditentukan. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost berasal dari nilai manfaat setoran awal yang dibayarkan Jemaah haji (Bipih) yang dananya dikelola BPKH, besarannya ditentukan atas usulan Menteri Agama dengan persetujuan DPR RI.(Umam et al., 2019).

BPKH berperan penting dalam mengatasi kekhawatiran berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan keterbukaan berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku khususnya dalam tata kelola keuangan sehingga bisa mencapai pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan maslahat untuk seluruh Jemaah Haji Republik Indonesia. ""(Mubarok & Fuhaidah, 2017). Adapun BPIH perlu dikritisi apakah sudah efisien dan optimal atau belum tetapi tetap memperhatikan tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji yaitu pelayananan terbaik kepada Jemaah haji sesuai dengan amanah Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dimana Jemaah bisa melaksanakan rukun haji dan wajib haji dengan baik. Maka dari itu, sebelum menaikkan harga atau Bipih apakah BPIH bisa ditekan terlebih dahulu dan kalaupun harganya harus dinaikkan diharapkan tidak terlampau tinggi dikarenakan daya beli masyarakat Indonesia. Sebagai upaya untuk menekan BPIH tersebut, maka melalui penelitian ini akan dilakukan simulasi minimalisasi BPIH dengan model *Activity Based Management* (ABM).

## B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Ongkos Naik Haji (ONH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)?
2. Apa yang dimaksud dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan bagaimana struktur biayanya?
3. Bagaimana pengelolaan pelaksanaan haji Jemaah Indonesia?, dan bagaimana Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) dapat disimulasikan dengan model *Activity Based Management* (ABM) dalam rangka penekanan biayanya?

## C. Metode Penelitian

### Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta proses pengelolaan pelaksanaan haji Jemaah Indonesia yang

*1) Mahasiswa S1 Akuntansi FEB UNPAD 2018-2022*
*2) Dosen Tetap Departemen Akuntansi FEB Unpad,*
*Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) Ikatan Akuntan Indonesia,*
*President IMA/Institute of Management Accountants Indonesia Chapter*

akan diminimalisasi melalui model *Activity Based Management* (ABM). Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

**Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan desain studi kasus tunggal holistik pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penelitian ini menerapkan desain studi kasus tunggal holistik yaitu dengan mendalami kasus tunggal dalam menentukan, memperbarui, atau menguraikan teori khusus. (Robert K. Yin, 2014). Model penelitian yang digunakan adalah *Cost Accounting* melalui pendekatan *Activity Based Costing* dan *Activity Based* Management kemudian menggunakan Sensitivity Analysis dalam menilai sensitivitas simulasi minimalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

## D. Hasil dan Analisis

**Pengertian dan Ruang Lingkup Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

Berikut merupakan pengertian dan ruang lingkup dari ONH, Bipih, dan BPIH serta struktur BPIH berdasarkan regulasi yang mengacu pada UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah:

1. Ongkos Naik Haji (ONH) merupakan istilah yang dibuat oleh masyarakat sedangkan BPIH dan Bipih merupakan istilah yang dibuat oleh Pemerintah yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. ONH akan disebut sebagai Bipih dimana keduanya merupakan harga yang dikenakan pada calon Jemaah haji. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sendiri merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh calon Jemaah Haji Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dalam bentuk setoran awal dan biaya pelunasan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) terkait.
2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang dianggap sah menurut Undang-Undang. Secara umum, struktur BPIH yang mengacu pada Keputusan Presiden dan data yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPIH terdiri dari direct cost dan indirect cost.
3. Struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari segi *direct cost* meliputi tiket pesawat, akomodasi di Mekah, akomodasi di Madinah, dan *living cost*. Sedangkan struktur biaya *indirect cost* meliputi pelayanan Jemaah di Arab Saudi, pelayanan Jemaah di Indonesia, operasional haji di Arab Saudi, operasional haji di Indonesia, dan dana cadangan (*safeguarding*). Adapun struktur BPIH mengacu pada UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terbagi menjadi 14 komponen yang meliputi biaya: Penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), pelindungan, pelayanan di asrama haji embarkasi dan debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup atau *living cost*, pembinaan Jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum, serta pengelolaan BPIH.

**Analisis Aktivitas Pelaksanaan Haji Jemaah Indonesia**

Secara keseluruhan, tahapan proses pelaksanaan ibadah haji terdiri dari sepuluh tahap dimulai dari tahap persiapan hingga tiba di kampung halaman. Analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan aktivitas yang bernilai tambah ataupun yang tidak bernilai tambah didasarkan pada rukun dan wajib haji. Adapun dalam analisis ini aktivitas bernilai tambah dikelompokkan menjadi aktivitas yang dapat diefisiensikan dan aktivitas yang sudah optimal. Sedangkan untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah dikelompokan menjadi aktivitas yang dapat dihilangkan atau direduksi dan aktivitas yang tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi pada objek dari aktivitas yang dapat disimulasikan antara lain aktivitas yang tidak bernilai tambah yang dapat dihilangkan atau direduksi serta aktivitas bernilai tambah tetapi dapat diefisiensikan.

Berikut merupakan hasil analisis aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah terhadap pelaksanaan ibadah haji Indonesia:

1) Awal Persiapan : Menerima bimbingan manasik haji (bernilai tambah dan sudah optimal), Pembinaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat haji (bernilai tambah dan sudah optimal), Pembentukan kelompok atau regu yang diatur sesuai dengan domisili Jemaah dan keluarga (tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan).
2) Keberangkatan Jemaah : Menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan bukti pembayaran BPIH berwarna biru, Menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama, Berangkat menggunakan bus yang telah disediakan berdasarkan regunya untuk menuju

bandara embarkasi, Menunjukkan paspor dan *boarding pass* kemudian menaiki pesawatnya, Penerbangan untuk gelombang I dengan jarak tempuh selama 9-10 jam akan tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Penerbangan untuk gelombang II dikarenakan waktu haji yang semakin dekat maka akan diterbangkan langsung ke Jeddah dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Seluruh aktivitas pada tahapan kedua tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan.

3) Tiba di Arab Saudi : Pemeriksaan identitas keimigrasian, Pemeriksaan badan yang tentunya dilakukan di ruang tertutup dengan memisahkan pria dan wanita dan dilakukan oleh petugas Arab Saudi, Menerima nasi box kemudian petugas Arab Saudi akan menerima paspor dari Jemaah yang akan diberangkatkan ke Madinah/Makkah menggunakan bus berdasarkan rombongannya sesuai dengan arahan petugas. Seluruh aktivitas pada tahapan ketiga tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan.
4) Di Pemondokan : Tinggal di pemondokan Madinah selama kurang lebih sembilan hari (tidak bernilai tambah dan dapat dihilangkan), Jemaah dianjurkan untuk berziarah tanpa dipungut biaya dan melakukan shalat arba'ain selama 40 waktu (bernilai tambah tetapi dapat diefisiensikan), Tinggal di pemondokan Makkah dengan waktu tinggal 28 hari (tidak bernilai tambah tetapi dapat direduksi), Jemaah melakukan umrah (tawaf, sa'I, tahallul) (bernilai tambah dan sudah optimal), Melaksanakan haji sampai delapan Zulhijah (bernilai tambah dan sudah optimal).
5) Di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) : Di Arafah Menempati tenda dengan fasilitas alas tidur hambal tanpa bantal (tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan), Jemaah akan mengenakan pakaian ihram dan melakukan wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijah (bernilai tambah dan sudah optimal), Pelayanan serta informasi dan penyuluhan mabit (bernilai tambah dan sudah optimal), Menempati tenda Mina pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijah untuk melempar jumrah atau tiga jamarat (bernilai tambah dan sudah optimal).
6) Persiapan Pulang Ke Indonesia : Pada tanggal 12 Zulhijah, di Masjidil Haram Makkah Jemaah akan melaksanakan tawaf perpisahan (wada) tanpa sa'i sebagai penutup dari proses ibadah haji (bernilai tambah dan sudah optimal), Pemulangan Jemaah haji menuju tanah air. (Gelombang I berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Gelombang II dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah) (tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan).
7) Tiba di Bandara Arab Saudi : Jemaah akan ditempatkan disuatu tempat atau ruangan untuk beristirahat serta menyiapkan paspornya untuk dilakukan pemeriksaan, Jemaah akan mendapatkan air Zamzam sebanyak lima liter per Jemaah dari Maskapai Garuda Airlines ataupun Saudi Airlines yang mengantarkan Jemaah menuju Indonesia pada saat tiba di asrama debarkasi. Seluruh aktivitas pada tahapan ketujuh tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan.
8) Tiba di Bandara Debarkasi (Tanah Air) : Jemaah diberangkatkan menggunakan bus ke asrama haji atau bagi Jemaah yang sudah dijemput oleh keluarganya maka bisa langsung pulang menuju rumahnya (tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan).
9) Tiba di Asrama Haji Debarkasi : Jemaah dapat mengambil barang bawaannya/kopernya untuk pulang menuju rumah masing-masing (tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan).
10) Tiba di Kampung Halaman : Jemaah haji disarankan untuk melakukan shalat dua rakaat dan sujud syukur kepada Allah Swt (bernilai tambah dan sudah optimal), Dalam kurun waktu 14 hari setelah tiba di kampung halaman, Jemaah harus segera melakukan verifikasi ke Puskesmas/ Dinas Kesehatan terdekat dengan memberikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) (tidak bernilai tambah tetapi tidak dapat dihilangkan), Jemaah diharapkan aktif berpartisipasi di daerahnya untuk tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dalam rangka untuk meningkatkan tali persaudaraan dan kepedulian sosialnya (bernilai tambah dan sudah optimal).

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penulis akan fokus pada interpretasi aktivitas bernilai tambah tetapi dapat diefisiensikan dan aktivitas tidak bernilai tambah yang dapat dihilangkan atau direduksi. Adapun yang termasuk ke dalam kategori tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Jemaah dianjurkan untuk berziarah tanpa dipungut biaya dan melakukan shalat arba'ain selama 40 waktu. Ketika berada di Madinah Jemaah dapat melakukan ziarah dan shalat arba'ain dengan waktu pemondokan selama 8 hari 12 jam. Adapun ziarah dan shalat arba'ain ini sifatnya sunnah atau dianjurkan sehingga jika tidak dikerjakan tidak apa-apa tetapi tidak mendapatkan keutamaannya. Kemudian, baik ziarah ataupun shalat arba'ain diketahui tidak termasuk rukun maupun wajib haji. Solusi untuk mengganti fadhilah yang hilang dari shalat arba'ain di Masjid Nabawi, Jemaah dapat melakukan shalat berjamaah selama 40 hari berturut-turut di masjid lain sesampainya di tanah

air. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yaitu "Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah empat puluh hari dengan berjamaah dan selalu mendapat takbir yang pertama maka ia dicatat sebagai orang yang selamat dari api neraka dan dari sifat munafik." (H.R. Tirmidzi).

b) Tinggal di pemondokan Madinah selama kurang lebih Sembilan hari (8 hari 12 jam). Aktivitas ini tidak bernilai tambah dan dapat dihilangkan dikarenakan Madinah ini tidak termasuk tempat untuk melaksanakan rukun ataupun wajib haji.

c) Tinggal di pemondokan Makkah dengan waktu tinggal 28 hari. Aktivitas ini tidak bernilai tambah dan dapat direduksi dikarenakan pada dasarnya dalam pelaksanaan ibadah haji mengacu pada jadwal pelaksanaan ibadah haji yang diterbitkan oleh Kemenag hanya membutuhkan waktu 7 hari yaitu 8-14 Zulhijah.

Mengacu pada pernyataan tersebut diharapkan dapat diupayakan efisiensi waktu agar waktu tunggu Jemaah haji selama di Makkah tidak terlampau lama.

### Identifikasi Cost Driver Pada Komponen Biaya Penyelenggaan Ibadah Haji (BPIH)

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 tahun 2022, struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terbagi menjadi tujuh komponen biaya utama. Berikut merupakan klasifikasi pemicu biaya atau *cost driver* berdasarkan struktur BPIH tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1 Identifikasi *Cost Driver***

| No. | *Cost Structure* | Biaya Aktivitas | | *Cost Driver* | Pengali | Biaya/unit | Total Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiket pesawat | Biaya penerbangan | | Frekuensi penerbangan | 2 kali | Rp14,750,000 | Rp29,500,000 |
| 2 | Akomodasi di Mekah | Biaya akomodasi Makkah (cadangan 1% & isolasi) | | Kebutuhan akomodasi | 1 paket | Rp2,692,669 | Rp2,692,669 |
| 3 | Akomodasi di Madinah | Biaya akomodasi Madinah (cadangan 1% & isolasi) | | Kebutuhan akomodasi | 1 paket | Rp769,334 | Rp769,334 |
| 4 | *Living cost* | Biaya hidup di Arab Saudi | | Kebutuhan masing-masing Jemaah | SAR 1,500 | Rp3,847 | Rp5,770,005 |
| 5 | Visa | Biaya dokumen perjalanan | | Kuantitas dokumen | 1 paket | Rp1,154,001 | Rp1,154,001 |
| **Bipih** | | | | | | | **Rp39,886,009** |
| 6 | Pelayanan Jemaah di Arab Saudi | Biaya pemondokan | Makkah | Frekuensi hari | 32 hari | Rp552,959 | Rp17,694,682 |
| | | | Madinah | Frekuensi hari | 9 hari | Rp587,083 | Rp5,283,747 |
| | | Biaya konsumsi | Kedatangan | Frekuensi makan | 1 kali | Rp71,163 | Rp71,163 |
| | | | Makkah | Frekuensi makan | 75 kali | Rp71,163 | Rp5,337,255 |
| | | | Madinah | Frekuensi makan | 27 kali | Rp71,163 | Rp1,921,412 |
| | | | ArMuzna | Frekuensi makan | 29 kali | Rp96,167 | Rp2,788,836 |
| | | Biaya tenda dan fasilitas ArMuzNa | ArMuzna | Frekuensi hari | 4 hari | Rp988,690 | Rp3,954,761 |
| | | Biaya lainnya | | Kebutuhan operasional | 1 paket | Rp1,908,993 | Rp1,908,993 |
| 7 | Pelayanan Jemaah di Dalam Negeri | Biaya akomodasi | | Kebutuhan akomodasi | 1 paket | Rp116,335 | Rp116,335 |
| | | Biaya konsumsi asrama Haji | | Frekuensi makan | 2 kali | Rp75,000 | Rp150,000 |
| | | Biaya pelindungan | | Kebutuhan pelindungan | 1 paket | Rp105,385 | Rp105,385 |
| | | Biaya keimigrasian | | Kebutuhan keimigrasian | 1 paket | Rp9,900 | Rp9,900 |
| | | Biaya premi asuransi | | Kebutuhan asuransi | 1 paket | Rp100,000 | Rp100,000 |
| | | Biaya dokumen perjalanan | | Kebutuhan dokumen | 1 paket | Rp160,847 | Rp160,847 |
| | | Biaya pelayanan embarkasi & debarkasi | | Kebutuhan pelayanan | 1 paket | Rp103,320 | Rp103,320 |
| | | Biaya Manasik | Bimbingan mansik | Frekuensi bimbingan | 6 kali | Rp100,000 | Rp600,000 |
| | | | Buku dan pengiriman | Kebutuhan pencetakan | 1 paket | Rp414,184 | Rp414,184 |
| | | Biaya pelayanan umum | | Kebutuhan pelayanan | 1 paket | Rp806,365 | Rp806,365 |
| | | Biaya pengelolaan BPIH | | Kebutuhan pengelolaan | 1 paket | Rp334,649 | Rp334,649 |
| ***Indirect Cost*** | | | | | | | **Rp41,861,835** |
| **BPIH** | | | | | | | **Rp81,747,844** |

Sumber : Olahan Penulis (2022)

### Analisa *Controllable Cost* dan *Uncontrollable Cost*

Penulis melakukan analisis *controllable cost* dan *uncontrollable cost* bertujuan untuk memberikan gambaran dan simulasi biaya bagi Pemerintah Indonesia sehingga dapat diketahui biaya mana yang bisa dan tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan analisa *cost driver* di atas, telah diklasifikasikan bahwa seluruh biaya aktivitas di Arab Saudi merupakan *uncontroallable cost*. Hal ini dikarenakan seluruh biaya diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan *lobby* terhadap Pemerintah Arab Saudi dengan baik.

Selain itu, untuk efisiensi biaya pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi salah satu upayanya dapat dilakukan dengan pembelian properti untuk kebutuhan jangka panjang sehingga bisa melakukan *pricing* yang lebih murah terhadap akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi. Sedangkan untuk biaya aktivitas di Indonesia berdasarkan *cost driver* terpilih yang telah diidentifikasi di atas seluruh biayanya dapat diklasifikasikan sebagai *controllable cost* dikarenakan Pemerintah Indonesia dapat langsung melakukan eksekusi terhadap biaya-biaya tersebut tanpa perlu adanya persetujuan pihak asing dan salah satu langkah pencapaiannya adalah dengan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya tersebut.

**Tabel 2 Simulasi Pengurangan Durasi/ Waktu Tinggal Jemaah di Arab Saudi**

| Waktu Haji | Pemondokan | | | Konsumsi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15 Hari :** | **Makkah** | **Madinah** | **ArMuzna** | **Makkah** | **Madinah** | **ArMuzna** | |
| **7 Hari (Rukun dan Wajib Haji)** | 3 hari | 0 hari | 4 Hari | (3 hari x 3 = 9 kali) | 0 kali | 13 kali (Nafar Awal : 35,353 org) | 16 kali (Nafar Tsani : 65,656 org) |
| **8 Hari Waktu Tunggu :** | | | | | | | |
| 2 Hari Kedatangan | 2 hari | | | (2 hari x 3 = 6 kali) | | | |
| 6 Hari Kepulangan | 6 hari | | | (6 hari x 3 = 18 kali) | | | |
| **Total** | 11 hari | 0 hari | 4 hari | 33 kali | 0 kali | 13 kali | 16 kali |
| **25 Hari :** | **Makkah** | **Madinah** | **ArMuzna** | **Makkah** | **Madinah** | **ArMuzna** | |
| **7 Hari (Rukun dan Wajib Haji)** | 3 hari | 0 hari | 4 Hari | (3 hari x 3 = 9 kali) | 0 kali | 13 kali (Nafar Awal : 35,353 org) | 16 kali (Nafar Tsani : 65,656 org) |
| **9 Hari (Shalat Arba'ain)** | 0 hari | 9 hari | 0 hari | 0 kali | (9 hari x 3 = 27 kali) | 0 kali | 0 kali |
| **9 Hari Waktu Tunggu :** | | | | | | | |
| 3 Hari Kedatangan | 3 hari | | | (3 hari x 3 = 9 kali) | | | |
| 6 Hari Kepulangan | 6 hari | | | (6 hari x 3 = 18 kali) | | | |
| **Total** | 12 hari | 9 hari | 4 hari | 36 kali | 27 kali | 13 kali | 16 kali |
| **30 Hari :** | **Makkah** | **Madinah** | **ArMuzna** | **Makkah** | **Madinah** | **ArMuzna** | |
| **7 Hari (Rukun dan Wajib Haji)** | 3 hari | 0 hari | 4 Hari | (3 hari x 3 = 9 kali) | 0 kali | 13 kali (Nafar Awal : 35,353 org) | 16 kali (Nafar Tsani : 65,656 org) |
| **9 Hari (Shalat Arba'ain)** | 0 hari | 9 hari | 0 hari | 0 kali | (9 hari x 3 = 27 kali) | 0 kali | 0 kali |
| **14 Hari Waktu Tunggu :** | | | | | | | |
| 4 Hari Kedatangan | 4 hari | | | (4 hari x 3 = 12 kali) | | | |
| 10 Hari Kepulangan | 10 hari | | | (10 hari x 3 = 30 kali) | | | |
| **Total** | 17 hari | 9 hari | 4 hari | 36 kali | 51 kali | 13 kali | 16 kali |

Sumber : Olahan Penulis (2022)

Keterangan harga biaya aktivitas di Arab Saudi:

**Tabel 3 Biaya Aktivitas di Arab Saudi**

| NO. | BIAYA AKTIVITAS | | COST DRIVER | Biaya Per Unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAR | Rupiah |
| **Biaya Aktivitas di Arab Saudi** | | | | | |
| 1 | Hotel atau Pemondokan | Makkah | Frekuensi Hari | SAR 143.75 | Rp552,958.81 |
| | | Madinah | | SAR 152.62 | Rp587,083.05 |
| 2 | Makan atau Konsumsi | Makkah | Frekuensi Makan | SAR 18.50 | Rp71,163.40 |
| | | Madinah | | SAR 18.50 | Rp71,163.40 |
| | | Kedatangan dari pesawat | | SAR 18.50 | Rp71,163.40 |
| | | Arafah, Muzdalifah, Mina | | SAR 25.00 | Rp96,166.75 |
| | | | | SAR 25.00 | Rp96,166.75 |
| 3 | Transportasi | Naqobah | Frekuensi Angkut | SAR 337.00 | Rp1,296,327.79 |
| | | Shalawat | Frekuensi Hari | SAR 4.87 | Rp18,720.46 |
| 4 | Tenda dan Fasilitas ArMuzNa | | Frekuensi Hari | SAR 257.03 | Rp988,690.36 |

Sumber : Olahan Penulis (2022)

**Analisis Sensitivitas Terhadap Upaya Minimalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

Simulasi ini dilakukan dengan simulasi waktu pelaksanaan haji selama 15 hari, 25 hari, dan 30 hari pada dua skenario yang berbeda mengacu pada komponen BPIH tahun 2019 dan 2022 sebagai berikut:

***Scenario Manager* Pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

*scenario manager* ini dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel dan diharapkan dapat membantu agar biaya haji minimal sebesar tahun 2019 karena pada dasarnya kompinen-komponen biaya yang ada tidak terlalu banyak mengalami perubahan biaya semenjak adanya *covid-19*. Hal ini disebabkan Pemerintah tidak memberangkatkan Jemaah haji ketika *covid-19* menyebar luas dan juga saat ini masyarakat sudah mulai 'berdamai' dengan *covid-19* yang perlahan sudah dianggap sebagai 'flu' biasa. Sebenarnya, di tahun ini terjadinya kenaikan biaya dikarenakan terdapat beberapa biaya yang dibebankan kepada Jemaah sementara di tahun 2019 disubsidi dari nilai manfaat. Jadi nilai manfaatnya dikurangi tetapi pembebanan kepada Jemaah lebih tinggi.

Oleh karena itu, sebelum menaikkan harga diharapkan dapat menekan biaya-biaya *indirect* terlebih dahulu. Dalam hal ini dispesialisasikan berdasarkan *cost driver* yang telah dipilih dan ditentukan sebelumnya yaitu akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. Sehingga dilakukannya analisis sensitivitas dan *scenario manager* ini bertujuan untuk mensimulasikan biaya-biaya tersebut agar dapat diminimalisasi. Adapun

*1.Scenario Summary* mengacu pada BPIH Tahun 2019

Tabel 4 *Scenario Summary* Mengacu Pada BPIH Tahun 2019

| Scenario Summary | Current Values: | 15 Hari (Skenario 1) | 25 Hari (Skenario 1) | 30 Hari (Skenario 1) |
|---|---|---|---|---|
| **Changing Cells:** | | | | |
| Tiket Pesawat (PP)* | 29,555,597 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
| Akomodasi di Makkah | - | 2,692,669 | 2,692,669 | 2,692,669 |
| Akomodasi di Madinah | - | - | 769,334 | 769,334 |
| *Living Cost* | 5,680,005 | 2,348,392 | 2,561,882 | 3,629,333 |
| Visa | - | 1,154,001 | 1,154,001 | 1,154,001 |
| Pelayanan Jemaah di Arab Saudi | 33,421,213.59 | 15,575,634.84 | 22,564,418.76 | 25,329,212.82 |
| Pelayanan Jemaah di Dalam Negeri | 1,161,064 | 1,161,064 | 1,161,064 | 1,161,064 |
| Operasional Haji di Arab Saudi | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 3,588 |
| Operasional Haji di Dalam Negeri | 79,823 | 79,823 | 79,823 | 79,823 |
| Dana Cadangan (Safeguarding) | 98,765 | 98,765 | 98,765 | 98,765 |
| **Result Cells:** | | | | |
| **BPIH** | 70,000,056 | 52,613,937 | 60,585,545 | 64,417,791 |

Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray.

Sumber : Olahan Penulis (2022)

dalam hal ini faktor lain dianggap tetap karena simulasi hanya dilakukan pada *cost driver* terpilih. Sehingga, berdasarkan analisis sensitivitas yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa semakin lama waktu tinggal Jemaah di Arab Saudi maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan.

*Scenario manager* dilakukan pada komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara umum yang meliputi tiket pesawat untuk perjalanan pulang dan pergi, akomodasi di Makkah, akomodasi di Madinah, *living cost*, visa, pelayanan Jemaah di Arab Saudi, pelayanan Jemaah di dalam negeri, operasional haji di Arab Saudi, operasioal haji di dalam negeri, dan dana cadangan (*safeguarding*). Dari komponen-komponen tersebut biaya dengan nominal yang sama dan menjadi patokan anggaran biaya tahun 2019 adalah pelayanan Jemaah di dalam negeri, operasional haji di Arab Saudi, operasioal haji di dalam negeri, dan dana cadangan (*safeguarding*). Sedangkan biaya lainnya disesuaikan dengan skenario yang telah dilakukan sebelumnya.

Sehingga, dengan skenario tersebut didapatkan hasil bahwa semakin lama waktu tinggal Jemaah di Arab Saudi maka akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dengan BPIH di setiap skenario yang semakin tinggi ketika waktu tinggal semakin lama dimana pada waktu 15 hari BPIH sebesar Rp 52,613,937, BPIH pada waktu 25 hari sebesar 60,585,545, dan BPIH pada waktu 30 hari sebesar Rp 64,417,791. Akan tetapi nominal tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan BPIH dengan waktu tinggal selama ± 40 hari di Arab Saudi di tahun 2019 yaitu sebesar Rp 70,000,056. Untuk skenario waktu 15 hari terjadi penurunan BPIH sebesar 24.84%, skenario waktu 25 hari dengan penurunan sebesar 13.45%, dan untuk skenario waktu 30 hari penurunannya sebesar 7.97%

2.*Scenario Summary* mengacu pada BPIH Tahun 2022

***Tabel 5 Scenario Summary Mengacu Pada BPIH Tahun 2022***

| Scenario Summary | Current Values: | 15 Hari (Skenario 2) | 25 Hari (Skenario 2) | 30 Hari (Skenario 2) |
|---|---|---|---|---|
| **Changing Cells:** | | | | |
| Tiket Pesawat (PP)* | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
| Akomodasi di Makkah | 2,692,669 | - | - | - |
| Akomodasi di Madinah | 769,334 | - | 769,334 | 769,334 |
| *Living Cost* | 5,770,005 | - | - | - |
| Visa | 1,154,001 | 1,154,001 | 1,154,001 | 1,154,001 |
| Pelayanan Jemaah di Arab Saudi | 38,960,849.63 | 20,424,362.37 | 27,626,636.48 | 31,458,881.47 |
| Pelayanan Jemaah di Dalam Negeri | 2,900,985.41 | 2,900,985.41 | 2,900,985.41 | 2,900,985.41 |
| Operasional Haji di Arab Saudi | - | - | - | - |
| Operasional Haji di Dalam Negeri | - | - | - | - |
| Dana Cadangan (Safeguarding) | - | - | - | - |
| **Result Cells:** | | | | |
| **BPIH** | 81,747,844.04 | 53,979,348.78 | 61,950,956.89 | 65,783,201.88 |

Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray.

Sumber : Olahan Penulis (2022)

*Scenario manager* ini dilakukan pada komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara umum yang mengacu pada komponen BPIH tahun 2022 meliputi: Tiket pesawat untuk perjalanan pulang dan pergi, akomodasi di Makkah, akomodasi di Madinah, *living cost*, visa, pelayanan Jemaah di Arab Saudi, dan pelayanan Jemaah di dalam negeri. Dari komponen-komponen tersebut biaya dengan nominal yang sama dan menjadi patokan anggaran biaya tahun 2022 adalah tiket pesawat, akomodasi di Madinah, visa, dan pelayanan Jemaah di dalam negeri. Sedangkan biaya lainnya disesuaikan dengan skenario yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga, dengan skenario ini juga didapatkan hasil bahwa semakin lama waktu tinggal Jemaah di Arab Saudi maka akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan.

Hal ini dapat dilihat dengan BPIH di setiap skenario yang semakin tinggi ketika waktu tinggal semakin lama dimana pada waktu 15 hari BPIH sebesar Rp 53,979,348.78, BPIH pada waktu 25 hari sebesar 61,950,956.89, dan BPIH pada waktu 30 hari sebesar Rp 65,783,201.88. Akan tetapi nominal tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan BPIH dengan waktu tinggal selama ± 40 hari di Arab Saudi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 81,747,844.04. Untuk skenario waktu 15 hari terjadi penurunan BPIH sebesar 33.97%, skenario waktu 25 hari dengan penurunan sebesar 24.22%, dan untuk skenario waktu 30 hari penurunannya sebesar 19.53%.

## E. Solusi Pengurangan Waktu Haji

1. Simulasi Pembukaan Bandara Tambahan Untuk Transit Haji Indonesia

   a. Simulasi Dibukanya Satu Bandara Tambahan (Bandara Regional Tha'if)

Pemerintah Arab Saudi menawarkan Bandara Taif secara khusus untuk penerbangan haji Indone-sia di tahun 2022, maka penulis mengasumsikan bahwa bandara ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat melakukan 7 kali penerbangan dan menampung 1.200 Jemaah Haji Indonesia per harinya sama seperti dua bandara yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, dengan dibukanya Bandara Taif ini dapat menambah jumlah penerbangan yang dapat dilakukan oleh Jemaah Haji Indonesia yaitu sejumlah 21 kali penerbangan dengan asumsi rata-rata 3.600 Jemaah per harinya.

Mengacu pada kapasitas Jemaah sebanyak 3.600 Jemaah per hari: Jika Indonesia dapat memberangkatkan 3.600 Jemaah per harinya, maka dengan asumsi total kuota haji Indonesia yang berangkat di tahun 2022 yaitu 101.009 Jemaah, waktu tunggu yang diperlukan menjadi sekitar 28 hari (101.009/3.600=28,05). Sehingga, dengan dibukanya satu bandara tambahan ini dapat mengurangi waktu tinggal Jemaah di Arab Saudi dimana sebelumnya membutuhkan waktu tunggu sekitar 42 hari (101.009/2.400=42,08).

Mengacu pada kapasitas penerbangan sebanyak 21 kali penerbangan per hari : Diketahui Maskapai Garuda Indonesia (Garuda *Airlines*) memiliki kapasitas 393 penumpang, sedangkan Maskapai Arab Saudi (Saudi *Airlines*) memiliki kapasitas 460 penumpang. Jika Indonesia dapat memaksimalkan kapasitas pesawat Garuda Indonesia dengan 21 kali penerbangan per harinya maka waktu tunggu Jemaah di Arab Saudi menjadi sekitar 12 hari. (21*393= 8.253 Jemaah per hari. 101.009/8.253= 12.23). Untuk Saudi *Airlines* dengan 21 kali penerbangan per harinya maka waktu tunggu Jemaah di Arab Saudi menjadi sekitar 10 hari. (21*460= 9.660 Jemaah per hari. 101.009/9.660 =10.45).

   b. Simulasi Dibukanya Dua Bandara Tambahan (Bandara Regional Tha'if dan Bandara Regional Yanbu)

Simulasi dibukanya Bandara Yanbu ini diasumsikan dapat menampung setidaknya 25% dari kapasitas bandara Jeddah dan Madinah. Sehingga, bandara ini diharapkan dapat melakukan 2 kali penerbangan dan menampung 300 Jemaah Haji Indonesia per harinya. Sehingga, setelah dibukanya dua bandara tambahan yaitu Bandara Tha'if dan Yanbu maka kapasitas penerbangan Jemaah Indonesia bertambah menjadi 23 kali penerbangan dengan total 3.900 Jemaah per hari.

Jika Indonesia dapat memberangkatkan 3.900 Jemaah per harinya, maka dengan asumsi total kuota haji Indonesia yang berangkat di tahun 2022 yaitu 101.009 Jemaah, waktu tunggu yang diperlukan menjadi sekitar 26 hari (101.009/3.900=25,89). Sehingga, dengan dibukanya dua bandara tambahan ini dapat mengurangi waktu tinggal Jemaah di Arab Saudi dimana sebelumnya membutuhkan waktu tunggu sekitar 42 hari (101.009/2.400=42,08).

Mengacu pada kapasitas penerbangan sebanyak 23 kali penerbangan per hari : Diketahui Maskapai Garuda Indonesia (Garuda *Airlines*) memiliki kapasitas 393 penumpang, sedangkan Maskapai Arab Saudi (Saudi *Airlines*) memiliki kapasitas 460 penumpang. Jika Indonesia dapat memaksimalkan kapasitas pesawat Garuda Indonesia dengan 23 kali penerbangan per harinya maka waktu tunggu Jemaah di Arab Saudi menjadi sekitar 11 hari. (23*393= 9.039 Jemaah per hari. 101.009/9.039=11.17). Untuk Saudi *Airlines* dengan 21 kali penerbangan per harinya maka waktu tunggu Jemaah di Arab Saudi menjadi sekitar 10 hari. (23*460= 10.580 Jemaah per hari. 101.009/10.580 =9.54).

2. Simulasi Penurunan *Unit Cost* Katering

Berikut merupakan biaya konsumsi haji Indonesia:

**Tabel 6 Biaya Konsumsi Haji Indonesia**

| No. | Biaya Konsumsi | *Cost Driver* | Frekuensi | *Unit Cost* | *Total Cost* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asrama Haji Indonesia | Frekuensi Makan | 2 kali | Rp75,000 | Rp150,000 |
| 2 | Kedatangan di Arab Saudi | Frekuensi Makan | 1 kali | Rp71,163 | Rp71,163 |
| 3 | Makkah | Frekuensi Makan | 75 kali | Rp71,163 | Rp5,337,255 |
| 4 | Madinah | Frekuensi Makan | 27 kali | Rp71,163 | Rp1,921,412 |
| 5 | ArMuzna | Frekuensi Makan | 29 kali | Rp96,167 | Rp2,788,836 |
| **Total Biaya Konsumsi** | | | | | **Rp10,268,665** |

Sumber : Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total biaya konsumsi Jemaah Haji Indonesia mencapai Rp 10 juta per Jemaah. Selanjutnya, penulis akan melakukan simulasi untuk menekan *unit cost* pada biaya konsumsi Jemaah Haji. Dalam hal ini, penulis mengupayakan bahwa *unit cost* untuk konsumsi haji adalah Rp 50 ribu. Berikut merupakan hasil simulasinya :

**Tabel 7 Simulasi Penurunan Unit Cost Katering**

| No. | Biaya Konsumsi | *Cost Driver* | Frekuensi | *Unit Cost* | *Total Cost* | *Unit Cost Baru* | *Total Cost Baru* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asrama Haji Indonesia | Frekuensi Makan | 2 kali | Rp75,000 | Rp150,000 | Rp50,000 | Rp100,000 |
| 2 | Kedatangan di Arab Saudi | Frekuensi Makan | 1 kali | Rp71,163 | Rp71,163 | Rp50,000 | Rp50,000 |
| 3 | Makkah | Frekuensi Makan | 75 kali | Rp71,163 | Rp5,337,255 | Rp50,000 | Rp3,750,000 |
| 4 | Madinah | Frekuensi Makan | 27 kali | Rp71,163 | Rp1,921,412 | Rp50,000 | Rp1,350,000 |
| 5 | ArMuzna | Frekuensi Makan | 29 kali | Rp96,167 | Rp2,788,836 | Rp50,000 | Rp1,450,000 |
| **Total Biaya Konsumsi** | | | | | **Rp10,268,665** | | **Rp6,700,000** |

Sumber : Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan tabel di atas, jika *unit cost* konsumsi Jemaah menjadi Rp 50 ribu maka total biaya konsumsi dapat dipangkas sebesar 34,75%. Hal ini dapat direalisasikan dengan melakukan *lobby* pada saat *Aanwijzing* atau melakukan monopoli oleh pemerintah Indonesia tanpa mengurangi kualitas dan cita rasa dari konsumsi untuk Jemaah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian properti di Arab Saudi untuk kebutuhan jangka panjang sehingga bisa melakukan *pricing* yang lebih murah terhadap kebutuhan konsumsi, akomodasi dan transportasi disana.

## F. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Ongkos Naik Haji (ONH) merupakan istilah yang dibuat oleh masyarakat sedangkan BPIH dan Bipih merupakan istilah yang dibuat oleh Pemerintah yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. ONH akan disebut sebagai Bipih dimana keduanya merupakan harga yang dikenakan pada calon Jemaah haji. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sendiri merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh calon Jemaah Haji Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dalam bentuk setoran awal dan biaya pelunasan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) terkait.
2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang dianggap sah menurut Undang-Undang. Secara umum, struktur BPIH yang mengacu pada Keputusan Presiden dan data yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPIH terdiri dari *direct cost* dan *indirect cost*. Struktur biaya *direct cost* meliput tiket pesawat, akomodasi di Mekah, akomodasi di Madinah, dan *living cost*. Sedangkan struktur biaya *indirect cost* meliputi pelayanan Jemaah di Arab Saudi, pelayanan Jemaah di Indonesia, operasional haji di Arab Saudi, operasional haji di Indonesia, dan dana cadangan (*safeguarding*). Adapun struktur BPIH mengacu pada UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terbagi menjadi 14 komponen yang meliputi biaya: Penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), pelindungan, pelayanan di asrama haji embarkasi dan debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup atau *living cost*, pembinaan Jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum, serta pengelolaan BPIH.
3. Penulis melakukan identifikasi dan perincian komponen biaya pada struktur BPIH berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang terbagi menjadi 14 komponen. Sedangkan untuk analisisnya, penulis mengacu pada struktur biaya BPIH berdasarkan Keputusan Presiden dan data yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mempermudah analisa penulis karena adanya keterbatasan pada *scenario manager* serta analisa yang dilakukan pun lebih sederhana sesuai dengan *cost driver* yang telah penulis tentukan yaitu akomodasi, konsumsi, dan transportasi Jemaah selama di Arab Saudi. Objek Biaya atau *cost object* dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini adalah Jemaah haji Reguler Indonesia. Solusi penurunan waktu haji dilakukan dengan upaya simulasi pembukaan bandara tambahan dan penekanan *unit cost* untuk katering.

### Saran

1. Saran untuk Pemerintah/ Kementerian Agama

   a. Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara BPKH dan Kemenag masih menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan adanya kejelasan dan ketentuan yang pasti terhadap tugas dan tanggung jawab diantara keduanya. Pemerintah memiliki wewenang dan berperan penting dalam pemisahan tugas tersebut supaya pengelolaan pelaksanaan haji bisa berjalan dengan lebih baik. Sehingga, akan terjalin harmonisasi antara pelayanan dan pengelolaan keuangan haji yang diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang lebih baik.

   b. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan *lobby* dan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi *uncontroallable cost*. Misalnya dengan dibukanya bandara tambahan dan penurunan *unit cost* pada biaya katering Jemaah Haji. Sedangkan untuk *controllable cost* Pemerintah dapat langsung melakukan eksekusi dengan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya tersebut.

2. Saran untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

   a. Melakukan pembelian properti di Arab Saudi untuk kebutuhan jangka panjang sehingga bisa melakukan *pricing* yang lebih murah terhadap akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi.

b. Realisasi dan optimalisasi Rencana Strategis (Renstra) BPKH dimana dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, BPKH diharapkan dapat beroperasi seperti Tabung Haji Malaysia dengan menggabungkan pelayanan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Adapun kebijakan terhadap kuota haji, pendaftaran, sistem informasi, pembinaan Jemaah haji, penyediaan petugas dan kebijakan umum tetap berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Agama dan *stakeholders* lainnya dengan penelitian lebih lanjut terkait *cost driver* lainnya seperti pelayanan Jemaah di dalam negeri dan faktor lain berupa ketersediaan bandara untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggali informasi lebih lanjut terkait transparansi dana haji yang dikreditkan ke dalam rekening virtual deposan haji oleh BPKH yang jumlahnya tidak diketahui oleh deposan walaupun dalam hal ini transaksinya sudah melalui akad wakalah. Sehingga, adanya transparansi tersebut bisa mencapai pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan maslahat untuk seluruh Jemaah Haji Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


Amir, Mohammad Faizal; Sartika, S. B. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN*. UMSIDA PRESS.

Antara; Ali Akhmad Noor Hidayat. (2021). *Biaya Haji 2021 Naik, ASITA Usulkan Pemerintah Berikan Subsidi - Bisnis Tempo.co*. Tempo.co. https://bisnis.tempo.co/read/1452030/biaya-haji-2021-naik-asita-usulkan-pemerintah-berikan-subsidi

Arif, M., Politeknik, B., & Banjarmasin, N. (2012). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA*. *May*. https://www.researchgate.net/publication/275973371

*Berapa Lama Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci | Indonesia Baik*. (n.d.). Diambil 12 Agustus 2022, dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/berapa-lama-jemaah-haji-indonesia-di-tanah-suci

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2 ed.). Sage.

Ekasari, dkk., K. (2017). Akuntansi Biaya. In *Akuntansi Biaya* (Nomor Oktober). https://books.google.co.id/books?id=d17MDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Emy Iryanie; Monika Handayani. (2019). *Akuntansi Biaya - Google Books*. POLIBAN PRESS. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Biaya/d17MDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22Emy+Iryanie%22&printsec=frontcover

Eramuslim. (2021). *Info Haji: Maktab dan Muassasah Apa Tugasnya??? - Eramuslim*. https://www.eramuslim.com/haji/info-haji-maktab-dan-muassasah-apa-tugasnya.htm

Fachri, B., Windarto, A. P., & Parinduri, I. (2019). Penerapan Backpropagation dan Analisis Sensitivitas pada Prediksi Indikator Terpenting Perusahaan Listrik. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, *5*(2), 202. https://doi.org/10.26418/jp.v5i2.31650

Faila Sufa Mila, 2007. (2007). Analisis sensitivitas pada keputusan pembangunan meeting Hall. *Meminilimalisir Resiko Investasi*, *5*, 97–105. http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/1597/1134

*Haji Berapa Hari? Ini Rangkaian Kegiatan Jemaah Selama di Tanah Suci*. (n.d.). Diambil 12 Agustus 2022, dari https://www.suara.com/news/2022/06/09/175328/haji-berapa-hari-ini-rangkaian-kegiatan-jemaah-selama-di-tanah-suci

Hansen; Mowen. (2009). *Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting)*. Salemba Empat.

Harahap, B. T. (2020). *AKUNTANSI BIAYA*. Batam Publisher. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Biaya/97XyDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22Baru+Harahap,+S.E.,+M.AK.,%3B+Tukino.+S.Kom.,+M.SI.%22&printsec=frontcover

Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Nomor April).

Hidayati, A. (2018). Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar: Perspektif Investasi Syariah. *Muslim Heritage*, *3*(1), 139–156. https://doi.org/10.21154/MUSLIMHERITAGE.V3I1.1300

Jusmani, J., & Oktariansyah, O. (2021). Activity Based Management Sebagai Instrumen Bagi Manajemen Dalam Efisiensi Biaya. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *18*(3), 377. https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6658

Kasri, D. R., Dr. Tika Arundina Aswin, M. B., Kenny Devita Indraswari, M., & Amalia, N. (2018). *STRATEGIC ASSETS ALLOCATION UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN INVESTASU DANA HAJI DI INDONESIA*.

Kusnandar, V. B. (2022, Mei 4). Keppres BPIH 2022 Terbit, Biaya Haji 2022 dari Embarkasi Makassar Termahal. *databoks.katadata.co.id*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/04/keppres-bpih-2022-terbit-biaya-haji-2022-dari-embarkasi-makassar-termahal#:~:text=Sebelumnya%2C pemerintah dan DPR telah,untuk musim haji 1443H%2F2022M.&text=Dengan demikian%2C total Biaya Penyelengga

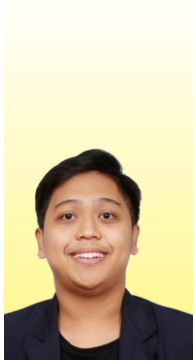

# Analisis Optimalisasi Kinerja Portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dengan Metode *Mean Absolute Deviation* (MAD) Dan *Single Index Model* (SIM)

**Vincentius Roni Pramudya**[1]
**Syaiful Rahman Soenaria**[2]

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam paling banyak di dunia. Per tahun 2021, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebanyak 86,88% atau 236,53 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Ibadah haji sebagai rukun islam kelima tentu menjadi kewajiban bagi umat Islam, bagi yang mampu, sebagai penyempurna pokok keagamaan sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankannya (Kasim, 2018). Minat yang besar untuk bisa menunaikan Ibadah Haji ditunjukkan dengan banyaknya pendaftar haji reguler yang saat ini terdaftar. Berdasarkan data dari situs Kementerian Agama RI per tanggal 23 Desember 2021, sebanyak 5.206.381 orang terdaftar sebagai jemaah tunggu.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2019 Pasal 4 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, calon jemaah haji reguler yang mendaftarkan diri diharuskan untuk membayar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) sebesar Rp 25 juta dari total Rp 35 juta yang harus dibayar oleh para calon jemaah. Calon jemaah yang telah mendaftar selanjutnya akan mendapatkan nomor porsi sebagai nomor urut pemberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama serta terdaftar sebagai *waiting list* jemaah yang akan berangkat. Per tahun 2018 dengan kuota haji sebesar 221.000, calon jemaah harus menunggu rata-rata 18-19 tahun untuk dapat berangkat (Sakinah & Yulianto, 2018). Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor meningkatnya antrian panjang calon jemaah haji yang akan berangkat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Arab Saudi menggelar ibadah haji dengan kuota terbatas dengan aturan dan protokol kesehatan yang ketat (Kasman, 2020).

Banyaknya pendaftar haji ini ditambah lagi dengan tidak adanya pemberangkatan membuat saldo biaya yang disetor oleh jemaah haji menjadi semakin menumpuk. Pada bulan Oktober 2021, saldo kelola dana haji mencapai Rp 156 triliun. Hal ini meningkat sebesar 7,75% dari akhir tahun 2020 dan kemungkinan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2021. Meningkatnya dana kelola tahun ke tahun yang berasal dari setoran awal calon jemaah menjadi tugas dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dapat mengalokasikan dana dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian pada kehalalan transaksi serta dapat melakukannya secara *thayyib* sehingga dapat menutupi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 mengatur mengenai batasan alokasi instrumen investasi menjadi tantangan bagi BPKH untuk dapat memanfaatkan dana haji melalui skema investasi yang baik. Selain itu, Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2014 BAB VI mengenai Pertanggungjawaban yang menjelaskan mengenai risiko tanggung renteng, menjadi tantangan bagi BPKH untuk dapat memperoleh *return* atas investasi dengan risiko seminimal mungkin.

Dalam menghasilkan *return* yang optimal dengan risiko seminimal mungkin. BPKH dihadapkan dengan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi dibandingkan dengan 4 tahun belakangan ini. Hal ini menjadi persoalan tersendiri untuk dapat mampu memenuhi BPIH jemaah haji yang kian membesar di tahun-tahun yang akan datang dikarenakan biaya kesehatan yang meningkat akibat protokol kesehatan

*1) Mahasiswa S1 Akuntansi FEB UNPAD 2018-2022*
*2) Dosen Tetap Departemen Akuntansi FEB Unpad,*
*Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) Ikatan Akuntan Indonesia,*
*President IMA/Institute of Management Accountants Indonesia Chapter*

yang ketat, serta peningkatan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan biaya hotel, katering, serta akomodasi mengalami peningkatan (Rafie, 2021).

Penelitian ini ingin melihat bagaimana deskripsi kuantitatif portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama ini, sebagai salah satu aspek pengelolaan keuangan haji yang transparan demi terciptanya rasa aman dan percaya bagi para jemaah yang menitipkan dananya sebagaimana tertuang dalam misi dan tujuan BPKH poin pertama dalam Renstra 2021 – 2025.

Besarnya dana kelola, fluktuasi nilai tukar rupiah, tambahan biaya protokol kesehatan dan pengenaan pajak yang menyebabkan BPIH meningkat, serta aturan pembatasan instrumen investasi, dan peraturan mengenai tanggung renteng dalam pengelolaan keuangan haji menjadi latar belakang fenomena yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis merencanakan untuk dapat mengetahui bagaimana portofolio optimal dengan menggunakan dua model teori, yaitu *Mean Absolute Deviation* (MAD) dan *Single Index Model* (SIM), serta dapat membandingkan kedua kinerja portofolio yang terbentuk dengan menggunakan indeks *sharpe* untuk mendapatkan hasil kinerja portofolio terbaik.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi kuantitatif portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji?
2. Bagaimana strategi optimalisasi kinerja portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji menggunakan metode *Mean Absolute Deviation*?
3. Bagaimana strategi optimalisasi kinerja portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji menggunakan metode *Single Index Model*?
4. Bagaimana perbedaan kinerja portofolio metode *Mean Absolute Deviation* dengan *Single Index Model* dengan menggunakan Indeks *Sharpe*?

## C. Metode Penelitian

### Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2018) merupakan atribut yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari serta dilakukan penarikan kesimpulan, sedangkan subjek penelitian berdasarkan Arikunto (2016) memiliki arti batasan penelitian yang ditentukan oleh benda, hal, atau orang. Subjek penelitian dapat dikatakan sebagai pemberi informasi bagi peneliti. Pada penelitian ini objek yang akan diteliti, ialah instrumen investasi yang dikelola oleh BPKH, sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah BPKH yang merupakan lembaga pengelola keuangan haji.

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif menurut Sugiyono (2018) adalah suatu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi terhadap data yang diteliti dengan mengetahui variabel yang berdiri sendiri dan bukan menghubungkan variabel independen dan dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instrumen investasi yang dikelola melalui Bidang Investasi, Surat Berharga, dan Emas (ISBE) BPKH.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Instrumen Investasi yang dikelola oleh BPKH. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen investasi yang dikelola oleh Bidang Investasi, Surat Berharga, dan Emas (ISBE) BPKH di tahun 2018 – 2021 dengan data historis per bulan. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*.

### Variabel Penelitian

Sugiyono (2019) mendefinisikan variabel penelitian adalah suatu hal yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga informasi dapat diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu *risk* dan *return* investasi dana haji Indonesia.

### Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan observasi untuk memperoleh kebenaran informasi atas objek yang diteliti. Pengambilan data dilakukan di BPKH sebagai tempat penelitian serta daftar pustaka/jurnal/bahan bacaan terkait dengan judul yang penulis angkat.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif serta dua metode optimalisasi investasi, yaitu *Mean Absolute Deviation* dan *Single Index Model*. Perhitungan dalam analisis data dibantu *software* Statistical Product and Service Solution (SPSS), winQSB, serta Microsoft Office Excel. Dalam memulai analisis data, penulis melakukan tahapan awal dengan membuat *prerequisite* berupa pengelompokan tipe instrumen investasi menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jenis investasinya.

## D. Perspektif Teori

### Mean Absolute Deviation

Metode *Mean Absolute Deviation* pertama kali dikenalkan oleh Hiroshi Konno dan Hiroshi Yamazaki pada tahun 1991. Metode ini dibentuk atas

penyempurnaan metode *Mean Variance* dari Markowitz dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan risiko dengan tingkat *return* tertentu dengan mengukur dari nilai mutlak dari simpangan antara *realized return* dengan *expected return* yang dibuat dalam model linear yang memudahkan perhitungan dibandingkan dengan metode kuadratik yang diterapkan oleh Markowitz.

Tahapan dalam pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan *Mean Absolute Deviation* (MAD) adalah

1. Menghitung *expected return* pada setiap masing-masing instrumen investasi lalu menentukan *return* minimal yang didapatkan dari nilai *expected return* paling kecil dan bernilai positif

$$E(R_i) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} R_{it}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $E(R_i)$ | = | *Expected Return* atas investasi i |
| $R_{it}$ | = | *Actual Return* atas investasi i periode ke-t |
| $n$ | = | Jumlah periode yang terjadi |

2. Menghitung nilai *Mean Absolute Deviation* dari masing-masing instrumen investasi

   Dalam melakukan perhitungan nilai *Mean Absolute Deviation* digunakan persamaan sebagai berikut (Konno & Yamazaki, 1991)

$$MAD = \sum_{t=1}^{n} \frac{|R_{it} - \mathrm{E(Ri)}|}{n}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| E(Ri) | = | *Expected Return* atas investasi i |
| $R_{it}$ | = | *Actual Return* atas investasi i periode ke-t |
| $n$ | = | Jumlah periode yang terjadi |

3. Membentuk model linear dalam persamaan dengan fungsi tujuan meminimalkan risiko dan fungsi kendala

   Model linear yang digunakan dalam persamaan dengan fungsi tujuan meminimalkan risiko adalah sebagai berikut (Konno & Yamazaki, 1991)

$$\sigma(\omega) = E\left[\left|\sum_{i=1}^{n} R_i\omega_i - E\left(\sum_{i=1}^{n} R_i\omega_i\right)\right|\right]$$

dapat ditulis ulang menjadi meminimalkan (Dumairy, 2013)

$$\sigma(\omega) = MAD_1\omega_1 + MAD_2\omega_2 + MAD_n\omega_n$$

dengan fungsi kendala sebagai berikut

$$\mathrm{E(Ri)}\omega_1 + \mathrm{E(Ri)}\omega_2 + \cdots + \mathrm{E(Ri)}\,\omega_n \geq R_M$$

$$\omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_n = 1$$
$$0 \leq \omega_i \leq u_i,$$
$$\text{dengan } i = 1,2,\ldots,n$$

Keterangan:
$\omega_i$ = Bobot instrumen investasi i
$u_i$ = Bobot maksimum

4. Menghitung *return* dan risiko portofolio

   *Return* portofolio dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (Hartono, 2017)

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i E(R_i)$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $E(R_p)$ | = | *Expected Return* Portofolio |
| $\omega_i$ | = | Bobot instrumen investasi i |
| $E(R_i)$ | = | *Expected Return* instrumen investasi i |

Sedangkan risiko portofolio dihitung dengan melakukan substitusi bobot yang telah ditemukan ke persamaan fungsi tujuan meminimalkan risiko.

### *Single Index Model*

*Single Index Model* adalah model yang dibuat oleh William Sharpe (1963). Model ini mengembangkan model sebelumnya milik Markowitz. Perhitungan menggunakan *Single Index Model* dinilai lebih sederhana jika dibandingkan dengan model Markowitz yang dinilai sangat kompleks (Shah, 2014). Model ini menambahkan parameter-parameter masukan yang diperlukan dalam perhitungan model Markowitz. *Single Index Model* dapat melakukan perhitungan *return* ekspektasian dan risiko portofolio. Dasar dari penerapan *Single Index Model*, yaitu adanya fluktuasi yang searah antara harga suatu sekuritas dengan indeks pasar serta adanya pengaruh *return* terhadap indeks pasar (*common response*).

Tahapan dalam pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan *Single Index Model* (SIM) adalah:

1. Menghitung *Expected Return* ($E(R_i)$) pada setiap masing-masing instrumen investasi.

$$E(R_i) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} R_{it}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $E(R_i)$ | = | *Expected Return* atas investasi i |
| $R_{it}$ | = | *Actual Return* atas investasi i periode ke-t |
| $n$ | = | Jumlah periode yang terjadi |

2. Menghitung *Actual Return* Pasar, *Expected Return* Pasar, dan Standar Deviasi Pasar

   Perhitungan *Actual Return* Pasar dan *Expected Return* Pasar dilakukan dengan perhitungan indeks harga instrumen investasi saat *closing price*.

   Selanjutnya dalam perhitungan *Expected Return* Pasar digunakan rumus berikut :

$$E(R_m) = \frac{\sum_{j=1}^{n} R_m}{n}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $E(R_m)$ | = | *Expected Return* Pasar |
| $R_m$ | = | *Actual Return* Pasar |
| $n$ | = | Jumlah periode yang terjadi |

Standar deviasi pasar yang merupakan alat ukur seberapa menyimpang *Actual Return* terhadap *Expected Return*. Standar deviasi ini digunakan dalam pengukuran risiko. Perhitungan standar deviasi pasar digunakan rumus berikut

$$\sigma_m = \sum_{j=1}^{m} \frac{[R_m - E(R_m)]^2}{n}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $\sigma_m$ | = | Standar Deviasi Pasar |
| $R_m$ | = | *Actual Return* Pasar |
| $E(R_m)$ | = | *Expected Return* Pasar |
| $n$ | = | Jumlah periode yang terjadi |

3. Menghitung Alpha ($\alpha$), Beta ($\beta$), dan *Variance Error* ($\sigma^2$) dari masing-masing instrumen investasi

Alpha ($\alpha$) dari instrumen investasi diartikan sebagai *return* yang khas, yaitu return yang tidak dipengaruhi oleh risiko pasar.

$$\alpha_i = E(R_{it}) - \beta_i E(R_{mt})$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $\alpha_i$ | = | Alpha instrumen investasi i |
| $E(R_{it})$ | = | *Expected return* investasi i pada tahun t |
| $\beta_i$ | = | Beta instrumen investasi i |
| $E(R_{mt})$ | = | *Expected return* pasar pada periode t |

Beta ($\beta$) digunakan untuk mengukur fluktuasi satu instrumen investasi (volatilitas) pada periode tertentu terhadap *return* pasar.

$$\beta_i = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $\beta_i$ | = | Beta instrumen investasi i |
| $\sigma_{im}$ | = | Kovarians *return* investasi i pada *return market* |
| $\sigma_m^2$ | = | *Variance return market* |

*Variance Error* ($\sigma^2_{e,i}$) digunakan untuk menggambarkan risiko unik yang tidak sistematis dan terjadi di dalam perusahaan.

$$\sigma_{e,i}^2 = \frac{\sum[e_{i,t} - E(e_i)]^2}{n-1}$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $\sigma_{e,i}^2$ | = | *Variance Error* |
| $e_{i,t}$ | = | Kesalahan residu instumen i pada periode ke t |
| $E(e_i)$ | = | Nilai ekspektasian dari kesalahan residu |

4. Melakukan perhitungan *Risk Free Rate of Return* ($R_f$)

   Penelitian ini menggunakan tingkat inflasi sebagai dasar dalam perhitungan *risk free rate of return* ($R_f$). Dimana menurut penelitian (Hanif, 2011), inflasi dapat digunakan sebagai variabel atau *proxy* sebagai pengganti *risk free* karena inflasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan investasi yang tidak tergantung pada risiko.

5. Melakukan perhitungan *Excess Return to Beta*

$$ERB = \frac{E(R_i) - R_f}{\beta_i}$$

Keterangan :

$ERB$ = *Excess Return to Beta*

$E(R_{it})$ = *Expected Return* atas investasi i

$R_f$ = *Risk Free Rate of Return*

$\beta_i$ = Beta instrumen investasi i

6. Melakukan perhitungan *Cut Off Point (C*)*
   Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan *Cut Off Point (C*)* dilakukan dengan 5 tahap menurut Jogiyanto (2012)

7. Melakukan perhitungan setiap bobot instrumen investasi
   Perhitungan *Expected Portofolio* dibuat dalam persamaan sebagai berikut.

$$E(R_P) = \sum w_1.\alpha_1 + \sum w_1.\beta_1.E(Rm)$$

dimana:

$$\sum w_1.\alpha_1 = \alpha_p$$

$$\sum w_1.\beta_1 = \beta_p$$

sehingga persamaan dapat diubah menjadi

$$E(R_P) = \alpha_p + \beta_p.E(Rm)$$

Perhitungan standar deviasi dibuat dalam persamaan sebagai berikut

$$\sigma_p^2 = \beta_p^2.\sigma_m^2 + (\sum_{i=1}^{n} w_i.\sigma_{ei})^2$$

### Indeks Sharpe

Indeks *Sharpe* dalam melakukan prediksi kinerja portofolio melakukan perhitungan dengan menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return portfolio*) dan risiko yang direfleksikan dengan faktor pembagi berupa standar deviasi.

Tahapan dalam melakukan perhitungan kinerja portofolio optimal dijelaskan sebagai berikut

1. Perhitungan indeks *sharpe* dirumuskan sebagai berikut

$$\frac{R}{VS} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

Keterangan :

$\frac{R}{VS}$ = *Reward to Variability Ratio Model Sharpe*

$E(R_P)$ = *Expected return portofolio*

$R_f$ = *Risk free rate*

2. Membandingkan nilai indeks *sharpe* dari masing-masing metode. Metode yang memiliki hasil indeks *sharpe* terbesar dinilai sebagai strategi optimalisasi portofolio terbaik

## E. Gambaran Umum Data

Dalam memulai analisis data, penulis melakukan tahapan awal dengan membuat *prerequisite* berupa pengelompokan tipe instrumen investasi menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jenis investasinya untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan.

Selama 4 tahun, BPKH melalui Bidang ISBE mengelola berbagai macam instrumen investasi

1) SDHI - DAU
2) SBSN - DAU
3) SDHI
4) SBSN
5) Sukuk Korporasi
6) RDPUS
7) RDST
8) SBSN - USD
9) Penyertaan Saham
10) Pembiayaan Yang Diterima (PYD)

**2018**

Pada tahun 2018, BPKH melalui Bidang ISBE mengelola 6 instrumen investasi yang memberikan imbal hasil, yaitu SDHI - DAU, SDHI, SBSN, Sukuk Korporasi, SBSN - USD, dan RDPUS dengan rincian imbal hasil sebagai berikut

**Tabel *Actual Return* Investasi BPKH 2018**

| No | Nama Instrumen | Imbal Hasil |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 6,50% |
| 2 | SDHI | 6,36% |
| 3 | SBSN | 6,40% |
| 4 | Sukuk Korporasi | 3,32% |
| 5 | SBSN - USD | 0,44% |
| 6 | RDPUS | 0,14% |

Sumber: Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH. Data Diolah.

**2019**

Pada tahun 2019, BPKH melalui Bidang ISBE mengelola 9 instrumen investasi yang memberikan imbal hasil, yaitu SDHI - DAU, SDHI, SBSN, Sukuk Korporasi, SBSN - USD, RDPUS dan 3 instrumen tambahan baru dari tahun sebelumnya, yaitu SBSN - DAU, RDST, dan Penyertaan Saham dengan rincian imbal hasil sebagai berikut

Tabel *Actual Return* Investasi BPKH 2019

| No | Nama Instrumen | Imbal Hasil |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 6,50% |
| 2 | SBSN - DAU | 6,20% |
| 3 | SDHI | 6,49% |
| 4 | SBSN | 6,77% |
| 5 | Sukuk Korporasi | 7,25% |
| 6 | RDPUS | 6,19% |
| 7 | RDST | 3,14% |
| 8 | SBSN - USD | 3,42% |
| 9 | Penyertaan Saham | 1,36% |

Sumber: Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH. Data Diolah.

**2020**

Pada tahun 2020, BPKH melalui Bidang ISBE mengelola 9 instrumen investasi yang memberikan imbal hasil, yaitu SDHI - DAU, SBSN - DAU, SDHI, SBSN, Sukuk Korporasi, RDPUS, RDST, SBSN - USD dan 1 instrumen tambahan baru dari tahun sebelumnya, yaitu PYD dengan rincian imbal hasil sebagai berikut

Tabel *Actual Return* Investasi BPKH 2020

| No | Nama Instrumen | Imbal Hasil |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 6,50% |
| 2 | SBSN - DAU | 7,46% |
| 3 | SDHI | 6,70% |
| 4 | SBSN | 6,57% |
| 5 | Sukuk Korporasi | 7,20% |
| 6 | RDPUS | 5,93% |
| 7 | RDST | 6,68% |
| 8 | SBSN - USD | 3,48% |
| 9 | PYD | 5,77% |

Sumber: Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH. Data Diolah.

**2021**

Pada tahun 2021, BPKH melalui Bidang ISBE mengelola 9 instrumen investasi yang memberikan imbal hasil, yaitu SDHI - DAU, SBSN - DAU, SDHI, SBSN, Sukuk Korporasi, RDPUS, RDST, SBSN - USD, dan PYD dengan rincian imbal hasil sebagai berikut

Tabel *Actual Return* Investasi BPKH 2021

| No | Nama Instrumen | Imbal Hasil |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 6,63% |
| 2 | SBSN - DAU | 6,92% |
| 3 | SDHI | 7,57% |
| 4 | SBSN | 6,36% |
| 5 | Sukuk Korporasi | 7,11% |
| 6 | RDPUS | 5,87% |
| 7 | RDST | 6,68% |
| 8 | SBSN - USD | 3,41% |
| 9 | PYD | 7,00% |

Sumber: Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH. Data Diolah.

## F. Hasil dan Analisis

### 1. Deskripsi kuantitatif portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji

Standar deviasi menggambarkan nilai penyimpangan yang terjadi antara *actual return* dan *average return* atau menggambarkan nilai risiko, *mean* diartikan sebagai tingkat *return* yang didapatkan, serta koefisien variasi yang digunakan untuk mengukur risiko relatif yang didapatkan dari hasil pembagian standar deviasi dan nilai yang diharapkan (*average return)* (Pappas & M. Hirschey, 1995). Berikut merupakan hasil statistik deskriptif yang menggambarkan *return*, risiko, serta koefisien variasi dari instrumen investasi BPKH berdasarkan sumber dananya.

I. Dana Abadi Umat

**Grafik Return dan Risiko Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

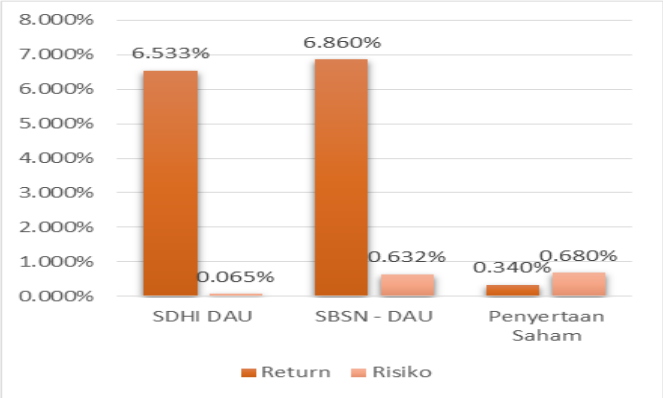


Sumber: Data Diolah

**Tabel Statistik Deskriptif Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumen Investasi | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | KoVar |
| SDHI - DAU | 0,0650 | 0,0663 | 0,065325 | 0,0006500 | 0,0100 |
| SBSN - DAU | 0,0620 | 0,0746 | 0,068600 | 0,0063214 | 0,0921 |
| Penyertaan Saham | 0,0000 | 0,0136 | 0,003400 | 0,0068000 | 2,0000 |

Sumber: Data Diolah

II. Non - Dana Abadi Umat

**Grafik Return dan Risiko Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

Sumber: Data Diolah

**Tabel Statistik Deskriptif Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumen Investasi | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | KoVar |
| SDHI | 0,0636 | 0,0757 | 0,067800 | 0,0054498 | 0,08038 |
| SBSN | 0,0636 | 0,0677 | 0,065250 | 0,0018699 | 0,028658 |
| Sukuk Korporasi | 0,0332 | 0,0725 | 0,062200 | 0,0193420 | 0,310965 |
| RDPUS | 0,0014 | 0,0619 | 0,045325 | 0,0293162 | 0,646801 |
| SBSN - USD | 0,0044 | 0,0348 | 0,026875 | 0,0149865 | 0,557638 |
| RDST | 0,0314 | 0,0668 | 0,055000 | 0,0204382 | 0,371604 |
| PYD | 0,0577 | 0,0700 | 0,063850 | 0,0086974 | 0,136216 |

Sumber: Data Diolah

1. **Optimalisasi Kinerja Portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji dengan Metode *Mean Absolute Deviation***

1. *Expected Return* dan *Return* Minimal

**Tabel *Expected Return* - MAD Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | E(Ri) |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 0,0653 |
| 2 | SBSN - DAU | 0,0686 |
| 3 | Penyertaan Saham | 0,0034 |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | E(Ri) |
|---|---|---|
| 1 | SDHI | 0,0678 |
| 2 | SBSN | 0,0652 |
| 3 | Sukuk Korporasi | 0,0622 |
| 4 | RDPUS | 0,0453 |
| 5 | RDST | 0,055 |
| 6 | SBSN - USD | 0,0269 |
| 7 | PYD | 0,0639 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data tersebut diperoleh *return* minimal untuk sumber dana - dana abadi umat sebesar 0,0034 dan untuk non - dana abadi umat sebesar 0,0269. *Return* minimal diperoleh dari nilai *expected return* paling kecil dan bernilai positif.

2. Nilai *Mean Absolute Deviation* pada masing-masing instrumen investasi

**Tabel Mean Absolute Deviation**

| No | Nama Instrumen | *MAD* |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 0,0004 |
| 2 | SBSN - DAU | 0,0044 |
| 3 | Penyertaan Saham | 0,0051 |

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | *MAD* |
|---|---|---|
| 1 | SDHI | 0,0039 |
| 2 | SBSN | 0,0014 |
| 3 | Sukuk Korporasi | 0,0145 |
| 4 | RDPUS | 0,022 |
| 5 | RDST | 0,0157 |
| 6 | SBSN - USD | 0,0112 |
| 7 | PYD | 0,035 |

Sumber: Data Diolah

3. Pembentukan model linear dalam persamaan dengan fungsi tujuan meminimalkan risiko dan fungsi kendala

**Sumber Dana: Dana Abadi Umat (DAU)**

Fungsi tujuan:

Minimalkan:

$$\sigma(\omega) = 0{,}0004\omega_1 + 0{,}0044\omega_2 + 0{,}0051\omega_3$$

Fungsi kendala:

$$0{,}0653\omega_1 + 0{,}0686\omega_2 + 0{,}0034\omega_3 \geq 0{,}0034$$

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 1$$

$$0 \leq \omega_i \leq 0{,}65$$

Masalah ini diselesaikan dengan menggunakan metode simpleks dengan bantuan *software WinQSB* dengan hasil bobot sebagai berikut

**Tabel Bobot Instrumen Investasi - MAD**

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 0,65 |
| 2 | SBSN - DAU | 0,35 |
| 3 | Penyertaan Saham | 0 |

Sumber: Data Diolah

Diketahui bahwa SDHI - DAU dan SBSN - DAU terpilih sebagai instrumen investasi yang masuk ke dalam portofolio optimal untuk sumber dana - Dana Abadi Umat dengan bobot sebesar 65% untuk SDHI - DAU dan 35% untuk SBSN - DAU, sedangkan Penyertaan Saham tidak masuk ke dalam portofolio optimal sehingga bobot instrumen tersebut bernilai 0.

**Sumber Dana: Non - Dana Abadi Umat**

Fungsi tujuan:

Minimalkan:

$$\sigma(\omega) = 0{,}0039\omega_1 + 0{,}0014\omega_2 + 0{,}0145\omega_3 + 0{,}022\omega_4 + 0{,}0157\omega_5 + 0{,}0112\omega_6 + 0{,}035\omega_7$$

Fungsi kendala:

$$0{,}0678\omega_1 + 0{,}0652\omega_2 + 0{,}0622\omega_3 + 0{,}0453\omega_4 + 0{,}055\omega_5 + 0{,}0269\omega_6 + 0{,}0639\omega_7 \geq 0{,}0269$$

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 + \omega_5 + \omega_6 + \omega_7 = 1$$

$$0 \leq \omega_i \leq 0{,}65$$

Masalah ini diselesaikan dengan menggunakan metode simpleks dengan bantuan *software WinQSB* dengan hasil bobot sebagai berikut

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | SDHI | 0,35 |
| 2 | SBSN | 0,65 |
| 3 | Sukuk Korporasi | 0 |
| 4 | RDPUS | 0 |
| 5 | RDST | 0 |
| 6 | SBSN - USD | 0 |
| 7 | PYD | 0 |

Sumber: Data Diolah

Diketahui bahwa SDHI dan SBSN terpilih sebagai instrumen investasi yang masuk ke dalam portofolio optimal untuk sumber dana - Non Dana Abadi Umat dengan bobot sebesar 35% untuk SDHI dan 65% untuk SBSN, sedangkan Sukuk Korporasi, RDPUS, RDST, SBSN - USD, dan PYD tidak masuk ke dalam portofolio optimal sehingga bobot instrumen tersebut bernilai 0.

4. Perhitungan *return* dan risiko portofolio

Hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut

**Sumber Dana: Dana Abadi Umat (DAU)**

$$E(R_p) = 0{,}0653(0{,}65) + 0{,}0686(0{,}35) = 0{,}066455$$

$$\sigma_p = 0{,}0004(0{,}65) + 0{,}0044(0{,}35) = 0{,}0018$$

**Sumber Dana: Non - Dana Abadi Umat**

$$E(R_p) = 0{,}0678(0{,}35) + 0{,}0652(0{,}65) = 0{,}06611$$

$$\sigma_p = 0{,}0039(0{,}35) + + 0{,}0014(0{,}65) = 0{,}002275$$

Portofolio yang dibentuk menggunakan metode MAD dengan sumber dana berasal dari Dana Abadi Umat memiliki nilai *Expected Return* sebesar 0,0664 atau 6,64% dengan tingkat risiko sebesar 0,0018 atau 0,18%.

Portofolio yang dibentuk menggunakan metode MAD dengan sumber dana berasal dari Non Dana Abadi Umat memiliki nilai *Expected Return* sebesar

0,06611 atau 6,61% dengan tingkat risiko sebesar 0,002275 atau 0,23%.

### 3. Optimalisasi Kinerja Portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji dengan Metode *Single Index Model*

1. *Expected Return* ($E(R_i)$) pada setiap masing-masing instrumen investasi.

**Tabel *Expected Return* - SIM**

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | E(Ri) |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 0,0653 |
| 2 | SBSN - DAU | 0,0686 |
| 3 | Penyertaan Saham | 0,0034 |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | E(Ri) |
|---|---|---|
| 1 | SDHI | 0,0678 |
| 2 | SBSN | 0,0652 |
| 3 | Sukuk Korporasi | 0,0622 |
| 4 | RDPUS | 0,0453 |
| 5 | RDST | 0,055 |
| 6 | SBSN - USD | 0,0269 |
| 7 | PYD | 0,0639 |

Sumber: Data Diolah

2. *Expected Return* Pasar, dan Standar Deviasi Pasar

Variabel pasar yang menjadi acuan penelitian ini adalah Infovesta Syariah Bond Index (ISBI) yang diperoleh dari *website* www.infovesta.com. Perhitungan *expected return* pasar diperoleh dari nilai rata-rata *actual return* Infovesta Syariah Bond Index (ISBI)

**Tabel *Expected Return dan Standar Deviasi* ISB**

| ISBI | |
|---|---|
| $E(R_m)$ | $\sigma_m$ |
| 0,0634 | 0,0114 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, nilai *expected return* pasar dengan acuan ISBI memiliki nilai 0,0634 atau sebesar 6,34% dan memiliki standar deviasi senilai 0,0114 atau sebesar 1,14%.

Jakarta Islamic Index (JII) digunakan sebagai variabel pasar untuk instrumen investasi Penyertaan Saham. JII diperoleh dari *website* https://finance.yahoo.com Berikut perhitungan *Expected Return* dan standar deviasi JII dibantu oleh *software* SPSS.

**Tabel *Expected Return* dan Standar Deviasi JII**

| JII | |
|---|---|
| $E(R_m)$ | $\sigma_m$ |
| -0,0684 | 0,0696 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, nilai *expected return* pasar dengan acuan JII memiliki nilai -0,0684 atau sebesar -6,84% dan memiliki standar deviasi senilai 0,0696 atau sebesar 6,96%.

3. Alpha ($\alpha$),Beta ($\beta$), dan *Variance Error* ( $\sigma^2_{e,i}$ ) dari masing-masing instrumen investasi

Tabel Perhitungan Alpha ( $\alpha$ ), Beta ( $\beta$ ), dan *Variance Error* ($\sigma^2_{e,i}$ )

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | $\alpha$ | $\beta$ | $\sigma^2_{e,i}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 0,0650 | 0,0055 | 0,00000042 |
| 2 | SBSN - DAU | 0,0117 | 0,8272 | 0,00002836 |
| 3 | Penyertaan Saham | 0,0122 | 1,0127 | 0,00000183 |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| Nama Instrumen | $\alpha$ | $\beta$ | $\sigma^2_{e,i}$ |
|---|---|---|---|
| SDHI | 0,0581 | 0,1537 | 0,00002664 |
| SBSN | 0,0597 | 0,0873 | 0,00000251 |
| Sukuk Korporasi | -0,0447 | 1,6825 | 0,00003158 |
| RDPUS | -0,0740 | 1,9325 | 0,00004719 |
| RDST | 0,0115 | 0,6319 | 0,00041095 |
| SBSN - USD | -0,0534 | 1,2664 | 0,00001718 |
| PYD | 0,1679 | -1,5061 | 0,00000001 |

Sumber: Data Diolah

4. *Risk Free Rate of Return* ($R_f$)

Penelitian ini menggunakan tingkat inflasi sebagai dasar dalam perhitungan *risk free rate of return* ($R_f$).

Tingkat inflasi didapatkan dari *website* Bank Indonesia yang kemudian diperoleh *risk free rate of return* selama periode penelitian sebesar 2,43%.

5. *Excess Return to Beta* (ERB)

**Tabel Perhitungan ERB**

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | ERB |
|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 7,403 |
| 2 | SBSN - DAU | 0,053 |
| 3 | Penyertaan Saham | -0,021 |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | ERB |
|---|---|---|
| 1 | SBSN | 0,468 |
| 2 | SDHI | 0,283 |
| 3 | RDST | 0,049 |
| 4 | Sukuk Korporasi | 0,022 |
| 5 | RDPUS | 0,011 |
| 6 | SBSN - USD | 0,002 |
| 7 | PYD | -0,026 |

Sumber: Data Diolah

6. *Cut Off Point* ***(C*)***

Perhitungan $C^*$ diawali dengan menghitung terlebih dahulu nilai $A_i$ dan $B_i$ untuk mengetahui nilai *Cut Off Rate* ($C_i$)Berikut merupakan hasil perhitungan $A_i$ , $B_i$ , $C_i$

**Tabel Perhitungan $A_i$ , $B_i$ , $C_i$**

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | ERB | Ai | Bi | Ci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDHI - DAU | 7,403 | 541,30 | 73,12 | 0,0693* |
| 2 | SBSN - DAU | 0,053 | 1290,65 | 24125,94 | 0,0452 |
| 3 | Penyertaan Saham | -0,021 | -11605,1 | 561029,20 | -0,0167 |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| No | Nama Instrumen | ERB | Ai | Bi | Ci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBSN | 0,468 | 1421,73 | 3039,95 | 0,1320 |
| 2 | SDHI | 0,283 | 250,66 | 886,67 | **0,1434*** |
| 3 | RDST | 0,049 | 47,13 | 971,62 | 0,0810 |
| 4 | Sukuk Korporasi | 0,022 | 2016,42 | 89628,01 | 0,0365 |
| 5 | RDPUS | 0,011 | 858,10 | 79143 | 0,0253 |
| 6 | SBSN - USD | 0,002 | 188,15 | 93367,1 | 0,0174 |
| 7 | PYD | -0,026 | -5949252 | 226821786 | -0,0262 |

Sumber: Data Diolah

Sekuritas pembentuk portofolio optimal ialah sekuritas yang memiliki ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB pada titik C*. Sehingga untuk sekuritas dengan nilai ERB lebih kecil dari nilai ERB pada titik C* tidak akan dimasukkan sebagai pembentuk portofolio optimal. Dari 3 instrumen investasi yang dikelola dengan sumber dana – Dana Abadi Umat, terdapat 1 instrumen yang layak untuk masuk ke dalam portofolio. Sedangkan dari 7 instrumen investasi yang dikelola dengan sumber dana – Non Dana Abadi Umat, terdapat 2 instrumen yang layak untuk masuk ke dalam portofolio.

1. Bobot instrumen investasi

**Tabel Bobot Masing-Masing Instrumen Investasi**

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Dana Abadi Umat**

| Nama Instrumen | Wi | Bobot (%) |
|---|---|---|
| SDHI - DAU | 1 | 100% |
| **Jumlah** | **1** | **100%** |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat**

| Nama Instrumen | Wi | Bobot (%) |
|---|---|---|
| SBSN | 0,9335 | 93,35% |
| SDHI | 0,0665 | 6,65% |
| **Jumlah** | **1** | **100%** |

Sumber: Data Diolah

8. *Expected Return* dan Standar Deviasi Portofolio

**Tabel *Expected Return Portofolio* dan Standar Deviasi *Portofolio* - SIM**

**Instrumen Investasi Sumber Dana – Dana Abadi Umat**

| | |
|---|---|
| Alpha Portofolio | 0,064974447 |
| Beta Portofolio | 0,005532150 |
| *Expected Return* Portofolio | 6,5325% |
| Standar Deviasi Portofolio | 0,0000004% |

Sumber: Data Diolah

**Instrumen Investasi Sumber Dana – Non Dana Abadi Umat**

| | |
|---|---|
| Alpha Portofolio | 0,059604982 |
| Beta Portofolio | 0,091759748 |
| *Expected Return* Portofolio | 6,5419% |
| Standar Deviasi Portofolio | 0,0001% |

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat nilai *Expected Return* Portofolio untuk sumber dana – dana abadi umat adalah 6,533% dengan risiko sebesar 0,0000004%. Sedangkan nilai *Expected Return* Portofolio untuk sumber dana – non dana abadi umat adalah 6,542% dengan risiko sebesar 0,0001%. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai *return* yang didapatkan untuk masing-masing sumber dana menggunakan metode SIM memiliki nilai di atas *return* pasar dan memiliki risiko dibawah dari risiko pasar.

4. **Perhitungan Kinerja Portofolio menggunakan Indeks *Sharpe***

**Tabel Indeks *Sharpe* untuk Metode *Mean Absolute Deviation***

| | |
|---|---|
| Sumber Dana - Dana Abadi Umat | 23,36 |
| Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat | 18,36 |

Sumber: Data Diolah

**Tabel Indeks Sharpe untuk Metode Single Index Model**

| | |
|---|---|
| Sumber Dana - Dana Abadi Umat | 10352606,56 |
| Sumber Dana - Non Dana Abadi Umat | 37717,75 |

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat bahwa metode *Single Index Model* memiliki nilai indeks *sharpe* lebih besar daripada metode *Mean Absolute Deviation*. Hal ini dapat dikatakan bahwa metode *Single Index Model* sebagai pembentuk portofolio optimal memiliki kinerja yang lebih baik daripada metode *Mean Absolute Deviation*, meskipun keduanya memiliki nilai positif yang menandakan bahwa kinerja portofolio keduanya memiliki kinerja yang optimal karena memiliki *excess return* yang tinggi untuk risiko portofolio yang ada.

Selanjutnya, dilakukan komparasi hasil masing-masing metode dengan proyeksi imbal hasil BPKH

**Tabel Perbandingan Hasil MAD dengan Proyeksi Imbal Hasil BPKH untuk 5 Tahun**

| Sumber Dana | *Expected Return* | Proyeksi Imbal Hasil BPKH (5 Tahun) |
|---|---|---|
| Dana Abadi Umat | 6,64% | 6,13% |
| Non Dana Abadi Umat | 6,61% | |

Sumber: Data Diolah

**Tabel Perbandingan Hasil SIM dengan Proyeksi Imbal Hasil BPKH untuk 5 Tahun**

| Sumber Dana | *Expected Return* | Proyeksi Imbal Hasil BPKH (5 Tahun) |
|---|---|---|
| Dana Abadi Umat | 6,533% | 6,13% |
| Non Dana Abadi Umat | 6,542% | |

Sumber: Data Diolah

Dalam penelitian ini, portofolio optimal yang terbentuk sebagian besar hanya terfokus pada satu atau dua instrumen investasi saja, yaitu untuk instrumen investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

***Disclaimer:***
*Penelitian ini tidak bermaksud untuk memaksa investor dalam perumusan strategi untuk melakukan pengelolaan keuangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran hasil dari pengaplikasian ilmu serta metode yang digunakan. Semua data dan hasil penelitian diolah dengan usaha terbaik dengan sumber yang terpercaya.*

## G. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Deskripsi kuantitatif portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama rentang waktu 2018 - 2021 untuk masing-masing instrumen investasi yang dikelompokkan berdasarkan sumber dananya, menunjukkan bahwa SDHI – DAU memiliki *return* 6,53% dengan tingkat risiko 0,065% dan koefisien variasi sebesar 0,01, SBSN – DAU memiliki *return* 6,86% dengan tingkat risiko 0,63% dan koefisien variasi sebesar 0,09, Penyertaan Saham memiliki *return* 0,34% dengan tingkat risiko 0,68% dan koefisien variasi sebesar 2, SDHI memiliki *return* 6,78% dengan tingkat risiko 0,54% dan koefisien variasi sebesar 0,08, SBSN memiliki *return* 6,52% dengan tingkat risiko 0,18% dan koefisien variasi sebesar 0,03, Sukuk Korporasi memiliki *return* 6,22% dengan tingkat risiko 1,93% dan koefisien variasi sebesar 0,31, RDPUS memiliki *return* 4,53% dengan tingkat risiko 2,93% dan koefisien variasi sebesar 0,65, RDST memiliki *return* 5,5% dengan tingkat risiko 2,04% dan koefisien variasi sebesar 0,37, SBSN – USD memiliki *return* 2,69% dengan tingkat risiko 1,49% dan koefisien variasi sebesar 0,56, serta PYD memiliki *return* 6,38% dengan tingkat risiko 0,87% dan koefisien variasi sebesar 0,14.
2. Optimalisasi Portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan metode *Mean Absolute Deviation* untuk sumber dana – Dana Abadi Umat menghasilkan 2 instrumen investasi yang layak untuk masuk ke dalam portofolio optimal, yaitu instrumen SDHI – DAU dan SBSN DAU yang menghasilkan *expected return* portofolio sebesar 6,64% dengan standar deviasi portofolio atau tingkat risiko sebesar 0,18%, sedangkan untuk instrumen investasi dengan sumber dana – Non Dana Abadi Umat menghasilkan 2 instrumen investasi yang layak untuk masuk ke dalam portofolio optimal, yaitu instrumen SBSN dan SDHI yang menghasilkan *expected return* portofolio sebesar 6,61% dengan standar deviasi portofolio atau tingkat risiko sebesar 0,23%.
3. Optimalisasi Portofolio Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan metode *Single Index Model* untuk sumber dana – Dana Abadi Umat menghasilkan 1 instrumen investasi yang layak untuk masuk ke dalam portofolio optimal, yaitu instrumen SDHI – DAU yang menghasilkan *expected return* portofolio sebesar 6,53% dengan standar deviasi portofolio atau tingkat risiko sebesar 0,0000004%, sedangkan untuk instrumen investasi dengan sumber dana – Non Dana Abadi Umat menghasilkan 2 instrumen investasi yang layak untuk masuk ke dalam portofolio optimal, yaitu instrumen SBSN dan SDHI yang menghasilkan *expected return* portofolio sebesar 6,54% dengan standar deviasi portofolio atau tingkat risiko sebesar 0,0001%.
4. Indeks *Sharpe* sebagai alat untuk mengukur kinerja portofolio optimal menghasilkan metode *Single Index Model* sebagai pembentuk portofolio yang menghasilkan kinerja lebih baik dengan nilai sebesar 10352606,56 untuk sumber dana – Dana Abadi Umat dan sebesar 37717,75 untuk sumber dana – Non Dana Abadi Umat. Sedangkan Indeks *Sharpe* untuk metode *Mean Absolute Deviation* sebagai pembentuk portofolio menghasilkan kinerja dengan nilai sebesar 23,36 untuk sumber dana – Dana Abadi Umat dan sebesar 18,36 untuk sumber dana – Non Dana Abadi Umat. Kedua metode memiliki nilai yang positif yang menandakan keduanya memiliki kinerja yang optimal dalam menghasilkan *return*.

### Saran

- Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

  Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan metode selain *Single Index Model* atau metode *Mean Absolute Deviation* sehingga dapat memberikan opsi terbaik dalam penentuan portofolio optimal serta menggunakan rentang data yang lebih panjang sejak pengelolaan keuangan haji dikelola oleh Kementerian Agama. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan acuan lainnya untuk indeks pasar, seperti *Indonesian Sukuk Index*, sehingga dapat diketahui indeks mana yang paling sesuai dalam pembentukan portofolio optimal untuk aset yang dikelola oleh BPKH. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan indeks lainnya untuk mengukur kinerja portofolio, seperti indeks *treynor* dan *janshen*. Oleh karena keterbatasan yang ada, yaitu hanya menggunakan data historis, untuk peneliti selanjutnya disarankan juga untuk dapat melakukan simulasi untuk aset yang belum pernah dikelola untuk dapat memetakan tingkat imbal hasil dan risiko agar dihasilkan hasil yang jauh lebih baik.
- Saran Untuk BPKH

  Untuk Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi disarankan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga dapat bermanfaat luas bagi para *stakeholders*,

khususnya Jemaah Haji Indonesia dalam penutupan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta melakukan antisipasi untuk setiap kemungkinan kenaikan BPIH.

## DAFTAR PUSTAKA


Adistyaningrum, W., Hilma Dwiyanti, Y., & Ade Chandra, Y. (n.d.). *Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal 434 SHARIA COMPLIANT ASSET PRICING MODEL FOR PORTOFOLIO EFFICIENCY*.

BPKH. (2020). *Investasi Surat Berharga BPKH*.

Effendi, K. (2016). OPTIMALISASI SHARI'A COMPLIANT ASSET PRICING MODEL TERHADAP RATE OF RETURN PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX. *Jurnal Manajemen*.

Elton, E. J., & Gruber, M. J. (1995). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. John Wiley & Sons.

Hanif, M. (2011). Risk and Return Under Sharia Framework: An Attempt to Develop Sharia Compliant Asset Pricing Model-SCAPM. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*.

Hartono, J. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.

Hartono, J. (2014). *Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel*. Salemba Empat.

Hartono, J. (2017a). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (11th ed.). BPFE.

Hartono, J. (2017b). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi Kesebelas)*. BPFE.

Jones, C. P. (2013). *Investments Analysis and Management* (Twelfth). Wiley.

Kasim, D. (2018). FIQH HAJI (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis). *Jurnal Al-'Adl*, *11*, 150.

Kasman, S. (2020). POTRET PELAKSANAAN IBADAH HAJI 2020 DI TENGAH PANDEMI VIRUS CORONA. In *Umrah dan Keislaman* (Vol. 1, Issue 1). https://video.kompas.com/view/1302545/digelar

Konno, H., & Yamazaki, H. (1991). Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and Its Applications to Tokyo Stock Market. *Jurnal Management Science*, *37*(5).

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. In *The Journal of Finance* (Vol. 7, Issue 1).

Muheramtohadi, S. (2019). The use of Hajj fund for investment purpose: a maqashid sharia approach. *Singgih Muheramtohadi Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 120. https://doi.org/10.21580/jiemb.2019.1.1.3740

Niranjan Mandal, by, Swarup Kumar Dutta, by, Rajveer Rawlin, by, Shanmugam, R., Abhishek Pinyani, by, Saluja, P., Kumar Daga, V., Rao, N. v, & Venkat Krishnan, by R. (2013). *Sharpe's Single Index Model and Its Application to Construct Optimal Portfolio: An Empirical Study The Mediating or Moderating Role of Organizational Context in Facilitating Ambidexterity Non-linear Relationships of Key Determinants in Influencing the Profitability of a Large Public Sector Bank in India Comparative Analysis of Banking Models* (Vol. 7, Issue 1). www.riskcontrol.com

Pappas, J. M., & M. Hirschey. (1995). *Ekonomi Manajerial*. Binarupa Aksara.

Rafie, B. (2021, April). *Biaya haji 2021 diprediksi lebih mahal Rp 9,1 juta, ini penyebabnya*. Kontan.Co.Id.

Reilly, F. K. and B. K. C. (2000). *Investment analysis and portfolio management (Sixth Edition)*. Harcourt, Inc.

Sakinah, K., & Yulianto, A. (2018, January). *Kuota Haji, Waiting List, dan Lobby Menag*. Ihram.Co.Id.

Samsul, M. (2006). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Erlangga.

Saptoyo, R. (2021, June). *Keputusan Arab Saudi: Kuota Haji 2021 untuk 60.000 Orang, Siapa Saja?* Kompas.Com.

Sayyidah, S. U., Harto, P. P., Baehaqi, A., Suprapto, E., Ekonomi, S. T., & Sebi, I. (2020). FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF HAJJ FUND INVESTMENT IN MALAYSIA. In *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance* (Vol. 3, Issue 1).

Shah, T. (2014). Constructing Optimal Portfolio: Sharpe's Single Index Model. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2459417

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Risiko* (Pertama). BPFE.

Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi*. Kanisius.

# Pandangan Thomas Piketty dan Ekonomi Islam Tentang Redistribusi Kekayaan

Syaiful Rahman Soenaria[1]
Naqiya Syahidati[2]

Ketimpangan merupakan masalah universal yang telah ada sejak berabad-abad, baik di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu bentuk ketimpangan yang tidak adil terjadi pada ketimpangan kekayaan yang dimiliki individu.

Pada 2012, nilai pendapatan perkapita di negara-negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang adalah sekitar 2500- 3000 euro, sedangkan di negara seperti Afrika Sub-Sahara dan India adalah 150 – 250 euro per bulan (Piketty, *The Economics of Inequality*, 2015, pp. 64-69). Selanjutnya, pada 2010, 10 persen orang -orang terkaya di negara seperti Prancis, Jerman dan Italia memiliki sekitar 60 persen kekayaan nasional, sedangkan 50 persen terbawah di negara-negara tersebut memiliki hanya sekitar 10 persen dari pendapatan nasional (Piketty, *Capital in The Twenty-First Century*, 2014, pp. 257-260).

Seorang ekonom asal Prancis, Thomas Piketty, berpendapat bahwa ketimpangan yang tidak adil akan semakin memburuk pada abad ke-21 disebabkan adanya sistem hiperkapitalisme yang semakin sulit untuk dikontrol (Piketty, *Capital and Ideology*, 2020, pp. 153-155). Piketty melakukan analisis mendalam terhadap ketimpangan yang telah tertuang dalam ketiga bukunya yang berjudul *Capital in The Twenty-First Century ( 2014 ), The Economics of Inequality* (2015), dan *Capital and Ideology* (2020 ). Menurut-nya, ketimpangan merupakan produk dari adanya ketidaktepatan ideologi dalam mendefinisikan sebuah keadilan.

Fakta sejarah telah memberikan bukti bagaimana dalam setiap rezim ketimpangan selalu diikuti dengan kegagalan ideologi yang dipegangnya, mulai dari masyarakat trifungsional, masyarakat kepemilikan, perbudakan, kolonialisme, masyarakat demokratis sosial, komunis, pasca-komunis, dan hiper-kapitalisme. Selain menganalisis penyebab suatu ketimpangan terbentuk, Thomas Piketty juga menganalisis berbagai instrumen redistribusi kekayaan yang pernah digunakan dalam sejarah untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya adalah zakat dan pajak progresif.

Menurutnya, zakat belum dapat dikatakan sebagai instrumen yang tepat untuk mengurangi ketimpangan disebabkan beberapa hal (*Capital and Ideology*, p. 407). Berbeda dengan pajak progresif, Thomas Piketty menilai bahwa pajak progresif merupakan instrumen yang tepat untuk mengurangi ketimpangan, hal tersebut dapat dilihat dari fakta sejarah selama perang dunia I dan II, dimana pajak progresif dapat mengurangi ketimpangan kekayaan yang terjadi di masyarakat secara radikal.Ekonomi Islam dengan landasannya berupa Al-Quran dan As Sunnah telah membahas masalah ketimpangan sejak zaman Rasulullah SAW. Berbagai instrumen yang digunakan dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan di antaranya adalah zakat yang memiliki hukum wajib untuk ditunaikan dalam Islam. Hukum aturan zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As Sunnah tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

nstrumen yang digunakan dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan di antaranya adalah zakat yang memiliki hukum wajib untuk ditunaikan dalam Islam. Hukum aturan zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As Sunnah tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

Dalam sejarah Islam, sistem zakat telah membawa

*1) Dosen Tetap Departemen Akuntansi FEB Unpad,*
*Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) Ikatan Akuntan Indonesia,*
*President IMA/Institute of Management Accountants Indonesia Chapter*
*2) Mahasiswa S1 Ekonomi Islam FEB UNPAD 2018-2022*

kemajuan besar, terutama dalam pengentasan kemiskinan, bahkan hingga saat ini zakat pun masih berlaku dibeberapa negara dalam bentuk non-pemerintah melalui organisasi. Kajian dan analisis terhadap redistribusi kekayaan berbasis ekonomi Islam juga telah banyak diangkat dalam *litelatur* akademik. Adapun *litelatur* yang dimaksud ialah *Journal of Islamic Accounting and Business Research ( JIABR ) , International Journal of Ethic and System ( IJES ), International Journal of Islamic and Midle Eastern Finance and Management ( IMEFM) , Journal of King Abdulaziz University ( JKAU )* , Jurnal Pengurusan , dan *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance ( JIMF )*. Keenam jurnal tersebut dinilai penulis merupakan jurnal yang tepat untuk mengkaji redistribusi kekayaan berbasis ekonomi islam, terutama dalam hal zakat.

Penelitian penulis terkait perbandingan antara redistribusi kekayaan dalam pandangan Thomas Piketty dan Ekonomi Islam berdasarkan penelitian terdahulu dan mengamati perkembangan masa kini. Sebelum membandingkan kedua pandangan tersebut, penulis akan membuat sebuah peta dinamika redistribusi kekayaan berbasis ekonomi Islam pada jurnal JIABR, IMEFM, JKAU, JIMF, IJES, dan Jurnal Pengurusan. Dengan dibuatnya peta dinamika redistribusi kekayaan ini diharapkan dapat lebih mudah memetakan *real case study* terkait redistribusi kekayaan Islam berdasarkan kriterianya serta dapat menemukan rujukan utama jurnal yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian pertama yang memetakan redistribusi kekayaan dalam pandangan Thomas Piketty dan Ekonomi Islam. Belum adanya penelitian sebelumnya menjadikan penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan menunjukkan bahwa redistribusi kekayaan Islam merupakan sistem redistribusi kekayaan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan.

## A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam studi litelatur untuk mengetahui teknik dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil. Selanjutnya, studi *litelatur* tersebut akan dikemas dalam bentuk analisis isi ( *content analysis* ). Analisis isi merupakan suatu teknik pembuatan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pesan tertentu secara objektif dan sistematis.

Dalam studi literatur analisis isi, dibutuhkan beberapa kriteria untuk memperjelas dalam memetakan jurnal dan buku yang dianalisis. Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sub bagian, kriteria untuk analisis artikel redistribusi kekayaan Islam dan kriteria untuk analisis perbandingan gagasan Thomas Piketty dan Ekonomi Islam terhadap redistribusi kekayaan. Kriteria yang digunakan dalam analisis artikel redistribusi kekayaan Islam meliputi tema atau topik yang diangkat pada artikel, tujuan penelitian dari artikel yang dianalisis, metode riset yang digunakan dalam berbagai artikel , dan keterkaitan antar artikel.

Kriteria yang digunakan dalam analisis perbandingan gagasan meliputi ideologi dan keadilan, nilai tarif terhadap pajak kekayaan global, dan dampak intrumen terhadap pertumbuhan ekonomi.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a) Klasifikasi Artikel

Pemetaan pada artikel diklasifikasikan serupa dengan penelitian terdahulu, (Hesford, Lee, Van Der Stede, & Young, 2006), dengan beberapa penambahan kriteria di dalamnya. Klasifikasi kriteria yang ditetapkan seperti penelitian terdahulu berupa topik dan metode riset. Penambahan kriteria lainnya berupa tujuan dari tiap-tiap artikel dan kriteria tindakan afirmatif yang terkandung didalam artikel. Pengklasifikasian ini akan fokus ke tiap jurnal sehingga analisis kriterianya akan dipisah antara Jurnal Pengurusan, JIABR, IMEFM, IJES, JIMF, dan JKAU.

Setelah melakukan pengklasifikasian artikel melalui kriteria yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan relasi artikel dalam satu Poin.

#### 1) Kriteria Topik

**Tabel 1**

**Distribusi Artikel berdasarkan Kriteria Topik**

| Topik[b] | Artikel (Pct.[a] ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jurnal Pengurusan | IMEFM | IJES | JIABR | JIMF | JKAU |
| Management | 7 ( 70 ) | 3 ( 18,75 ) | 7 ( 58,3 ) | 14 ( 60,87 ) | 4 ( 25 ) | 0 ( 0 ) |
| Distribution | 2 ( 20 ) | 5 ( 31,25 ) | 1 ( 8,3 ) | 6 ( 26,1 ) | 5 ( 31,25 ) | 0 ( 0 ) |
| Poverty | 1 ( 10 ) | 4 ( 25 ) | 4 ( 33,3 ) | 0 ( 0 ) | 5 ( 31,25 ) | 4 ( 40 ) |
| Others | 0 ( 0 ) | 4 ( 25 ) | 0 ( 0 ) | 3 ( 13 ) | 2 ( 12,5 ) | 6 ( 60 ) |
| Total | 10 ( 100 ) | 16 ( 100 ) | 12 ( 100 ) | 23 ( 100 ) | 16 ( 100 ) | 10 ( 100 ) |

Panel A memperlihatkan persentase dari tiap-tiap topik yang ditetapkan. Panel B menunjukkan topik yang digunakan dalam redistribusi kekayaan Islam pada artikel.

Topik manajemen menjadi topik yang paling mendominasi pada jurnal JIABR sebesar 60,87 persen, IJES sebesar 58,3 persen, dan Jurnal Pengurusan

sebesar 70 persen. Topik manajemen yang dimaksud adalah pembahasan sistem pengembangan zakat agar dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Sistem pengembangan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan strategi optimalisasi penerima dana zakat.

Dalam jurnal JIMF, topik yang paling banyak digunakan adalah topik ditribusi dana zakat dan peran zakat dalam kemiskinan dengan persentase masing-masing adalah 31,25 persen, jurnal JIMF banyak memberikan berbagai artikel studi kasus yang berkaitan dengan peran zakat dalam pengurangan kemiskinan di negara-negara Muslim, seperti Bangladesh, Indonesia, Nigeria, dan sebagainya.

Pada jurnal JKAU, topik "*others*" mendominasi topik-topik yang paling banyak digunakan, topik "*others*" yang dimaksud meliputi pembahasan zakat secara teoritis, fiqh tentang zakat, dan sebagainya di luar kategori managemen, distribusi, dan kemiskinan.

**1) Kriteria Metode Riset**

**Tabel 2**

**Distribusi Artikel berdasarkan Kriteria Metode Riset**

| Metode Riset[c] | Artikel (Pct.[a]) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jurnal Pengurusan | IMEFM | IJES | JIABR | JIMF | JKAU |
| Case study | 3 ( 30 ) | 6 ( 37,5 ) | 4 ( 33.33 ) | 2 ( 8,7 ) | 10 ( 62,5 ) | 1 ( 10 ) |
| Analytical | 5 ( 50 ) | 7 ( 43,75 ) | 8 ( 66,67 ) | 19 ( 83 ) | 5 ( 31,25 ) | 9 ( 90 ) |
| Correlational | 2 ( 20 ) | 3 ( 18,75 ) | 0 ( 0 ) | 2 ( 8,7 ) | 1 ( 6,25 ) | 0 ( 0 ) |
| Total | 10 ( 100 ) | 16 ( 100 ) | 12 ( 100 ) | 23 ( 100 ) | 16 ( 100 ) | 10 ( 100 ) |

Panel C menunjukkan kolom metode riset yang digunakan dalam penelitian setiap artikel. Metode riset yang paling banyak digunakan pada mayoritas jurnal adalah metode riset analisis dan studi kasus. JIMF memiliki nilai persentase sebesar 62,5 persen pada metode riset studi kasus, disebabkan banyak artikel yang diterbitkannya memberikan bukti empiris redistribusi kekayaan zakat di berbagai negara. Pada jurnal JKAU, metode riset yang paling mendominasi adalah *analytical* dengan persentase 90 persen, hal tersebut disebabkan banyak artikel-artikel pada jurnal JKAU yang menggunakan metode analisis untuk memberikan penjelasan secara teoritis terkait redistribusi kekayaan zakat.

**2) Kriteria Tujuan Riset**

**Tabel 3**

**Distribusi Artikel berdasarkan Kriteria Tujuan Riset**

| Tujuan Riset[d] | Artikel (Pct.[a]) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jurnal Pengurusan | IMEFM | IJES | JIABR | JIMF | JKAU |
| Eksploratif | 0 ( 0 ) | 3 ( 18,75 ) | 3 ( 25 ) | 7 ( 30,43) | 2 ( 12,5 ) | 6 ( 60 ) |
| Deskriptif | 5 ( 50 ) | 6 ( 37,5 ) | 3 ( 25 ) | 9 ( 39,13) | 5 ( 31,25 ) | 4 ( 40 ) |
| Eksplanatori | 5 ( 50 ) | 7 ( 43,75 ) | 6 ( 50 ) | 7 ( 30,43 ) | 9 ( 56,25 ) | 0 ( 0 ) |
| Total | 10 ( 100 ) | 16 ( 100 ) | 12 ( 100 ) | 23 ( 100 ) | 16 ( 100 ) | 10 ( 100 ) |

Panel D menggambarkan tujuan pada artikel redistribusi kekayaan zakat yang diklasifikasikan menjadi empat bagian , yaitu deskriptif, pengembangan, eksploratif, dan eksplanatori. Tujuan riset yang paling banyak digunakan dalam mayoritas jurnal seperti Jurnal Pengurusan, IMEFM, IJES, dan JIMF adalah eksplanatori. Eksplanatori yang dimaksud adalah jurnal-jurnal yang banyak memberikan penjelasan terkait peran zakat dalam berbagai bidang yang dipengaruhi oleh suatu variabel tertentu. Contohnya, artikel dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat religiusitas mempengaruhi kepatuhan dalam menunaikan zakat, dampak pemerintahan yang baik terhadap pelaksanaan zakat, pengaruh zakat terhadap ketimpangan pendapatan, dan sebagainya.

**b) Relasi Seluruh Artikel**

Dari 87 artikel yang dianalisis, terdapat 15 artikel yang tidak memiliki relasi dengan artikel lainnya. Selanjutnya, terdapat satu penulis utama dengan jumlah penerbitan artikel redistribusi kekayaan zakat yang paling banyak, penulis tersebut adalah Saad R. A. J, yang konsisten dalam menerbitkan tulisan zakat selama delapan tahun terkahir (2014-2022). Berdasarkan relasi seluruh artikel, terdapat satu artikel dan satu buku redistribusi kekayaan Islam yang paling banyak mempengaruhi artikel lainnya.

Artikel dimaksud adalah artikel karya Saad R. A. J yang berjudul *"Determinants of Zakah (Islamic Tax) Compliance Behaviour"* yang diterbitkan pada tahun 2014 (Poin no. 49 pada gambar 1). Sedangkan buku yang dimaksud adalah buku karya Yusuf Al Qardawi yang berjudul *"Fiqh Al Zakah ( volume 1 ) : A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Quran and Sunnah" ( Poin no.71* pada gambar 1*)*.

**Gambar 1**

**Relasi Antar Artikel dan Buku Redistribusi Kekayaan Islam Zakat**

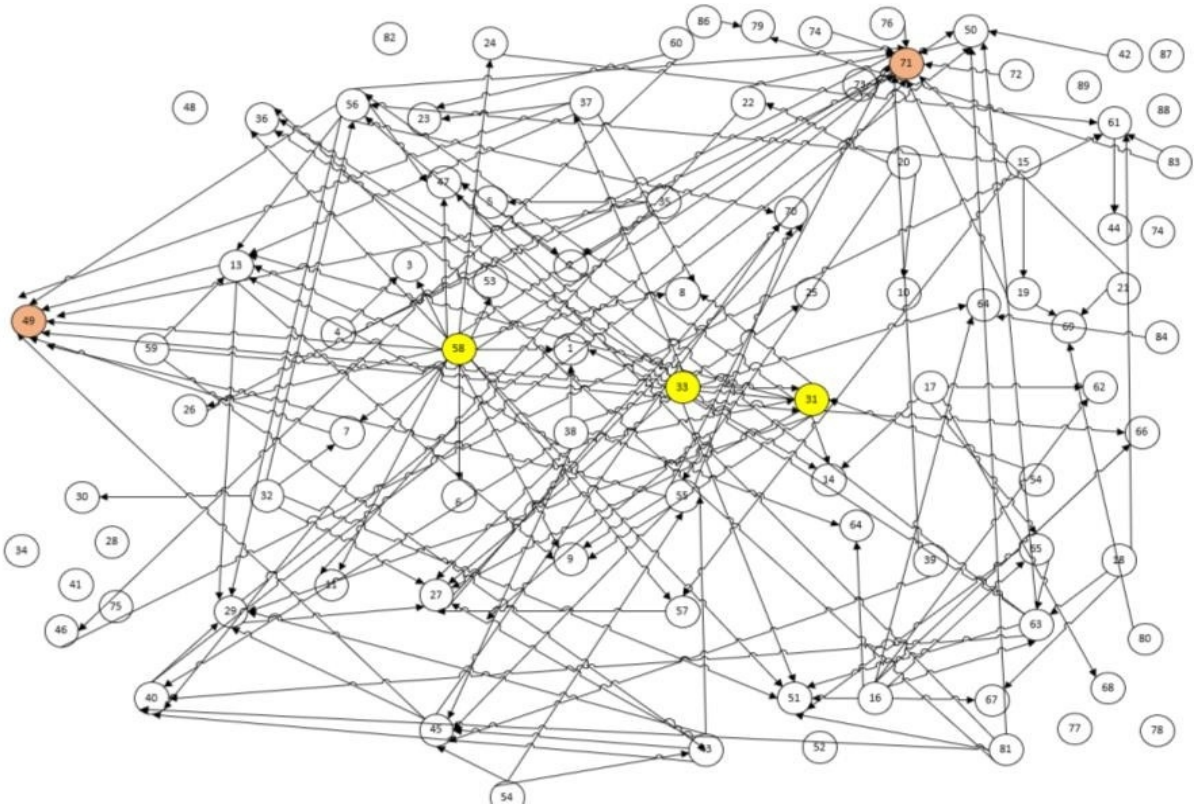

**c) Relasi Artikel Utama**

Penggagas utama adalah mereka yang memberikan kontribusi besar dalam tulisan kritisnya. Poin penting yang akan dijelaskan adalah inti bahasan artikel-artikel yang mereka publikasika dan sejauh mana artikel mereka dipakai dan memberikan pengaruh positif kepada penulis lain yang dilihat dari pengembangan atas artikel lain dengan dikutipnya artikel penggagas tersebut.

**1) Inti Kritis Artikel Penggagas Utama**

Yusuf Al-Qardawi yang memiliki gagasan terhadap zakat dalam bukunya yang berjudul " *Fiqh Al Zakah ( volume 1 ) : a Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosopy in The Light of Quran and Sunnah*", menjelaskan tentang dasar-dasar redistribusi kekayaan Islam berupa zakat, berbagai macam harta yang dikenakan dalam zakat, sekaligus menekankan pentingnya penerapan zakat dalam kehidupan sebagai sarana penyeimbang antara kehidupan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya terdapat Saad R. A. J yang memberikan gagasan terkait sistem redistribusi kekayaan zakat dari segi manajemen dengan memberikan analisis diantaranya menganalisa masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem zakat, solusi yang perlu diterapkan lembaga zakat, usulan kebijakan terkait pentingnya negara untuk mengadopsi sistem zakat, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam menunaikan zakat, sistem transparasi manajamen zakat, dan analisa sistem manajemen zakat lainnya.

**2) Relasi Gagasan Utama dengan Gagasan Pendukung**

Gambar 2

Artikel Pengutip Buku Dr. Yusuf Al Qardawi

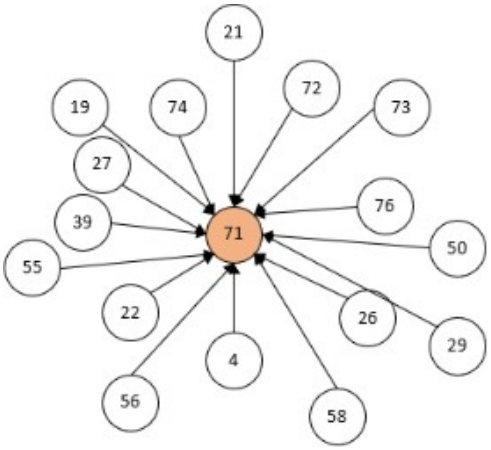

Artikel-artikel yang mengutip buku Yusuf Al Qaradawi, diantaranya adalah " *A Framework to Analyse The Efficiency and Governance of Zakat Institutions" karya* Norazlina Abd. Wahab ( 2011) ( Poin no.27 pada gambar 2) ) (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011). Artikel tersebut membahas model konseptual efisiensi dan tata kelola lembaga zakat yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat.

"*Financial Protection for the Poor in Malaysia: Role of Zakah and Micro-takaful" (*Poin no.76 pada pada gambar 2) karya Noor Ashikin Mohd Rom dan Zuriah Abdul Rahman menjelaskan pentingnya produk tafakul mikro dari dana zakat untuk melindungi keuangan masyarakat miskin (Rom & Rahman, 2012). Selanjutnya terdapat "*Effectiveness of Zakah in Fulfilling daruriyat/basic needs and elevating the Zakah recipients standard of living to Hajiyat/comfortable life in the perspective of Maqasid al syariah*" ( poin no.4 pada gambar 2 ) (Zakaria & Mohamad, 2019) karya Maheran Zakaria yang menjelaskan bahwa zakat memiliki dampak terhadap pemenuhan dasar yang terkandung dalam pilar-pilar Islam *maqashid shariah*.

Buku Yusuf Al Qardawi juga dikutip oleh artikel " *Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution : Case of Malaysia" (* Poin no.74 pada gambar 2 ) (Razak S. , 2020) karya Shaikh Hamzah Abdul Razak. Ia menjelaskan bahwa zakat dan waqaf memiliki peran penting dalam menajamen kekayaan secara islami yang bersifat berkelanjutan, beliau menyatakan bahwa zakat telah memainkan perannya dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat Muslim. Zakat banyak disalurkan untuk pendidikan, layanan kesehatan, bisnis, program bantuan terhadap dampak bencana alam, dan sebagainya.

**Gambar 3**
**Artikel Pengutip dari Artikel Saad R. A. J**

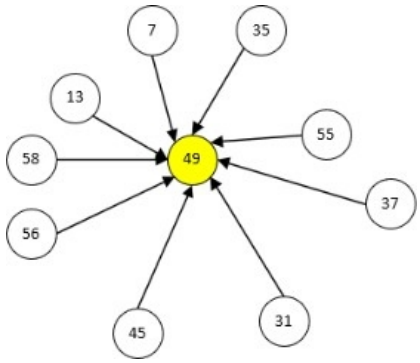


Terdapat beberapa artikel yang menggagas gagasan Saad R. A. J, di antaranya Shamharir Abidin ( 2014 ), mengembangkan analisa artikel Saad R.A.J untuk mendorong pajak Islam, zakat, menjadi lebih efektif. Dalam artikelnya yang berjudul *"Evaluating Corporate Reporting on The Internet : The Case of Zakat Institutions in Malaysia"* ( poin no.7 pada gambar 3) (Abidin, Saad, & Muhaiyuddin, 2014) , menjelaskan bahwa transparasi informasi pelaporan keuangan dan non- keuangan zakat di internet adalah hal yang sangat penting.

Hal ini menjadikan bahwa lembaga zakat perlu memanfaatkan penggunaan internet sebagai media komunikasi utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap zakat. Selanjutnya, Nurudeen Abubakar Zauro ( 2020), melakukan analisis peran redistribusi kekayaan zakat dalam artikelnya yang

| Judul Artikel | Nama Jurnal | Penulis | Sektor Tindakan Afirmatif |
|---|---|---|---|
| The Significance of Islamic Social Finance in Stabilising Income for Micro-Entrepreneurs During The Covid-19 Outbreak | IJMF | Nik Hadiyan Nik Azman, Tajul Ariffin Masron, Haslindar Ibrahim | Kebijakan Fiskal |
| The Effectivness of Zakat Funding Through Dompet Dhuafa Beastudi Etos Scholarship Program | IJMF | Yulya Srinovita, Purwa Udiutomo, Pedri Haryadi | Pendidikan |
| Zakat and SDG 6 : A Case Study of Baznas Indonesia | IJMF | Fahmi Ali Hudaefi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Hidayaneu Farchatunnisa, Ulfah Lathifah Junari | Infrastruktur |

| Judul Artikel | Nama Jurnal | Penulis | Sektor Tindakan Afirmatif |
|---|---|---|---|
| Can Islamic microfinance alleviates poverty in Indonesia? An investigation from the perspective of the microfinance institutions | IJMF | Ginanjar A., Kassim S. | Inklusifitas Pembiayaan |
| The role of Islamic social finance in empowering youth and women in Sokoto state of Nigeria [special issue] | IJMF | Muhammad, A.D., Maidoki, M.L., Sani, U.B. | Kebijakan Fiskal |
| Zakat for poverty alleviation and income inequality reduction: West Java, Indonesia | IJMF | Ayuniyyah Q., Pramanik A.H., Saad N.M., Ariffin M.I. | Kebijakan Fiskal |
| Effectiveness of zakat-based programs on poverty alleviation and economic empowerment of poor women: a case study of Bangladesh | IJMF | Anis, F.M., Kassim, S.H | Kebijakan Fiskal |
| Exploration of agent-based simulation: the multiplier effect of zakah on economic growth | IJMF | Putriani D., Mat Ghani G., Kartiwi M. | Kebijakan Fiskal |
| Do Islamic microfinance institutions affect the socio-economic development of the beneficiaries? The evidence from Turkey | IJES | Salih Ülev, Fatih Savaşan, Mücahit Özdemir | Kebijakan Fiskal |

berjudul *"Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria : The Role of Zakat, Sadaqah, and Qardhul Hassan"* ( Poin no.37 pada gambar 3) (Zauro, Saad, & Sawandi, 2020).Artikel tersebut bertujuan untuk membahas peran zakat, sadaqah, dan *qardhul hassan* sebagai instrumen keuangan Islam untuk meningkatkan keadilan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Di Nigeria, zakat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Hanudin Amin (2022) dalam artikelnya yang berjudul " *Examining New Measure of Asnad Muslimpreneur Success Model : A Maqashid Perspective"* ( Poin no.35 pada gambar 3) (Amin, 2022). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa berdasarkan penelitian, keberhasilan usaha asnaf berada dinilai indeks 50 persen atau 0,5 yang mengindikasikan bahwa para mustahiq memiliki hasil yang memuaskan dalam mengelola dana zakat yang diperolehnya.

**d) Analisis Artikel Redistribusi Kekayaan Zakat berdasarkan Sektor Tindakan Afirmatif**

**1. Kesehatan**

Fawzia Mohammed Idris (2022) menjelaskan bahwa salah satu tujuan zakat ialah meningkatkan solidaritas sosial melalui kesehatan. Di Sudan, zakat memiliki kontribusi dalam pendanaan asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin. (Idris, Seraj, & Ozdeser, 2022).

Dalam situasi COVID-19, zakat juga berperan sebagai dana sosial yang diberikan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak (Hambari, Arif, & Zaim, 2020). Di Indonesia, salah satu kota yang mengkaji efektivitas zakat terhadap kesehatan adalah Kendal, Rahman Saleh Rahmat dan Mohamad Soleh Nurzaman (2019) menyatakan bahwa masyarakat Kendal mengalami peningkatan terhadap rata-rata angka harapan hidup setelah menerima dana zakat (Rahmat & Nurzaman, 2019).

**2. Pendidikan**

Dalam Pendidikan, zakat memilki peran untuk turut serta dalam memajukan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua pihak. Pada umumnya, zakat sering disalurkan dengan cara menjadi beasiswa bagi siswa yang kurang mampu untuk memiliki

kesempatan yang sama dengan orang lain dalam menempuh pendidikan yang lebih baik. Yulya, Purwa, dan Pedri ( 2016 ),menjelaskan keberhasilan Dompet Dhuafa (lembaga filantropi dan kemanusiaan) di Indonesia dalam program beastudi etos dalam rangka memberdayakan pendidikan dengan memberikan pembinaan, pendampingan, dan pembiayaan pendidikan. Hasilnya menyatakan bahwa pembinaan dan pendampingan yang diberikan berpengaruh pada karakter ( 97,4 persen), keterampilan ( 94,2 persen), keterampilan sosial ( 97,9 persen) dan kedermawanan sosial ( 97,9 persen). (Srinovita, Udiutomo, & Haryadi, 2016).

**3. Infrastruktur**

Dalam rangka pengelolaan dana zakat secara produktif untuk menciptakan inovasi indsutri dan memperkuat infrastruktur, zakat berperan dalam membangun lembaga penelitian untuk menciptakan sebuah inovasi. Berdasarkan jurnal yang di teliti oleh Mazro'atus Sa'adah dan Uswatun Hasanah menyatakan bahwa di Indonesia terdapat lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat, BAZNAZ memiliki kemitraan inovatif dengan UNDP dalam membentuk pendirian pembangkit listrik tenaga air skala kecil (PLTMH) untuk masyarakat miskin di berbagai daerah Indonesia, salah satunya ialah Jambi dengan nilai uang sebesar 350.000 Dolar AS.

Program pembangunan listrik tersebut telah membawa listrik lebih ke 4.500 individu di empat jaringan jarak jauh. Selain itu, kerjasama lainnya juga dilakukan untuk membangun perberdayaan nelayan miskin melalui program *zakat community development* ( ZCD) seperti yang dilaksanakan di Parigi, Sulawesi Tengah dan Langkat, Sumatera Utara. Melalui proyek- proyek semacam itu, potensi zakat dapat dilihat untuk mendukung kapasitas produktif masyarakat dan jaringan (Mazro'atus Sa'adah, 2021).

**4. Kebijakan Fiskal**

Ram Al Jaffri Saad dan Abubakar Umar Farouk menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu mekanisme untuk operasi fiskal didalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena zakat dapat menjadi alat distribusi pendapatan yang adil serta menjadi katalis bagi kegiatan ekonomi negara. ( Saad & Farouk, 2019). Peran zakat sebagai kebijakan fiskal dapat dilihat dari peran zakat dalam meningkatkan permintaan agregat dan menghindari pembekuan harta dalam perekonomian melalui kegiatan investasi. Nik Hadiyan, Tajul Ariffin, dan Haslindar (2021), menilai bahwa Islamic Social Finance seperti zakat memainkan peran penting dalam merekstrukturisasi bisnis pengusaha mikro terutama di era pandemi. Dengan menagimbil contoh studi kasus di Malaysia, zakat terbukti memiliki hubungan positif yang paling kuat dengan stabilitas keuangan, hal tersebut mengindikasikan bahwa zakat merupakan instrumen keuangan yang penting untuk digunakan oleh para pengusaha mikro agar mereka dapat tetap stabil dalam pendapatannya selama terjadi pandemi. (Hadiyan Nik Azman, Ariffin Masron, & Ibrahim, 2021).

**a) Analisis buku Thomas Piketty berdasarkan sektor tindakan afirmatif**

**1. Kebijakan Fiskal *Capital Endowment***

Thomas Pikkety dalam bukunya yang berjudul *"Capital and Ideology"* berpendapat bahwa pajak progresif merupakan sarana yang tepat dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi. Dana atas pajak progresif tersebut akan dialokasi ke beberapa sektor, di antaranya *capital endowment* atau modal abadi yang diberikan kepada *young adult* (misalkan di usia 25 tahun), adanya modal abadi tersebut dinilai merupakan sarana terpenting untuk menjadikan 50 persen orang terbawah dalam kekayaan dapat memiliki aset yang siginfikan serta menjadikan mereka sebagai kelompok yang dapat berpartisipasi penuh dalam aktifitas ekonomi dan sosial.

*Capital Endowment* itu sendiri dibiayai dari dana pajak progresif atas kekayaan individu yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar lima persen dari pendapatan nasional. Nilai *capital endowment* yang akan diberikan adalah senilai 120 ribu euro per individu. Besaran nilai uang tersebut setara dengan 60 persen rata-rata nasional kekayaan pribadi (hal ini dimaksudkan agar setiap individu dapat memiliki kekayaan sekitar 60 persen dari rata-rata kekayaan individu dalam suatu negara).

***Basic income***

Selain mengusulkan skema pajak progresif atas kekayaan, Thomas Piketty juga mengusulkan pajak progresif atas pendapatan yang mencakup pajak jaminan sosial dan karbon yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 45 persen dari pendapatan nasional. Semua dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran publik, termasuk *basic income* dan semua yang berkaitan dengan *welfare state* (kesehatan, pendidikan, pensiun, dan sebagainya).

Nilai pajak progresif sebesar 45 persen ini dinilai bagus oleh Thomas Piketty dalam memberantas ketimpangan sebab nilai pajak yang telah mengklaim setengah dari pendapatan nasional merupakan solusi untuk membatas perkembangan kapitaslime yang terus menerus, karena denga banyaknya dana dan atas pajak yang terkumpul semakin memperluas peran negara dan meningkatkan pengeluaran sosial sebanyak yang diperlukan.

Secara general pengeluaran untuk *basic income* membutuhkan sekitar 5 persen dari pendapatan nasional, sedangkan pengeluran publik yang berkaitan

dengan *welfare state* sendiri memiliki proporsi sekitar 40 persen dari pendapatan nasional, pengeluaran publik meliputi kesehatan, pendidikan, pensiun, asuransi pengangguran, tunjangan keluarga, dan sebagainya.

Thomas Piketty tidak membahas secara mendalam skema alokasi pengeluaran publik dalam bukunya, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa pengeluaran publik memiliki proporsi yang besar disebabkan masyarakat yang adil harus didasarkan pada akses universal ke barang-barang fundamental, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan upah, dan sebagainya.

**b) Analisis perbandingan pandangan Thomas Piketty dan ekonomi Islam terhadap redistribusi kekayaan**

**1. Berdasarkan konsep ideologi dan keadilan**

Thomas Piketty menjelaskan bahwa ideologi dan politik memainkan peran penting dalam pembentukan rezim ketimpangan, salah satu ideologi tersebut adalah hiperkapitalisme yang didasarkan atas pembelaan mutlak terhadap kepemilikan pribadi, dalam artian konsentrasi kekayaan ekonomi dan politik bertumpu kepada para pemilik modal (Piketty, *Capital and Ideology*, 2020, pp. 153-155).

Untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi pada abad ke- 21, Thomas Piketty menjelaskan pentingnya sistem ideologi baru yang memiliki dasar egalitarianisme sebagai tujuan utamanya untuk membentuk keadilan. Piketty mendefinisikan arti dari keadilan sebagai suatu keadaan dimana setiap anggota di dalam suatu masyarakat mampu mengakses barang-barang fundamental , seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sebagainya seluas mungkin . Masyarakat yang adil bukan berarti keseragaman atau kesetaraan mutlak dalam setiap individu, melainkan setiap anggota dalam suatu masyarakat mampu menikmati kondisi kehidupan setinggi mungkin dengan cara yang adil. (*Capital and Ideology*, pp. 967-971).

Ideologi Islam dengan dasar Al Quran dan As-Sunnah,sebagai landasan teoritisnya telah terlebih dahulu mendefinisikan makna keadilan yang sebenarnya sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Islam keadilan distributif dapat terangkum dalam beberapa poin, salah satunya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, dalam artian apabila kebutuhan dasar atau fundamental terpenuhi, maka Islam mengizinkan adanya perbedaan antar pribadi yang disebabkan adanya perbedaan alami dalam bakat atau kapasitas manusia. Islam menilai bahwa kesetaraan penuh dapat menciptakan masalah baru dalam sosial, seperti penghancuran sebuah insentif. Namun, syariat Islam tetap menganjurkan adanya kesetaraan yang lengkap dalam keadaan darurat, seperti dalam kehidupan yang mengancam kebutuhan, seperti kekurangan makanan, dan sebagainya.

Berangkat dari egalitarianisme yang Thomas Piketty sampaikan, beliau mengusulkan ideologi sosialisme partisipatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi terutama ketimpangan dalam modal, dimana sistem ideologi tersebut didasarkan agar kepemilikan modal bersifat sementara terhadap suatu individu bukan permanen. Disisi lain, Islam juga memiliki aturan didalam keadilan yang berkaitan dengan kepemilikan individu, diantaranya Islam melarang adanya penimbunan dalam harta, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, dan bersifat kikir terhadap harta. Adanya larangan tersebut, menjadikan redistribusi kekayaan dalam islam menjadi wajib, terutama agar harta-harta kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran surat Hasyr ayat 7.

Apabila diperbandingkan, gagasan Thomas Piketty terhadap ideologi dan keadilan memiliki nilai yang sejalan sebagaimana Islam memandang keadilan. Hal tersebut mengartikan bahwa, sebenarnya sistem ekonomi Islam dapat dilihat sebagai sistem ideologi yang memiliki nilai egalitarianisme didalam tujuannya, berbeda dengan kapitaslime, sosialisme, dan komunisme yang dinilai dapat menciptakan ketimpangan. Islam juga sangat memperhatikan masalah dalam kepemilikan invidu, sebagaimana Piketty juga sangat memperhatikan masalah kepemilikan modal.

**2. Konsep pajak dan zakat**

Berangkat dari konsep ideologi yang disampaikan dalam gagasan Thomas Piketty dan Ekonomi Islam, Piketty akhirnya mengusulkan sistem sosialisme partisipatif yang terdiri dari pajak progresif untuk redistribusi kekayaan, sedangkan ekonomi Islam menilai zakat sebagai intrumen yang tepat dalam redistribusi kekayaan. Secara konsep pajak dan zakat merupakan kedua hal yang berbeda, meskipun memiliki beberapa persamaan dalam perannya sebagai intrumen redistribusi kekayaan.

Dalam Islam, salah satu instrumen yang digunakan dalam redistribusi kekayaan adalah akat. Berdasarkan hukum aturannya, aturan zakat telah ditetapkan di dalam Al-Quran secara tetap dan tidak pernah berubah, mulai dari nilai tarif dan juga distribusi dana zakat. Zakat merupakan alat redistribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam atas dasar penolakan terhadap konsentrasi kekayaan hanya pada golongan

tertentu, inti ibadah dari zakat sendiri adalah kemanusiaan dan keadilan sosial.

Zakat adalah tanda persaudaraan tetapi karena ditunaikan secara massal, zakat bisa mendatangkan dampak sosial yang besar dan bagi umat muslim zakat merupakan hal yang wajib untuk ditunaikan. Berbeda dengan pajak, pajak merupakan sanksi dari pemerintah kepada masyarakat melalui undang-undang federal, pemerintah memiliki hak prerogatif dalam menentukan nilai harta kena pajak, dalam artian sistem ketetapan dalam pajak dapat berubah-ubah. Selain itu, zakat tidak dikenakan hanya pada pendapatan, tetapi juga dikenakan pada aset yang menganggur, aset produktif, dan juga pengeluaran konsumsi. Dana distribusi zakat akan bermanfaat secara langsung kepada orang yang membutuhkan (Abu Bakar & Abdul Rahman, 2007).

Berdasarkan kedudukan dipemerintahan saat ini, pajak sendiri pada dasarnya sudah menjadi bagian integral dari sistem fiskal suatu negara, sedangkan zakat disebagian pemerintahan sekuler masih dinilai sebagai sistem periferal dan bukan sebagai salah satu bagian utama dari sistem fiskal. Apabila dilihat berdasarkan penerapan instrumen pajak dan zakat pada pemerintahan Islam terdahulu pendapatan negara Islam juga terdiri dari zakat dan pajak. Akan tetapi penggunaan pajak hanya digunakan apabila suatu negara dalam pemerintahan Islam tidak memiliki pembendaharaan yang cukup untuk menutupi pengeluaran negaranya. Adanya hal tersebut menjadikan banyak pemerintahan Islam menggunakan pajak untuk meningkatkan pendapatan agar dapat membiayai administrasi, pertahanan dan keamanan nasional, lembaga peradilan, infrastruktur untuk tujuan kesehatan masyarakat (misalnya rumah sakit), pendidikan umum (misalnya sekolah), transportasi (misalnya jalan raya), irigasi dan berbagai jenis fasilitas umum untuk tujuan mempromosikan kebijakan sosial dan ekonomi suatu negara.

Zakat telah lama menerapkan nilai tarif terhadap harta kekayaan, akan tetapi penekanan atas pengenaan pajak progresif atas harta kekayaan, warisan, dan pendapatan kerap diusulkan oleh Thomas Piketty sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil untuk membatasi pertumbuhan kapitalisme yang kian memburuk pada abad ke-21. Kekayaan yang dimaksud meliputi total asset pribadi yang terdiri dari *financial asset* meliputi *bank accounts*, reksa dana, obligasi, saham, asuranasi, uang pensiun, dan sebagainya dikurangi dengan toal hutang. Selanjutnya *non financial asset* meliputi tanah, *real estate*, *inventory commercial*, bangunan, mesin, hak paten, dan sebagainya. (*The Capital In The Twentyfirst Century*, pp. 45-50).

Pajak progresif yang Thomas Piketty usulkan merupakan pembaharuan atas pajak progresif yang sebelumnya sudah pernah ada. Pajak progresif sudah digunakan sebelum perang dunia 1 dan 2, akan tetapi bentuk penyempurnaanya terjadi ketika perang dunia 1 dan 2 melonjak, saat itu berbagai pemerintahan membutuhkan pendapat tambahan untuk membiayai negaranya dimasa peperangan, akhirnya pajak progresif yang diterapkan mampu secara radikal mengurangi kepemilikan asset orang-orang kaya secara signifikan.

Akan tetapi karena adanya permasalahan dalam penerapan pajak progresif, sampai pada tahun 2017 hanya terdapat empat negara yang bertahan menggunakan pajak kekayaan progresif, di antaranya Swiss, Spanyol, Prancis, dan Norwegia. Hingga akhirnya, Thomas Piketty memberikan ide gagasan baru untuk pengembangan pajak progresif dengan menawarkan nilai tarif yang tepat untuk pajak dan alokasi yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan.

### 3. Nilai tarif pajak kekayaan global Thomas Piketty dan zakat

Piketty memberikan usulan nilai tarif yang baru terhadap pajak progresif dan memberikan urgensi alokasi dana pajak yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan.Dalam bukunya yang berjudul *Capital in The Twenty-first Century*, Piketty menilai bahwa penerapan pajak dengan nilai tarif 2 persen terhadap pajak kekayaan global dapat berimplikasi terhadap pengurangan ketimpangan (*The Capital In The Twentyfirst Century*, 2014, pp. 524-527). Nilai tarif 2 persen juga dinilai sebagai tarif yang ringan untuk individu dalam batas minimal tertentu, sebab invidu yang dikenakan pajak masih memiliki *multiplier effect* terhadap modal yang dimilikinya meskipun sudah dikenakan pajak.

Pendapat ini juga didukung artikel karya Emmanuel Saez dan Gabriel Zucman. Dalam artikel mereka, dijelaskan bahwa pajak kekayaan sebesar 2 persen untuk kekayaan 50 juta dolar AS dan 3 persen untuk kekayaan di atas 1 milliar dolar AS dapat mengurangi tingkat pertumbuhan keuntungan kekayaan secara signifikan sekaligus memberikan pendapatan kepada negara untuk jangka waktu cukup panjang. Di sisi lain, apabila penepatan tarif pajak progresif senilai satu persen dinilai memberikan dampak yang sangat lambat terhadap dekonsentrasi kekayaan, dan apabila penetapan tarif di atas 3 persen makan dekonsentrasi akan berlangsung dengan cepat akan tetapi pendapatan yang diterima negara tidak akan bertahan lama (Gaez & Zucman, 2019).

Di sisi lain, pengenaan tarif zakat terhadap kekayaan sudah secara rinci dibahas dalam buku Yusuf Al Qardawi yang berjudul *Fiqh Al Zakah* yang bersumber dari Al-Quran dan As Sunnah. Di dalamnya dijelaskan bahwa nilai tarif harta kekayan yang dikenakan zakat ialah 2,5 persen. (Al Qardawi, 1976) . Nilai ini tidak pernah berubah hingga saat ini, nilai tarif zakat sebagaimana yang telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadist, " Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah genap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham, dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya."

**4. Dampak pajak progresif dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi**

Meskipun saat ini kedudukan zakat dalam suatu pemerintahan masih tergantung pada bagaimana suatu negara meletakkan konstitusi agama di dalam negaranya, pada dasarnya zakat sendiri memiliki banyak dampak positif terhadap perekonomian sebagaimana pajak.

Distribusi zakat yang tepat dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur diantaranya konsumsi, investasi, dan belanja publik yang dimana ketiga hal tersebut akan berimplikasi terhadap konsumsi agregat, tabungan dan investasi, pasokan agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan sistem jaminan sosial.Peran zakat dalam konsumsi agregat dapat dilihat dari bagaimana seorang individu kaya menggunakan pendapatannya untuk konsumsi, invetasi atau pengeluaran pemerintah. Zakat dapat meningkatkan permintaan di dalam negeri karena penerima zakat akan menghabiskan sebagian besar dana zakatnya untuk membeli barang. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pengeluaran konsumsi secara agregat, dan dengan begitu hal ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Thomas Piketty menjelaskan dalam bukunya terkait *The Fundamental Law of Capitalism* yang memiliki formulasi ß=s/g dan kondisinya saat ini nilai ß atau *capital income ratio* semakin terus meningkat akibat pengaruh dari adanya tingkat tabungan yang semakin tinggi dan nilai pertumbuhan yang semakin rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, sebagaimana pajak, zakat juga dapat berperan sebagai instrumen yang mampu mempengaruhi tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan dalam sebuah perekonomian, hal tersebut dapat dilihat dari peran zakat yang secara teoritis dapat meningkatkan konsumsi agregat dan mengurangi tabungan (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).Dalam hal invetasi, zakat memiliki dampak positif dengan cara mempenalti penumpukan dana atau sumber daya yang menganggur dan aset yang tidak produktif sehingga dapat menghindari adanya pembekuan properti dalam perekonomian. Selain itu, hal tersebut juga memungkinkan terjadinya *investment-switching* dari investasi di aset-aset yang tidak /kurang produktif ke investasi di sektor riil yang melibatkan aset-aset produktif.

Contoh investasi tersebut adalah investasi di sektor pangan dan energi (terbarukan), dengan begitu hal tersebut dapat mendorong kenaikan pada pertumbuhan ekonomi yang bisa memberikan *multiplier effect* terhadap penyediaan tenaga kerja dengan peningkatan kesehatan, gizi dan kondisi kehidupan masyarakat miskin lainnya. Dengan demikian, akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan secara positif mempengaruhi penawaran barang yang diproduksi dalam perekonomian. Secara teori, zakat tidak hanya akan meningkatkan permintaan barang dan memenuhi kebutuhan dasar orang miskin, tetapi juga dapat mengurangi permintaan barang mewah oleh orang kaya. (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).D.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, Thomas Piketty berpendapat bahwa sistem pajak progresif atas kekayaan, warisan, dan pendapatan yang merupakan bagian dari sosialisme partisipatif sangatlah diperlukan. Pendapat tersebut dibuktikan berdasarkan analisis sejarah dari abad ke-18 sampai abad ke-21. Sedangkan berdasarkan gagasan ekonomi Islam, zakat merupakan sistem instrumen redistribusi kekayaan yang dinilai lebih adil dalam mengurangi ketimpangan. Zakat sendiri di antaranya dikenakan pada kekayaan dan pendapatan. Selanjutnya, berdasarkan sejarah Islam, zakat dan pajak keduanya digunakan dalam sejarah Islam, hanya saja pengenaan pajak dapat digunakan apabila suatu negara tidak memiliki keuangan yang cukup dalam perbendaharaan untuk membiayai pengeluaran.

2. Di dalam rumpun ekonomi Islam, sudah terdapat jurnal-jurnal yang secara konsisten fokus membahas redistribusi kekayaan berdasarkan perspektif Islam, terutama zakat. Di antaranya terdapat *Journal of Islamic Accounting and Business Research (JIABR)*, *International Journal of Ethic and System (IJES)* , *International Journal of Islamic and Midle Eastern Finance and Management (IMEFM)* , *Journal of King Abdulaziz University (JKAU)*, Jurnal Pengurusan, dan *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance ( JIMF )*. Penelitian tentang redistribusi kekayaan zakat pada jurnal-jurnal tersebut masih terus berkembang sampai saat ini dengan berbagai kriteria di dalamnya. Inti kritis dari tulisan mereka adalah membahas secara teori dan praktik terkait redistribusi kekayaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi ketimpangan. Analisis artikel tersebut sangat bermanfaat dalam mengarahkan masa depan praktik redistribusi kekayaan zakat. Analisis artikel ini juga dapat secara tidak langsung mematahkan pendapat Thomas Piketty terhadap zakat.
3. Ideolologi Islam telah terbukti memiliki nilai egalitarianisme dengan nilai dasar keadilan di dalamnya. Berbeda dengan ideologi Kapitalisme, Sosialisme, maupun Komunisme. Beberapa gagasan yang Thomas Piketty sampaikan dalam bukunya memiliki beberapa nilai yang sama sebagaimana sudah disampaikan sejak berabad-abad oleh system ekonomi Islam. Hal dimaksud di antaranya meliputi pajak progresif atas waris, yang di dalam Islam juga terdapat pembagian harta waris, peran zakat yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pajak, dan nilai tarif pajak progresif sebesar 2 persen yang dinilai efektif oleh Piketty. Di sisi lain, Islam telah lebih dahulu menetapkan nilai tarif zakat terhadap kekayaan sebesar 2,5 persen.

**E. Saran**

1. Mengetahui bahwa zakat merupakan instrumen fiskal redistribusi kekayaan yang memiliki peran signifikan terhadap ketimpangan, bahkan nilai-nilai zakat memiliki beberapa persamaan sebagaimana pendapat Thomas Piketty terhadap redistribusi kekayaan yang adil. Maka sudah seharusnya berbagai negara, terutama negara-negara Muslim, untuk mendukung zakat secara global mulai dari segi regulasi dan tata kelolanya.
2. Berdasarkan artikel-artikel yang dianalisis secara empirik, peran zakat terhadap tindakan afirmatif masih dinilai sedikit, terutama tindakan afirmatif dalam sektor pendidikan, sehingga hal ini dapat menjadi potensi untuk meningkatkan penelitian redistribusi kekayaan zakat dalam sektor bidang tersebut.
3. Secara analisis kesimpulan yang dikemukan dalam penelitian ini masih bersifat kajian studi literatur, maka untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan bukti analisis secara empirik terkait analisis sistem pajak progresif dan zakat, sekaligus memberikan analisis yang lebih mendalam terkait nilai tarif yang dinilai lebih adil.

**DAFTAR PUSTAKA**


Hesford, J., Lee, S.-H., Van Der Stede, W., & Young, S. (2006). Management Accounting: A Bibliographic Study. *Handbook of Management Accounting Researc*, 3-26.

Rusydiana, A. S., & Al-Farisi, S. (2016). STUDI LITELATUR RISET ZAKAT. *AHKAM*.

Bank Indonesia. (2015). Ketimpangan Yang Semakin Melebar. hal. 9.

Pickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2014, December 30). Income Inequality and Health : A Casual Review. *Social Science & Medicine*.

Piketty, T. (2014). *The Income and Inequality*. United State of America: The Belknap Press of Harvard University Press.

Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology* (1 ed.). Cambrigde , London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Karim, A. (2010). *Makro Ekonomi Islam*.

Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al Quran dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Institusi Agama Islam Negeri ( IAIN ) Curup*.

Hasibuan, D. (2006). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. *Jakarta : PT Bumi Aksara*, 2. Prawiro, M. (2020, September 05). *Pengertian distribusi : Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Distribusi*. Diambil kembalidari Maxmanroe: https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-distribusi.html

*Affirmatif Action*. (2009, Februari 18. Diambil kembali dari Hukum Online.Com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904

SHIDARTA. (2014, July 5). *AFFIRMATIVE ACTION SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI POSITIF*. Diambil kembali dari Binus University Law: https://business- law.binus.ac.id/2014/07/05/affirmative-action-sebagai-bentuk-diskriminasi-positif/

Alshater, M. M., Saad, R. A., Wahab, N. A., & Saba, I. (2021). What do we know about zakat literature? A bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12*(4), 544-563.

Ashiq, M., Tijjani, B., Siddique, N., Khan, M. A., & Rasul, A. (2021). A bibliometric analysis of quality research papers in Islamic finance: evidence from Web of Science. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 84-

101.

Bank Dunia. (2015, November). *Ketimpangan yang semakin lebar.*

Piketty, T. (2014). *The Capital In The Twentyfirst Century.*

Amalia, D. (2022). *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*.

Idris. (2015). *Ekonomi dalam perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hosseini, H. (2010). Making the unequal global economic structure more just : Going beyond welafe economics, utilitarianism. *Humanomics, 3*(3), 200-211.

Zaman, A. (2018). An Islamic Approach to Inequality and Poverty. *Journal of King Abdulaziz University, 31*(1), 69-92.

Bashir, A. H. (2018). Reducing Poverty and Income Inequalities: Current Approaches and Islamic Perspective. *Journal of King Abdulaziz University, 31*(1), 93-104.

Munawir, A. W. (1997). Al- Munawwir : Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Surabaya. Khadduri, M. (1999). Teori Keadilan Perspektif Islam. Dalam *Risalah Gusti*. Surabaya.

Iqbal, M. (2018). overty, Inequalities and the Perceptions on Distributive Justice. *Journal of King Abdul University, 31*(1), 115-128.

Jarhil, M. A. (2018). Redistributive Justice in a Developed Economy : An Islamic Perspective.

*Journal of King Abdulaziz University ( JKAU )*.

Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.Achmad, A. (1983). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta. Al Qardawi, Y. (1976). *Fiqh Al Zakah*. King Abdul Aziz university.

Wahab, N., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research ( JIABR )*, 43-62.

Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11*(2), 498-510.

Rom, N., & Rahman, Z. (2012). Financial protection for the poor in Malaysia: Role of zakah and micro-takaful. *Journal of King Abdulaziz University*.

Zakaria, M., & Mohamad, N. (2019). Effectiveness of Zakah in fulfilling daruriyat/basic needs and elevating the Zakah recipients standard of living to Hajiyat/comfortable life in the perspective of Maqasid al-Syariah. *Jurnal Pengurusan*.

Razak, S. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Social and Social Policy*.

Ben Jedidia,, K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*.

Al Jaffri Saad, R., & Haniffa, R. (2014). Determinants of zakah (Islamic tax) compliance behavior.

*Journal of Accounting and Business Research*.

Abidin, S., Saad, R., & Muhaiyuddin, N. (2014). Evaluating corporate reporting on the internet: The case of Zakat institutions in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*.

Farouk, A., Md Idris, K., & Saad, R. (2014). Moderating role of religiosity on Zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management*.

Saad, R., & Farouk, A. (2019). A comprehensive review of barriers to a functional Zakat system in Nigeria: What needs to be done? ( 56 ). *International Journal of Ethics and Systems*, 24-42.

Andam, A., & Osman, A. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

Zauro, N., Saad, R., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

Idris, F. M., Seraj, M., & Ozdeser, H. (2022). Assessing the possibility of financing social health insurance from zakat, case of Sudan: ARDL bounds approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research ( JIABR ), 13*(2), 264-276.

Mazro'atus Sa'adah, U. H. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al- Sharia Perspective. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, , 16*(2), 302-326.

Hambari, Arif, A. A., & Zaim, M. A. (2020, october 7-8). The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19: A Case Study of the Federal Territory Islamic Council (MAIWP) of Malaysia. *NTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT*.

# Belajar dari Sejarah: Penyelenggaraan Haji Sebaiknya Diserahkan Kepada Lembaga Independen

Rustam Sumarna*

Bila merujuk kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Termasuk dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam sebagai rukun Islam kelima.

Ibadah haji merupakan peristiwa keagamaan yang sangat istimewa dan menjadi sorotan umat manusia dari seluruh dunia. Apabila dibandingkan dengan perjalanan keagamaan yang terdapat pada agama-agama lain, ibadah haji merupakan perjalanan keagamaan terbesar, baik dari segi jumlah jamaah hajinya, pergerakan dari berbagai negara ke Tanah Suci, maupun asal-usulnya.

Musim haji tahun 1444 H/2023 memang masih terasa lama, namun sejatinya semakin dekat. Persiapan sudah mulai dilakukan, khususnya oleh jajaran Kementerian Agama, melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan wakil rakyat yang menentukan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tentu melakukan persiapan jauh-jauh hari itu dengan harapan untuk bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.

Maklum, Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan tiga tugas sekaligus, yakni perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada jamaah Indonesia di setiap musim penyelenggaraan ibadah haji.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama harus bertanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas pelayanan haji, seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Salah satu upaya perbaikan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola haji, misalnya, pada tahun 2009 diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2009 yang menghapuskan ketentuan penggunaan paspor khusus haji.

Selain itu, pada tahun 2014 juga telah disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) yang mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan hukum publik yang mandiri dan terpisah dari Kementerian Agama.

Namun, alangkah baiknya apabila kita berkaca kepada sejarah lembaga yang dipercaya menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia.

Dari berbagai sumber dan catatan peristiwa bersejarah, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merentang panjang sejak akhir abad ke-19, bahkan tentunya lebih jauh lagi. Saat itu, para jamaah haji Indonesia berada pada garda terdepan dalam perjuangan melawan penjajahan.

Berikut beberapa peristiwa yang tercatat dari sejarah pelaksanaan ibadah haji di Indonesia:

1825 —- Karena besarnya keterlibatan para haji dalam melakukan perlawanan di Nusantara pada akhir abad kesembilan belas, Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859 mengeluarkan berbagai resolusi (*ordonnantie*) yang ditujukan untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas mereka sekembalinya ke Tanah Air. (Yudi Latif, "*Indonesia, Muslim Intelligensia dan Kekuasaan*").

---

*) *Founder dan CEO Khalifah Tour*

1912 —- Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak. Perintis munculnya Direktorat Urusan Haji.

1922—-Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda) mengadakan perubahan dalam ordonansi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordonansi 1922. Ordonasi ini menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Beberapa ordonansi dikeluarkan Volksraad, antara lain: Pilgrims Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927-Nomor 508, Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass Perjalanan Haji, dan Staatsblad 1947 Nomor 50. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji).

1930 —- Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau merekomendasikan untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia.

1947 —- Masyumi yang dipimpin oleh KH. Hasjim Asj'ari mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting.

1948 —- Indonesia mengirimkan misi haji ke Makkah dan mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Tahun itu, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah.

1951 —- Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah.

1952 —- Dibentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem *quotum* (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara.

1959 —- Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI).

1960 —- Keluarnya perturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya, Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Pada tahun 1962, PANUHAD berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). PPPH dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen urusan Haji (DUHA).

1965 —- Dikeluarkan Kepres Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. PT. Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji (laut) hanya mampu memberangkatkan 15 ribu jamaah melalui laut.

1969 —- Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Hal itu disebabkan banyaknya calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, bahkan calon-calon yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji.

1975 —- PT. Arafah mengalami kesulitan keuangan dan pada tahun 1976 gagal memberangkatkan haji karena pailit.

1979--- Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan pesawat udara.

1985—- Pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji.

1999—- Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Produk hukum berbentuk UU tentang haji yang pertama ini memandatkan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji kepada Pemerintah. Kuota haji kemudian terbagi menjadi dua, yakni Haji Reguler dan Haji Khusus. Pendaftaran haji regular melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Diberlakukan untuk pertama sekali setoran awal sebesar Rp 5 juta yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji.

2001 —- Setoran awal bagi jamaah haji regular naik menjadi Rp 20 juta yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.

2004 —- Setoran awal bagi jamaah haji reguler sebesar Rp 20 juta yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.

2008 —- Penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui SISKOHAT dengan prinsip *first come first served*.

2010 —- Setoran awal bagi jamaah haji reguler naik menjadi Rp 25 juta yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.

2013 —- Beberapa peristiwa terjadi pada tahun ini, antara lain: peluncuran Siskohat generasi kedua, pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 20 persen dari kuota dasar sebagai dampak proyek perluasan

Masjidil Haram, migrasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah/Unit Usaha Syariah.

2014 —- Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) paling lambat September 2015. Selain itu, penggunaan kuota jamaah haji dilakukan secara transparan dan akuntable sesuai dengan urutan porsi, pelayanan akomodasi setara hotel berbintang tiga, *upgrade* bus shalawat yang beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan ke Masjidil Haram, penghematan biaya operasional penyelenggaraan haji dengan tidak mengurangi layanan kepada jamaah haji, serta revitalisasi Asrama Haji.

2015 —- Implementasi total pelaksanaan *pilot project e-hajj* yang ditetapkan otoritas Arab Saudi, pengendalian daftar tunggu jamaah haji dengan memprioritaskan calon jamaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan menghimbau yang sudah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah berhaji karena haji wajib hanya sekali seumur hidup, reformasi penyelenggaraan umrah, transformasi Asrama Haji menjadi Unit Pelaksanaan Teknis, keterbukaan sistem sewa pemondokan, transportasi, katering dan pendukung lainnya dengan tidak mengurangi layanan kepada jamaah haji.

Selain itu, dilakukan penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada tahun 2015 ini juga akan diterapkan rute baru keberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Gelombang I : Tanah Air –Madinah – Makkah – Jeddah – Tanah Air, Gelombang II : Tanah Air – Jeddah – Makkah – Madinah – Tanah Air. Pada tahun 2015 juga akan diberlakukan penyediaan makan siang bagi jamaah haji selama di Makkah dan pematangan gagasan mempermanenkan pemondokan jamaah haji di Makkah.

Namun, pengalaman panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji ini belum bisa mewujudkan tata kelola haji yang baik di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada munculnya problem-problem teknis yang sering terulang dan terjadi tiap tahun dalam pelaksanaan ibadah haji.

Seperti keterlambatan pengurusan visa haji, permasalahan pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, transportasi, dan daya dukung SDM yang terbatas.

Sorotan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya pada tataran teknis penyelenggaraan saja, Kementerian Agama sebagai penyelenggara tunggal haji reguler juga tidak luput dari sorotan tajam.

Kementerian Agama memang memiliki dualisme yakni sebagai regulator dan operator haji sekaligus. Kemenag dinilai tidak mampu dan bahkan muncul wacana sudah saatnya operator haji di Indonesia diserahkan kepada badan independen di luar Kementerian Agama.

Apabila kita bedah lembaga penyelenggara ibadah haji di Indonesia, maka diamanatkan menjadi bagian dari tugas negara. Menteri Agama merupakan koordinator nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh organisasi yang sifatnya permanen dan organisasi kepanitiaan.

Organisasi permanen terdiri atas di tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tingkat provinsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan tingkat kabupaten/kota oleh Kantor Kementerian Agama.

Adapun penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi) dilaksanakan oleh Kantor Urusan Haji (KUH) yang secara organisatoris administratif berada di bawah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Organisasi penyelenggara ibadah haji yang sifatnya kepanitiaan meliputi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia dan PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi dibentuk oleh Menteri Agama sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan unsur terkait di Arab Saudi.

Dalam setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama membentuk PPIH serta petugas operasional pusat dan daerah yang menyertai jamaah haji (TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD, dan TKHD) sebagai pelaksana teknis dari penyelenggaraan haji.

Akan tetapi, kepanitiaan yang bersifat *ad-hoc* ini memiliki kelemahan mendasar sebab akan adanya pergantian personal setiap tahun. Dengan kepanitiaan yang senantiasa diisi oleh orang-orang yang relatif baru di posisinya, maka menjadi wajar jika hampir dalam setiap penyelenggaraan haji ditemukan problem teknis yang berulang-ulang.

Selain itu, penyelenggaraan petugas haji Indonesia juga dimungkinkan berasal dari masyarakat luas yang biasanya berasal dari mahasiswa sekitar Arab Saudi serta WNI yang berdomisili di Arab Saudi untuk menjadi tenaga musim (Temus) haji. Temus ini belum memiliki landasan hukum yang kuat serta belum memiliki standardisasi dan sertifikasi yang jelas dalam hal kompetensi dasar yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, akan sulit untuk mengharapkan pelayanan maksimal dan efisien bagi Jamaah haji dari petugas musiman yang tidak memiliki standarisasi kompetensi dan direkrut setiap tahunnya ini.

Sedangkan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). KPHI dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan UU PIH dan baru menjalankan tugasnya pada penyelenggaraan haji tahun 2013. KPHI sendiri merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji juga melibatkan peran serta masyarakat. Hadirnya lembaga atau organisasi seperti Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIHK) juga ikut mewujudkan pembangunan tata kelola haji menuju arah yang lebih baik.

Peran KBIHU dan PPIHK dalam membimbing jamaahnya dalam manasik maupun pada saat pelaksanaan merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

**Lembaga independen penyelenggara haji**

Dengan kerumitan penyelenggaraan haji dan dualisme peran Kemenag, maka sudah waktunya penyelenggaraan haji diserahkan kepada lembaga independen layaknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH merupakan terobosan bagus dalam mengelola ratusam triliun dana jamaah haji sehingga bisa dikelola dengan prinsip profesional, amanah, transparans, dan optimal serta ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat seoptimal mungkin untuk peningkatan layanan bagi jamaah haji.

Salah satu reformasi dalam tata kelola keuangan haji di Indonesia adalah hadirnya BPKH. Pengelolaan keuangan haji secara operasional dikelola oleh BPKH meskipun pada tingkat kebijakan pengelolaan keuangan haji masih tetap berada di tangan Menteri Agama.

Kalau BPKH bisa berdiri lalu mengapa tidak ada lembaga independen penyelenggaran haji di Indonesia?

Peran Kemenag sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji diduga kuat mengakibatkan kualitas pelayanan haji yang tidak maksimal karena potensi distorsi yang tinggi. Hubungan antara regulator dan operator yang bersifat vertikal akan menyulitkan pengawasan dan penerapan mekanisme *reward and punishment*, seperti dari laporan KPPU RI: Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Penyelenggaran Haji.

Dualisme peran dari Kementerian Agama ini juga bisa berdampak pada proses yang tumpang tindih dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.

Hal ini akan berdampak pada tataran pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan haji yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan maksimal kepada jamaah haji.

Pembentukan lembaga independen ini juga karena melihat kompleksitas permasalahan perangkapan peran Kementerian Agama sebagai regulator dan operator, serta untuk menghindari adanya *vested interest* dan *abuse of power*.

Perlunya pembuatan kebijakan yang memisahkan peran eksekutor penyelenggaraan ibadah haji dari regulator atau *legal policy*.

Keberadaan lembaga independen atau badan khusus ini setidaknya memiliki beberapa alternatif format kelembagaan.

(1) badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS termasuk BPKH.

(2) lembaga independen yang terdiri dari berbagai instansi, seperti Otoritas Jasa Keuangan;

(3) lembaga pemerintah nonkementerian, seperti Badan Kepegawaian Negara; atau bisa juga format (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, peran masyarakat atau swasta pun harus diberi kesempatan yang sama dengan lembaga independen penyelenggara haji tersebut.

Bisa saja pihak swasta diberikan kuota minimal 30 persen dari kuota haji Indonesia. Selain itu, pihak swasta yang selama hanya dibolehkan mengelola yang plus (haji khusus), maka nantinya bisa mengelola haji khusus maupun haji reguler.

Sebagai perbandingan, di beberapa negara seperti Turki, Maroko dan Mesir peran swasta sudah cukup besar porsinya dibandingkan Indonesia. Di Turki, swasta mendapat kuota 40 persen, Maroko 50 persen dan Mesir 50 persen.

Dengan melibatkan peran masyarakat atau perusahaan swasta diharapkan akan terjadi persaingan yang sehat antara lembaga independen penyelenggaraan haji yang dibentuk pemerintah dengan pihak swasta. Sedangkan Kemenag diposisikan jadi regulator untuk membuat kebijakan dan pengawas penyelenggaraan ibadah haji.

Keberadaan lembaga independen atau badan khusus penyelenggara haji ini dan pelibatan swasta inu akan memungkinkan adanya suatu efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan haji, khususnya dalam penyediaan jasa transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

Lembaga independen tersebut dapat dioptimalkan untuk melakukan kontrak jangka panjang dalam penyediaan seluruh jasa dari kebutuhan penyelenggaraan haji.

Dengan demikian, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mayoritas dari biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dapat diefisienkan dengan adanya kontrak jangka panjang tersebut.

Mendesaknya pembentukan lembaga independen penyelenggaraan haji ini juga pernah ditegaskan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas.

Badan independen ini nantinya akan bekerja untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan menggunakan standar umum, dalam artian, harga barang dan jasa yang diperlukan ditentukan dengan standar yang berlaku.

Karena berada di luar sistem, Badan ini akan bertanggung jawab kepada legislator dan evaluator. Sistem kerjanya mirip dengan Badan Layanan Umum seperti rumah sakit atau penyedia layanan publik lain.

UU Haji no. 8 tahun 2019 banyak mengubah tata kelola haji di Indonesia antara lain diakuinya eksistensi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada level Undang-undang, ditetapkannya kuota haji khusus sebesar delapan persen, diakuinya keberadaan KBIH yang namanya kemudian diubah menjadi KBIHU, diberikannya kuota petugas untuk KBIUH dan lain-lain.

Penulis, mewakili salah satu asosiasi Haji dan Umrah di Indonesia, ikut terlibat dalam penyusunan draft Rancangan Undang-undang Haji no 8 tahun 2019 tersebut. Salah satu usulan pentingnya adalah pembentukan Lembaga Independen semacam BLU sebagai pengelola utama penyenggara perjalanan haji di Indonesia. Sayang sekali usulan mengenai BLU ini tidak muncul dalam hasil akhir naskah UU Haji No. 8 tahun 2019. [ ]

https://islamic-center.or.id/madinah/

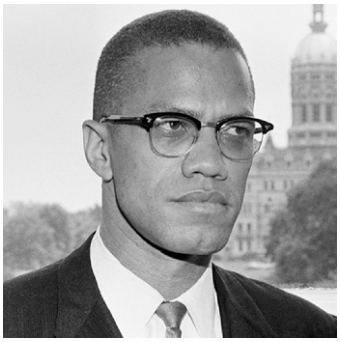

# Mekkah Mengubah Keyakinan dan Perjuangan Hidup Saya*

Malcolm X

Ibadah haji ke Mekkah merupakan kewajiban bagi ummat Islam yang mampu, dan diwajibkan sekali dalam hidup.

Al-Qur'an mengatakan bahwa ibadah haji merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah, dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah. Allah berfirman, ibadah haji dilaksanakan dengan jalan kaki atau naik unta dan menempuh perjalanan yang penuh dengan jurang yang dalam.

Pertama kali aku mendengar hal itu dari orang-orang Arab, yang perasal dari Timur Tengah, atau kaum Muslim dari Afrika Utara. Mereka kujumpai di sekolah tinggi atau universitas, tempat aku biasa memberi ceramah agama. Mereka adalah para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Mereka mengatakan, walaupun semua pernyataan-pernyataanku cenderung memojokkan kulit putih, kesemuanya memang benar bila dilihat dari kacamata Muslim, dan mereka mengatakan itulah salah satu cara untuk membeberkan apa yang mereka sebut sebagai "Islam sejati". Aku paham dan kemudian meyakini hal tersebut. Secara otomatis sebagai pengikut Elijah Muhammad, aku berusaha mengingat apa yang dikatakan.

Tetapi dalam kesempatan merenungkan semua pengalaman, aku lalu bertanya kepada diri sendiri: jika seseorang telah mengaku sebagai pemeluk agama, mengapa mereka menolak ilmu pengetahuan di luar agama?

Aku sempat berbincang-bincang dengan Wallace Muhammad, salah seorang putra Elijah Muhammad. la sependapat. Seorang Muslim memang sebaiknya mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Aku setuju dengan pendapat Wallace Muhammad.

Para Muslim ortodoks yang kujumpai, menyuruhku untuk menemui Dr. Mahmoud Youssef Shawarbi. Ia menjelaskan semua yang ingin kuketahui tentang Islam, sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. Ia seorang Muslim lulusan dari sebuah universitas di Kairo, mendapatkan gelar PhD dari sebuah universitas di London, seorang budayawan Islam, salah seorang penasihat di PBB, serta pengarang yang sudah menulis banyak buku. Dahulu ia salah seorang profesor yang mengajar penuh di Universitas Kairo, kemudian pindah ke New York sebagai direktur dari Federation of Islamic Associations (FIA) di Amerika Serikat dan Kanada. Selama beberapa waktu kami mengelilingi kota. Dengan perasaan segan kami singgah di gedung FIA; yang terletak di Jalan Riverside Drive nomor 1. Dan kami pun diperkenalkan kepada salah seorang wartawan.

Wartawan itu sangat ramah. Katanya selama ini ia mengikuti seluruh kegiatanku melalui koran. Kemudian aku memintanya untuk berbicara empat mata selama kurang lebih lima belas sampai dua puluh menit. Kami pun membuat perjanjian untuk bertemu di suatu tempat, dan kemudian ia membawaku ke sebuah tempat yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Katanya,"Tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya penuh sampai kita menemukan orang lain yang benar-benar dapat dipercaya."

Bagiku, orang tersebut adalah Ella. Aku tidak tahu bagaimana ia kini. Seperti yang sudah kukatakan,

---

**) Diambil dari Malcolm X, Sebuah Otobiografi. Alex Haley, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya, 1995*

ia adalah wanita kuat kelahiran Georgia. Ia sendiri yang memutuskan untuk masuk Islam, dan aktif di masjid Boston Eleven, sebelum ia kembali hidup sendirian di rumah. Ella pun segera mempelajari ajaran-ajaran Muslim ortodoks, dan kemudian ia mendirikan sekolah yang mengajarkan bahasa Arab. Ia sengaja tidak mengumumkan hal itu dan ia merahasiakan siapa saja tenaga pengajarnya. Ternyata tenaga pengajarnya Ella sendiri. Ia ternyata menguasai bahasa Arab, dan ia merencanakan untuk naik haji. Hampir sepanjang malam kami bercakap-cakap di kamarnya. Katanya, tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, dan ia menyarankan sebaiknya aku segera pergi.

Aku menuruti saran Ella dan pergi ke New York dengan penerbangan terakhir. Ia adalah wanita yang kuat. Ia sudah tiga kali bercerai dengan suaminya, ia seorang wanita yang enerjik dan dinamis. Ia banyak berperan dalam hidupku. Tak ada seorang wanita pun yang sedemikian kuat mempengaruhiku, selain Ella. Kuajak ia memeluk agama Islam, dan sekarang ia membiayai perjalanan naik haji yang akan segera kulaksanakan.

Allah akan selalu memberi petunjuk apabila Anda mendekat kepadaNya.

Ketika aku mengajukan permohonan visa naik haji ke Konsulat Arab Saudi, Duta Besar Arab Saudi mengatakan, seorang Muslim Amerika tidak dapat begitu saja pergi naik haji ke Arab Saudi tanpa persetujuan Dr. Mahmoud Shawarbi. Bagiku hal itu amat mudah kudapatkan, dan hal itu merupakan isyarat dari Allah sendiri.

Ketika aku menelepon Dr. Shawarbi, ia menerimanya dengan penuh ketakjuban. “Aku baru saja memikirkan hal itu. Segeralah kemari!”

Ketika aku sampai di kantornya, Dr. Shawarbi segera memberikan surat izin untuk pergi naik haji ke Mekkah, di samping sebuah buku. Buku itu berjudul “*The Eternal Message of Muhammad*”, karya Abdar Rahman Azzam.

“Pengarang buku ini telah mengirimkannya kepadaku,”kata Dr. Shawarbi. Ia juga menjelaskan jika pengarang buku tersebut adalah orang Mesir dan sekarang menjadi warganegara Saudi. Ia salah seorang tokoh internasional, dan termasuk sahabat dekat Pangeran Faisal, penguasa Arab. “Beliau telah mengikuti seluruh kegiatanmu melalui koran,” kata Dr. Shawarbi. Bagiku sendiri, hal itu sulit untuk dipercaya.

Dr. Shawarbi memberikan nomor telepon putranya, Muhammad Shawarbi, yang menjadi mahasiswa di Kairo, juga nomor telepon putra pengarang buku tersebut, Omar Azzam, yang tinggal di Jeddah. “Anda dapat mendarat sebelum Mekkah, dan dapat menelepon keduanya.”

Dengan segera kutinggalkan New York (mengingat hal itu bisa menimbulkan keributan). Beberapa orang menyarankan agar aku segera pergi. Di samping itu aku sendiri tidak ingin pemerintah serta tetangga-tetangga mengganggu perjalananku walau hanya beberapa menit. Hanya istri, ketiga anakku, serta beberapa orang terdekat saja yang mengantarku ke Lapangan Udara Kennedy International Airport. Ketika pesawat Lufthansa Airlines lepas landas, kedua rekan dari Arab dan aku, saling memperkenalkan diri. Ketika sampai, kedua Muslim tersebut turun. Yang satu turun di Kairo, dan yang seorang lagi mendarat di Jeddah, di mana aku akan tinggal selama beberapa hari.

Dalam perjalanan ke Frankfurt, Jerman, aku dan rekan di sebelahku menghabiskan waktu dengan saling berbicara atau membaca buku yang diberi oleh Dr. Shawarbi. Ketika kami mendarat, rekan yang akan menuju Jeddah menyatakan selamat tinggal, demikian juga rekan yang akan mendarat di Kairo. Kami punya waktu yang cukup untuk menunggu penerbangan ke Kairo. Oleh sebab itu kami memutuskan untuk jalan-jalan menikmati suasana di Frankfurt.

Di kamar tunggu yang ada di lapangan udara, untuk pertama kali aku bertemu dengan mahasiswa Amerika yang mengenalku. Ia berasal dari Rhode Island. Ia mendekat dan bertanya, “Apakah Anda saudara X?” Aku tertawa mengiyakannya. Ia pun berseru, “Sungguh aku tidak percaya Anda berada di sini! Aku tahu, tidak seorang pun yang akan percaya jika Anda berada di sini!” Ia berkata bahwa ia belajar di Prancis.

Kami segera merasakan keramahan penduduk Frankfurt dalam menerima tamu. Kami pergi ke berbagai toko dan warung, meski hanya melihat-lihat. Ke manapun kami pergi apakah itu ke warung atau ke toko, kami selalu menerima tegur sapa: Hallo! Padahal orang-orang tersebut belum pernah mengenal kami, dan mereka mengetahui bahwa kami orang asing. Dan kami pun tetap diperlakukan dengan ramah tamah meski kami tidak membeli apa pun dari toko mereka.

Lain halnya dengan di Amerika, jika Anda pergi ke sebuah toko, membeli sesuatu dan kemudian meninggalkan toko tersebut, Anda tetap dianggap sebagai orang asing. Tidak ada keramahtamahan di sana. Masing-masing orang saling tidak mengacuhkan urusan orang lain. Orang-orang Eropa lebih ramah dan lebih manusiawi. Rekan Muslim kami yang fasih berbahasa Jerman segera menerangkan bahwa kami adalah Muslim. Dan di sini kami betul-betul diperlakukan sebagai Muslim, tidak sebagai Negro seperti di Amerika. Mereka memperlakukan kaum Muslim sama seperti orang lain, baik dalam cara

berbicara, cara melihat, dan sebagainya.

Di salah satu toko di Frankfurt, seorang penjaga toko menyambut kami dengan ramah sambil mengulurkan tangan berjabatan. Kami bersalaman dan ia menyampai-kan salam khas penduduk Jerman, "Sekarang adalah sekarang, dan besok adalah besok!" Rekan Muslim di sebelahku segera menjelaskan, arti tegur sapa tersebut adalah mereka berharap dapat bertemu kembali.

Kami pun kembali ke lapangan udara, dan naik pesawat terbang United Arab Airlines menuju Kairo. Bagi kami kaum Muslim, naik haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Suasana yang kami rasakan sungguh sangat menyenangkan. Tak ada perlakuan berdasarkan perbedaan warna kulit. Dan rasanya baru saat itulah aku seperti keluar dari penjara yang sesungguhnya.

Kukatakan kepada rekanku Muslim, bahwa aku ingin menghabiskan waktu selama dua hari di Kairo sebelum melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Ia memberikan nomor teleponnya, dan menyuruhku untuk menghubunginya, karena ia ingin mengajakku pergi bersama-sama ke acara naik haji, di mana aku dapat bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Inggris, yang juga akan pergi naik haji, dan mungkin merasa gembira bisa saling berkenalan.

Aku pun menghabiskan waktu di Kairo dengan perasaan senang. Aku terkesan dengan sekolah modern, dengan pembangunan perumahan bagi penduduk, jalan-jalan tol, dan juga industrialisasi yang kusaksikan. Bahkan aku pernah mendengar dan membaca bahwa pemerintahan Presiden Nasser telah membangun kawasan industri berat di benua Afrika. Yang juga membuatku heran, di Kairo mobil diproduksi secarg besar-besaran, begitu juga dengan bus.

Aku disambut hangat oleh anak Dr. Shawarbi, Muhammad Shawarbi. Ia pemuda berusia 19 tahun, dan mempelajari ilmu ekonomi dan politik di Universitas Kairo. Ia bercerita tentang keinginan ayahnya yang ingin membangun Universitas Islam di Amerika Serikat.

Penduduknya ramah tamah, merasa heran ketika mereka tahu aku seorang Muslim dari Amerika. Mereka, termasuk salah seorang ilmuwan Mesir dan istrinya, pergi ke sebuah restoran di Heliopolis di daerah pinggiran Kairo, sebelum meneruskan perjalanan ke Mekkah untuk naik haji. Mereka adalah orang-orang luar biasa, dan merupakan pasangan yang cocok. Perkembangan industri yang demikian pesat di Mesir, membuat kekuasaan di Barat membenci Mesir, dan juga membenci negara-negara di Afrika yang industrinya maju pesat.

"Mengapa orang-orang di Amerika kelaparan, jika di sana makanan melimpah?"tanya istri rekanku. "Apa yang mereka lakukan dengan makanan itu, membuangnya ke laut?" "Ya!" aku menjawab. "Tetapi mereka merampasnya kembali dari kapal-kapal dan menyimpannya di lumbung-lumbung dan kulkas di ruang angkasa, dan berniat untuk menetap di sana, bersama dengan sejumlah kecil angkatan darat yang melindungi mereka, sampai semua makanan habis dimakan. Kemudian angkatan bersenjata lain akan merekrut penduduk dan membentuk sebuah kelompok baru."

Istri rekan Muslim itu melihat ke arahku seperti tak percaya dengan perkataanku. Atau mungkin ia mengira aku hanya bergurau. Tetapi bahwa penduduk Amerika dikenakan pajak yang tinggi, itu adalah fakta. Tetapi aku tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di Amerika Serikat, bahwa sekarang banyak orang kelaparan di sana.

Aku menelepon rekan sesama Muslim dan dia mengatakan, aku sedang ditunggu oleh sekelompok Muslim. Semuanya berjumlah delapan orang, termasuk seorang hakim dan seorang dari instansi Departemen Pendidikan. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih dan memperlakukanku seperti saudara. Aku yakin, itu semua pertolongan dari Allah, sebab di manapun aku berada, aku selalu mendapatkan pertolongan.

Arti kata-kata "Haji" dalam bahasa Arab lepas dari definisi obyektif. Dalam hukum Islam, artinya berkaitan dengan Ka'bah, sebuah Rumah Suci, dan dipenuhi oleh barisan haji. Lapangan udara Kairo dipenuhi oleh Muhrim, para haji, yang berpakaian ihram.

Sesuai nasihat, aku meninggalkan Kairo dengan membawa empat kopor, empat kamera dan satu rol film. Aku membeli sebuah kopor kecil di Kairo, yang hanya cukup untuk satu stel celana, sehelai kemeja, pakaian dalam, serta sepasang sepatu produksi Arab. Selama menempuh perjalanan ke lapangan udara bersama kelompok haji, aku merasa gugup mengetahui bagaimana kami bisa saling memperhatikan, sehingga tahu apa yang terjadi pada masing-masing jamaah haji.

Memasuki daerah di mana orang harus memakai pakaian ihram, kami melepas pakaian, dan menutup tubuh kami dengan dua handuk putih. Pertama-tama, Izar dililitkan di pinggang. Kemudian Rida dililitkan di leher, menutupi lengan dan pundak. Sepasang sandal sederhana dikenakan sampai menutupi mata kaki. Di bagian luar Izar, tergantung sebuah tas kecil, seperti tas tangan wanita, tempat menyimpan uang atau paspor dan surat-surat, seperti yang kuterima dari Dr. Shawarbi.

Semua orang di lapangan udara yang akan meninggalkan Jeddah berpakaian seperti itu. Pada

saat seperti itu kedudukan semua orang sama. Apakah ia seorang pangeran, raja atau petani, orang tidak menghiraukannya. Beberapa orang mengalami perasaan yang sama dengan yang kualami. Kami semua yang berpakaian seperti itu segera berseru: "*Labbaika! Labbaika*!" (di Amerika artinya, Kami penuhi panggilanmu Ya Tuhan! Kami penuhi panggilanmu Ya Tuhan!). Suasana di lapangan udara dipenuhi dengan ekspresi Muhrim yang sedang menunaikan ibadah haji.

Pesawat terbang mengangkut jamaah haji beberapa menit sekali, tetapi lapangan udara makin penuh dengan hadirnya para pengiring, rekan-rekan atau famili yang ingin melepas mereka. Mereka pun tidak lupa berdoa untuk kepergian para calon jamaah haji ke Mekkah. Ketika pesawat terbang sudah mengangkasa, aku bingung mengalami goncangan-goncangan. Tetapi syukurlah, seseorang membantuku memasang sabuk pengaman, sehingga seorang Muslim Amerika tidak sampai kecewa. Dari kejadian itu aku merasa mendapatkan suasana hangat dan juga kepercayaan serta kemuliaan.

Aku benar-benar merasa bersyukur bisa naik pesawat terbang bersama-sama dengan mereka yang terdiri dari berbagai ras. Kulit putih, kulit hitam, merah, kuning, coklat, dan juga dengan mereka yang berambut sedikit kemerah-merahan, yang satu sama lain menganggap masing-masing sebagai saudara. Kemuliaan Allah-lah yang membukakan mata hati kami, sehingga kami masing-masing bisa saling menghargai.

Dalam kelompokku, segera tersebar dari tempat duduk yang satu ke tempat duduk lain bahwa aku adalah seorang Muslim berasal dari Amerika. Semua wajah berpaling ke arahku, tersenyum dan memberi salam. Pada waktu makan siang, aku yang dipandang sebagai orang asing, diundang ke kokpit.

Kapten pilot segera menemuiku. Ia orang Mesir, yang kulit tubuhnya lebih hitam dariku. Ia pernah pergi ke Harlem, dan di sana, tak seorang pun yang menyambutnya ramah. Ia sangat senang bertemu dengan Muslim Amerika. Ketika ia mengundangku untuk datang ke kokpit, aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu.

Co-pilotnya malah lebih hitam dari kapten pilot tadi. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku waktu itu. Sebelumnya, aku tidak pernah mendengar seorang kulit hitam mengemudikan pesawat terbang. Semua instrumen yang ada di sana, tidak satu pun yang kuketahui apa nama dan kegunaannya. Kedua pilot dan co-pilot itu tersenyum ke arahku, menghargai dan menghormatiku, sama seperti yang kualami pada waktu aku meninggalkan Amerika. Aku berdiri menyaksikan ketinggian langit melalui kaca jendela. Di Amerika, meskipun puluhan kali aku naik pesawat terbang, tak pernah sekalipun aku masuk ke kokpit. Sekarang bersama dua orang rekan sesama Muslim, aku mendapat kesempatan tersebut. Benar-benar sebuah karunia dari Allah.

Aku kembali ke tempat dudukku. Di sepanjang perjalanan yang kurang lebih memakan waktu satu jam, semua calon jamaah haji menyerukan: "*Labbaika! Labbaika!*" sampai pesawat terbang mendarat di Jeddah. Pelabuhan udara itu terletak di tepi pantai Laut Merah. Merupakan pelabuhan udara embarkasi bagi jamaah haji sebelum menuju Mekkah, yang terletak kurang lebih 40 mil arah timur.

Pelabuhan udara di Jeddah lebih sibuk dari pelabuhan udara di Kairo. Kelompok kami dibagi dalam beberapa kelompok kecil tanpa mempertimbangkan perbedaan ras. Setiap kelompok membentuk barisan yang akan pergi bersama-sama Amirul Hajj. Para kelompok haji ini menunjuk Mutawaf yang akan bertanggung jawab memimpin perjalanan dari Jeddah ke Mekkah. Beberapa calon jamaah haji berseru dan menangis: "*Labbaika!* "

Beberapa kelompok lain yang lebih besar menyerukan pujian dalam doa yang apabila kuterjemahkan bunyinya sebagai berikut: "*Aku hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Aku percaya hanya kepada Allah. Sebab Dia-lah Yang Maha Tunggal. Semua pujian hanya bagi Allah seru semesta alam.*"

Hanya para pemimpin dan para Mutawaf yang tidak mengenakan baju ihram. Mereka mengenakan tutup kepala berwarna putih, dan mengenakan *yapon*. Dalam bahasa Arab, bunyi "m" sebelum kata kerja berubah sebagai kata benda. Jadi, Mutawaf artinya seseorang yang memimpin jamaah haji melakukan Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah di Mekkah.

Aku gelisah di tengah kerumunan calon jamaah haji, menunggu pemeriksaan paspor. Aku merasa akan tertangkap. Bagaimanapun aku mengkhawatirkannya. Sekarang aku berada di tengah-tengah Muslim, aku merasa seperti berada di tengah-tengah sumber. Paspor Amerika sangat sulit diterima di negara Islam.

Pemeriksa segera memeriksa kelompokku. Ia menggamit pundak dengan ramah. Kemudian, ia mulai memeriksa satu persatu paspor dan kopor yang kami bawa.

Aku begitu gugup ketika memutar kunci koporku yang macet. Aku lalu membongkar paksa koporku, mengeluarkan semua isinya untuk diperiksa. Saat itu petugas pemeriksa tahu bila aku menggunakan paspor Amerika. Ia menatapku, dan berbicara dalam bahasa Arab. Rekan-rekan di sekitarku segera menjelaskan dalam bahasa Arab yang lancar. Disertai gerak tangan mereka mencoba menjelaskan siapa diriku. Petugas pemeriksa itu menanyaiku dalam bahasa Inggris mengenai surat dari

Dr. Shawarbi, dan ia memberikannya kepada juru tulis. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti orang tolol, aku mengiyakan saja apa yang mereka katakan. Namun pada akhirnya persoalan itu beres.

Sebelumnya aku harus pergi menemui Mahkamah Syariat, katanya menjelaskan. Yang dimaksud adalah Pengadilan Tinggi yang memutuskan apakah seseorang bisa atau tidak memasuki kota Mekkah. Hal itu merupakan keharusan bagi Muslim untuk memasuki kota Mekkah.

Rekan-rekanku segera pergi ke Mekkah, tanpa mengajakku. Mereka tampaknya bisa mengatasi persoalanku. Aku pun pasrah. Aku berkata kepada mereka, "Jangan khawatir, semua baik, Allah bersamaku saat ini." Mereka pun berdoa untukku. Seorang Mutawaf berpakaian putih memohon kepada mereka agar memberikan jadwal penerbangan. Diiringi dengan pandangan kami, mereka pun pergi.

Hari itu Jumat pagi, tanggal 3. Aku memang tidak pernah bergabung dengan sekian banyak orang, dan aku pun sebenarnya tidak ingin diperhatikan terus-menerus seperti bayi.

Aku tidak percaya jika ada kamera yang dapat merekam pemandangan yang kusaksikan, yaitu pada saat semua orang dari berbagai ras berkumpul bersama. Berbondong-bondong kami pergi ke sebuah ruangan besar, dan kemudian mulai menaiki tangga sampai ke tingkat empat, lantai paling atas, yang sudah dipenuhi oleh ummat dari berbagai ras. Misalnya orang-orang dari Cina, Indonesia, Afghanistan dan sebagainya. Tak lama kemudian kami menukar ihram kami dengan baju nasional masing-masing. Pemandangan itu mirip dengan halaman sebuah majalah dalam rubrik "*National Geographic*".

Ketua rombongan kelompok empat yang menyertaiku, melalui bahasa isyarat memberitahukan bahwa aku harus masuk ke dalam salah satu kelompok kecil, yang masing-masing beranggotakan 15 orang. Pada saat yang sama, banyak dari jamaah yang langsung membaringkan diri di atas permadani kusut sebagai alas tidur. Sebagian besar wanita Muslim menutupi kepala dan kakinya. Seorang Muslim Rusia yang sudah tua, bersama istrinya, agaknya tidak bisa tidur. Dari tempatnya, keduanya menatapku tajam-tajam. Demikian juga dengan dua orang Muslim asal Mesir dan Iran. Mereka bangkit dari duduknya sambil menatapku lekat-lekat begitu ketua rombongan meminta kami untuk pindah ke pojok.

Dengan isyarat mereka memberitahuku bagaimana cara salat yang benar. Anda bisa membayangkan, bagaimana aku yang sudah dianggap *mubaligh* oleh pengikut Elijah Muhammad, tidak bisa salat dengan benar.

Tanpa segan-segan, aku mencoba mengikuti apa yang dilakukannya, sebab aku sadar bahwa aku belum sempurna. Aku merasa telah menjadi pusat perhatian bagi setiap Muslim yang hadir di sana. Orang-orang Asia, umumnya suka duduk dengan berjongkok, sementara orang Barat berdiri di atas kursi. Ketika ketua rombongan memperagakan gerakan salat, aku berusaha meniru apa yang dilakukannya, walaupun masih sering mangu-mangu kebingungan. Sesudah hampir satu jam, ia memberi isyarat bahwa ia akan pergi dan secepatnya akan kembali.

Aku hampir tidak pernah tidur. Disaksikan oleh banyak Muslim, aku sering memperagakan gerakan salat dalam cara yang benar. Aku tidak peduli dengan tatapan orang lain, dan aku pun tidak peduli betapa konyolnya aku. Dalam waktu singkat aku sudah bisa membungkukkan badan sampai keningku menyentuh lantai, meski dua atau tiga hari kemudian, mata kakiku membengkak karenanya.

Ketika fajar menyingsing, semua Muslim segera bangun. Mereka saling mengingatkan kewajiban masing-masing. Kini aku tahu betapa pentingnya peranan permadani (sajadah) bagi orang Muslim. Setiap orang memiliki sebuah sajadah berukuran kecil, sementara setiap kelompok memiliki sajadah dalam ukuran besar, yang dipakai untuk salat Bersama-sama (jamaah). Sesudah itu kami salat bersama-sama di sebuah ruangan. Usai salat mereka membentangkan kain taplak di atas permadani dan segera menyiapkan makanan, sehingga ruangan itu berubah menjadi ruang makan. Begitu selesai makan, ruangan itu pun disulap menjadi ruang santai.

Jika tiba waktu tidur, mereka pun merebahkan diri di atas permadani, sehingga ruangan itu berubah menjadi ruang tidur. Saat tidur di atas permadani itulah, ingatanku melayang pada saat aku masih berkubang dalam dunia pencuri. Kini aku baru tahu, mengapa harga sebuah permadani Oriental begitu mahal. Ternyata disebabkan oleh pembuatannya yang rumit. Untuk mendapatkan permadani yang berkualitas sehingga nyaman dibuat duduk, serta perawatannya memerlukan kecermatan. Di Mekkah, aku banyak menyaksikan permadani dalam berbagai ukuran.

Jika tiba-tiba ada seseorang yang berniat mengadakan diskusi, maka kami pun mengelilinginya, sementara ia duduk di tengah-tengah lingkaran. Jika sudah demikian, ruangan itu pun berubah menjadi semacam ruang pengadilan. Kadang-kadang, di saat lain ruangan itu pun berubah menjadi kelas.

Ada seorang Muslim asal Mesir yang sering menatapku melalui ekor matanya. Ketika aku tersenyum ke arahnya, ia pun mendatangiku serta menyapa: Hallo. Aksen suaranya mirip aksen Gettysburg. Aku pun menyambut salamnya: Hallo. Aku

mencoba bertanya siapa namanya. Nama? Nama? Ia mencoba memahami apa yang kutanyakan. Tetapi tampaknya ia gagal. Lalu kami masing-masing mencoba mengeja beberapa kata.

"Langit," kataku sambil menunjuk ke atas. Ia tersenyum dan mencoba meniru kata-kata yang kuucapkan. Aku pun menyebut beberapa kata lagi, dan melalui isyarat kuminta ia tetap meniru kata kata yang kuucapkan. Ia bersedia. "Pesawat terbang, permadani, kaki, sandal, mata-mata," dan seterusnya. Tanpa kusadari, sebuah keajaiban terjadi. Aku merasa senang, ketika tiba-tiba aku dapat berkomunikas! dengan sesama Muslim, dan aku pun mencoba mengatakan apa-apa yang terlintas dalam otakku: Tanpa sadar aku mengucapkan kata Muhammad Ali Clay. Secara serentak, seluruh Muslim yang mendengar kata-kata tersebut menoleh ke arahku dengan muka berseri-seri seperti pohon Natal. "Anda? Anda?" Seorang rekan menunjuk ke arahku. Aku menggeleng, "Bukan! Muhammad Ali Clay itu sahabatku ... sahabat!"

Sebagian memang mengerti maksudku, tetapi sebagian lagi yang tidak mengerti segera mengelilingiku persis seperti mengelilingi juara tinju kelas berat, petinju Cassius Clay. Kemudian aku mengerti mengapa semua Muslim, besar-kecil, tua-muda, semua mengelu-elukan Cassius Clay. Sebelumnya mereka telah mendengar bahwa Cassius Clay telah mengalahkan Sonny Liston, yang oleh orang Muslim dijuluki sebagai raksasa. Mereka mengibaratkan Cassius Clay sebagai David yang berhasil mengalahkan Goliath sang raksasa. Di kemudian hari, Cassius Clay yang memeluk agama Islam mengganti namanya dengan Muhammad Ali, dan dalam sepanjang hidupnya, ia selalu diberkati oleh Allah.

Keakraban makin terjalin di kompartemen tersebut. Kebiasaanku sebagai Muslim Amerika lambat laun berubah, mengikuti kebiasaan dan sikap orang-orang Muslim di sekitarku. Semua orang bersikap ramah, dan setiap orang dengan tulus menerima kehadiranku. Aku dielu-elukan bagaikan orang yang datang dari planet Mars.

Mutawaf segera menyuruhku untuk mengikutinya. Ia menunjuk suatu tempat di masjid, dan memintaku untuk memimpin salat subuh (*El Sobh*), yang dilakukan sebelum matahari terbit. Aku mengikuti dia menuju ke bawah, melewati ribuan jamaah haji, yang bercakap-cakap dalam berbagai bahasa, kecuali bahasa Inggris. Aku menyesali diri sendiri, mengapa selama ini tidak mempelajari tata cara salat menurut bahasa Arab. Dalam ajaran Elijah Muhammad, kami berdoa tidak dalam bahasa Arab. Padahal dua belas tahun sebelumnya, ketika aku berada di penjara, seorang Muslim ortodoks yang tinggal di Boston, bernama Abdul Hameed, mengunjungiku dan berdoa dalam bahasa Arab. Seketika itu juga timbul niatku untuk mempelajari lafal-lafal doa dalam bahasa Arab. Sayang, sejak saat itu pula aku tidak pernah menggunakannya lagi.

Aku mengikuti apa yang dikerjakan oleh pemimpin kelompok. Ternyata hal itu tidak sulit dilakukan. Terbukti selama ini ia tidak pernah menegurku. Di luar mesjid ada pipa panjang yang berisi air. Tempat itu digunakan berwudlu sebelum mengerjakan salat. Sebelumnya, aku tidak mengetahui bagaimana cara berwudlu. Tanpa dibimbing oleh Mutawaf, belum tentu aku bisa berwudlu dengan benar seperti yang dilakukan oleh para Muslim di tempat itu.

Aku mengikuti Mutawaf ke bagian belakang masjid, mencoba melihat apa yang dilakukannya di sana. Sekarang ia sedang bersujud, keningnya menyentuh tanah. Aku pun melakukan hal serupa. Bismillahirrahmanirrahiim; "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang." Semua Muslim selalu mengucapkan doa itu sebelum salat. Sebenarnya aku tidak ingin hanya berkomat-kamit saja. Tetapi aku terpaksa melakukannya karena aku memang tidak bisa mengucapkannya dengan benar.

Aku tidak bermaksud bergurau, tetapi selama ini tidak ada orang yang mengatakan bahwa aku tidak bisa berdoa seperti yang lain. Setelah salat subuh, ketua rombongan memintaku kembali ke ruang empat. Dengan bahasa isyarat, ia mengatakan akan pergi selama tiga jam. Lalu ia pun pergi meninggalkanku.

Ruangan tempat kami menginap sangat terang benderang, sehingga menyebabkan sebagian daerah lapangan udara menjadi ikut bersinar. Aku berdiri di teras menyaksikan sekeliling. Pesawat terbang datang dan pergi sesuai dengan jadwalnya. Jutaan orang dari seluruh dunia memenuhi tempat tersebut. Aku melihat kelompok-kelompok jamaah haji meninggalkan Mekkah, dengan mengendarai bus, truk serta mobil. Sebagian besar lainnya menempuh perjalanan dengan kaki. Timbul keinginanku untuk juga menempuh perjalanan dengan kaki, karena sedikitnya aku sudah berpengalaman.

Aku khawatir kesemuanya hanya perbuatan pura-pura saja. Apakah aku menyesal disebut sebagai jamaah haji dari Mekkah? Aku merasa cemas, ujian apa lagi yang akan kujalani, dan kapan aku akan berhadapan dengan pengadilan Muslim?

Seorang Muslim dari Iran, menyapaku dari kisi-kisi jendela. Ia memberi salam dan berusaha berkata, "Amer, ... Amerika?" Ia ingin agar aku sarapan bersama-sama dengan ia dan istrinya. Aku tahu itu adalah salah satu cara untuk mengakrabkan diri.

Namun dalam Islam dikatakan: Anda tidak bisa minum teh bersama-sama dengan istri dari salah seorang Muslim. Dan aku tidak ingin melanggarnya. Aku tidak tahu apakah ia memahami maksudku ketika aku menggelengkan kepala dan tersenyum, yang artinya, tidak terima kasih! Tetapi tampaknya ia tidak mengerti, dan tetap membawakan aku secangkir teh dan kue-kue kering. Sejak saat itu aku tidak mengalami kesulitan dalam hal makan.

Jamaah lain menggunakan isyarat bila ingin berbicara. Mereka tersenyum dan berusaha mendekatiku dan mengajakku berbicara. Rekan yang pertama kali kukenal menggunakan bahasa Inggris, telah pergi entah kemana. Kudengar ia mengajarkan kata-kata yang diterimanya dari Muslim Amerika kepada seluruh Muslim di kelompok empat.

Kendaraan penjemput sudah datang, berhenti persis di depan ruangan tempat kami menginap. Semua Muslim, baik yang sedang mengenakan ihram maupun yang berpakaian biasa, berjalan dengan pelan dalam antrean panjang menuju ke sebuah tempat. Mereka tersenyum satu sama lain.

Mutawaf ternyata tidak kembali dalam waktu tiga jam seperti yang dijanjikan. Dan hal itu cukup membuatku cemas. Aku khawatir ia melepaskan tanggung jawabnya atas diriku. Di samping itu, aku merasa lapar sekali. Sebelumnya, aku telah menolak tawaran makan dari beberapa orang Muslim. Kesulitanku adalah, aku tidak terbiasa makan dengan tata cara mereka. Segala makanan diletakkan di atas permadani, dan mereka makan dengan hanya menggunakan tangan.

Aku berdiri di luar kamar, dan berusaha membuang pikiran yang mengganggguku. Aku turun ke lantai pertama. Aku merasa seseorang sedang mencariku, sehingga kuputuskan untuk kembali lagi ke kompartemen. Kira-kira lima puluh menit aku turun. Aku menuruti perasaanku, kuturuti saja kemana kakiku melangkah. Kujumpai sebuah restoran kecil di halaman depan. Aku pun bergegas ke sana. Dan sama seperti di tempat lain, di sana orang-orang berbicara dengan berbagai bahasa yang tidak kumengerti. Dengan menggunakan isyarat, aku memesan sepotong ayam dan sesuatu yang mirip kentang goreng. Makanan itu langsung kunikmati dengan tangan. Semua Muslim berbuat serupa denganku. Di beberapa tempat, aku menyaksikan banyak laki-laki berusia sedikitnya tujuh puluh tahun duduk bersila menghabiskan makanan yang dipesannya. Ia begitu lahap seolah-olah berada di sebuah restoran mewah. Kami makan bersama, tidur pun bersama. Bagi semua jamaah haji, semua orang adalah saudara, karena mereka menyembah Tuhan yang sama.

Hampir sehari penuh aku berjalan-jalan di sekitar kompartemen. Suatu saat aku melihat dua orang laki-laki kulit hitam sedang berdiri. Aku berteriak ke arah mereka, dan kemudian salah seorang dari mereka berbicara kepadaku dalam bahasa Inggris aksen British. Selama menunggu keberangkatan mereka, kami sempat berbincang-bincang mengenai berbagai hal dan bertukar pikiran. Ternyata kedua laki-laki itu berasal dari Ethiopia. Mendengar mereka akan pergi, semangatku kembali terbang. Baru saja aku menemukan lawan bicara sesama Muslim yang fasih berbahasa Ingeris, kini mereka akan pergi pula.

Kedua orang Ethiopia itu kuliah di Kairo, dan tinggal di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Aku kagum dengan Ethiopia, dari delapan belas juta penduduknya, sebanyak sepuluh juta orang telah memeluk Islam. Padahal selama ini orang menganggap penduduk Ethiopia beragama Kristen. Rupanya hanya orang-orang yang duduk di pemerintahan saja yang memeluk agama Kristen, dan pihak Barat selalu memberi bantuan kepada mereka supaya tetap berkuasa.

Usai salat Maghrib (*El-Maghrib*) aku berbaring di tempatku di lantai empat. Aku merasa kesepian saat menjelang malam. Dan aku selalu termenung memikirkan kesulitan yang bakal kutemui. Di tengah rasa khawatir, aku menemui empat orang ketua rombongan yang sedang duduk dekat meja, yang di atasnya terletak sebuah pesawat telepon. Melihat pesawat telepon tersebut, timbul keinginanku untuk menelepon putra dari pengarang buku yang diberi oleh Dr. Shawarbi di New York, yaitu Omar Azzam yang tinggal di Jeddah.

Beberapa menit kemudian, kukatakan niatku hendak meminjam telepon. Salah seorang dari mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Dengan segera kutunjukkan surat dari Dr. Shawarbi yang segera dibacanya. Ia pun mengulanginya sekali lagi dengan suara yang lebih keras kepada ketiga rekannya, "Muslim Amerika!" Aku melihat ketiganya senang mendengar hal itu. Dengan sopan aku memohon supaya diperbolehkan menelepon putra Dr. Shawarbi. Dengan serta merta mereka membantuku menelepon Omar Azzam dengan menggunakan bahasa Arab.

Dr. Omar Azzam segera datang ke lapangan udara. Diiringi sambutan empat orang ketua rombongan, Dr. Omar Azzam segera menyalamiku. Ia masih muda, bertubuh tinggi dan berwibawa. Tinggi badannya kira-kira 6 kaki 3 inchi. Ia sangat sopan. Jika di Amerika mungkin ia termasuk ras kulit putih, tetapi saat itu aku tak membayangkan bahwa ia termasuk ras kulit putih.

"Mengapa Anda tidak menelepon sebelumnya?" tanyanya. Ia lalu menunjukkan sesuatu kepada empat orang ketua rombongan, dan kemudian meminta izin menggunakan pesawat telepon. Dalam bahasa Arab ia

memanggil seorang karyawan lapangan udara, "Kemari," katanya.

Kurang dari setengah jam, ia segera menyuruh orang mengangkat kopor dan meminta paspor yang masih berada di tangan para pemeriksa. Dengan mengendarai mobil Dr. Azzam, kami mengelilingi kota Jeddah. Saat itu aku masih mengenakan baju ihram dengan handuk dan kaki beralas sandal. Aku sudah semakin terbiasa dengan sikap orang-orang di sekitarku, yang memperlakukanku tanpa perbedaan. Sebelumnya aku memang telah mendengar keramah-tamahan orang Muslim, tetapi aku benar-benar tak dapat membayangkannya. Beberapa pertanyaan segera kuajukan kepadanya. Dr. Azzam lulusan sekolah teknik di Swiss, menangani rencana tata kota. Pemerintah Arab Saudi meminjamnya dari PBB dan memintanya untuk menangani rekonstruksi tempat-tempat suci di Arab Saudi. Saudara wanita Dr. Azzam adalah istri dari putra Pangeran Faisal. Aku takjub bisa semobil dengan ipar laki-laki dari penguasa Arab Saudi. Semua terjadi atas kehendak Allah semata! "Ayahku tentu sangat gembira dapat bertemu Anda!" kata Dr. Azzam. Ya, tentu saja aku pun tak kalah gembiranya dapat bertemu dengan pengarang yang mengirimiku sebuah buku hasil karyanya.

Kutanyakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ayahnya. Nama fengkapnya Abdur-Rahman Azzam. Ia lebih dikenal dengan nama Azzam Pasha atau Lord Azzam, sampai terjadinya revolusi Mesir dan Presiden Nasser menghapus semua gelar Lord atau Noble. "Seharusnya beliau sudah ada di rumahku, ketika kita sampai!" demikian kata Dr. Azzam. "Ia memang menghabiskan waktu di New York, dan bekerja di PBB. Selama ini beliau selalu mengikuti sepak terjang Anda dengan penuh perhatian."

Aku membisu. Hari menjelang pagi ketika kami sampai di rumah Dr. Azzam. Ayahnya telah berada di sana, begitu juga ayah sepupunya, seorang ahli kimia, serta beberapa orang rekannya. Mereka sengaja menunggu kedatangan kami sejak pagi. Betul-betul sebuah pertemuan paling menyenangkan yang tidak pernah kualami sejak aku bayi sampai setua ini. Aku tidak pernah mengenal mereka sebelumnya, tetapi sambutan mereka sungguh luar biasa. Aku belum pernah menerima penghormatan yang begitu tinggi, yang diberikan dengan penuh ketulusan.

Pelayan menyuguhkan teh dan kopi, untuk sekejap kemudian menghilang. Aku merasa sangat nyaman. Tak ada seorang wanita pun yang berkeliaran di mana-mana di negara Arab. Dan secara bergurau orang mengatakan, tak ada wanita di negara Arab.

Dr. Abdur-Rahman Azzam mendominasi percakapan. Ia menyayangkan diriku yang tidak menelepon sebelumnya. Mereka tidak mengerti mengapa aku tidak menelepon. Apa sebenarnya yang terjadi atasku?

Mereka terperangah ketika aku bercerita sempat tertahan di lapangan udara, sehingga batal ke Mekkah. Tetapi aku memang tidak terlalu memikirkan kesulitan yang kuhadapi. Aku senang mereka tidak tahu apa yang kuhadapi. "Anda harus beristirahat!" kata Dr. Azzam. Ia pun menelepon seseorang.

Aku tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Aku tak mampu berpikir apa-apa. Ketika mereka berkata bahwa aku harus kembali untuk makan malam bersama-sama, itu berarti aku harus segera kembali ke mobil. Bagaimana aku menghadapi kenyataan ini!

Rumah Dr. Abdur-Rahman Azzam sendiri terletak di sebuah kamar mewah di Hotel Jeddah Palace. Disebabkan oleh kedatanganku yang membawa surat dari sahabatnya, ia rela datang ke rumah anaknya, dan kemudian membawaku ke tempat tinggalnya, sampai menjelang keberang-katanku ke Mekkah.

Tiada yang kukeluhkan di tempat semewah itu. Dr. Azzam Jr pergi. Ketiga kamar mewah itu dilengkapi sebuah kamar mandi besar, dua kali lebih besar dari kamar mandi yang ada di New York Hilton. Kamar itu bernomor 214. Di depan kamar itu terletak sebuah beranda yang cukup luas, berlatar belakang pemandangan indah kota kuno di Laut Merah.

Aku tidak pernah lupa berdoa dan salat di atas permadani. Tidak satu pun dari dua jenis sel darah yang mengalir di tubuhku, bertendensikan idealisme. Secara otomatis aku banyak mempelajari alasan-alasan, motivasi dari seseorang yang tidak mau mendekatiku, kecuali kulit putih yang mempunyai alasan khas.

Tetapi saat pagi tiba, di hotel tanpa dering telepon, sendirian selama beberapa jam di lantai empat sebuah hotel, aku betul-betul merasa terasing. Laki-laki kulit putih yang tentunya tidak jauh berbeda dengan saudaranya di Amerika, ternyata lebih mematuhi peraturan Arab. Ia yang dipercaya sebagai penasihat, tokoh kaliber internasional, meng-izinkanku tinggal di kamarnya yang mewah, selama menunggu keberangkatanku ke Mekkah. Aku yakin ia tak punya maksud apa-apa, ia tak memerlukan apa-apa dariku, ia telah memiliki segalanya. Kenya-taannya, ia lebih banyak sugi daripada untungnya. Ia lebih mempercayai pers Amerika yang memang banyak menulis tentang diriku. Jadi ia tahu benar bahwa aku seorang pemalu. Aku seorang penganut rasialis, aku anti-Amerika. Aku anti-kulit putih, padahal secara keseluruhan ia berpenampilan sebagai kulit putih. Aku dibesarkan dalam dunia kriminal, dan tidak hanya itu. Sekarang setiap orang menyalahkan aku, seolah-olah dengan kedok agama Islam, aku bebas berbuat sesuatu atas nama filsafat demi kepentinganku sendiri. Menurut mereka, aku sengaja memisahkan diri dari Elijah Muhammad dan pengikutnya, yang merupakan tempat pertama kali aku mengenal agama Islam, demikian tulis pers Amerika. Organisasi itu kutinggalkan belum lama ini.

Dan kini aku menganggur hingga tidak memiliki uang sepeser pun. Untuk sampai ke tanah Arab, aku meminjam uang kakakku, Ella.

Pagi itu merupakan awal perenungan terhadap sikap yang selama ini kutunjukkan kepada kulit putih. Aku mulai mengakui secara jujur, bahwa kulit putih hanya sekadar "sebutan" saja. Yang penting adalah bagaimana sikap dan perbuatan mereka. Di Amerika, pengertian "kulit putih" lebih menunjuk pada sikap dan tingkah laku yang memusuhi kulit hitam, atau siapa saja yang tidak termasuk dalam ras putih. Tetapi dalam Islam, aku melihat sikap kulit putih lebih ramah dan tidak membeda-bedakan siapa pun yang dihadapinya.

Kucatat peristiwa itu dalam buku, pada tengah hari ketika aku berada dalam hotel. "Terjadi perubahan besar dalam diriku, yang tidak bisa kujelaskan dengan gamblang, di sini, di tempat ini, selama aku menunggu pelaksanaan ibadah haji. Jendela hatiku mulai terbuka terhadap apa-apa yang berbau Barat."

Jalanan dipenuhi oleh calon jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Doa pujian kepada Allah, serta doa-doa yang dikutip dari Al-Qur'an, menggema di mana-mana. Sungguh, aku tidak pernah mengalami situasi menyenangkan seperti ini. Meskipun aku terasing, aku merasa aman dan terlindung. Aku berada di lingkungan yang ribuan kali berbeda dari yang pernah kualami. Bayangkan, selama sehari semalam, aku berada di gedung bertingkat empat, di seberang lapangan udara, dikelilingi ribuan orang yang tidak bisa kuajak berkomunikasi, disertai perasaan yang tidak menentu, kesepian, atau sesekali menelepon seperti pesan Dr. Shawarbi. Aku telah bertemu dengan salah seorang dari sekian ribu Muslim yang memiliki kekuatan. Aku memutuskan untuk tidur di Jeddah Palace. Aku Sadar, saat ini aku berada di antara rekan-rekan yang semangat keagamaannya tinggi. Aku lalu berdoa dan terus berdoa menyatakan terima kasihku kepada Allah untuk rahmat-Nya, dan terimakasih pula untuk istri dan anak-anakku di Amerika yang telah banyak berkorban Untukku."

Aku berdoa lebih dari dua kali dari seluruh doa yang kucatat dalam bukuku. Lalu aku tertidur selama kurang lebih empat jam sampai dibangunkan dering telepon.

Ternyata telepon itu dari Dr. Azzam Jr. Satu jam kemudian ia akan menjemputku untuk makan malam. Dengan terpatah-patah, aku mencoba mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikannya selama ini. Ia lalu memutus kalimatku, Masya Allah, yang artinya, "seperti yang dikehendaki Allah."

Kembali aku mencari kesempatan untuk berkeliling di sekitar lobi hotel, sebelum Dr. Azzam tiba. Ketika aku membuka pintu, di ruangan yang berseberangan dengan tempatku berdiri, seorang laki-laki dalam pakaian dinas, dan yang tampaknya sudah lama tinggal di situ, memberi penjelasan kepada setiap orang yang ingin pergi ke lantai bawah. Melalui lobi, aku pun mencoba mengikuti mereka. Di luar, sebuah mobil karavan kecil sedang menunggu. Seorang rekan yang tinggal berdekatan denganku, muncul di pintu masuk Jeddah Palace, yang segera disambut oleh orang-orang dengan mencium tangannya. Kemudian, aku baru tahu bahwa ia adalah Mufti dari Yerusalem.

Di hotel aku mendapat kesempatan berbincang-bincang dengannya, selama kurang lebih setengah jam. Ia orang yang ramah dan berhati mulia. Ia punya hubungan yang baik dengan dunia internasional, tak terkecuali dengan hal-hal atau peristiwa yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini.

Aku tidak akan melupakan saat makan malam di rumah Dr. Azzam. Peristiwa itu kucatat dalam bukuku: Aku tidak dapat berkata, bahwa mereka adalah orang-orang kulit putih. Mengapa mereka bisa bersikap ramah dan penuh rasa persaudaraan kepadaku? Juga tentang anak tertua Dr. Azzam, yang memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Sikap kebapakan yang ia tunjukkan, dan juga cara bicaranya yang teratur, membuatku menganggapnya sebagai ayahku. Ia memang mempunyai kemampuan untuk berdiplomasi, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang diperolehnya di luar negeri. Pengetahuannya pun luas. Ia selalu bersikap terbuka kepada siapa saja yang bertamu ke rumahnya.

Semakin sering aku bercakap-cakap, semakin aku tahu betapa luas ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga seolah-olah tanpa batas. Ia membicarakan masalah rasialis yang sudah berlangsung turun-temurun, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ia memberi contoh kasus yang terjadi antara kulit hitam dan kulit putih. Juga masalah warna kulit yang terjadi di antara sesama Muslim yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Barat. Katanya, jika timbul paham perbedaan warna kulit, hal itu secara langsung dipengaruhi oleh paham derajat dan kedudukan yang berkembang dalam masyarakat Barat.

Selama berlangsungnya makan malam di hotel, Komite Pengadilan Haji (*Hajj Committee Court*) sedang membicarakan kasusku. Pagi berikutnya aku diminta hadir di sana, dan itu sudah kupenuhi.

Hakim yang mengadiliku adalah Sheikh Muhammad Harkon. Pengadilan itu sepi, hanya ada aku dan seorang wanita dari India. Ia seorang Protestan yang masuk Islam, dan sekarang ingin melaksanakan ibadah haji seperti diriku. Ia wanita berkulit coklat, dengan wajah yang hampir tertutup seluruhnya. Hakim itu seorang yang ramah dan berwibawa. Kami terlibat pembicaraan, dan ia banyak bertanya kepadaku berkaitan dengan maksudku. Aku menjawab sejujurnya. Dan ia tidak saja mengakuiku sebagai Muslim yang jujur, bahkan ia memberi dua buah buku, satu dalam edisi Inggris, dan yang lain dalam bahasa Arab. Ia mencatat namaku dalam buku suci yang berisi nama-nama Muslim. Sesudah itu kami siap berbagi pengalaman. Katanya kepadaku, "Saya

harap Anda jadi mubaligh besar bagi ummat Islam di Amerika." Aku menjawab, "Saya akan mewujudkan harapan tersebut, dan mencoba melaksanakannya."

Seluruh keluarga Azzam dengan gembira mengantar kepergianku ke Mekkah. Aku makan siang di Jeddah Palace. Kemudian aku tidur selama beberapa jam sampai telepon berdering.

Telepon itu dari Muhammad Abdul Azziz Maged, deputi kepala Protokol Pangeran Faisal. "Sebuah mobil khusus akan mengantar Anda ke Mekkah, begitu usai makan malam." Ia memohon agar aku dapat menikmati makan malamku, sebab acara ritual haji memerlukan kondisi tubuh yang sehat dan kuat.

Aku takjub mendengarnya. Dua orang Arab menyertaiku ke Mekkah. Dengan perlengkapan modern, membuat perjalanan kali ini makin menyenangkan. Para penjaga memeriksa mobil, dan sopir pun memberi isyarat tanpa pernah memperlambat kecepatan. Setelah itu kami pun berlalu. Saat itu aku merasa menjadi orang penting, merasa haru, bahkan merasa begitu kecil. Perasaanku campur aduk tak karuan.

Ketika kami sampai di Mekkah, kekunoan kota itu tampak benar. Mobil kami berjalan pelan melalui jalan yang berkelok-kelok. Di kiri-kanan jalan terdapat pertokoan, dan lalu lintas pun amat ramai. Bus-bus, mobil maupun truk, simpang siur, sementara jamaah haji berlalu lalang di mana-mana.

Mobil berhenti di sebuah halte, tempat seorang Mutawaf sedang menunggu kedatangan kami. Ia mengenakan tutup kepala berwarna putih dan pakaian malam yang panjangnya sampai ke tumit, seperti yang pemah kulihat di lapangan udara. Ia seorang yang bertubuh pendek, dengan kulit tubuh gelap khas Arab, dan bernama Muhammad. Ia tidak bisa berbahasa Inggris.

Kami memarkir mobil dekat Masjid Haram. Kami berwudlu lebih dulu sebelum masuk. Semua jamaah haji terlibat dalam kesibukan masing-masing. Ada yang berbaring, duduk, tidur, berdoa serta berjalan-jalan.

Perbendaharaan kata yang kumiliki, tidak cukup luas untuk menjelaskan kemegahan masjid baru yang dibangun dekat Ka'bah. Aku makin kagum ketika mengetahui pembangunan masjid itu di bawah petunjuk Dr. Azzam Jr, yang selama ini jadi tuan rumah bagiku. Ketika selesai, kemegahan arsitektur masjid baru tersebut melebihi Taj Mahal.

Dengan menenteng sandal, aku mengikuti langkah Mutawaf menyaksikan Ka'bah, sebuah batu besar yang berdiri di tengah Masjid Besar. Ka'bah itulah yang harus dikelilingi oleh jutaan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia, baik laki-laki maupun wanita, dalam berbagai rupa, wama kulit, serta berbagai ras di dunia. Aku tahu mereka takjub menyaksikan Ka'bah untuk pertama kali. Aku pun mencoba menerjemahkan doa-doa yang pernah kucatat, "Ya, Tuhan, sumber segala kedamaian, berilah kami ketenteraman."

Setelah masuk ke dalam masjid, jamaah haji harus mencium Ka'bah. Tetapi kadang-kadang kerumunan orang menggagalkan niat seseorang. Hanya apabila kerumunan agak bergeser, seseorang bisa mencoba meraih Ka'bah dengan tangan, dan sambil menangis meneriakkan kata-kata Takbir (Allah Maha Besar). Aku sendiri gagal meraih Ka'bah.

Ketika berada di rumah Allah, aku merasa seperti sesuatu yang tak ada artinya. Mutawaf kembali membimbingku ke arah kerumunan yang sedang berdoa serta melantunkan pujian bagi Allah sambil mengelilingi Ka' bah sebanyak tujuh kali. Beberapa di antaranya tampak lemah karena usia yang sudah uzur. Banyak pula jamaah yang pingsan. Tetapi di sisi lain, wajah para jamaah haji itu tampak berbinar-binar penuh semangat. Selama tujuh kali berturut-turut, aku salat dua rakaat. Pada gerakan sujud pertama, aku membaca doa dalam Al-Qur'an, "Tiada Tuhan selain Allah," lalu pada sujud kedua kubaca, "Hanya Engkau Ya Allah."

Sementara aku bersujud, Mutawaf melindungiku dari desakan jamaah lain, lalu Mutawaf dan aku minum air Zamzam. Sesudah itu kami berjalan di antara dua bukit Safa dan Marwa, di mana Hajar bersusah payah mencarikan air untuk anaknya, Ismail.

Dalam tiga kali waktu yang berlainan, aku mengunjungi Masjid Haram dan mengelilingi Ka'bah. Hari berikutnya sesudah matahari terbit, dari balik padang Arafah, ribuan Muslim berteriak bersama-sama: "*Labbaika, Labbaika*", dan "*Allah Akbar*". Mekkah dikelilingi oleh gunung-gunung gundul yang tak pernah kusaksikan sebelumnya. Gunung-gunung itu tampak seperti sedang mengeluarkan letusan. Tidak ada tetumbuhan apa pun di sana. Menjelang tengah hari kami berdoa dan melantunkan puji-pujian sampai menjelang matahari terbenam. Salat asar dan maghrib merupakan saat yang paling khusyu'.

Akhirnya, kami mengangkat tangan (*takbiratul ikhram*) dan berdoa mengucapkan syukur: "Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Kuasa dan Maha Mulia."

Berdiri di Gunung Arafah (Mount Arafat) merupakan esensi ritual dari salah satu syariah haji di Mekkah. Tak seorang pun yang sadar bahwa mereka sudah menjadi seorang haji.

Perjalanan Ihram berakhir. Kami melengkapi perjalanan haji tersebut dengan melempar tujuh batu ke arah setan, dan berharap beberapa di antaranya dapat mengenai janggut dan rambut mereka. Aku memutuskan untuk mencukur janggutku. Aku khawatir, istri dan anak-anakku akan terkejut melihat aku berjanggut lebat saat kembali ke New York kelak. Ingat keluarga, membuat aku sadar bahwa New York berjarak ribuan mil dari tempatku. Aku tak pernah lagi membaca koran sejak meninggalkan New York beberapa waktu lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ada sebuah kabar yang memang kudengar, yang menyangkut sedikit tentang diriku. Ada memang sekelompok Negro bersenjata yang sudah berdiri

sejak 12 tahun lalu. Namun pada akhirnya gerakan itu tercium oleh polisi. Tersiar kabar bahwa aku berdiri di belakang mereka. Belum selesai kasus yang satu, kembali aku dihadapkan pada kasus Elijah Muhammad dengan ummat Islam kelompoknya. Dengan mengatasnamakan hukum, mereka memaksa keluargaku untuk keluar dari rumah yang kami tempati di Long Island.

Sebagian besar pihak pers, baik dari radio, televisi dan surat kabar, mengirimkan para wartawannya untuk mewawancaraiku, berkaitan dengan banyaknya kasus yang terjadi di New York. Padahal, sungguh mati aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu.

Yang kuketahui ketika aku meninggalkan Amerika, aku menyaksikan kejadian yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara sesama Muslim. Kini, di sebuah tenda besar, di antara jamaah haji yang berjumlah kurang lebih 20 orang, aku menjadi pusat perhatian. Sebagai satu-satunya Muslim dari Amerika, mereka bertanya kepadaku, sejauh mana ibadah haji itu mempengaruhiku.

Salah seorang di antara mereka yang fasih berbahasa Inggris segera menerjemahkan jawaban-jawabanku kepada para penanya. Tentu saja Jawaban itu tidak selengkap seperti yang mereka inginkan.

"Kita, yang datang dari berbagai penjuru dunia dan terdiri dari berbagai ras, dan yang sekarang berkumpul di sini, adalah satu saudara. Itu semua berkat kuasa Allah."

Barangkali kalimat-kalimat itu belum menyentuh, tetapi paling tidak aku sudah mendapat kesempatan untuk berkhotbah, dan menceritakan masalah rasialisme yang terjadi di Amerika beserta segala akibatnya.

Aku menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka selama ini. Mereka memang menyadari bahwa selama ini perhatian terhadap kulit hitam "amat buruk". Tetapi mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa perlakuan terhadap mereka jauh lebih buruk, melebihi perlakuan terhadap binatang. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia itu terkejut mendengarnya. Sebagai Muslim, hati mereka tergugah terhadap penderitaan orang lain, dan sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebenaran dan keadilan.

Mendengar hal itu, mereka mengatakan bahwa khotbah-khotbahku bak sebuah tongkat panjang yang siap mengobrak-abrik rasialisme yang juar biasa jahat, yang sangat bertentangan dengan hukum-hukum Allah, yang mengharuskan ummat-Nya untuk saling mengasihi, terutama bagi mereka yang tinggal di Barat.

Aku merenungkan surat-surat yang kususun tanpa rencana terlebih dulu. Menghilangkan paham perbedaan warna kulit di antara sesama Muslim menurut keyakinan agama, dan memupuk rasa kemanusiaan di antara sesama Muslim, merupakan dua hal yang mempengaruhi dan menimbulkan tantangan yang berat, meski hal itu berhasil menambah keyakinanku akan jalan hidup yang kuambil.

Surat pertama tentu saja kutujukan kepada istriku yang cantik, Betty. Selama ini aku memang belum punya kesempatan untuk bertanya kepadanya, apakah selama ini jalan pikirannya sama dengan jalan pikiranku. Yang kutahu, selama ini Betty mempercayaiku seratus persen. Aku tahu, ia akan selalu setuju dengan apa yang kukemukakan. Sekarang, ketika aku berada di Tanah Suci, tanah kelahiran Nabi Muhammad, tanah kelahiran Nabi Ibrahim, aku memohon kepada Allah agar memberikan wawasan baru tehadap kebenaran ajaran Islam, serta pemahaman yang lebih baik terhadap rasialisme yang terjadi di Amerika.

Aku pun menulis surat yang isinya sama, kepada Ella. Aku tahu pasti bagaimana pendapatnya. Saat ini, ia tengah mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadat haji ke Mekkah. Di samping itu aku juga menulis kepada Dr. Shawarbi yang mempercayaiku dengan tulus, dan mengusahakan paspor ke Mekkah.

Sepanjang malam aku menyalin berlembar-lembar surat yang akan kutujukan kepada siapa saja yang selama ini dekat denganku. Di antaranya kepada putra Elijah Muhammad, Wallace Muhammad, yang menyatakan dengan sadar bahwa hanya ada satu kebesaran bagi ummat Islam yang percaya dan menerima ajaran Islam ortodoks.

Aku juga menulis untuk para Muslim yang loyal kepadaku, di masjid yang baru kubangun, di Harlem. Aku menyuruh mereka untuk memperbanyak surat itu dan membagi-bagikannya kepada seluruh media massa.

Aku sadar, jika suratku terbaca oleh para cerdik pandai di Amerika, mungkin mereka merasa heran. Misalnya saja orang-orang yang pernah dekat denganku, rekan-rekan dan juga musuh-musuhku. Namun bagi orang yang sudah tahu perselisihanku dengan Elijah Muhammad, tak akan heran membacanya. Kecuali tentu saja, mereka heran dengan apa yang terjadi dalam diriku. Secara kronologis hidupku memang berubah. Inilah yang kutulis berdasar kata hatiku: "Tidak pernah aku merasakan keramahan dan ketulusan yang dilimpahkan kepadaku dengan penuh rasa persaudaraan yang tinggi dari berbagai ras dan warna kulit seperti yang kualami di Tanah Suci, tanah tempat Ibraham dan Muhammad dilahirkan, tanah tempat para Nabi dan kitab suci diturunkan."

Selama berminggu-minggu aku seperti kehilangan kata, terpesona oleh keramahan, ketulusan yang kudapat dari orang-orang di sekelilingku yang terdiri dari berbagai ras dan warna kulit.

Aku betul-betul mendapat karunia bisa mengunjungi kota suci Mekkah. Aku mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dipimpin oleh seorang

Mutawaf muda, bernama Muhammad. Aku minum air Zamzam. Aku berlari-lari sebanyak tujuh kali di antara puncak Al-Safa dan Al-Marwa. Aku berdoa di kota kuno Mina serta di bukit Arafah.

Ada ribuan tenda jamaah haji dari seluruh dunia. Mereka terdiri dari berbagai warna kulit, mulai dari mereka yang bermata biru dan berambut pirang, sampai mereka yang berkulit hitam dari Afrika. Kami bersama-sama menjalankan upacara keagamaan yang sama, menjalankan kewajiban agama yang sama, dalam kesatuan dan persaudaraan, sehingga semua pengalamanku di Amerika membuatku makin percaya bahwa suatu saat kelak tidak ada yang tidak mungkin bagi bersatunya kulit putih dan hitam.

Amerika perlu memahami Islam, sebab agama inilah yang menghapuskan rasialisme. Selama perjalananku sebagai Muslim ke seluruh dunia, sudah berkali-kali aku bertemu dan sempat makan bersama-sama dengan orang-orang yang bersimpati kepada kulit putih, yang tampaknya tetap tidak setuju dengan sikap kulit putih terutama mereka yang tinggal Amerika, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebelumnya aku tidak pernah menyaksikan ketulusan dan rasa persaudaraan yang tanpa mengindahkan warna kulit.

Anda akan terkejut mendengar pendapatku. Tetapi dari ibadah haji ini, apa yang kulihat, apa yang kualami, telah memaksaku untuk menyusun kembali wawasan dan pemikiranku, serta menyimpulkan apa yang telah kudapat. Hal itu tidak terlalu sulit bagiku. Meski ada sedikit dendam, tetapi aku harus siap menghadapi kenyataan, harus menerima pula kenyataan hidup serta pengalaman dan pengetahuan baru. Aku selalu membuka pikiranku, bersikap fleksibel, dan harus bekerja sama dengan siapa saja yang berusaha mencari kebenaran.

Selama 11 hari hidup di lingkungan Muslim, aku makan dari piring yang sama, minum dari gelas yang sama, dan tidur pun di atas permadani yang sama. Kami pun berdoa kepada Tuhan yang sama, beserta sesama Muslim, dari yang bermata biru dan berambut pirang serta mereka yang berkulit lebih putih dari kulit putih sendiri. Dari perkataan, tingkah laku serta perbuatan mereka, aku dapat merasakan persahabatan yang tulus. Sama seperti ketulusan yang kuperoleh dari kulit hitam Afrika, misalnya, Nigeria, Sudan dan Ghana.

Kami benar-benar seperti satu saudara, karena kepercayaan kami telah menghapuskan "kulit putih" dari pikiran mereka, menghapuskan "kulit putih" dari perbuatan mereka, dan "kulit putih" dari sikap mereka. Dengan cara ini mungkin kulit putih Amerika dapat menerima ajaran tentang Keesaan Tuhan, dan juga menerima kenyataan bahwa manusia itu sama derajatnya.

Rasialisme bagi Amerika merupakan penyakit kanker yang tak dapat diobati. Orang-orang Amerika pemeluk agama Kristen mungkin lebih bisa menerima keadaan itu. Atau barangkali juga hal itu merupakan sumber bencana yang juga telah menghancurkan Jerman yang dalam waktu cukup lama dirusak oleh rasialisme.

Selama berada di Tanah Suci, aku telah dapat menerangkan apa sebenarnya yang terjadi antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Negro Amerika tak dapat begitu saja disalahkan jika selama ini mereka merasa dendam. Hal itu hanya sebagai reaksi terhadap rasialisme di Amerika yang sudah berjalan selama 400 tahun lebih. Rasialisme merupakan salah satu cara "bunuh diri" bagi Amerika, sebab generasi muda saat ini banyak yang berpendidikan tinggi, dan pasti sudah membaca sejarah serta mengerti secara spiritual apa yang disebut kebenaran. Hanya dengan cara itu Amerika bisa mengatasi masalah rasialisme.

Tidak pernah aku merasa begitu mulia. Siapa yang dapat percaya begitu saja, bahwa karunia itu diturunkan kepada seorang Negro Amerika yang lemah dan tidak berdaya? Contohnya, beberapa malam lalu, aku berjumpa dengan seseorang yang bila ia berada di Amerika dapat dimasukkan ke dalam ras kulit putih. Ia seorang diplomat dari PBB, seorang duta besar, sahabat para raja. Ia menginginkan aku untuk tinggal di kamarnya yang mewah di hotel. Melalui laki-laki ini, Yang Mulia Pangeran Faisal, penguasa Tanah Suci mengetahui kehadiranku di Jeddah.

Pagi berikutnya, putra Pangeran Faisal datang seorang diri menemuiku dan mengatakan bahwa ayahnya mengundangku sebagai tamu negara.

Deputi Kepala Protokol sendiri yang menjemputku sebelum pelaksanaan ibadah haji. Yang Mulia Sheikh Muhammad Harkon sendiri yang menyambut kedatanganku di Mekkah. Beliau memberiku dua buah buku tentang Islam, lengkap dengan tanda tangan pribadi dan otobiografinya. Beliau berkata dan berharap agar aku menjadi mubaligh besar bagi ummat Islam di Amerika. Sopir dan penunjuk jalan mengantarku ke tempat tujuan, yang membuatku mudah untuk meneruskan perjalanan ke Tanah Suci. Pemerintah menyediakan kamar ber-AC dan pelayan, di setiap kota yang kusinggahi. Sedikit pun aku tidak pernah memimpikan bahwa suatu saat aku diperlakukan sedemikian mulia, yang di Amerika mungkin hanya pantas diberikan kepada seorang raja, bukan kepada seorang Negro. Segala puji bagi Allah, Raja dari segala raja di dunia.

Salam hormat,
El-Hajj Malik El-Shabazz [Malcolm X]

# Tantangan Sistem Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Prof. Didin S Damanhuri*

Setelah berjalan lebih dari tiga dasa warsa perkembangan sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Tanah Air, layak kiranya dicermati bagaimana perkembangan tersebut dalam konteks "Sistem Ekonomi Islam (SEI)" yang menjadi payungnya secara komprehensif. Hal ini karena seringkali banyak pihak yang mengartikan sistem perbankan syariah (SBS) seolah sudah otomatis sebagai SEI.

Memang salah satu pilar penting SEI adalah SBS, tapi bukan satu-satunya. Dalam SEI, SBI baru merupakan salah satu dari empat pilar Ekonomi Islam, yakni: sistem keadilan ekonomi (makro dan mikro), sistem keuangan syariah (termasuk SBS di dalamnya), keluarga batih (*extended family*) dan peran negara (*State*). Dengan demikian, meskipun pertumbuhan SBS di Indonesia sangat spektakuler (pertumbuhannya di atas 10 persen per tahun). Namun jika dikaitkan baik dengan problem internal SBS sendiri maupun dengan tiga pilar yang lainnya, agaknya perjuangan untuk mengembangkan SEI masih sangat berat dan panjang.

**Tantangan SBS**

Misi kehadiran SBS tak lepas dari prinsip dalam Islam yakni memperjuangkan kesejahteraan umum (*falah*) baik material maupun spiritual dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Hal itu baik dalam rangka mencapai *good governance* maupun *good life (high quality of life)*. Secara kongkret, halangan di Tanah Air untuk menegakkan dua prinsip tersebut adalah karena secara struktural telah terbentuk "ekonomi gelembung" (*bubble economy*) yang ribawi (karena makin maraknya aktivitas spekulasi baik dalam pasar barang, pasar uang maupun pasar modal). Juga masih dominannya "kapitalisme semu (*erzatz capitalism*") karena meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi sebelum krisis 1998 (7-8 persen) dan masih positif di saat krisis (4-5 persen dari 1998 hingga sekarang), namun sektor riil masih sulit bergerak secara massif dan berkelanjutann. Dampaknya malahan pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan justru makin memburuk.

Dengan pertumbuhan SBS tahun 2022 sekitar 14,2 persen dengan aset Rp 703.167 trilyun (baru sekitar tujuh persen dari aset perbankan konvensional, yakni Rp10.112,3 triliun). Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana di samping terus mendongkrak pertumbuhan SBS setidaknya dalam dua dasawarsa ke depan dapat tumbuh lebih dari 15 persen sehingga menjadi lebih mendekati bank konvensional yakni Rp10.112,3 triliun. Juga persoalannya, dapatkah SBS turut mendekonstruksi ekonomi gelembung (*bubble economy*), kapitalisme semu dan spekulatif (ribawi) dalam kehidupan makro ekonomi nasional?

Dengan demikian, ia mampu merekonstruksi ekonomi yang dapat menjamin penciptaan kesejahteraan umum (material dan spiritual) dan *high quality of life*, setidak-tidaknya mampu mengurangi ketimpangan, pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan umat dan bangsa. Sementara, dalam struktur internal SBS hingga sekarang ini, prinsip *mudharobah* dan *musyarokah* yang justru merupakan instrumen untuk mengerakkan sektor riil, baru berjumlah Rp 224.055 T (32 persen). Sisanya dari total alokasi penggunaan SBS, adalah: (1) Penempatan di Bank Indonesia dan bank-bank lain berjumlah Rp 230.665 T (33 persen). (2) Alokasi lainnya (Murabahah,

*) *Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat*
*Guru Besar Ekonomi FEM IPB*

Qardh. Istishna kepada bank lain dan bukan bank, Ijarah dan tagihan lainnya) berjumlah Rp 231.996 T (33 persen). (3) Kas berjumlah Rp 7.608 T (2 persen).

Dengan demikian, SBS masih jauh dari produktif (menggerakkan sektor rill terutama UMKM yang merupakan 99,98 persen dalam struktur dunia usaha) yang sangat membutuhkan pinjaman dengan prinsip bagi hasil (*mudharobah* dan *musyarokah*), di mana SBS baru mengalokasikan 32 persen. Sementara penempatan di surat berharga BI dan bank-bank lainnya 33 persen.

Belum lagi kalau dilihat dari SBS ini menjadi bagian dari sistem perbankan yang *Branch Banking System* (sentralisme) dalam Sistem Perbankan Nasional/SBN di mana dana dari daerah-daerah disedot ke Jakarta (keberadaan kantor-kantor pusat dari bank bank termasuk bank bank Syariah). Kemudian dana pihak ketiga tersebut dialokasikan umumnya ke nasabah-nasabah yang berada di kota-kota besar dan yang terbesar berada di Jakarta. Maka yang terjadi, dengan SBN yang sentralistik (termasuk SBS) itu, ada pengeringan liquiditas di daerah-daerah dan perdesaan yang makin memakmurkan kota-kota. Ini karena dana yang tersedot ke kota-kota itu yang kembali ke daerah-daerah dan perdesaan tidak sampai 10 persen.

Itu semua gambaran tantangan dalam mengembangkan SBS kini dan di masa depan.

**Penegakan keadilan ekonomi**

Lebih jauh, tantangan mewujudkan Ekonomi Islam secara lebih mendasar adalah karena dalam prinsip ekonominya berbeda dengan "ekonomi jahiliyah" sekarang ini, yang lebih didorong untuk memaksimalkan "keinginan" (*wants*) bahkan cenderung keserakahan (*greedy*). Misal, di negeri ini korupsi yang marak dalam tataran individu, bisnis dan kenegaraan (pemerintahan, parlemen dan peradilan). Hal itu karena masalahnya di negeri ini kebebasan lebih dulu berkembang sebelum terjadinya supremasi dan pembudayaan hukum seperti preseden di negara-negara Barat yang korupsinya rendah.

Namun di Barat pun sesungguhnya dibangun dalam waktu ratusan tahun dengan prinsip "pemenuhan maksimal dari keinginan" yang diasumsikan oleh pendiri ekonomi modern, Adam Smith, untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat (*pareto optimality*). Namun ini juga rapuh. Buktinya, depresi besar tahun 1930-an maupun krisis kontemporer (1998, 2008, 2020) antara lain karena prinsip pemenuhan *wants* baik dalam tataran individu, antara lain marak spekulasi saham, maupun bisnis dan kenegaraan. Yang terakhir disebut adalah ekonomi neoliberalisme dengan paradigma dan kebijakan globalisasi ala WTO yang mendorong dunia dengan perdagangan bebas, sehingga menjadikan ekonomi gelembung global runtuh karena arus uang telah 700 kali lebih besar dari arus barang.

Dalam prinsip ekonomi Islam yang bisa menjamin keadilan, baik motivasi individu, bisnis maupun kenegaraan harus dibangun berdasarkan "kebutuhan" (*felt need*) dengan prinsip hidup "sederhana" (bukan miskin, tapi mampu memenuhi kebutuhan yang wajar, tidak boros, apalagi serakah). Contoh dalam kehidupan nyata tentu saja adalah zaman Rasulullah hingga pemerintahan empat sahabat (*khulafa ar-rasyidin*).

Namun di zaman sekarang ini, justru dalam arti bangsa yang relatif dapat merealisasikan prinsip ini dipelopori India. Ini karena sejak tahun 1950-an, ditekankan prinsip "Swadhesi" oleh pemimpinnya, Mahatma Gandhi, yang pribadinya sederhana dan berhasil disosialisasikan baik dalam tataran individu maupun kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hingga Sekarang India terkenal kehidupan elit kenegaraannnya yang sederhana (pakaian, kendaraan, rumah pribadi maupun rumah jabatan) maupun prinsip kemandirian dalam ekonominya.

Persoalannya adalah bagaimana mentranformasikan prinsip "kesederhanaan" berdasarkan *felt needs* tersebut ke dalam tataran individu, bisnis dan kenegaraan di kalangan umat, bangsa bahkan masyarakat global sehingga lebih menjamin penciptaan keadilan makro maupun mikro ekonomi. Ini butuh *effort* dakwah keteladanan, pendidikan, gerakan sosial dan ekonomi, dst. Juga perlu dekonstruksi dan rekonstruksi kurikulum, teori dan epistemonologi dalam keilmuan sosial dan ekonomi yang sekarang ini sangat didasarkan kepada premis-premis keinginan dan keserakahan.

Salah satunya di tataran global adalah perilaku MNC (*Multinational Corporation*) yang beroperasi dengan kegiatan ekonomi ekstraktif, yakni mengeduk keuntungan super normal dengan kegiatan penambangan dan perkebunan yang merusak ekologi sekaligus mengekspoitasi SDA negara-negara berkembang, tanpa memakmurkan penduduk setempat. Ini Harus dikoreksi, seperti yang dikumandangkan Klaus Schwab (*Chairman of World Economic Forum)* tentang perlunya *The Great Reset* termasuk mendesaknya penerapan pembangunan yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

***Extended family***

Di negara-negara barat dewasa ini, mayoritas masyarakatnya bertumpu kepada keluarga inti (*nucleus family*) bahkan kepada *single parent* (seorang ibu dengan anak-anaknya) karena massifnya (70-90 persen) kehidupan tanpa pernikahan (*free sex)* yang menurut hasil penelitian telah menimbulan massifnya IQ rendah, karena anak-anak dibesarkan tanpa kasih sayang orang tua lengkap serta karena telah ditinggalkannya prinsip kesucian pernikahan.

Dalam Islam, prinsip kesucian pernikahan dengan kehidupan keluarga *sakinah mawaddah marrahmah* (penuh ketentraman dan kasih sayang), bahkan *extended family* adalah sangat mendasar. Misalnya zakat, infak dan sadaqah untuk fakir miskin diutamakan untuk yang masih terkait keluarga (keluarga besar) sehingga di Indonesia telah terlembagakan tolong-menolong antar keluarga jauh. Secara lebih luas sesungguhnya dalam Islam harus mampu membangun lewat *nation state* yang tergabung dalam OKI sistem "Negara Kesejahteraan". Dalam konsep tersebut negara dengan sistem jaminan sosialnya mampu melindungi kaum fakir, miskin, anak-terlantar, penganggur, orang-orang cacat, dan kaum lemah lainnya secara efektif dan efisien.

Negara-negara Eropa umumnya terkenal sudah lebih dari seabad menjadi bangsa yang dapat dicontoh dengan tingkat kemiskinannnya di bawah lima persen (AS sekarang sekitar 18 persen), karena efektivitas sistem jaminan sosialnya. Indonesia sudah memiliki UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan UU BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari pasal 34 UUD'45, yang sekarang sudah berjalan sejak 2014. Umat Islam sepatutnya mendukung pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS Kes dan TK tersebut sehingga prinsip Islam dan UUD'45 untuk melindungi kaum lemah dapat dilaksanakan.

Tapi itu baru dari segi materi. Dalam Islam juga harus dipenuhi kesejahteraan material (terbebas dari kemiskinan ekonomi) maupun spiritual, yakni peningkatan iman, akal, kualitas hidup, sistem reproduksi (keturunan yang baik) dan harta yang cukup (mendorong jadi orang kaya secara halal dan baik sehingga mampu membayar zakat dan naik aji). Masalahnya adalah bagaimana mentranformasikan ke dalam prinsip kenegaraan dan kemasyarakatan, baik dengan keteladanan, pendidikan, pelembagaan dan sistem hukum maupun masuk dalam konten strategi pembangunan nasional. Juga pengembangan kepribadian yang memadukan kecerdasan *intelllegence, emotional, spiritual and social* --seperti digiatkan Dr.Arry Gunanadjar, hendaknya didukung bahkan selayaknya masuk dalam sistem pendidikan nasional.

Tentu saja negara bangsa Indonesia juga harus sekaligus menjaga kelangsungan *extended family* dengan kesucian pernikahan (menghindari perilaku seks menyimpang) di mana keluarga batih menjadi sistem jaminan sosial infomal yang melengkapi SJSN yang makin disistematiskan dan disempurnakan lagi. John Naisbitt malah menyebutkan dalam "*Megratrend Asia*" (1995), *extended family* menjadi sistem jaminan socsal berbasis keluarga.

Mengiringi kebangkitan agama di Asia inilah yang dapat mengalahkan Barat dalam kompetisi pembangunan. Dengan demikian Asia lebih kompetitif secara makro ekonomi-sosial, karena menggabungkan jaminan social keluarga dengan sistem jaminan sosial negara

**Negara yang adil**

Prinsip keempat dalam ekonomi Islam adalah negara yang adil, baik dalam arti strukturnya yang menjamin keadilan ('*adalah*), yakni antieksploitasi, antipenindasan, antihegemoni (demokratis) maupun dalam fungsinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, *khalifatullah fil ardh*). Tugas itu terutama menciptakan solidaritas sosial dan universal (menghapuskan kemiskinan dan kerja sama antara negara dalam mencapai *millenium development goals* dan sejak 2015 untuk mencapai *sustainable development goals* seperti dicanangkan PBB).

Tak terhindarkan juga penegakan *good governance* (terbebas dari korupsi, amanah dalam mengelola SDA dan SDM), Inovatif (*enterpreneurial goverment*), kesederhanaan (efisien dan efektif, tidak boros) dan menjamin kebebasan (HAM individual maupun sosial).

Prinsip negara (*nation state*) yang demikian sebagian telah menjadi prinsip-prinsip Negara Modern. Ini yang kini tengah diperjuangkan oleh bangsa kita dalam era reformasi. Namun dalam solidaritas universal misalnya belum masuk menjadi prinsip kerja sama antarnegara. Persoalannya adalah bagaimana mentranformasikan prinsip-prinsip Islam dalam aspek "agama publik" (*public religion* / Mu'amalah) tersebut dalam kehidupan negara secara nasional dan global agar terjamin keadilan dengan pendekatan dalam rangka kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (*ramatan lil aalamiin*).

**Rekomendasi**

Dari uraian tersebut diatas, tulisan ini mencatat rekomendasi bagaimana menjawab tantangan sistem keuangan syariah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut :

Pertama, negara agar lebih serius mentransformasikan pembangunan yang berkeadilan social, dengan mengambil banyak inisiatif *reform,* baik dalam perundang-undangan maupun kebijakan pembangunan negara secara fiskal, moneter dan perbankan termasuk di tingkat daerah. Hal ini agar perintah sila ke lima dari Pancasila (juga sesuai dengan prinsip '*adalah* dalam ekonomi Islam) makin menjadi aksi nyata dan efektif mengoreksi ketimpangan yang membuat Indonesia kini menempati peringkat ke-4 terburuk di dunia.

Kedua, agar pemerintah mengkontruksi *Uni Banking System* (lebih desentralistik), sebab dengan *branch banking system* seperti sekarang akan terus menerus menciptakan pengeringan likuiditas daerah dan perdesaan (termasuk penduduknya yang makin miskin) dan semakin memakmurkan perkotaan (termasuk warganya) sehingga ketimpangan kota-desa dan kaya-miskin akan makin buruk, termasuk SBS yng turut menciptakan ketidakadilan sosial ini.

Ketiga, perlunya digalakan narasi keadilan serta sensitivitas UMKM, Pertanian dan perdesaan di antara para bankir (konvensional, terlebih lagi bagi Syariah) untuk menciptakan keadilan finansial, ekonomi dan sosial. Yakni, antara lain melakukan lokakarya diantara para bankir (konvensional khususnya yang syariah) untuk menemukenali data empiris tentang alokasi kredit perbankan, khususnya yang syariah serta pelatihan praktis dalam melayani nasabah usaha mikro, kecil dan menengah yang kompatibel untuk bisnis yang berkelanjutan.

Model *Grameen Bank* dan BMT malah telah sukses memberdayakan UMKM dengan jutaan warga miskin terangkat kapasitas usahanya.

Keempat, agar perbankan syariah tidak terjebak kepada *growth oriented* dalam pengembangan SBS. Pertumbuhan yang tinggi, sehat dan berkelanjutan adalah *necessary condition,* tapi *unsufficent condition* untuk tercapainya *maqosyid syariah,* yakni keadilan finansial, ekonomi dan social dalam masyarakat. Ini terutama dalam mengalokasikan dana pihak ketiga kedalam skema bagia hasil (*mudharobah* dan *musyarokah*) yang menggerakkan sektor riil.

**Rujukan**


- Didin S Damanhuri: *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, IPB Press, 2010, 2013 dan 2014.

- Didin S Damanhuri: *Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa*, Pustraka Pelajar, 2014.

- Muhammad Baqir Ash Shadr: *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna* (Buku aslinya *Our Economics*), Penerbit Zahra, Jakarta, 2008.

- Umer Chapra: *Islam dan Tantangan Ekonomi* (terjemahan dari buku aslinya *Islam and the Economic challence*), Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2000.

- Umer Chapra: *Sistem Moneter Islam* (buku aslinya *Towards A Just Monetary System*), Gema Insani Press, 2000;

- Umer Chapra*: Masa Depan Ilmu Ekonomi, Tinjaun Islam* (buku aslinya *The Future of Economics: An Islamic Perspective*), Gema Insani Press, 2001.

**https://hajj.leeds.ac.uk/exhibition/the-changing-hajj-in-modern-times/**

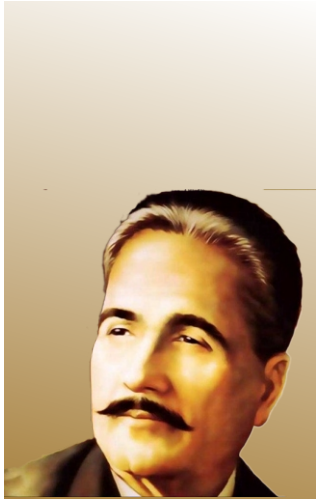

# Sekelumit "Fase Pendidikan Pribadi", Puisi Sir Muhammad Iqbal dari Kumpulan Puisi "Asrar-I-Khudi"

Redaksi Jurnal Kasyaf

Muhammad Iqbal (1877 – 1938) adalah seorang filosof dan penyair. Beliau lahir di Sialkot, India dari keluarga Muslim yang shalih, dan wafat di Lahore, Pakistan. Memperoleh pendidikan dasar dan menengah di Sialkot. Sejak sekolah dasar, Iqbal telah tertarik dan menekuni kaitan sastra dan agama. Gelar M.A. diperolehnya di Universitas Cambridge-Inggris, dan gelar doktor dalam bidang filsafat diperolehnya di Universitas Munich-Jerman.

Berbekal banyak ilmu dari dunia Islam dan dunia barat, Iqbal membuat sinergi antara filsafat-tasawuf-sastra dan mengarahkan sinergi tersebut untuk mengajak umat Islam di dunia bangkit dari keterpurukan dan berdiri sejajar dengan bangsa barat. Iqbal tidak menolak pemikiran barat, namun mengajak kita untuk kritis terhadap kebudayaan barat dan memperkuat tradisi Islam, guna membangun jalan unik umat Islam dalam meraih kemajuan dan kesuksesan hakiki.

Iqbal produktif menulis kumpulan puisi. Ciri khas kumpulan puisinya adalah watak menggugah dan menggelorakan semangat untuk bangkit. Di antara kumpulan puisinya adalah "*Asrar-i-khudi*" ("*Rahasia Diri*"). Puisi "Fase Pendidikan Pribadi" berikut ini baik isi maupun maknanya relevan sekali dengan kepribadian Muslim yang diharapkan muncul setelah melakukan ibadah haji.

Beberapa inti pemikiran Iqbal dalam puisi ini, antara lain:

**1. Ketaatan**

*Bijak dan kerja keras adalah sifat unta*

*Sabar dan tegar itu jalan hidup unta*

*Langkah lembut menapak di padang pasir*

*Dialah kapal bagi para pengarung samudra pasir*

*Semak belukar mengenal jejak langkahnya*

*Dialah makhluk yang jarang makan, tidurnya sedikit*

*Dan biasanya bekerja keras.*

*Dibawanya beban di punggung*

*Berlari dan berlari hingga sampai ke tujuan*

*Langkahnya selalu gembira ria*

*Unta hewan yang sabar, lebih sabar dari penunggangnya*

*Engkau juga, kawan, jangan kau tolak tugas kewajiban*

*Agar dapat kau hidup di sisi Tuhan*

*Hai, orang ceroboh, taat dan patuhlah*

*Kemerdekaan adalah hasil paksaan.*

*Karena ketaatan membuat orang rendah menjadi terhormat*

*Oleh karena keras kepala apinya jadi abu lagi*

*Siapa yang hendak menguasai matahari dan bintang*

*Jadikan dia tawanan hukum*

*Angin terpesona oleh wangi bunga*

*Wewangian sempurna diantara muskus*

*Bintang melesat ke tujuannya*

*Dengan kepala tertunduk kepada hukum*

*Rumput tumbuh karena taat pada hukum tetumbuhan*

*Jika tak dipedulikan hukum itu, maka rumput pun mati terinjak.*

*Selalu terbakar adalah hukum bunga tulip*

*Dan darah semburat dari batangnya*

*Karena hukum kesatuan setitik air jadi laut*

*Dan segenggam pasir menjelma gurun Sahara*

*Karena hukum segalanya jadi kuat*

*Tapi mengapa kau abaikan kekuatan itu?*

*Wahai kau yang lepas dari hukum Islam*

*Hiasi kakimu dengan langkah agama.*

**2. Penguasaan diri**

*Ruhmu semata membutuhkan dirimu sendiri bagai unta*

*Sebab unta yakin pada dirinya sendiri, mengatur dirinya*

*Dan kuat kehendaknya.*

*Jadilah jantan, pegang talinya dalam genggamanmu.*

*Agar kau jadi mutiara meskipun kau tempayan.*

*Bagi dia yang tak sanggup mengatur dirinya sendiri*

*Maka dia hanya jadi budak orang lain.*

*Jika mereka bentuk dirimu dari lempung*

*Maka cinta dan ketakutan campur aduk dalam kejadianmu*

*Engkau akan jadi takut kepada dunia ini*

*Takut pada masa depan*

*Takut pada mati*

*Takut dan nestapa terhadap derita di bumi dan di langit;*

*Cinta harta dan kekuasaan, cinta tanah air*

*Cinta pada diri serta sanak keluarga*

*Itulah campuran sempurna lempung dan air*

*Tapi bagi dia yang berlumur dosa matinya celaka*

*Peganglah selalu kalimat "Tiada Tuhan Selain Allah"*

*Maka akan kau pecah setiap lembah ketakutan*

*Pada siapa Tuhan bagai jiwa bagi raganya*

*Kepalanya tak tunduk pada segala kesombongan*

*Tak ada takut dan cemas dalam dadanya*

*Hatinya tak pernah gentar selain kepada Allah semata*

*Tiada yang lebih ditakjubkannya selain Allah*

*Dan Ibrahim pun melekatkan belati ke leher Ismail putranya sendiri,*

*tapi dia bagai prajurit di medan laga*

*Di matanya kehidupan ini lebih murah dari sehelai baju.*

*Iman adalah kepahnya, shalat itu mutiaranya.*

*Hati Muslim menganggap setiap shalat adalah umrah*

*Di tangan Muslim shalat seumpama pisau tajam*

*Untuk membunuh dosa, kebekuan hati, serta segala noda*

*Sedang puasa untuk menyerang lapar dahaga*

*Dan menghancurkan benteng nafsu angkara.*

*Pergi haji memberi cahaya bagi pikiran beriman*

*Diajarkan kita meninggalkan rumah*

*Melupakan sebentar tanah air sendiri.*

*Itulah namanya amal kebaktian*

*Di mana semua bangsa bersatu padu*

*Diikat lembar kitab agama.*

*Zakat mengajar yang kaya jadi dermawan*

*Melunaskan rasa kebersamaan*

*Dikuatkannya hati pada laku kebaikan*

*Dilipatgandakan kekayaan*

*Mengurangi sikap cinta harta benda.*

*Semua ini adalah jalan memperkuat dirimu*

*Kau jadi kokoh*

*Andai Islammu kuat*

*Capailah sifat qawi-Nya*

*Agar dapat kau tunggangi unta jisimmu sendiri!*

**3. Perwakilan pribadi**

*Jika engkau dapat kuasai untamu, niscaya dunia kau kuasai*

*Di kepalamu akan berkilau singgasana Sulaiman*

*Dirimu akan jadi cemerlang dunia, selama dunia ini masih berkembang*

*Alangkah nikmatnya jadi khalifah Ilahi di bumi ini*

*Segala unsur tunduk tekun padamu!*

*Niyabat-i-llahi adalah bagai jiwa alam semesta*

*Ujudnya jadi bayangan Nama Yang Terluhur*

*Diketahuinya segala rahasia hingga yang sekecil-kecilnya*

*Dikerjakannya perintah Tuhannya*

*Jika didirikannya kemah di alam luas ini*

*Maka digulungnya permadani zaman yang uzur.*

*Kecakapannya penuh sinar kehidupan*

*Dan ingin mewujudkan dirinya*

*Dia akan menciptakan dunia lain yang baru*

*Dunia-dunia kecil dengan kelengkapannya di atas bumi ini*

*Bermekaran bagai mawar dari benih khayalnya*

*Dijadikannya setiap alam yang kasar berubah kemurnian*

*Dipindahkannya patung-patung dari rumah suci*

*Sentuhannya menggetarkan dawai kalbu jadi musik merdu*

*Bangun dan tidurnya demi Allah semata.*

*Diajarkannya kepada yang dewasa lagu muda belia*

*Dan ditaburkannya cahaya bahagia*

*Kepada umat manusia*

*Serta digemakannya amanat gembira dan peringatan*

*Dia datang seperti seorang prajurit*

*Seperti seorang jenderal ataupun pangeran gagah perkasa*

*Dialah sebab terakhir dari Allah*

*Yang mengajarkannya tiap nama benda*

*Dialah tabir rahasia dari Maha Besar Tuhan*

*Musa yang diperkukuh dengan tongkatnya*

*Ilmunya berpasangan dengan kodrat manusia unggul*

*Langkahnya gagah perkasa mengeringkan Laut Merah*

*Dipimpinnya Bani Israil dari Mesir Kuno*

*"Bangkitlah!" pekiknya*

*lalu mereka yang mati ruhani bangkit bagai dahan pohon tusam.*

*Kepribadiannya jadi pembebasan dunia*

*Karena sifat luhurnya dunia pun terhindar dari bencana*

*Bayangannya jadi payung dari terik matahari*

*Wujudnya yang padu memberi nilai bagi segala yang ada*

*Jejak langkahnya jadi pandangan yang luas*

*Betapa Musa terpesona oleh bukit Sinainya*

*Diberinya tafsir baru bagi kehidupan tentang mimpi itu*

*Wujudnya terpendam seperti musik yang tak terdengar*

*Dari dawai kecapi hidup ini adalah rahasia kehidupan*

*Alam bekerja keras dalam darah generasi*

*Yang menciptakan kepaduan indah pribadinya*

*Apabila setumpuk abu kita mencapai puncak kejayaan*

*Maka Sang Unggul akan menjelma dari abu itu!*

*Baringlah kau di atas abu kekinian*

*Nyala api yang menerangi dunia masa depan*

*Putik kita akan menumbuhkan taman sari bunga mawar*

*Mata terang berkilau oleh fajar esok*

*Datang engkau, wahai penunggang kuda takdir!*

*Datang kau, wajah cahaya dalam gelap gulita perubahan!*

*Terangi kegembiraan penciptaan*

*Menyalalah dalam kegelapan mata kami!*

*Redam hiruk-pikuk bangsa-bangsa*

*Penuhi telinga kami dengan nyanyianmu*

*Bangkitlah dan kumandangkan kecapi persaudaraan dunia*

*Serahkan kembali piala anggur cinta*

*Gambar lagi zaman perdamaian bagi mereka yang berjuang*

*Umat manusia adalah ladang dan kaulah pemanennya*

*Kau-lah arah tuju kafilah kehidupan*

*Daun-daunnya berterbangan diamuk musim gugur*

*Ah, lintasi taman kami bagai musim semi*

*Terimalah alis mata kami yang menunduk ini*

*Jika engkau hadir kami kembali mengangkat kepala*

*Suka cita menggeluti nyala yang membakar dunia ini. [ ]*

Epilog :

# Adil, Sejak dari Dugaan

Darmawan Sepriyossa*

Bila kita selalu percaya bahwa rumput tetangga itu senantiasa lebih hijau dan rimbun, tampaknya harus berkaca kepada apa yang pernah terjadi di negara tetangga, Malaysia. Apalagi justru pada hal yang pasti dirujuk lebih baik, diyakini layak menjadi *benchmark* pada semua aspeknya. Pokoknya, hal yang dipersepsi konsisten sebagai teladan: Tabung Haji (TH).

Dua tahun lalu, Agustus 2020, Tabung Haji mencuat jadi salah satu isu paling penting di negeri jiran tersebut. Wajar, sebagaimana Indonesia, Malaysia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim, sehingga urusan ibadah haji tentu saja perkara penting. Sengkarut terus berproses, hingga menyimpul pada momen fenomenal, debat besar yang menguras perhatian warga negeri jiran tersebut.

Seolah menghadirkan perang tanding kata-kata yang fenomenanya mendunia, antara John F Kennedy dan lawannya Richard M. Nixon dalam kontestasi kursi presiden AS tahun 1960, debat terbuka di Malaysia itu pun gegap gempita. Panasnya membelah warga Melayu laiknya perseteruan cenong vs kampret di kita yang seolah tak mengenal usai. Semua berlangsung sengit di bawah tatapan hampir sejuta pasang mata warga Malaysia via layar tv mereka. Sejuta lainnya mengikuti via *streaming Facebook*. Bedanya, jika di AS para protagonisnya adalah Kennedy dan Nixon, di perang tanding Malaysia adalah Datuk Seri Dr Mujahid Yusof—mantan menteri agama, melawan Datuk Seri Azeez Rahim, mantan pimpinan TH. Sementara wartawan Tan Sri Johan Jaaffar bertindak seolah Howard K. Smith yang menjadi moderator debat panas tersebut.

Yang membikin debat itu diserbu perhatian public dengan atensi melimpah, karena bagi warga Semenanjung Malaya itu Tabung Haji tak hanya lembaga nasional membanggakan, dengan nama harum yang meruap ke seantero dunia. Yang lebih utama, TH adalah lembaga yang membuat mimpi setiap warga Malaysia yang Muslim untuk pergi haji menjadi nyata dan teralami. Itu pula memang yang menjadi alasan utama mengapa lembaga kebanggaan Malaysia itu berdiri.

Sejarah berdirinya TH bermula dari keprihatinan Prof Diraja Ungku Abdul Aziz. Pada awal 1950-an itu, Ungku Aziz melihat meluapnya minat warga Muslim Malaysia untuk berhaji. Namun hal itu terkendala, terutama karena tidak akrabnya mereka dengan sistem perbankan. Warga yang berkecukupan umumnya menabung di bawah kasur, dalam bantal atau bumbung bambu di rumah mereka. Sementara golongan yang lebih papa atau kalangan yang kurang sabar dengan gampang diiming-imingi lintah darat untuk diberi pinjaman keberangkatan. Tak tanggung-tanggung, bunganya bisa 100 persen hingga 200 persen setahun!

Karena masih kuatnya kepercayaan publik bahwa bank itu lembaga riba, pada 1959 Ungku Aziz menyodorkan ide membentuk TH kepada pemerintah Malaysia. Idenya, lembaga itu adalah sebuah institusi keuangan untuk mengelola sumber-sumber tabungan haji warga, tanpa berdasarkan riba, tetapi dengan cara investasi-investasi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sekaligus mampu memberi keuntungan yang akan dikembalikan kepada tabungan mereka. Lama mengalami penajaman, lembaga itu baru berdiri resmi pada 1963.

Singkatnya, TH kemudian berkembang fenomenal. Ia menjadi acuan banyak negara berpenduduk mayoritas Islam. Penelitian Nurhasanah dari Universitas Islam Negeri Jakarta,"*Tabung Haji Malaysia dalam Perspektif Ekonomi*", menuliskan,

---

**Jurnalis, pernah berkiprah di Majalah Panji, Majalah TEMPO, harian Republika. Saat ini bekerja di INILAH.COM.*

bila pada saat pendirian di tahun 1963, tabungan TH hanya sekitar RM 46.610 yang didapat dari 1.281 jamaah haji Malaysia, pada 2007 saja investasinya di bidang ekuitas sudah mencapai hampir RM 7,6 miliar (sekitar Rp 26,56 triliun pada kurs 3.495), dan mendominasi alokasi asset lebih kurang 44 persen.

Dengan jumlah investasi yang besar ini, TH memegang saham di 161 buah perusahaan yang terdaftar, 25 perusahaan yang tidak terdaftar merupakan perusahaan subsidiari. Keuntungan dari penanaman saham dalam tahun 2007 itu telah menunjukkan peningkatan sebanyak RM 750 juta (Rp 2,62 triliun) atau 155 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara dari pendapatan deviden dan profit pemilikan saham, tahun itu TH mengeruk RM 279,8 juta (sekitar Rp 977, 9 miliar).

Angka yang lebih mutakhir diperoleh dari media Malaysia, *Sinar Harian*. Media tersebut menyatakan, sampai 2017 TH mengurus dana haji 9,3 juta jamaah, meliputi dana sebesar RM 73 miliar—atau sekitar Rp 255,14 triliun pada kurs 3.495.

Selain debat keras tersebut, pemerintah Malaysia pun membentuk Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI), untuk menyelidiki berbagai kisruh keuangan TH, terutama yang menjadi pertayaan publik, yakni seputar penjualan asset-aset Tabung Haji.

Dari debat tersebut mengemuka, warga Malaysia yang dalam debat itu direpresentasikan Mujahid Yusof, tidak hanya mempertanyakan mengapa pengurus TH harus menjual atau menggadaikan banyak asset, termasuk empat hotel terkemuka di lokasi strategis serta lebih dari 6.400 hektare ladang kelapa sawit. Ada lagi soal lain; tuduhan bahwa TH sudah sangat dipolitisasi untuk kepentingan rejim penguasa.

Misalnya, Mujahid mempertanyakan mengapa TH harus memperjudikan nasib jamaah haji tahun-tahun mendatang dengan memberikan subsidi haji sekitar RM 300 juta (Rp 1,049 triliun) per tahun. Wajar dipertanyakan, dengan kian muramnya bisnis, nasib jamaah haji ke depan belum tentu seuntung jamaah haji tahun-tahun sebelumnya, yang mendapatkan subsidi hampir RM 15 ribu ( sekitar Rp 52,4 juta) per orang.

Belum lagi, kata Mujahid, Tabung Haji yang diyakininya menjalankan 'perintah' pemerintah yang berkuasa, memberikan hibah itu pada saat yang bisa mempengaruhi pilihan politik warga. Ia mencontohkan, pada 2018 Tabung Haji membayarkan hibah haji pada bulan Februari. “Pada waktu itu nak dekat pilihan raya (Pemilu). Mereka keluarkan dua kali hibah. Mana pernah orang beri dua kali hibah?” kata Mujahid menyerang. Dalam perhitungannya, hibah itu sejatinya bahkan tak boleh dikeluarkan, mengingat “tidak padan” dengan keuntungan. “Kasih hibah tinggi, tetapi bisa bikin haji tidak *sustainable* kerana hibah itu tidak padan dengan untung yang TH dapat,” kata dia, menyerang.

-Ini juga tuntutan lama di kita

-Adil, transparan, tak hanya murah—ini soal ibadah (skema Ponikah?.

Bahagialah rakyat Malaysia yang dengan debat itu transparansi pun terjadi. Karena perdebatan itu, urusan Tabung Haji kemudian menjadi wacana terbuka yang menguak banyak fakta dan data tentang apa sebenarnya yang (tengah dan telah) terjadi di sana.

Itu yang relatif belum kita nikmati saat ini dalam soal keuangan haji. Bukan hanya urusan pengelolaannya, tetapi bahkan pada sisi yang lebih esensial lagi, soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Ini soal lama yang bahkan bisa dibilang klasik. Satu dekade lalu, 2012, anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi PKS (waktu itu), Ledia Hanifa, pernah meminta kejelasan soal ini. Ia berhujjah, masyarakat berhak mendapat kejelasan dan keadilan dalam menanggung biaya haji, jadi bukan sekadar menerima berapa saja keputusan biaya yang harus ditanggung. Ada banyak catatan Ledia saat itu, yang terlalu panjang dan detil untuk diangkat melalui tulisan pendek ini.

Setahun setelah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lahir, dengan *ghirah* dan semangat tinggi lembaga baru itu mencoba lebih transparans. Saat itu di masyarakat beredar isu bahwa biaya haji dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dengan argumentasi kuat dan data kredibel BPKH kemudian melawan isu negative yang merugikan itu.

Tentu saja upaya tersebut menggembirakan, tapi sangat jauh dari cukup. Yang masih selalu saja menjadi pertanyaan dan menjadi harapan masyarakat adalah keterbukaan tentang dengan cara bagaimana dan diputar seperti apa dana haji itu? Ini pun kian kini semakin terbuka, transparans dan relatif cukup memuaskan keingintahuan masyarakat. Yang masih diharapkan public karena relative belum dijawab, apakah benar dana haji pun, karena sekian banyak tarikan kepentingan dan tekanan untuk 'untung', terjebak ke dalam sistem Ponzi?

Kami yakin, dalam urusan haji, masyarakat akan jauh dari sikap tak mau tahu. Mereka bahkan sangat mau tahu, hingga bagi pihak pemerintah dan pengelola dana haji, mungkin terkesan nyinyir. Itu tak aneh, mengingat perjalanan haji adalah ibadah, yang semua aspeknya, termasuk pembiayaan, harus jelas kehalalannya.

Karena itulah, untuk urusan (biaya) haji, meski penting, urusan murah barangkali tidak menjadi prioritas utama. Bahwa haji mereka dibiayai dana

yang jelas, dari usaha yang *clear* dan sesuai syar'i, jauh lebih diharapkan. Bukan sekali du akita mendengar, paa pengamat haji mengungkapkan soal biaya yang adil, alih-alih hanya biaya haji yang murah.

Termasuk dalam katagori adil ini adalah pula proporsional. Misalnya bahkan sampai pada pertanyaan yang mungkin ganjil: seberapa berhak seorang jamaah yang seharusnya sudah "mampu" berhak mendapatkan bantuan (katakanlah agar gampang: subsidi) pemerintah? Sementara ia tergolong orang berlebih karena jamaah haji haruslah seorang yang telah "mampu". Bukankah lebih berhak untuk dibantu negara, para warga miskin yang untuk makan sehari-hari pun menguras upaya mereka?

Kembali kepada soal kisruh Tabung Haji, ada hal-hal yang membuatnya lebih mending dibanding seandainya hal itu terjadi pada BPKH di negara kita. Berbeda dengan BPKH, lembaga pengelola dana haji Malaysia itu didukung penuh APBN Malaysia. Sementara BPKH, kita tahu tidak.

Sebenarnya banyak pembeda yang menegaskan bahwa dalam hal kelincahan bermanuver ekonomi, bergerak untuk mengambil keputusan terbaik dan hal-hal yang berkaitan dengan otoritas lainnya, TH justru lebih banyak punya keuntungan dibanding BPKH.

Sementara TH adalah badan superior dalam keuangan syariah Malaysia, BPKH masih harus berkoordinasi dengan Kemenag yang berada di bawah Presiden. Posisi yang, kata beberapa sumber 'orang dalam', membuat BPKH seolah hanya menjadi juru bayar dalam pembiayaan haji.

Bila TH mendapatkan banyak pengecualian pajak, hal itu masih menjadi mimpi yang pasti menghantui para pimpinan BPKH, karena lembaga itu masih merupakan objek pajak. "Pajak BPKH minimal di atas Rp 1 triliun per tahun," kata sebuah sumber di BPKH.

Di sisi kelincahan mengambil keputusan strategis di saat terjadi turbulensi dalam perekonomian pun, TH bisa lebih gesit. TH jelas-jelas sebuah korporasi, sementara BPKH badan nirlaba.

Masih banyak hal lain yang membuatnya keduanya tidak begitu saja dengan mudah disamakan. Jadi, kalau Pramudya Ananta Toer bilang, kira harus adil bahkan sejak dari pikiran, kami pun yakin, kita harus adil, bahkan sejak kepala kita ingin menduga-duga dan membandingkan. [dsy]

https://hajj.leeds.ac.uk/exhibition/the-changing-hajj-in-modern-times/

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

# Generasi Milenial Sudah Punya Porsi Haji?

Niat

Konsisten

Menyisihkan tiap Bulannya

Stamina yang masih kuat

Beribadah menjadi lebih khusyuk

# Yuk, Segera Nabung Haji Sejak Muda!

@bpkhri
BPKH RI

www.bpkh.go.id